



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada Tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Sistematika Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah
- d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
- e. Bab V Tujuan dan Sasaran
- f. Bab VI Strategis, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
- g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah
- h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- i. Bab IX Penutup

(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Daerah digunakan oleh Penjabat Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026.
- (2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Perangkat Daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
 - a. capaian target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. capaian target Indikator Kinerja Daerah Rencana Pembangunan Daerah;

- c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan sasaran; dan
- d. efektivitas Program Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang diterjemahkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin:
 - a. konsistensi kinerja Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dengan kinerja Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - b. konsistensi kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi atas Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program/kegiatan/subkegiatan yang telah dituangkan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup evaluasi terhadap Program Prioritas Daerah dan Program Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pertumbuhan derajat keotonomian daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah dan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional.

- (3) Evaluasi dapat dilaksanakan pada paruh waktu dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tata cara pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
- (2) Perubahan atau pembaharuan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program dapat disesuaikan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun berkenaan.
- (3) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 24 - 3 - 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 24 - 3 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAFRIK, SH. M.Hum.

Nip. 19710929 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan tahapan penyusunan dokumen berdasarkan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sebagai panduan bagi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pasca Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024. Dokumen RPD ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), disebabkan karena dokumen perencanaan jangka menengah daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2023, sehingga perlu disusun dokumen jangka menengah sebagai dokumen transisi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025 dan prioritas nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Penyusunan dokumen ini melibatkan pemangku kepentingan, mulai dari perumusan permasalahan dan isu strategis, perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah, sehingga harapan kita semua bahwa perencanaan yang telah disusun bersama ini dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran sehingga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Kendari, Maret 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



H. ALI MAZI, SH

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	x
BABI PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik Fisik Wilayah	II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-8
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-14
2.1.4. Demografi	II-16
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-18
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-18
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-33
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-46
2.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib Dasar	II-46
2.3.2. Fokus Urusan Layanan Wajib Non Dasar	II-76
2.3.3. Fokus Urusan Layanan Pilihan	II-104
2.3.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan	II-117
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-121
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-121
2.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi	II-123
2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia	II-124
2.4.4. Fokus Kewilayahan	II-125
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Kondisi Perekonomian Daerah	III-2
3.2. Kinerja Keuangan	III-3
3.2.1. Kinerja pelaksanaan APBD	III-4
3.2.2. Pendapatan Daerah	III-5
3.2.3. Neraca Daerah	III-6
3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-8
3.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-9
3.3.2. Analisa Pembiayaan	III-12
3.4. Kerangka Pendanaan	III-12
3.4.1. Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah	III-13
3.4.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja 2024-2026	III-14
3.4.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-17
3.4.4. Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	III-18
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1. Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran	IV-1
4.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-2
4.2. Isu Strategis	IV-13

4.2.1. Isu Strategis Global.....	IV-13
4.2.2. Isu Strategis Nasional	IV-19
4.2.3. Isu-isu Strategis Sulawesi Tenggara	IV-24
BAB V TUJUAN & SASARAN	V-1
5.1. Penelaahan Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024.....	V-3
5.2. Tujuan dan Sasaran.....	V-4
5.3. Tujuan dan Sasaran.....	V-5
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026...	VI-1
6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.....	VI-9
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
7.2. Program Perangkat Daerah	VII-2
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VIII-1
8.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah.....	VIII-1
8.2. Indikator Kinerja Utama.....	VIII-1
8.3. Indikator Kinerja Kunci	VIII-2
BAB IX PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	II-1
Tabel 2.2	Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	II-3
Tabel 2.3	Banyaknya Desa menurut Posisi Terhadap Laut	II-4
Tabel 2.4	Banyaknya Desa Menurut Topografi Wilayah, 2021	II-5
Tabel 2.5	Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-6
Tabel 2.6	Curah Hujan Menurut Bulan di Sulawesi Tenggara (MM), 2021	II-7
Tabel 2.7	Pusat-pusat kegiatan di Sulawesi Tenggara	II-10
Tabel 2.8	Produksi Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021	II-11
Tabel 2.9	Produksi Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2021 ..	II-11
Tabel 2.10	Produksi Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020	II-11
Tabel 2.11	Hasil Produksi Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2019	II-12
Tabel 2.12	Jumlah Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2021	II-16
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara	II-17
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2017	II-17
Tabel 2.15	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Dasar 2010 (miliar rupiah) Tahun 2017-2021	II-18
Tabel 2.16	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Dasar 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021	II-19
Tabel 2.17	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-20
Tabel 2.18	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-21
Tabel 2.19	Laju Inflasi Bulanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2022	II-23
Tabel 2.20	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Indonesia September 2020, Maret 2021, dan September 2021	II-25
Tabel 2.21	Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2022	II-26
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2022	II-27
Tabel 2.23	Persebaran Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2022	II-28
Tabel 2.24	Jumlah Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022	II-29
Tabel 2.25	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara 2015-2022 ..	II-31
Tabel 2.26	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2017-2022	II-32
Tabel 2.27	Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2020	II-33
Tabel 2.28	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	II-35

Tabel 2.29	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022	II-37
Tabel 2.30	Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021	II-39
Tabel 2.31	Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021	II-41
Tabel 2.32	Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2020	II-43
Tabel 2.33	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021	II-44
Tabel 2.34	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022	II-45
Tabel 2.35	Indeks Pendidikan Sulawesi Tenggara	II-47
Tabel 2.36	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022	II-47
Tabel 2.37	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022	II-47
Tabel 2.38	APK SMA/SMK/MA di Provinsi Sulawesi Tenggara (Persen) Tahun 2018-2022	II-48
Tabel 2.39	APM SMA/SMK/MA di Provinsi Sulawesi Tenggara (Persen) Tahun 2018-2022	II-48
Tabel 2.40	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022 (Persen)	II-49
Tabel 2.41	Angka Putus Sekolah SMA/SMK Tahun 2016-2019	II-49
Tabel 2.42	Angka Kelulusan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2019	II-50
Tabel 2.43	Angka Tingkat Penyelesaiannya Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021	II-50
Tabel 2.44	Capaian Angka Anak Tidak Sekolah Usia 16-18 tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022	II-50
Tabel 2.45	Capaian Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017/2018	II-50
Tabel 2.46	Fasilitasi Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2019	II-51
Tabel 2.47	Data Sertifikasi Guru SMA, SMK dan SLB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022	II-51
Tabel 2.48	Persentase Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan \geq DIV Atau S1	II-51
Tabel 2.49	Data Sarana dan Prasarana Sekolah SMA, SMK dan SLB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022	II-51
Tabel 2.50	Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2020	II-52
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan tingkat Daerah provinsi/ lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014-2021	II-53
Tabel 2.52	Fasilitasi Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.53	Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ..	II-55
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) daerah Provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021	II-55
Tabel 2.55	Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021	II-58
Tabel 2.56	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan	II-59
Tabel 2.57	Cakupan Kinerja Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	II-60
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Penyelenggaraan SPM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021	II-62

Tabel 2.59	Capaian Data Kondisi Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.60	Data dan Kondisi Jembatan Kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021	II-67
Tabel 2.61	Pembangunan Infrastruktur di bidang Pengairan (Irigasi, Pemenuhan Air Baku, Penanggulangan Bahaya Banjir dan Abrasi Pantai)	II-68
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara (Penetapan Perda RTRW)	II-69
Tabel 2.63	Arus Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Prov. Sultra (Penetapan Perkada RDTR).....	II-70
Tabel 2.64	Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2022	II-71
Tabel 2.65	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2022.....	II-71
Tabel 2.66	Pemenuhan SPM Urusan Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	II-72
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021	II-73
Tabel 2.68	Jumlah PPNS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021	II-73
Tabel 2.69	Tempat Ibadah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019	II-74
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2022	II-74
Tabel 2.71	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022	II-75
Tabel 2.72	Kondisi Panti Anak Terlantar Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2022	II-76
Tabel 2.73	Kondisi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020	II-76
Tabel 2.74	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Periode Agustus 2020-2021	II-77
Tabel 2.75	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Daerah Tempat Tinggal Periode Agustus 2020-2021	II-77
Tabel 2.76	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2021	II-78
Tabel 2.77	Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2020 dan 2021	II-82
Tabel 2.78	Neraca Ketersediaan Energi dan Protein per kapita Tahun 2017-2021	II-82
Tabel 2.79	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara	II-82
Tabel 2.80	Capaian IKLH Prov.Sultra Tahun 2016-2021	II-86
Tabel 2.81	Status Mutu Air pada Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-88
Tabel 2.82	Keadaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2021	II-91
Tabel 2.83	Daftar Perekaman e-KTP per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022	II-92

Tabel 2.84	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022.....	II-92
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara	II-93
Tabel 2.86	Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif, dan Peserta KB Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2022.....	II-94
Tabel 2.87	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara	II-94
Tabel 2.88	Arus Lalu Lintas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-7-2022	II-94
Tabel 2.89	Terminal Tipe B yang ada di Sulawesi Tenggara	II-95
Tabel 2.90	Pelabuhan Pengumpan Regional di Sulawesi Tenggara	II-96
Tabel 2.91	Pelabuhan Penyeberangan di Sulawesi Tenggara	II-97
Tabel 2.92	Capaian Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021	II-97
Tabel 2.93	Perkembangan Koperasi Aktif Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022	II-98
Tabel 2.94	Capaian Capaian Koperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022	II-99
Tabel 2.95	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022	II-100
Tabel 2.96	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara	II-100
Tabel 2.97	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022	II-101
Tabel 2.98	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022	II-102
Tabel 2.99	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022	II-103
Tabel 2.100	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022	II-103
Tabel 2.101	Kondisi Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2022	II-103
Tabel 2.102	Kondisi Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021	II-104
Tabel 2.103	Kondisi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022	II-105
Tabel 2.104	Kondisi Lahan sawah berdasarkan jenis Pengairan dan Frekuensi Penanaman Padi (Ha) di Sulawesi Tenggara Tahun 2020 dan 2021	II-105
Tabel 2.105	Luas Tanaman, Luas Panen, Produksi & Produktivitas Padi & Palawija Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 - 2021	II-106
Tabel 2.106	Luas Lahan yang di tanami padi dan tidak ditanami padi serta frekuensi penanamannya di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2021	II-106
Tabel 2.107	Luas Lahan Pertanian Tanaman Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021	II-107
Tabel 2.108	Kontribusi Sektor Perkebunan & Hortikultural terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021	II-107
Tabel 2.109	Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2020...	II-108
Tabel 2.110	Kondisi Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2022	II-108

Tabel 2.111	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2021	II-109
Tabel 2.112	Perkembangan Sektor Industri Kecil di Sulawesi Tenggara, Tahun 2017-2021	II-109
Tabel 2.113	Komoditi Prioritas yang akan dibangun dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara	II-110
Tabel 2.114	Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan	II-113
Tabel 2.115	Keadaan Komoditas Pertambangan Nikel dan Aspal di Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2020	II-114
Tabel 2.116	Pertambangan tanpa Izin di Sulawesi Tenggara	II-114
Tabel 2.117	Perkembangan Kelistrikan di Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2020 ..	II-114
Tabel 2.118	Jumlah Pelanggan, Tenaga Listrik yang terjual, dan Nilai Penjualan Tenaga Listrik Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2018-2020	II-115
Tabel 2.119	Bauran Energi di Sulawesi Tenggara Tahun 2015	II-115
Tabel 2.120	Keadaan Penerimaan Transmigrasi Umum menurut Jenis Transmigrasi Tahun 2017-2021	II-115
Tabel 2.121	Kawasan Transmigrasi di Sulawesi Tenggara Tahun 2021	II-116
Tabel 2.122	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2022 ..	II-118
Tabel 2.123	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022	II-118
Tabel 2.124	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022	II-119
Tabel 2.125	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020 ..	II-119
Tabel 2.126	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Riset dan Inovasi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020	II-119
Tabel 2.127	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2021 ..	II-119
Tabel 2.128	Capaian Kinerja DPRD di Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022	II-120
Tabel 2.129	Capaian Kegiatan DPRD di Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021	II-120
Tabel 2.130	Kondisi Makro Provinsi Sulawesi Tenggara	II-121
Tabel 2.131	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan (rupiah) menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2017-2021	II-121
Tabel 2.132	Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan (rupiah) menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2017-2021	II-122
Tabel 2.133	Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Sehari Menurut Klasifikasi Daerah Tahun 2017-2021	II-123
Tabel 2.134	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) dan Persentase Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Clearance Rate</i>) menurut Kepolisian Resort Tahun 2017- 2021	II-124
Tabel 2.135	Realisasi Pajak dan Macam Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021	II-124
Tabel 2.136	Persentase Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021	II-125

Tabel 2.137	Data Rata-Rata Kinerja Indikator Kunci pada Aspek Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota pada Wilayah Daratan dan Kepulauan Tahun 2021	II-126
Tabel 2.138	Data Kinerja Indikator Kunci pada Aspek Sosial dan Ekonomi Kabupaten dan Kota	II-126
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018-2021	III-3
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2021	III-4
Tabel 3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2022	III-6
Tabel 3.4	Rasio Liquiditas dan Rasio Solvabilitas Neraca 2019-2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2021	III-7
Tabel 3.5	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah 2018-2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021	III-7
Tabel 3.6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022	III-10
Tabel 3.7	Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 – 2023	III-11
Tabel 3.8	Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022 ...	III-12
Tabel 3.9	Kondisi Dan Asumsi Makro Ekonomi Daerah dan Kondisi Sosial Masyarakat Periode 2018 – 2023 Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023	III-13
Tabel 3.10	Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026	III-15
Tabel 3.11	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026	III-16
Tabel 3.12	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 – 2026	III-17
Tabel 3.13	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2023	III-17
Tabel 3.12	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2022- 2023	III-18
Tabel 5.1	Target Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam RPJMN 2020-2024	V-2
Tabel 5.2	Daftar Proyek Prioritas Strategis (<i>Major Project</i>) di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam RPJMN 2020-2024	V-2
Tabel 5.3	Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024	V-3
Tabel 5.4	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja RPD Tahun 2024-2026	V-6
Tabel 6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mewujudkan Tujuan 1 RPD Tahun 2024-2026	VI-1
Tabel 6.2	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mewujudkan Tujuan 2 RPD Tahun 2024-2026.....	VI-3
Tabel 6.3	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mewujudkan Tujuan 3 RPD Tahun 2024-2026	VI-4
Tabel 6.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mewujudkan Tujuan 4 RPD Tahun 2024-2026	VI-6
Tabel 6.5	Arah Kebijakan Tahunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026	VI-7

Tabel 6.6	Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026	VI-10
Tabel 7.1	Kondisi Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2023	VII-1
Tabel 7.2	Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026	VII-2
Tabel 7.3	Rencana Program Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026	VII-3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Makro Pembangunan	VIII-1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama	VIII-1
Tabel 8.3	Penetapan Indikator Kinerja Kunci	VIII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	I-6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara	II-2
Gambar 2.2	Kondisi Topografi Sulawesi Tenggara	II-4
Gambar 2.3	Peta Kawasan Strategis RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara	II-9
Gambar 2.4	Peta Struktur Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara	II-9
Gambar 2.5	Peta Pola Ruang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara	II-10
Gambar 2.6	Peta Rawan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara	II-15
Gambar 2.7	Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan III-2020 Provinsi Sulawesi Tenggara	II-20
Gambar 2.8	Peta Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara	II-22
Gambar 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2021	II-23
Gambar 2.10	Grafik Perkembangan Gini Ratio, Maret 2016-September 2020	II-24
Gambar 2.11	Grafik Perkembangan Gini Ratio September 2018 – September 2021	II-25
Gambar 2.12	Gini Rasio Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020 ..	II-27
Gambar 2.13	Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020	II-30
Gambar 2.14	Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara ..	II-31
Gambar 2.15	IPM Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-32
Gambar 2.16	Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Tenggara	II-33
Gambar 2.17	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara	II-34
Gambar 2.18	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota Tahun 2022Provinsi Sulawesi Tenggara	II-35
Gambar 2.19	Rata-Rata Lama Sekolah Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota Tahun 2022	II-36
Gambar 2.20	Angka Harapan Lama Sekolah Sulawesi Tenggara	II-37
Gambar 2.21	Harapan Lama Sekolah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020	II-38
Gambar 2.22	Angka Usia Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara	II-38
Gambar 2.23	Usia Harapan Hidup Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020	II-40
Gambar 2.24	Pengeluaran Perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara	II-41
Gambar 2.25	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020	II-42
Gambar 2.26	Angka Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/orang/tahun) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 – 2021	II-43
Gambar 2.27	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tenggara	II-45
Gambar 2.28	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020	II-46
Gambar 2.29	Prevalensi Jantung 11 Provinsi tahun 2013-2018	II-60
Gambar 2.30	Prevalensi Stroke tahun 2013-2018	II-61
Gambar 2.31	Kunjungan Pasien Jantung 2015-2019	II-61

Gambar 2.32	Peta Jaringan Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara	II-63
Gambar 2.33	Kondisi Permukiman Jalan Berdasarkan Status Jalan Pada Tahun 2021.....	II-65
Gambar 2.34	Diagram Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi di Wilayah Kabupaten dan Kota Tahun 2021	II-66
Gambar 2.35	Peta Irigasi di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-69
Gambar 2.36	Proporsi Capaian TPB Provinsi Sulawesi Tenggara	II-83
Gambar 2.38	Capaian TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target	II-84
Gambar 2.39	Capaian TPB yang sudah dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target	II-84
Gambar 2.40	Capaian TPB yang sudah dilaksanakan Namun Belum Menjadi Indikator dalam RPJMD	II-85
Gambar 2.41	Capaian TPB yang Belum Memiliki Data	II-85
Gambar 2.42	Capaian TPB Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Target Nasional	II-86
Gambar 2.43	Peta Daya Dukung Air Sulawesi Tenggara	II-89
Gambar 2.44	Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tenggara	II-111
Gambar 2.45	Kawasan Peruntukan Industri Pengolahan Kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-111
Gambar 2.46	Kawasan Peruntukan Industri Kelapa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-112
Gambar 2.47	Kawasan Peruntukan Industri Pengolahan Rumput Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-112
Gambar 2.48	Kawasan Peruntukan Industri Pengolahan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Tenggara	II-113
Gambar 2.49	Peta Gambaran Ketimpangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Sesuai Indikator Sosial dan Ekonomi Pada Tahun 2019	II-127
Gambar 2.50	Peta Tipologi Daerah Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Tingkat Kemiskinan (%) Pada Tahun 2019	II-128
Gambar 2.51	Peta Tipologi Daerah Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB Per Kapita Tahun 2019	II-129
Gambar 2.52	Peta Tipologi Daerah Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan PDRB Per Kapita Tahun 2019	II-130
Gambar 2.53	Peta Tipologi Daerah Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019	II-131
Gambar 2.54	Peta Tipologi Daerah Indikator Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019	II-132
Gambar 3.1	Perkembangan PDRB Sulawesi Tenggara beserta Perubahannya ...	III-3
Gambar 5.1	Skema Perumusan Tujuan dan sasaran Program dan Kegiatan	V-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terhitung mulai tanggal 5 September 2018 Provinsi Sulawesi Tenggara telah memiliki Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, yaitu Bapak H. Ali Mazi, SH, dan Bapak Dr. H. Lukman Abunawas, SH., M.Si., MH, yang resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2018 – 2023 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo. Sejak saat itu tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur baru selama 5 (lima) tahun periode kepemimpinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dan ditetapkan pasca pelantikan tersebut. RPJMD berlaku sesuai dengan periode masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023. Selama 5 (lima) tahun kepemimpinan Bapak H. Ali Mazi, SH, dan Bapak Dr. H. Lukman Abunawas, SH., M.Si., MH., pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara semakin meningkat sesuai dengan Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 yaitu **Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat**. Untuk mewujudkan visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan daerah. Hasil pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah dimaksud telah berdampak pada pencapaian target-target pembangunan yang secara makro dapat diketahui melalui capaian kinerja indikator makro pembangunan, seperti Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia. Meskipun pada tahun 2020 hingga saat ini pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) melanda dunia termasuk di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga berdampak tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat, namun perlahan-lahan perekonomian daerah kembali bangkit seiring dengan mereda dan terkendalinya pandemi Covid-19.

Tahun 2023 merupakan akhir periode kepemimpinan Bapak H. Ali Mazi, SH, dan Bapak Dr. H. Lukman Abunawas, SH., M.Si., MH. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023. Selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur periode berikutnya pasca Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada Tahun 2024 mendatang. Mengingat rentang waktu yang cukup lama untuk memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur definitif dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus tetap berjalan, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Pusat mengangkat Penjabat (Pj) Kepala Daerah untuk menjalankan tugas transisi sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah definitif. Untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan oleh Penjabat Kepala Daerah, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang menjabat hingga tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana

Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 dan memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026. RPD tahun 2024 – 2026 dan Renstra PD Tahun 2024 – 2026 menjadi dasar Penjabat Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024, 2025 dan 2026, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen RKPD yang disusun setiap tahun tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Inmendagri Nomor 52 tahun 2022, bahwa penyusunan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 memperhatikan: a) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024; b) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Tahun 2005 – 2025; c) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun 2018 – 2023; d) Isu-isu strategis yang berkembang; e) Kebijakan nasional; dan f) Regulasi yang berlaku. Untuk menyusun dokumen tersebut melalui beberapa tahapan penyusunan, meliputi:

a. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan RPD meliputi: pembentukan tim penyusunan dengan keputusan kepala daerah, orientasi mengenai RPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RPD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

b. Penyusunan Rancangan

Disusun secara teknokratis dengan memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun 2018-2023, Isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.

c. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Dilaksanakan dengan tujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan RPD dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan menghasilkan Berita Acara Forum Konsultasi Publik.

d. Perumusan Rancangan Akhir

Merupakan proses penyempurnaan rancangan RPD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan Berita Acara Forum Konsultasi Publik.

e. Fasilitasi Rancangan Akhir

Merupakan proses fasilitasi rancangan akhir RPD oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RPD.

f. Penetapan

Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang RPD Provinsi Tahun 2024 – 2026.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, artinya bahwa pembangunan yang dilaksanakan di

daerah tidak terlepas dari konsep rencana pembangunan nasional, karenanya dalam menyusun program pembangunan daerah tetap mengacu kepada rencana pembangunan nasional, baik rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 menggunakan kombinasi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*). Pendekatan *teknokratik* berkaitan dengan metode kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Perumusan tujuan dan sasaran dihasilkan dari evaluasi RPJMD yang telah berakhir dengan menggunakan metode ilmiah berdasarkan data yang telah dikumpulkan atas capaian pelaksanaan pembangunan selama periode RPJMD. Pendekatan *partisipatif* dilakukan berkenaan dengan pelibatan pemangku kepentingan termasuk DPRD dalam memberikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan RPD melalui forum konsultasi publik. Pendekatan *politis* dalam penyusunan RPD terkait dengan penyusunan rancangan RPD dilaksanakan oleh Kepala Daerah yang masih menjabat dengan melibatkan DPRD dalam Forum Konsultasi Publik dan mengacu pada dokumen RPJMN Tahun 2020 – 2024. Pendekatan *atas-bawah (top-down)* dan *bawah-atas (bottom-up)* berkaitan dengan hasil perencanaan yang diselaraskan antara perencanaan pusat dan daerah, baik yang bersumber dari level pemerintahan terendah hingga tertinggi, demikian pula sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui prioritas pembangunan dari setiap level pemerintahan untuk diselaraskan menjadi prioritas pembangunan nasional, karena perencanaan pembangunan dari setiap level pemerintahan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan.

Selain menggunakan pendekatan proses tersebut di atas, dalam penyusunan RPD, pendekatan substansi juga merupakan pendekatan yang harus diperhatikan. Pendekatan dimaksud yaitu pendekatan *holistik-tematik*, *integratif*, dan *spasial*. Pendekatan *holistik-tematik* dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan *integratif* dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan *spasial* merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

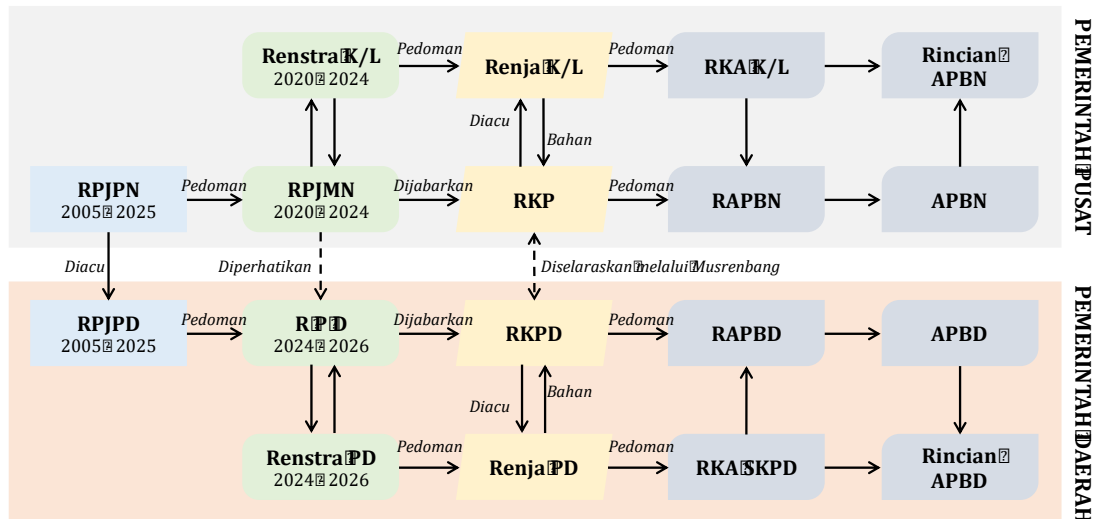
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2020, tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, tentang Penurunan Percepatan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13).

1.3. Hubungan Antar Dokumen



Gambar 1.1. Hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024 – 2026. Demikian pula dengan dokumen perencanaan pusat, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Keterkaitan dengan dokumen penganggaran dalam hal RPD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hubungan/keterkaitan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat sasaran pokok Pembangunan Nasional beserta serangkaian Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional salah satunya adalah mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan nasional dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Berdasarkan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024.

b. RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, sasaran pokok dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. RPD memuat tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan program pembangunan daerah dan perangkat daerah dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025, terutama yang berkaitan erat pada kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan tahap ketiga dan keempat RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025.

c. RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dengan RPJMD/RPD Provinsi lain

RPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 – 2026 senantiasa mengedepankan sinkronisasi dan harmonisasi dokumen perencanaan daerah provinsi di Regional Pulau Sulawesi dengan memperhatikan aspek prioritas bersama, urgensi, relevansi dengan kebutuhan rakyat serta kemampuan keuangan daerah masing-masing.

d. RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dengan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara

RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

e. RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dengan Renstra PD Tahun 2024 – 2026

RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Organisasi Perangkat Daerah.

f. RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dengan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara 2014 – 2034

Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 – 2026 sejalan dengan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034 untuk lebih fokus pada pembangunan kawasan-kawasan strategis yang telah ditetapkan berdasarkan ketersediaan SDA.

g. RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 dengan Rencana Pembangunan Sektor

Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 selain berkorelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tersebut di atas, juga memperhatikan beberapa dokumen perencanaan sektoral di tingkat nasional dan daerah. Beberapa dokumen perencanaan tersebut antara lain : 1) Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAN TPB); 2) Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Tenggara; 3) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK); 4) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG); 5) Rencana

Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM); 6) Grand Design Reformasi Birokrasi; 7) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; 8) RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Tenggara; 9) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Tenggara; 10) RAD Pengurangan Resiko Bencana; 11) Pedoman Pelaksanaan PUG di Sulawesi Tenggara; dan beberapa dokumen perencanaan sektoral lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 – 2026 adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026;
- b. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;
- c. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RPD;
- e. Mendukung terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan;
- f. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergitas baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
- g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- h. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- i. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- j. Memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja pemerintahan daerah baik tahunan, maupun lima tahunan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kondisi Perekonomian Daerah



- 3.2 Kinerja Keuangan Daerah
- 3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.4 Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1 Penelaahan Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020 – 2024
- 5.2 Penelaahan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025
- 5.3 Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026
- 6.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

- 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan
- 7.2 Program Perangkat Daerah

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 8.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah
- 8.2. Indikator Kinerja Utama
- 8.3. Indikator Kinerja Kunci

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Fisik Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 153.019 km², meliputi luas daratan 38.140 km² dan luas laut 114.879 km². Panjang garis pantai 1.740 km², jumlah pulau 651 buah, 361 pulau diantaranya telah memiliki nama, 290 pulau belum memiliki nama dan hanya 86 pulau yang berpenghuni. 39 persen penduduk Sulawesi Tenggara bermukim di kepulauan.

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah
 Sebelah Barat : Teluk Bone (Provinsi Sulawesi Selatan)
 Sebelah Selatan : Laut Flores (Provinsi NTT)
 Sebelah Timur : Laut Banda (Provinsi Maluku)

Tabel 2.1.
 Pembagian Wilayah Sulawesi Tenggara Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan	Desa
Kabupaten Kolaka	Kecamatan Kolaka	12	35	100
Kabupaten Konawe	Kecamatan Unaaha	29	57	297
Kabupaten Muna	Kecamatan Raha	22	26	125
Kabupaten Buton	Kecamatan Pasarwajo	7	12	83
Kabupaten Konawe Selatan	Kecamatan Andoloo	25	15	336
Kabupaten Bombana	Kecamatan Rumbia	22	22	121
Kabupaten Wakatobi	Kecamatan Wangi-Wangi	8	26	75
Kabupaten Kolaka Utara	Kecamatan Lasusua	15	6	127
Kabupaten Konawe Utara	Kecamatan Wanggudu	13	11	159
Kabupaten Buton Utara	Kecamatan Buranga	6	12	78
Kabupaten Kolaka Timur	Kecamatan Tirawuta	12	16	117
Kabupaten Konawe Kepulauan	Kecamatan Wawonii Barat	7	7	89
Kabupaten Muna Barat	Kecamatan Sawerigadi	11	5	81
Kabupaten Buton Tengah	Kecamatan Lakudo	7	10	67
Kabupaten Buton Selatan	Kecamatan Batauga	7	10	60
Kota Kendari	Kecamatan Kendari	11	65	-
Kota Baubau	Kecamatan Baubau	8	43	-
Jumlah		222	377	1.915

Sumber: Permendagri No.72 Tahun 2019.

Secara administrasi pemerintahan, Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk pada tanggal 27 April 1964 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 dengan cakupan wilayah administrasi yang meliputi 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna.

Seiring dengan perkembangan wilayah administrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pada Tahun 2022, wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 wilayah kabupaten dan dua kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas daratan masing-masing kabupaten/kota, dan Sultra Dalam Angka Tahun 2022 yaitu : Kabupaten Buton (1.212,99 km²), Kabupaten Muna (1.922,16 km²), Kabupaten Konawe (4.435,28 km²), Kabupaten Kolaka (3.283,59 km²), Kabupaten Konawe Selatan (5.779,47 km²), Kabupaten Bombana (3.001 km²), Kabupaten Wakatobi (559,54 km²), Kabupaten Kolaka Utara (3.391,67 km²), Kabupaten Buton Utara (1.864,91 km²), Kabupaten Konawe Utara (5.101,76 km²), Kabupaten Kolaka Timur (3.634,74 km²), Kabupaten Konawe Kepulauan (867,58 km²), Kabupaten Muna Barat (1.022,89 km²), Kabupaten Buton Tengah (958,31 km²), Kabupaten Buton Selatan (509,92 km²), Kota Kendari (300,89 km²) dan Kota Baubau (221 km²), sebagaimana ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 2.2.
Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)
1.	Kabupaten Kolaka	Kecamatan Kolaka	3.283,59
2.	Kabupaten Konawe	Kecamatan Unaaha	4.435,28
3.	Kabupaten Muna	Kecamatan Raha	1.922,16
4.	Kabupaten Buton	Kecamatan Pasarwajo	1.212,99
5.	Kabupaten Konawe Selatan	Kecamatan Andoloo	5.779,47
6.	Kabupaten Bombana	Kecamatan Rumbia	3.001,00
7.	Kabupaten Wakatobi	Kecamatan Wangi-Wangi	559,54
8.	Kabupaten Kolaka Utara	Kecamatan Lasusua	3.391,67
9.	Kabupaten Konawe Utara	Kecamatan Wanggudu	5.101,76
10.	Kabupaten Buton Utara	Kecamatan Buranga	1.864,91
11.	Kabupaten Kolaka Timur	Kecamatan Tirawuta	3.634,74
12.	Kabupaten Konawe Kepulauan	Kecamatan Wawonii Barat	867,58
13.	Kabupaten Muna Barat	Kecamatan Sawerigadi	1.022,89
14.	Kabupaten Buton Tengah	Kecamatan Lakudo	958,31
15.	Kabupaten Buton Selatan	Kecamatan Batauga	509,92
16.	Kota Kendari	Kecamatan Kendari	300,89
17.	Kota Baubau	Kecamatan Baubau	221,00
Jumlah			38.067,70

Sumber: BPS Tahun 2022.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Sulawesi Tenggara secara astronomis terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 020 45'-060 15' Lintang Selatan dan 1200 25' - 1240 45' Bujur Timur.

b. Posisi Geostrategis

Pulau Sulawesi menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia. Posisi geostrategis yang menjadi jalur perdagangan dan distribusi barang antar wilayah barat dan timur Indonesia menjadikan pulau Sulawesi menjadi wilayah yang potensial sebagai pusat ekonomi dan perdagangan dalam dan luar negeri. Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi yang mencakup jazirah tenggara pulau Sulawesi dan memiliki beberapa pulau disekitarnya serta berbatasan langsung dengan laut banda sehingga wilayah ini kaya akan sumber daya laut dan berpotensi untuk menjadi kawasan wisata bahari.

c. Kondisi/kawasan

Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi daratan Konawe dan Kolaka. Sedangkan kepulauan meliputi Pulau Buton dan Pulau Muna serta pulau-pulau kecil yang tersebar di bagian Selatan dan Tenggara.

Wilayah Sulawesi Tenggara, pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit, sedangkan permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah yakni sekitar 1.868.860 hektar sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan mencapai 40 derajat, serta terdapat kawasan pesisir dan laut yang diperkirakan mencapai 110.000 km².

Tabel 2.3.
Banyaknya Desa menurut Posisi Terhadap Laut

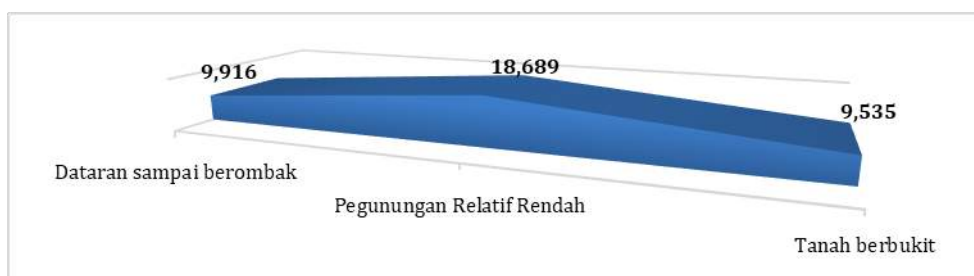
Kabupaten/Kota	Tepi Laut	Bukan Tepi Laut	Jumlah
Buton	64	31	95
Muna	63	87	150
Konawe	37	331	368
Kolaka	53	82	135
Konawe Selatan	88	263	351
Bombana	71	74	145
Wakatobi	76	24	100
Kolaka Utara	51	82	133
Buton Utara	71	19	90
Konawe Utara	71	116	187
Kolaka Timur	-	133	133
Konawe Kepulauan	78	18	96
Muna Barat	33	53	86
Buton Tengah	64	13	77
Buton Selatan	59	11	70
Kendari	28	37	65
Baubau	19	24	43
Jumlah	911	1.398	2.354

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022

2.1.1.3. Topografi

Topografi merupakan gambaran permukaan bumi, yang biasanya berasosiasi dengan ciri-ciri bentuk permukaan seperti variasi relief suatu daerah.

Sebagian besar topografi Sulawesi Tenggara terdiri dari tanah berbukit hingga bergunung, yaitu ± 74 persen sedang selebihnya datar sampai berombak ± 26 persen, sebagaimana disajikan pada diagram berikut :



Gambar 2.2.
Kondisi Topografi Sulawesi Tenggara

Secara umum topografi Sulawesi Tenggara bergelombang, bergunung dan berbukit. Pada beberapa tempat terdapat dataran aluvial seperti Mowewe, Lainea, Ladongi dan lain-lain. Berdasarkan kelas kemiringan lahan maka kondisi topografi di Sulawesi Tenggara dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) Dataran Konawe-Lahumbuti dengan luas kurang lebih 87.500 Ha
- b) Dataran Rate-rate-Lambandia dengan luas kurang lebih 25.000 Ha
- c) Dataran Waworamo-Punggaluku dengan luas kurang lebih 18.000 Ha
- d) Dataran Tinanggea-Lakara dengan luas kurang lebih 17.000 Ha
- e) Dataran Lalindu-Lasolo dengan luas kurang lebih 17.000 Ha
- f) Dataran Konda dengan luas kurang lebih 14.000 Ha
- g) Dataran Sampara dengan luas kurang lebih 14.000 Ha
- h) Dataran Roraya dengan luas kurang lebih 10.000 Ha
- i) Dataran Kolono dengan luas kurang lebih 4.000 Ha
- j) Dataran Oko-oko-Tawai dengan luas kurang lebih 13.500 Ha
- k) Dataran Kolaka-Pomalaa dengan luas kurang lebih 12.000 Ha
- l) Dataran Watuputih dengan luas kurang lebih 7.000 Ha

Tabel 2.4.
Banyaknya Desa Menurut Topografi Wilayah, 2021

Kabupaten/Kota	Lereng/ Puncak	Lembah	Dataran	Jumlah
Kabupaten Buton	-	-	95	95
Kabupaten Muna	120	2	28	150
Kabupaten Konawe	176	13	179	368
Kabupaten Kolaka	103	-	32	135
Kabupaten Konawe Selatan	235	-	116	351
Kabupaten Bombana	112	-	33	145
Kabupaten Wakatobi	76	--	24	100
Kabupaten Kolaka Utara	87	2	44	133
Kabupaten Buton Utara	78	2	10	90
Kabupaten Konawe Utara	116	3	53	172
Kabupaten Kolaka Timur	77	-	56	133
Kabupaten Konawe Kepulauan	77	-	19	96
Kabupaten Muna Barat	44	1	41	86
Kabupaten Buton Tengah	-	-	77	77
Kabupaten Buton Selatan	-	-	70	70
Kota Kendari	55	-	10	65
Kota Bau bau	38	1	4	43
Jumlah	1.394	24	891	2.309

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022

Diantara gunung dan bukit-bukit, terbentang dataran-dataran yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan telah banyak digunakan untuk usaha. Tanah ini sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan tanah yang mencapai 40°.

2.1.1.4. Geologi

Secara geologis Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk akibat tumbukan (*collision*) dua buah lempeng besar yaitu lempeng benua yang berasal dari Australia dan lempeng samudra yang berasal dari Pacific. Akibat tumbukan tersebut maka wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari 3 group utama batuan penyusunnya, yaitu :

- a. Kompleks batuan malihan di Sulawesi Tenggara terdiri dari sekis, kuarsit, sabak dan marmer yang melampar dari Kolaka Utara hingga ke selatan membentuk pegunungan Tangkelemboke, Mendoke dan Pegunungan Rumbia.
- b. Kompleks ofiolit dan sedimen pelagic. Kompleks ofiolit Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari lajur ofiolit Sulawesi Timur dimana diatasnya ditutupi oleh sedimen pelagic. Kompleks ofiolit Sulawesi Tenggara didominasi oleh batuan ultramafik dan mafik yang terdiri dari harzburgit, dunit, werlit, lertzolit, websterit, serpentinit, dan piroksinit. Sedangkan untuk batuan mafik terdiri atas gabro, basalt, dolerite, mikrogabro, dan amfibolit. Untuk batuan sedimen pelagic tersusun oleh batu gamping laut dalam dan sisipan rijang merah.
- c. Molasa Sulawesi tersebar luas dan umumnya menempati bagian selatan dari jazirah Sulawesi bagian tenggara. Molasa Sulawesi yang berada di Sulawesi Tenggara terdiri atas sedimen klastik dan sedimen karbonatan. Sedimen klastik dari molasa Sulawesi terdiri atas

Formasi Langkowala dan Formasi Boepinang. Sedangkan sedimen karbonat yang berasosiasi dengan batupasir adalah formasi eomoiko.

2.1.1.5. Hidrologi

- a. Sumber daya alam DAS menyediakan berbagai kepentingan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber kehidupan yang tersedia mulai dari kebutuhan bahan makanan, air bersih, kayu dan berbagai jasa lingkungan yang mempunyai nilai melebihi nilai ekonomi Sumber daya alam tersebut. Gagasan pengelolaan Sumber daya alam DAS sering dianggap gagal terutama disebabkan oleh adanya perubahan kondisi yang sangat cepat, permasalahan yang demikian kompleks serta sarat dengan ketidakpastian mengenai tujuan, kebijakan dan sasaran pengelolaan.
- b. Daerah Aliran Sungai (DAS) Wanggu merupakan salah satu DAS prioritas di Sulawesi Tenggara karena disamping memiliki fungsi hidrologis sebagai sumber utama sedimen yang menyebabkan pendangkalan Teluk Kendari, juga terdapat berbagai sarana dan prasarana vital seperti Bandar Udara Halu Oleo, Kampus Universitas Halu Oleo, Polda Sulawesi Tenggara dan sebagainya. Secara administrasi DAS Wanggu dibagi atas dua daerah otonom yaitu Kota Kendari (26,38 persen) dan Kabupaten Konawe Selatan (73,62 persen) dengan total luas 33.208 hektar (BPDAS Sampara, 2003). Bagian hilir DAS Wanggu merupakan wilayah Kota Kendari, sedangkan hulunya merupakan Kabupaten Konawe Selatan.
- c. Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki beberapa sungai yang melintasi hampir seluruh kabupaten/kota. Sungai-sungai tersebut pada umumnya potensial untuk dijadikan sebagai sumber energi, untuk kebutuhan industri, rumah tangga dan irigasi. Daerah aliran sungai, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Konawe, melintasi Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe. DAS tersebut seluas 7.150,68 km² dengan debit air rata-rata 200 m³/detik. Bendungan Wawotobi yang menampung aliran sungai tersebut, mampu mengairi persawahan di daerah Kabupaten Konawe seluas 18.000 Ha.
- d. Selain itu, masih dapat dijumpai banyak aliran sungai di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan debit air yang besar sehingga berpotensi untuk pembangunan dan pengembangan irigasi, seperti : Sungai Lasolo di Kabupaten Konawe, Sungai Roraya di Kabupaten Bombana (Kecamatan Rumbia dan Poleang), Sungai Wandasa dan Sungai Kabangka Balano di Kabupaten Muna, Sungai Laeya di Kabupaten Kolaka dan Sungai Sampolawa di Kabupaten Buton. Di samping sungai-sungai tersebut terdapat pula 2 (dua) rawa yang cukup besar, yaitu Rawa Aopa yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan dan Rawa Tinondo yang terdapat di Kabupaten Kolaka.

2.1.1.6. Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson tipe iklim di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dibedakan ke dalam 5 (lima) klasifikasi iklim, yaitu :

*Tabel 2.5.
Tipe Iklim Berdasarkan Klasifikasi Schmidt dan Ferguson
di Provinsi Sulawesi Tenggara*

No	Tipe Iklim	Wilayah
1	B	<ul style="list-style-type: none"> - Sekitar wilayah Kecamatan Asera (Kabupaten Konawe Utara) - Sekitar wilayah Kecamatan Lainea (Kabupaten Konawe) - Sekitar wilayah Kecamatan Pakue dan Lasusua (Kabupaten Kolaka Utara) - Sekitar wilayah Kecamatan Kabawo (Kabupaten Muna)
2	C	<ul style="list-style-type: none"> - Sekitar wilayah Kecamatan Lambuya, Wawotobi dan Sampara (Kabupaten Konawe) - Sekitar Kecamatan Lainea, Tinangea dan Konda (Kabupaten Konawe) - Sekitar wilayah Kecamatan Wolo, Kolaka, Wundulako dan Mowewe (Kabupaten Kolaka) - Sekitar Kecamatan Pasar Wajo (Kabupaten Buton) - Kecamatan Rarowatu, Kabaena Timur dan Rumbia (Kabupaten Bombana) - Sekitar Kecamatan Wolio (Kota Baubau) - Sekitar Kecamatan Kulisusu (Kabupaten Buton Utara)
3	D	<ul style="list-style-type: none"> - Sekitar wilayah Kecamatan Pondidaha, Abuki (Kabupaten Konawe)

No	Tipe Iklim	Wilayah
		<ul style="list-style-type: none"> - Sekitar wilayah Kecamatan Moramo, Tinanggea, Landono, Angata (Kabupaten Konseil) - Sekitar wilayah Kecamatan Watubangga, Tirawuta dan Ladongi (Kabupaten Kolaka Timur) - Sekitar wilayah Kecamatan Batauga, Sampolawa, Kapontori, Lasalimu, Gu (Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan) - Sekitar wilayah Kecamatan, Kabaena dan Poleang Timur (Kabupaten Bombana) - Sekitar wilayah Kecamatan Bungi (Kota Baubau) - Sekitar Kota Kendari - Sekitar Kecamatan Tiworo dan Lawa (Kabupaten Muna Barat)
4	E	<ul style="list-style-type: none"> - Sekitar Wilayah Kecamatan Mawasangka (Kabupaten Buton) - Sekitar Wilayah Kecamatan Kaledupa (Kabupaten Wakatobi)
5	G	<ul style="list-style-type: none"> - Sekitar Kecamatan Tomia (Kabupaten Wakatobi)

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2018

Tabel 2.6.
Curah Hujan Menurut Bulan di Sulawesi Tenggara (mm), 2021

Bulan	BMKG Kota Kendari	BMKG Kota Baubau	BMKG Konawe Selatan	BMKG Sangia Ni Bandera Kolaka
Januari	131,3	352,1	105,1	348,2
Februari	104,5	171,1	157,4	119,7
Maret	168,3	210,6	217,3	262,8
April	110,0	83,1	100,6	94,1
Mei	223,3	156,2	240,3	156,1
Juni	346,1	140,7	283,5	136,2
Juli	314,8	100,1	312,3	158,6
Agustus	386,3	148,6	585,2	239,1
September	200,4	201,9	279,6	157,7
Oktober	59,6	62,1	131,8	221,9
November	102,6	289,5	232,8	299,4
Desember	114,5	437,3	121,4	207,3

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini (*present or current land use*), oleh karena aktivitas manusia di bumi bersifat dinamis, maka perhatian sering ditujukan pada perubahan penggunaan lahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pada tahun 2016 penggunaan lahan Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 3.691.957.38 Ha yang terdiri atas Hutan Belukar 1.361.178.54 Ha, Hutan Lebat 860.711.42 Ha, Kebun Campuran 549.113.64, Persawahan 78.454.82 Ha, Perkebunan 43.629.58 Ha, Permukiman, 115.977.02 Ha, Tanah Terbuka 303.548.32 Ha dan Lainnya, sedangkan pada tahun 2017 penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 3.833.892.3 Ha, yang penggunaanya terbagi atas : tanah sawah seluas 128.685,9 Ha, Lahan pertanian bukan sawah seluas 2.973.002,5 Ha, Lahan bukan pertanian seluas 732.203,9 Ha. Untuk penggunaannya luas kawasan hutan dan perairan seluas 2.333.155 Ha, yang terdiri atas Hutan Lindung seluas 1.081.489 Ha, Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam seluas 282.924 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 466.854 Ha, dan Hutan Tetap (*Permanent*) seluas 404.893 Ha.

a. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi Sumber daya alam, Sumber daya manusia dan Sumber daya buatan. Pada tahun 2017 kawasan budidaya pada penggunaannya terbagi atas lahan sawah irigasi seluas 100.121,8 Ha, lahan sawah non irigasi 28,564,1 Ha, sedangkan lahan bukan pertanian terdiri atas penggunaannya yaitu tanah perkebunan seluas 683.504,0 Ha, tanah tegalan/kebun seluas 231.171,2 Ha, tanah ladang/huma seluas 141.731.5 Ha, tanah padang rumput 105.885,4 Ha, Sementara tidak diusahakan seluas 222,909,0 Ha dan Lainnya seluas 1.442.357,5 Ha dan untuk luas lahan budidaya air tawar seluas 20.885 Ha.

b. Kawasan Lindung

Untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup maka telah ditetapkan beberapa kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

Kawasan Suaka Alam yang meliputi :

- Cagar Alam Napabalano
- Cagar Alam Lamedai
- Cagar Alam Kakinauwe
- Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo
- Suaka Margasatwa Buton Utara
- Suaka Margasatwa Tanjung Peropa
- Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo
- Suaka Margasatwa Lambusango.

Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi :

- Taman Hutan Raya Gunung Nipa-nipa
- Taman Hutan Nasional Rawa Aopa Watumohai
- Taman Nasional Laut Wakatobi
- Taman Wisata Alam Mangolo
- Taman Wisata Alam Tirta Rimba Moramo
- Taman Wisata Alam Laut P. Padamarang dan sekitarnya
- Taman Wisata Alam Teluk Lasolo
- Taman Buru Mata Osu

2.1.1.8. Flora dan Fauna

Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki kekayaan alam berupa fauna (binatang) yang khas dan jarang dijumpai di daerah lain di Indonesia. Jenis binatang khas atau spesifik di daerah ini antara lain adalah Anoa, Babi Rusa dan Burung Maleo yang merupakan satwa langka sehingga mendapat perlindungan yang ketat. Binatang lain yang hidup di Sulawesi Tenggara adalah Monyet, Musang, Rusa, Ular, Babi Hutan, Burung Nuri dan Kakatua. Jenis-jenis Flora endemik di Sulawesi Tenggara adalah kayu kuku (*Pericopsis mooniana*) dan jenis komersil lainnya seperti kayu besi, kayu hitam, palapi, jati, rotan dan lain-lain. Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari biosfir, terdiri dari berbagai ekosistem daratan dan lautan yang merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara lestari.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, seperti : perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Kawasan strategis provinsi merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

a. Pusat Kegiatan Industri Pertambangan yang terdiri atas:

- 1) PKIP Asera-Wiwirano-Langgikima (AWILA) di Kabupaten Konawe Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe bagian selatan;
- 2) PKIP Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) di Lasalimu Kabupaten Buton dengan wilayah pelayanan mencakup Pulau Buton dan Pulau Muna;
- 3) PKIP Kabaena-Torobulu-Wawonii (KARONI) di Lora Kabupaten Bombana dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 4) PKIP Pomalaa di Kabupaten Kolaka dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Kolaka Utara bagian selatan; dan
- 5) PKIP Laiwoi di Kabupaten Kolaka Utara dengan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Konawe bagian utara.

- b. Kawasan strategis Teluk Kendari di Kota Kendari;
- c. Kawasan industri perkebunan Kakao di Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- d. Kawasan strategis kelautan dan perikanan di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- e. Kawasan industri pariwisata di Kabupaten Wakatobi;
- f. Kawasan strategis pertanian tanaman pangan di Wawotobi Kabupaten Konawe;
- g. Kawasan industri semen di Pulau Muna;
- h. Kawasan pusat perdagangan di Kota Baubau; dan
- i. Kawasan pabrik gula di Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna dan Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.



Gambar 2.3
Peta Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: Perda RTRW Prov.Sultra Tahun 2014-2034



Gambar 2.4.
Rencana Struktur Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: Perda RTRW Prov.Sultra Tahun 2014-2034



Gambar 2.5.
Rencana Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: Perda RTRW Prov.Sultra Tahun 2014-2034

Selain membagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, Rencana Tata Ruang Wilayah juga membagi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi pusat-pusat kegiatan industri, adapun pusat-pusat kegiatan industri yang direncanakan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Pusat-pusat kegiatan di Sulawesi Tenggara

No.	Pusat-Pusat Kegiatan	Lokasi
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kendari (I/B/1)
2.	Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp)	Baubau (I/B/1)
3.	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Unaaha (II/B/1)
		Lasolo (II/B/1)
		Raha (II/B/1)
		Kolaka (II/B/1)
4.	Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	Pasarwajo (II/B/1)
		Wangi-Wangi (II/B/1)
5.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pomalaa
		Langara
		Usuku
		Kasipute
		Sikeli
		Lasusua
		Andoolo
		Wanggudu
		Perkotaan Buranga dan sekitarnya
		Tirawuta
		Laworo

Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034

Potensi Pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi dalam beberapa sektor unggulan, yaitu :

a. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Pada sektor pertanian tanaman pangan, tanaman pangan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara hanya 7 jenis tanaman yang utama yaitu : padi , jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Dari jenis tanaman pangan, padi mendominasi produksi

tanaman pangan di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Data Produksi Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8.
Produksi Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021 (ton)

No.	Jenis Tanaman Pangan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Padi (Padi Sawah + Padi Ladang)	711.401	709.516	656.691	532.773,5	530.029,1
2.	Jagung	172.078	221.498	279.170	179.906	150.561
3.	Kedelai	4.055	9.853	1.540	629	574
4.	Kacang Tanah	2.617	2.054	3.221	3.046	3.104
5.	Kacang Hijau	681	510	449	804	296
6.	Ubi Kayu	242.901	210.387	144.752	167.769	137.657
7.	Ubi Jalar	24.753	20.291	17.682	17.707	15.469

Sumber: Distanak Prov. Sultra, 2022

Sedangkan untuk Sektor Perkebunan, yang menjadi komoditi unggulan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tanaman kakao, jambu mete, kelapa dalam, cengkeh dan lada yang produksinya tergolong besar, masing-masing sebesar 107.053 ton untuk tanaman kakao, 51.700 ton untuk tanaman jambu mete, 39.155 ton untuk tanaman kelapa dalam, 9.490 ton untuk tanaman cengkeh dan 5.579 ton untuk tanaman lada. Produksi Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9.
Produksi Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2021

No.	Jenis Tanaman Perkebunan	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kakao	133.638	136.460	125.180	122.988	99.051	114.003	107.053
2.	Jambu Mete	26.902	25.366	23.816	36.922	41.979	52.777	51.700
3.	Kelapa Dalam	39.979	37.782	39.658	39.388	44.625	38.397	39.155
4.	Kelapa Hibrida	3.491	3.476	3.489	3.396	3.573	3.556	3.589
5.	Cengkeh	13.571	14.176	12.681	13.238	13.779	13.434	9.490
6.	L a d a	4.663	5.093	5.049	5.135	4.667	5.604	5.579
7.	K o p i	2.715	2.675	2.669	2.492	2.765	2.675	2.776
8.	Vanili	60	43	35	32	33	32	31
9.	P a l a	221	480	410	534	599	710	763
10.	Kemiri	249	971	892	875	837	833	927
11.	Enau	2.580	2.637	2.638	2.648	650	2.053	1.982
12.	Asam Jawa	60	57	64	60	38	46	27
13.	Pinang	221	221	193	172	156	161	174
14.	Kapuk	249	214	174	151	174	176	146
15.	Sagu	3.259	2.765	2.600	2.711	4.979	2.760	2.705
16.	Jarak Pagar	58	0	0	1	0	0,02	0,00
17.	Kelapa Sawit	516	1.347	2.630	2.372	2.221	5.030	3.950
18.	Karet	24	25	27	295	497	81	159
19.	Nilam	28.571	38.371	463	434	184,5	544,2	1.199,3

Sumber: Disbunhorti Provinsi Sulawesi Tenggara, Statistik Perkebunan Tahun 2022

b. Sektor Perikanan

Produksi perikanan di Sulawesi Tenggara bersumber dari : Perikanan Laut, Perikanan Darat, Perikanan Perairan Umum, Tambak, Kolam dan Perikanan Budidaya. Produksi hasil sektor perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.10.
Produksi Dan Nilai Produksi Prikanan Tangkap Menurut Jenis Tangkapan
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020

No.	Kabupaten/ Kota	Prikanan Tangkap di Laut		Perikanan Perairan Umum Darat	
		Volume (ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)
1.	Buton	26 231	525.891.484	-	-

No.	Kabupaten/ Kota	Perikanan Tangkap di Laut		Perikanan Perairan Umum Darat	
		Volume (ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (ton)	Nilai (000 Rp)
2.	Muna	20.880	798.168.222	-	-
3.	Konawe	2.126	68.813.685	412	10.509.795
4.	Kolaka	18.908	463.704.646	-	-
5.	Konawe Selatan	8.335	303.270.235	162	7.523.810
6.	Bombana	18.738	535019.896	-	-
7.	Wakatobi	20.390	376.881.795	-	-
8.	Kolaka Utara	4.929	177.731.610	300	6.471.155
9.	Buton Utara	6.880	122.635.081	-	-
10.	Konawe Utara	14.244	325.993.760	849	15.604.710
11.	Kolaka Timur	-	-	96	2.354.360
12.	Konawe Kepulauan	5.752	157.010.980	-	-
13.	Muna Barat	9.302	653.334.645	-	-
14.	Buton Tengah	21.013	539.408.100	-	-
15.	Buton Selatan	23.306	652.434.700	-	-
16.	Kota Kendari	33.065	545.207.745	-	-
17.	Kota Baubau	19.259	466.121.958	-	-
Jumlah		253.359	6.711.628.542	1.819	42.463.830

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat, sektor perikanan terbesar berasal dari perairan laut dengan jumlah produksi pada tahun 2020 sebesar 253.359 ton dengan nilai Rp. 6.711.628.542.000,- sedangkan produksi perikanan Perairan umum darat sebesar 1.819 ton dengan nilai Rp. 42.463.830.000,-

c. Sektor Pertambangan

Potensi kandungan nikel di Sulawesi Tenggara telah dikenal sejak jaman belanda. Data menunjukkan nikel Sulawesi Tenggara telah dieksploitasi sejak tahun 1934 oleh Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Bone Tolo Maatschappij. Cadangan nikel di Sulawesi Tenggara cukup besar, jumlah cadangan nikel Sulawesi Tenggara berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 97 milyar tondengan luas sebaran nikelnya 480 ribu Ha. Selain nikel potensi besar yang ada di Sulawesi Tenggara adalah aspal alamnya yang terkenal di dunia. Potensi aspal alam di Sulawesi Tenggara yang terletak di Pulau Buton dengan jumlah cadangan 2.663.648.000 M3 atau setara sekitar 3.835.653.120 ton (DESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, 2011). Nikel dan aspal merupakan dua jenis produksi pertambangan yang menonjol di Sulawesi Tenggara. Tahun 2018 jumlah produksi nikel mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 menjadi 20.220.717 ton dan meningkat kembali di Tahun 2019 sebesar 23.967.146 ton. Sedangkan produksi aspal di tahun 2018 menurun menjadi 20.625 ton, namun mengalami lonjakan produksi pada tahun 2019 menjadi 71.113 ton. Peningkatan produksi ini dipicu adanya kebijakan yang mewajibkan penggunaan aspal buton pengganti aspal minyak. Potensi kandungan Emas di Sulawesi Tenggara juga cukup besar. Terdapat lima kabupaten yang memiliki potensi kandungan emas, yakni Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Bombana. Dengan total cadangan emas 1,1 juta ton senilai Rp 270 triliun, potensi terbesar berada di Kabupaten Bombana sebesar 540 ribu ton. Potensi lain yang ada di Sulawesi Tenggara adalah marmer seluas 206.237 juta meter kubik, dan batu gamping seluas 188.352 Ha. Hasil Produksi Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11.
Hasil Produksi Pertambangan Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2019

No.	Jenis Tambang	Hasil Produksi (ton)						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bijih Nikel	2.908.327	29.431.004	1.387.140	373.851	2.394.228	20.220.717	23.967.146
2	Ferro Nikel	18.372	15.535	16.851	-	780.758		
3	Aspal	342.472	583.830	275.290	-	27.683	20.625	71.113

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPS, 2018 dan 2020

Untuk meningkatkan potensi pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya untuk meningkatkan produksi sektor-sektor unggulan, maka perlu ditetapkan arah

kebijakan penataan ruang yang mendukung pengembangan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kebijakan penataan ruang yang mendukung pengembangan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri atas :

- Menata dan mengalokasikan sumber daya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan disektor unggulan pertanian, pertambangan serta kelautan dan perikanan;
- Peningkatan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
- Menetapkan pola ruang secara proporsional untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, seimbang dan berkesinambungan;
- Menetapkan kawasan strategis dalam rangka pengembangan sektor unggulan dan pengembangan sosial ekonomi secara terintegrasi dengan wilayah sekitar; dan
- Pengembangan sumber daya manusia yang mampu mengelola sektor unggulan secara profesional dan berkelanjutan.

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas terdiri atas:

- Menata dan mengalokasikan sumber daya lahan untuk pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan secara proporsional;
- Mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung aksesibilitas dan pusat-pusat pertumbuhan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal;
- Mengintegrasikan kawasan unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta pengembangan lahan peternakan dengan wilayah sekitar dan kawasan unggulan lain; dan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura serta peternakan secara profesional dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor pertambangan terdiri atas :

- Menata dan menetapkan kawasan pertambangan;
- Mengembangkan pusat industri pertambangan nasional sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu;
- Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar;
- Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang aksesibilitas perdagangan antar pulau dan ekspor;
- Mengintegrasikan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan pusat industri pertambangan nasional dengan usaha-usaha ekonomi masyarakat sekitar;
- Mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan; dan
- Pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif untuk mengelola industri pertambangan nasional secara menyeluruh dengan melaksanakan pelatihan teknis dan membangun sekolah kejuruan dan pendidikan keahlian (sarjana dan pascasarjana).
- Strategi dalam mewujudkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan terdiri atas :
 - Menata dan mengalokasikan sumber daya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan disektor kelautan dan perikanan;
 - Meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor kelautan dan perikanan terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;

- Menetapkan pusat kawasan pengembangan sektor perikanan dan kelautan berupa kawasan pengembangan budidaya perairan dan kawasan perikanan tangkap secara terintegrasi dengan usaha-usaha ekonomi wilayah sekitar;
- Melindungi dan mengelola sumber daya kelautan untuk kebutuhan perlindungan plasma nutfah, terumbu karang dan sumber daya hayati untuk kelangsungan produksi dan pengembangan ekowisata; dan
- Mengembangkan fasilitas pelayanan pendidikan dan latihan secara profesional dan berkelanjutan.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Sulawesi Tenggara terbagi menjadi :

- a. Kawasan Rawan Bencana Alam, yang terdiri dari:

Kawasan Rawan Tanah Longsor, yaitu diseluruh wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali wilayah Kabupaten Wakatobi
- b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang, yaitu: wilayah Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Wakatobi.
- c. Kawasan Rawan Banjir, yaitu: wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali wilayah Kota Baubau dan Kabupaten Wakatobi.
- d. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
 - 1) Kawasan Rawan Gempa Bumi, yaitu : Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan wilayah laut provinsi bagian timur dan perairan Teluk Bone bagian barat.
 - 2) Kawasan Rawan Gerakan Tanah, yaitu :
 - Zona kerentanan tinggi meliputi wilayah Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Utara.
 - Zona kerentanan menengah meliputi semua wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Utara.
 - Zona kerentanan rendah meliputi wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
 - Zona kerentanan saat rendah meliputi wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Bombana, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Buton dan Kabupaten Konawe Kepulauan.
 - 3) Kawasan Rawan Tsunami, terdapat pada kawasan pantai yang dipengaruhi kejadian gempa bawah laut di Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Bombana, dan Kota Kendari.
 - 4) Kawasan Rawan Abrasi, terdapat pada kawasan pantai diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali Kabupaten Kolaka Timur.
 - 5) Kawasan Rawan Gas Beracun H₂S (Hidrogen Sulfida), terdapat di wilayah Kabupaten Kolaka.

Selain Kawasan Rawan Bencana di atas, kecelakaan laut juga sangat potensial terjadi di seluruh perairan laut Sulawesi Tenggara seiring dengan terjadinya perubahan iklim yang mengakibatkan semakin tingginya gelombang laut serta semakin meningkatnya intensitas lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut dari waktu ke waktu.



Gambar 2.6
 Peta Potensi Rawan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara
 Sumber: Perda RTRW Prov.Sultra Tahun 2014-2034



RPD

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026

2.1.4. Demografi

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. Pada sensus sebelumnya referensi waktu dalam konsep kependudukan adalah enam bulan. Perubahan ini didasari oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 15. Oleh Karna itu data BPS, penduduk Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 sebanyak 2.659.156 jiwa terdiri atas 1.346.653 penduduk laki-laki dan 1.312.503 penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara dari tahun 2010 hingga 2020 sebesar 1,47 persen, dan Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara dari tahun 2021 hingga 2022 sebesar 1,75 persen Secara umum, penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang ditunjukkan oleh besaran sex ratio sebesar 102,60.

Dengan luas wilayah 38.067 km², secara rata-rata setiap km² wilayah Sulawesi Tenggara ditinggali sekitar 69 orang penduduk dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak 4-5 orang. Seiring dengan persebaran penduduk tiap kabupaten/kota, Kota Kendari dengan persentase penduduk sebesar 13,17 persen memiliki tingkat kepadatan tertinggi mencapai 1.164.10 jiwa/km². Sementara tingkat kepadatan terendah di Kabupaten Konawe Utara sebesar 13,30 jiwa/km² dengan persentase penduduk sebesar 13,51 persen.

Tabel 2.12.
Jumlah Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2021

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah (jiwa)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Buton	99.352	100.440	101.618	102.641	115.207	117.040
2.	Muna	215.442	218.680	221.343	224.099	215.527	218.956
3.	Konawe	238.067	244.324	249.010	254.695	257.011	261.116
4.	Kolaka	246.918	251.520	256.827	261.664	237.587	241.366
5.	Konawe Selatan	299.928	304.214	309.298	314.785	308.524	312.674
6.	Bombana	170.020	175.497	180.035	184.570	150.706	151.910
7.	Wakatobi	95.208	95.386	95.737	95.892	111.402	113.122
8.	Kolaka Utara	142.614	144.681	147.863	150.831	137.659	139.234
9.	Buton Utara	61.124	62.088	63.070	64.072	66.653	67.714
10.	Konawe Utara	59.673	60.884	62.403	63.814	67.871	68.950
11.	Kolaka Timur	125.859	128.154	130.860	133.324	120.699	120.966
12.	Konawe Kepulauan	32.307	33.212	33.680	34.219	37.050	37.639
13.	Muna Barat	78.476	79.649	80.619	81.624	84.590	84.777
14.	Buton Tengah	90.159	91.099	92.165	93.091	114.773	116.599
15.	Buton Selatan	78.218	79.053	79.979	80.784	95.261	95.472
16.	Kota Kendari	359.371	370.728	381.628	392.830	345.107	350.267
17.	Kota Baubau	158.271	162.780	167.510	171.802	159.248	161.354
Jumlah		2.243.587	2.551.008	2.602.389	2.653.654	2.624.875	2.659.156

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022

Tabel 2.13.
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Kabupaten/ Kota	Laju Pertumbuhan (persen)	
		2010-2020	2020-2021
1.	Buton	1,77	2,13
2.	Muna	0,83	2,13
3.	Konawe	1,71	2,14
4.	Kolaka	1,17	2,13
5.	Konawe Selatan	1,40	1,80
6.	Bombana	0,72	1,07
7.	Wakatobi	1,64	2,06
8.	Kolaka Utara	1,14	1,53
9.	Buton Utara	1,79	2,13
10.	Konawe Utara	2,52	2,13
11.	Kolaka Timur	1,14	0,30
12.	Konawe Kepulauan	2,25	2,13
13.	Muna Barat	1,51	0,29
14.	Buton Tengah	2,63	2,13
15.	Buton Selatan	2,22	0,30
16.	Kota Kendari	1,58	2,00
17.	Kota Baubau	1,37	1,77
Jumlah		1,47	1,75

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh struktur penduduk yang berada dalam suatu wilayah. Berikut struktur penduduk Sulawesi Tenggara menurut kelompok umur disajikan dalam, yaitu :

Tabel 2.14.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	129.305	125.691	254.996
5-9	125.452	122.695	248.147
10-14	127.882	120.899	248.781
15-19	126.234	118.605	244.839
20-24	122.228	117.830	240.058
25-29	117.079	113.517	230.596
30-34	109.208	106.470	215.678
35-39	99.776	98.053	197.829
40-44	90.628	89.063	179.691
45-49	79.397	77.847	157.244
50-54	65.593	64.325	129.918
55-59	52.769	51.913	104.682
60-64	39.376	39.106	78.482
65-69	27.851	28.318	56.169
70-74	17.809	18.861	36.670
75+	16.066	19.310	35.376
Total	1.346.653	1.312.503	2.659.156

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Salah satu cara mengukur tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah yaitu dengan melihat perekonomiannya. Dalam analisis perekonomian, sebagian besar data yang digunakan yaitu hasil olahan dari PDRB atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. PDRB merupakan total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa.

Selain itu, pengukuran aspek pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu aspek mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur berdasarkan pada kontribusi setiap sektor pada komposisi PDRB. Perkembangan nilai PDRB suatu daerah menunjukkan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah. Pada tabel berikut ini diperlihatkan pertumbuhan dan kontribusi setiap sektor pada PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2017 sampai dengan 2021:

Tabel 2.15.
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Dasar 2010 (miliar rupiah) Tahun 2017-2021

No	Sektor	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.869,14	28.293,34	30.671,58	31.416,81	33.091,16
2.	Pertambangan & Penggalian	22.213,42	24.595,94	27.189,78	26.371,59	27.045,75
3.	Industri pengolahan	6.591,64	7.279,08	8.274,53	9.164,30	10.270,36
4.	Pengadaan Listrik, Gas	44,78	46,12	50,12	51,417	56,44
5.	Pengadaan Air	194,81	206,63	215,57	224,40	231,25
6.	Konstruksi	14.345,87	15.925,48	17.694,58	17.647,84	20.126,90
7.	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Spd Motor	13.481,62	14.919,76	16.498,54	16.037,80	17.660,63
8.	Transportasi dan Pergudangan	4.849,62	5.415,79	5.719,32	5.289,88	5.328,07
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	621,69	679,36	726,80	710,483	745,02
10.	Informasi dan Komunikasi	1.984,44	2.150,50	2.313,98	2.468,76	2.457,86
11.	Jasa Keuangan	2.629,88	2.773,47	3.023,07	3.114,18	3.488,82
12.	Real Estate	1.601,74	1.656,92	1.736,97	1.749,10	1.810,26
13.	Jasa Perusahaan	219,35	239,50	260,40	257,93	267,61
14.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	5.532,16	6.009,03	6.322,56	6.738,23	6.954,55
15.	Jasa Pendidikan	4.875,37	5.325,41	5.783,03	6.078,82	6.465,22
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	972,08	1.062,12	1.174,14	1.303,12	1.421,34
17.	Jasa Lainnya	1.395,85	1.448,15	1.571,38	1.559,41	1.636,57
PDRB		107.423,45	118.066,61	129.260,35	130.184,07	139.057,83

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tabel di atas menunjukkan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai daerah agraris yang menjadikan sektor pertanian dengan kontribusi

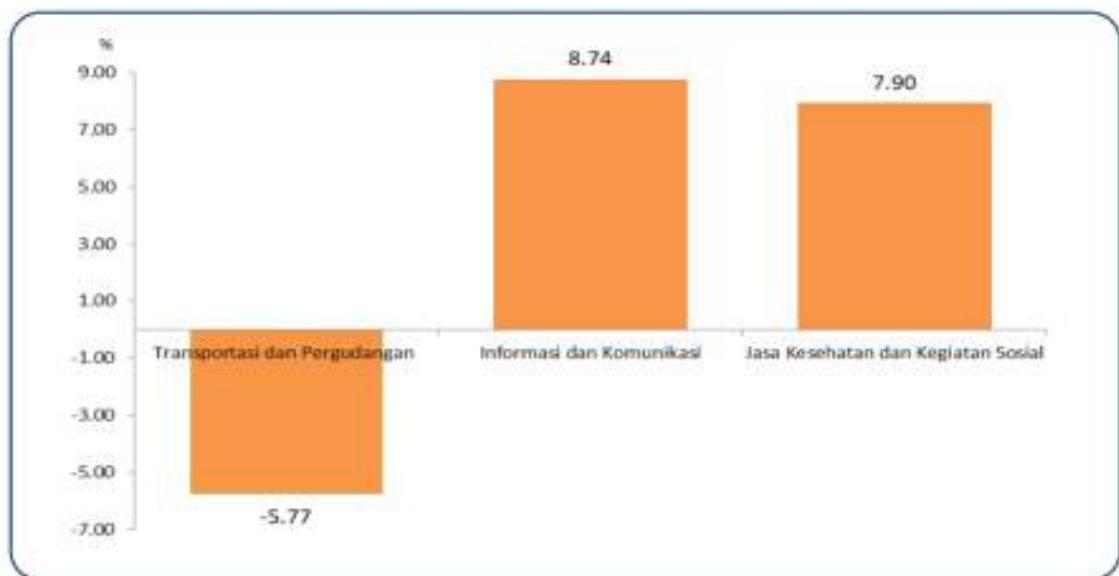
terbesar, dari tahun ke tahun cenderung naik di tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat kontribusi dari tahun 2017 mencapai Rp. 25.869,140,- tahun 2020 mencapai Rp. 31.416,810,- dan tahun 2021 mencapai sebesar Rp. 33.091.16,-. Hal tersebut dialami pula pada sektor pertambangan dan galian sebagai penyumbang terbesar kedua PDRB setelah pertanian, kehutanan dan perikanan, pada tahun 2017 mencapai Rp. 22.213,420,- kemudian di tahun 2020 meningkat sebesar Rp. 26.371,590,- dan di tahun 2021 mencapai sebesar Rp. 27.045.75,-. Secara umum dilihat dari persentase masing-masing sektor perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara di atas dalam 5 tahun terakhir cukup merata.

Tabel 2.16.
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun Dasar 2010 (Miliar Rupiah) Tahun 2017-2021

No.	Sektor	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.323,39	20.554,63	21.587,17	21.692,75	22.247,61
2.	Pertambangan & Penggalian	17.442,49	18.597,26	19.824,35	18.941,20	18.989,48
3.	Industri pengolahan	5.142,94	5.444,70	6.089,05	6.520,70	6.894,52
4.	Pengadaan Listrik, Gas	43,78	44,45	47,51	47,36	50.816,88
5.	Pengadaan Air	156,07	164,97	171,46	177,12	180.526,44
6.	Konstruksi	10.597,43	11.301,19	12.091,95	11.991,29	13.150,19
7.	Perdagangan Besar & Eceran, dan Reparasi Mobil & Spd Motor	10.447,03	11.139,87	12.003,55	11.490,07	12.492,63
8.	Transportasi dan Pergudangan	3.865,37	4.204,13	4.388,42	4.157,82	4.169,77
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	482,43	514,71	540,15	518,92	541,38
10.	Informasi dan Komunikasi	2.005,44	2.169,89	2.339,82	2.528,84	2.620,52
11.	Jasa Keuangan	1.907,41	1.948,67	2.084,22	2.151,41	2.299,69
12.	Real Estate	1.295,99	1.329,44	1.380,31	1.386,16	1.425,22
13.	Jasa Perusahaan	177,82	188,17	197,98	190,44	193,02
14.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	4.277,06	4.436,42	4.595,53	4.747,43	4.838,19
15.	Jasa Pendidikan	3.889,63	4.184,68	4.477,60	4.648,23	4.821,70
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	792,17	846,55	917,77	992,08	106,60
17.	Jasa Lainnya	1.192,05	1.258,98	1.316,54	1.264,89	1.295,58
PDRB		83.038,50	83.038,50	88.328,71	94.053,39	93.446,72

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022.

Berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha, ekonomi Sulawesi Tenggara hingga triwulan III-2020 mengalami kontraksi sebesar minus 0,06 persen. Hal ini disebabkan sebagian besar lapangan usaha masih mengalami kontraksi pertumbuhan akibat adanya pandemi Covid-19. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar minus 5,77 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar minus 3,83 persen, dan Jasa Lainnya sebesar minus 3,65 persen. Di sisi lain beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diantaranya, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,74 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lain sebesar 7,90 persen serta Jasa Pendidikan sebesar 4,84 persen. (Sumber: BPS,2021).



Gambar 2.7
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Triwulan III-2020 Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: BPS, 2021.

Selain melihat kondisi pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara, juga perlu dilihat kondisi pertumbuhan PDRB masing-masing Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tabel berikut ini diperlihatkan pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2014 sampai dengan 2019 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan:

Tabel 2.17.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara (miliar rupiah), 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Buton	3.285,41	3.550,00	3.806,00	3.781,98	3.960,14
2.	Muna	5.921,62	6.421,00	6.929,00	6.987,85	7.339,68
3.	Konawe	7.231,39	8.034,00	9.013,00	10.303,73	11.370,36
4.	Kolaka	21.341,93	23.793,00	26.456,00	25.550,95	27.327,99
5.	Konawe Selatan	10.200,30	11.169,00	12.105,00	11.828,42	12.600,88
6.	Bombana	5.476,95	5.929,00	6.431,00	6.565,75	6.897,02
7.	Wakatobi	3.629,61	3.999,00	4.357,00	4.429,27	4.708,75
8.	Kolaka utara	7.262,12	7.956,00	8.674,00	8.831,48	9.165,72
9.	Buton Utara	2.645,49	2.877,00	3.132,00	3.211,19	3.420,71
10.	Konawe Utara	3.264,23	3.592,00	3.926,00	3.966,23	4.263,39
11.	Kolaka Timur	3.797,54	4.108,00	4.427,00	4.496,34	4.834,04
12.	Konawe Kepulauan	1.152,59	1.262,00	1.384,00	1.398,58	1.469,80
13.	Muna Barat	2.141,33	2.358,00	2.589,00	2.618,06	2.787,12
14.	Buton Tengah	1.975,78	2.170,00	2.370,00	2.463,47	2.536,09
15.	Buton Selatan	2.463,18	2.694,00	2.937,00	2.924,73	2.975,77
16.	Kota Kendari	18.668,33	20.335,00	22.245,00	22.045,70	23.670,76
17.	Kota Baubau	7.508,26	8.256,00	9.044,00	9.075,85	9.614,97
	PDRB	107.465,20	118.503,00	129.825,00	130.184,07	132.046,20

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2020

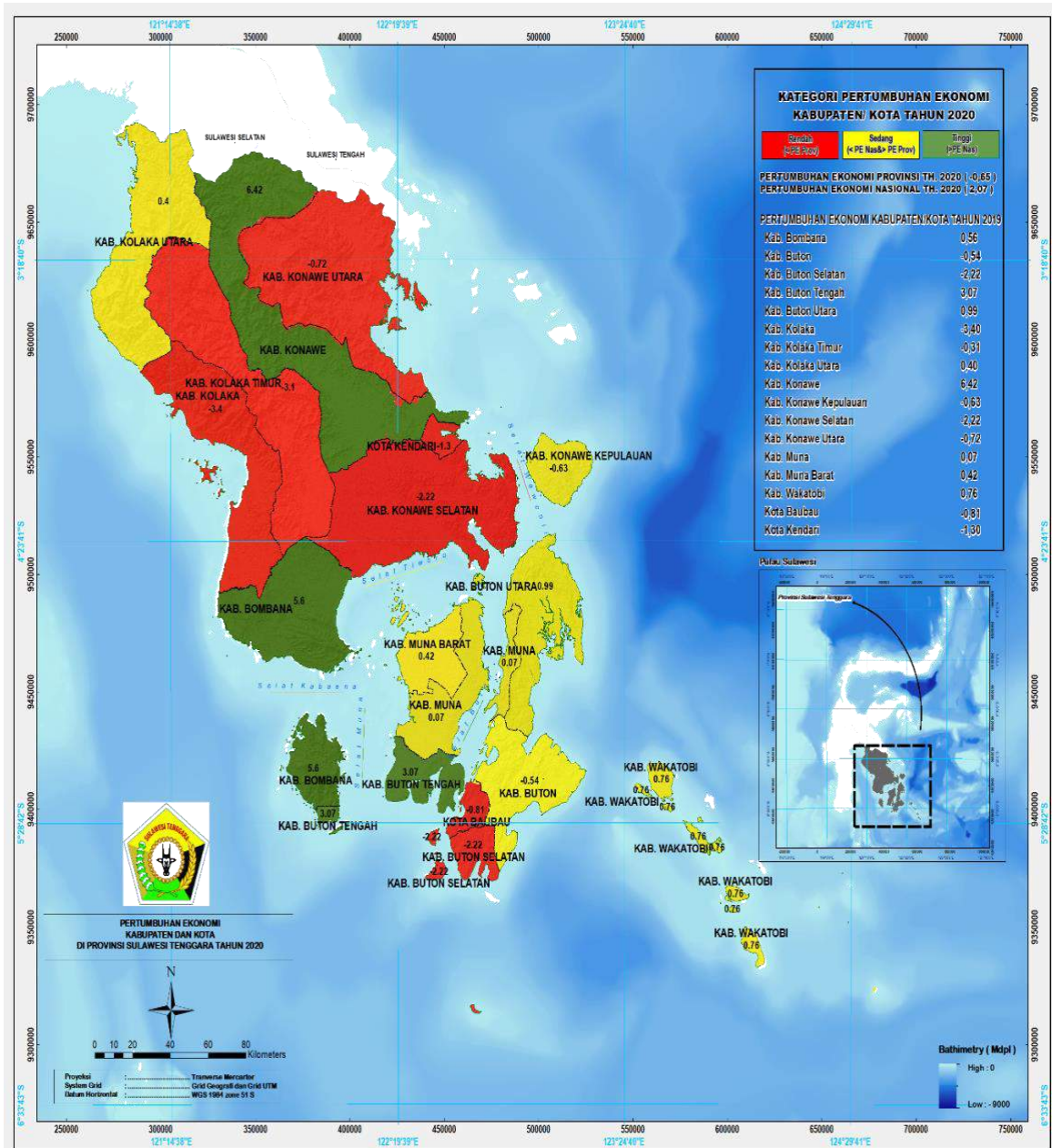
Tabel 2.18.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tenggara (miliar rupiah), 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Buton	2.529,51	2.657,00	2.767,00	2.751,66	2.847,09
2.	Muna	4.572,07	4.808,00	5.068,00	5.071,45	5.229,55
3.	Konawe	5.575,75	5.992,00	6.543,00	7.348,39	7.826,41
4.	Kolaka	16.802,49	17.908,00	19.163,00	18.231,57	18.990,35
5.	Konawe Selatan	7.560,43	7.989,00	8.445,00	8.256,32	8.655,57
6.	Bombana	4.172,83	4.443,00	4.717,00	4.708,74	4.873,72
7.	Wakatobi	2.707,36	2.883,00	3.073,00	3.096,55	3.220,93
8.	Kolaka Utara	5.598,71	5.968,00	6.332,00	6.356,67	6.525,45
9.	Buton Utara	1.992,95	2.109,00	2.228,00	2.250,75	2.342,59
10.	Konawe Utara	2.516,51	2.678,00	2.849,00	2.828,03	2.957,84
11.	Kolaka Timur	2.943,93	3.121,00	3.297,00	3.256,58	3.413,96
12.	Konawe Kepulauan	913,55	981,00	1.054,00	1.046,99	1.071,10
13.	Muna Barat	1.618,72	1.726,00	1.843,00	1.850,88	1.926,50
14.	Buton Tengah	1.490,37	1.579,00	1.678,00	1.729,46	1.760,04
15.	Buton Selatan	1.864,30	1.967,00	2.083,00	2.068,59	2.080,20
16.	Kota Kendari	14.826,05	15.753,00	16.803,00	16.527,21	17.650,19
17.	Kota Baubau	5.825,53	6.219,00	6.629,00	6.572,22	6.920,69
PDRB ADHK		83.038,50	88.782,00	94.573,00	93.446,72	97.276,96

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2021, Kabupaten Kolaka merupakan Kabupaten dengan PDRB tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara baik itu atas dasar harga berlaku sebesar 27.327,99 (dalam miliar rupiah) maupun atas dasar harga konstan sebesar 18.990,35 (dalam miliar rupiah). PDRB ADHB di Kabupaten Konawe Kepulauan didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan untuk Kabupaten yang nilai PDRB nya paling rendah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 1.469,80 (dalam miliar rupiah) atas dasar harga berlaku dan 1.071,10 (dalam miliar rupiah) atas dasar harga konstan. Kontribusi PDRB ADHB di Kabupaten Konawe Kepulauan didominasi oleh sektor pertanian.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya pandemic *Covid-19* yang mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kabupaten Konawe menjadi Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 6,42 persen. Angka ini berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Hal ini dapat dicapai karena adanya penurunan angka pengangguran; penurunan angka kemiskinan; minat belanja masyarakat tetap tinggi sehingga mendorong laju ekonomi daerah, serta upaya Pemda Konawe membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Kemiskinan yang berfungsi menjaga agar tidak terjadi kesenjangan. Sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe, menurutnya, datang dari sektor pertanian yang menyumbang angka pertumbuhan tertinggi, disusul sektor peternakan dan sektor lainnya. Sedangkan Kabupaten Kolaka menjadi Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah pada tahun 2020 yaitu sebesar -3,40 persen.



Gambar 2.8
 Peta Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara
 Sumber: BPS, diolah oleh Penyusun, 2021



Gambar 2.9
Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2021
Sumber: BPS Tahun 2022

2.2.1.2. Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Data laju inflasi di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dari Tahun 2013-2021 dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.19.
Inflasi Bulanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2022

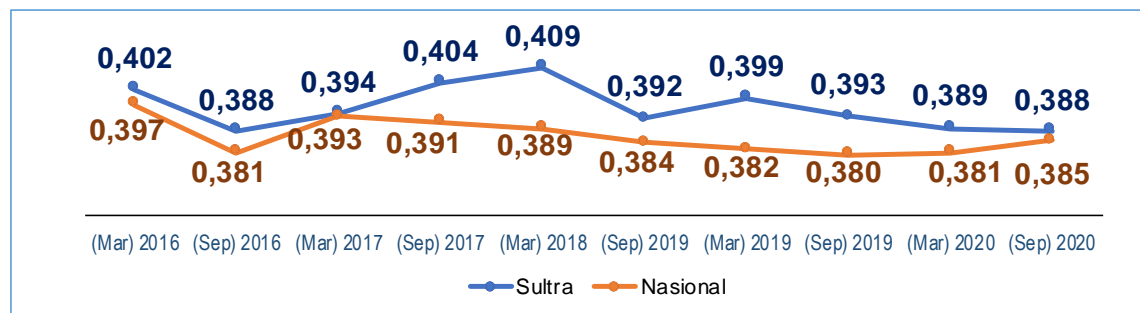
Bulan	2016 (persen)	2017 (persen)	2018 (persen)	2019 (persen)	2020 (persen)	2021 (persen)	2022 (persen)
Januari	1,49	0,88	0,59	0,65	-0,27	-0,24	0,29
Februari	0,07	0,49	0,05	0,03	-0,47	-0,11	-0,09
Maret	0,23	-0,24	-0,08	-0,24	0,06	0,39	-0,07
April	-0,62	-0,13	-0,16	0,46	-0,05	0,21	1,80
Mei	0,15	0,68	0,96	1,80	0,31	1,16	1,39
Juni	0,93	3,58	2,01	2,55	1,33	0,28	-0,61
Juli	0,77	0,46	0,66	-0,24	0,25	0,70	2,27
Agustus	0,01	-1,48	-1,29	-1,56	0,21	0,62	0,36
September	-0,01	-0,76	-0,54	0,47	0,26	0,24	0,43
Oktober	0,12	-0,81	0,16	-0,59	-0,48	0,70	0,27
November	-0,22	-0,34	0,28	-0,36	-0,22	0,19	0,36
Desember	0,13	0,68	-0,09	0,26	0,45	0,28	0,52
Laju Inflasi tahunan	3,07	2,96	2,55	3,22	1,38	2,58	-

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa laju inflasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun cenderung menurun. Pada tahun 2013 laju inflasi mencapai 5,92 persen dan pada tahun 2015 turun hingga 1,64 persen, ditahun berikutnya kembali naik sebesar 3,07 persen dan turun kembali sebesar 2,96 persen pada tahun 2017. Penurunan laju inflasi Sulawesi Tenggara tersebut disebabkan oleh penurunan inflasi yang terjadi baik di Kota Kendari maupun Kota Baubau. Namun pada tahun 2019, laju inflasi mengalami kenaikan kembali sebesar 3,22 persen. Sumber utama penurunan inflasi tersebut adalah penurunan tekanan harga kelompok bahan pangan dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan.

2.2.1.3. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Tenggara

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Sulawesi Tenggara pada September 2019 tercatat sebesar 0,393 dan naik menjadi 0,389 pada Maret 2020, kemudian turun pada September 2020 menjadi 0,388. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 yang sebesar 0,404 naik dibanding Gini Ratio September 2019 tercatat sebesar 0,402 dan mengalami penurunan kembali pada September 2020 yang sebesar 0,403. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,353 kemudian mengalami penurunan pada Maret 2020 yang sebesar 0,347 dan naik kembali pada September 2020 yang sebesar 0,352.



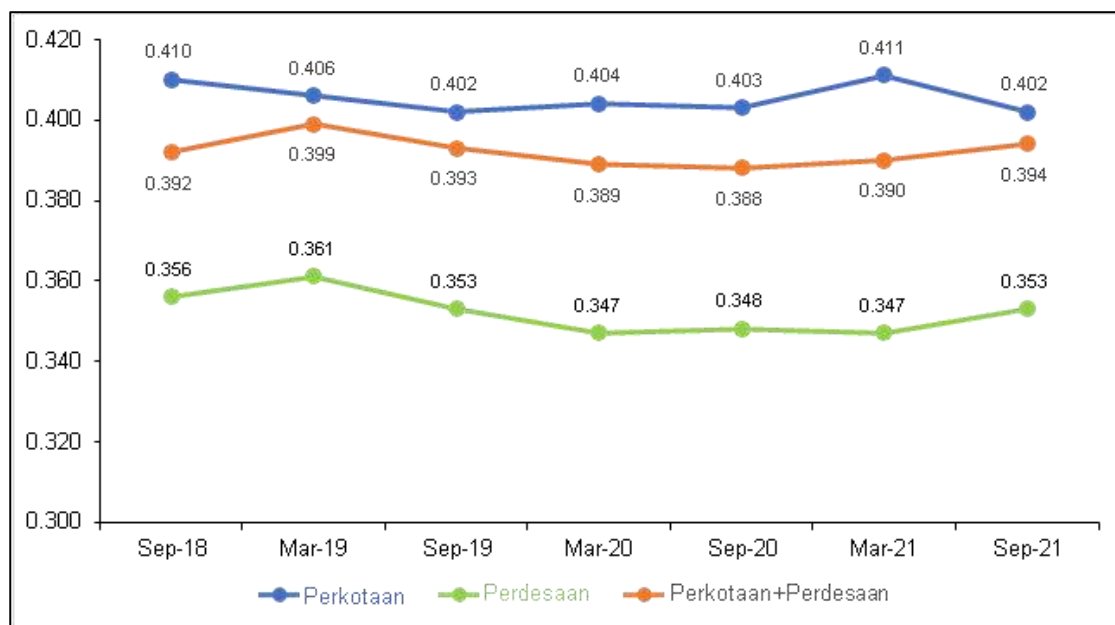
Gambar 2.10
Grafik Perkembangan Gini Ratio Maret 2016-September 2020
Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2021

Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk salah satu provinsi yang diatas Gini Ratio Nasional, Gini Ratio Nasional September tahun 2020 adalah sebesar 0,388. Gini Ratio Provinsi Sulawesi Tenggara (0,388) diatas Gini Ratio Nasional (0,385). Berdasarkan data BPS September 2020 terdapat tujuh provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi dari pada Gini Ratio Nasional, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,437), Jawa Barat (0,398), DKI Jakarta (0,400), Gorontalo (0,406), Sulawesi Tenggara (0,388), Papua (0,395), dan Nusa Tenggara Barat (0,386).

Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tenggara sebesar 0,388. Angka ini menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan September 2019 yang sebesar 0,393. Sementara itu jika dibandingkan, Gini Ratio rata-rata Nasional pada September 2020 lebih rendah daripada Gini Rasio Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 0,385.

Pada Perkembangan Gini Ratio bulan September 2018 – September 2021, Secara rata-rata di Sulawesi Tenggara terus mengalami penurunan hingga September 2020. Efek pandemi Covid-19 terhadap angka gini ratio baru mulai terlihat pada Maret 2021, atau satu tahun setelah virus Covid-19 merebak. Angka gini ratio mulai meningkat pada Maret 2021 dan berlanjut pada September 2021.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah Perkotaan pada september 2021 adalah sebesar 0,402. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar 0,001 poin dibanding September 2020 yang sebesar 0,403 dan meningkat sebesar 0,009 poin dibanding Maret 2021 yang sebesar 0,411. Untuk daerah Perdesaan, Gini Ratio pada September 2021 tercatat sebesar 0,353, naik sebesar 0,005 poin dibandingkan dengan kondisi September 2020 dan sebesar 0,006 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2021. Gini Ratio di daerah Perdesaan pada September 2020 dan Maret 2021 Masing-masing tercatat sebesar 0,348 dan 0,347. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Gambar berikut ini :



Gambar 2.11
Grafik Perkembangan Gini Ratio September 2018 – September 2021
Sumber: di olah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS Sulawesi Tenggara, 2022

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya kurang dari 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen. Pada September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah terbesar 16,31 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan sedang. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 17,19 persen dan juga menurun dibandingkan dengan Maret 2021 yang sebesar 16,97 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2021 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah didaerah perkotaan adalah sebesar 16,11 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah didaerah perdesaan tercatat sebesar 18,04 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan termasuk ketimpangan sedang sementara daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Tenggara pada bulan September 2020, Maret 2021, dan September 2021 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.20.
Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Tenggara, September 2020, Maret 2021, dan September 2021

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jumlah
Perkotaan				
September 2020	16,58	36,41	47,27	100

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jumlah
Maret 2021	15,73	37,36	46,91	100
September 2021	16,11	37,64	46,25	100
Perdesaan				
September 2020	18,82	38,64	42,54	100
Maret 2021	18,71	39,54	41,75	100
September 2021	18,04	39,93	42,03	100
Perkotaan+Perdesaan				
September 2020	17,19	36,67	46,14	100
Maret 2021	16,97	37,36	45,67	100
September 2021	16,31	37,96	45,72	100

Sumber: di olah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS Sulawesi Tenggara, 2022

Sementara itu, Gini Ratio untuk Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara pada Tahun 2018, terdapat tiga Kabupaten dan Kota yang Gini Rationya berada di atas Provinsi yaitu 0,4089. Ketiga Kab/Kota tersebut adalah Kab. Muna Barat (0,4139), Kota Bau-bau (0,4527) dan Kab. Buton Tengah (0,508). Data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat ketimpangan adalah

Bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah lebih cepat dibanding penduduk kelompok lainnya. Penduduk kelompok 40 persen menengah mengalami kenaikan terkecil.

- Di daerah perkotaan, rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 20 persen teratas mengalami kenaikan. Sedangkan penduduk kelompok 40 persen menengah mengalami penurunan pengeluaran perkapita.
- Di perdesaan tercatat bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah lebih cepat dibandingkan penduduk kelompok lainnya.

Gambar 2.16 menunjukkan secara spasial besarnya Gini Ratio masing-masing Kab/Kota pada tahun 2020.

Tabel 2.21.
Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2022

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Buton	0,47	0,337	0,320
2	Muna	0,40	0,331	0,330
3	Konawe	0,34	0,330	0,330
4	Kolaka	0,32	0,383	0,310
5	Konawe Selatan	0,32	0,366	0,370
6	Bombana	0,34	0,361	0,370
7	Wakatobi	0,34	0,335	0,350
8	Kolaka Utara	0,35	0,356	0,380
9	Buton Utara	0,38	0,370	0,350
10	Konawe Utara	0,35	0,399	0,370
11	Kolaka Timur	0,31	0,320	0,300
12	Konawe Kepulauan	0,33	0,324	0,350
13	Muna Barat	0,37	0,332	0,320
14	Buton Tengah	0,28	0,314	0,360
15	Buton Selatan	0,37	0,324	0,290
16	Kota Kendari	0,37	0,362	0,390
17	Kota Baubau	0,44	0,443	0,430
18	Sulawesi Tenggara	0,389	0,390	0,390

Sumber: BPS, 2022

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin (persen)
Maret 2019	327.402	302,58	11,24
September 2019	346.466	299,97	11,04
Maret 2020	356.444	301,82	11,00
September 2020	368.529	317,32	11,69
Maret 2021	378.589	318.70	11,66
September 2021	397.744	323.26	11,74
Maret 2022	404.137	309.79	11,17
September 2022	432.464	314.74	11,27

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Susenas Tahun 2015-2022

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang menggolongkan seseorang miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada bulan Maret 2020 Garis Kemiskinan Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 356.444 rupiah per kapita per bulan, kemudian pada bulan Maret 2021 meningkat mencapai 378.589 rupiah per kapita per bulan. Selama kurun waktu tujuh tahun terakhir, garis kemiskinan Sulawesi Tenggara terus naik hingga pada bulan Maret 2022 mencapai 404.137 rupiah per kapita per bulan.

Pada bulan September 2020 dan bulan September 2021 terjadi peningkatan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan masih sangat rendah sehingga masih banyak yang terperangkap dalam jurang kemiskinan. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan Sulawesi Tenggara kian menurun mencapai 11,27 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara masih berada diatas nasional. Meskipun persentase penduduk miskin Sulawesi Tenggara cenderung menurun namun penurunannya semakin melambat, sehingga dapat dipastikan bahwa kelambatan penurunan tingkat kemiskinan atau persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara mempengaruhi tingkat kemiskinan nasional.

Persebaran penduduk miskin di Sulawesi Tenggara baik di Desa maupun di Kota dari tahun 2015-2022 fluktuatif. Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagian besar berada di Desa, namun persebaran penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara dari Maret 2015-Maret 2022 mengalami penurunan berbanding terbalik dengan penduduk miskin di perkotaan, walaupun penduduk miskin sebagian besar berada di desa tetapi perkembangan penduduk miskin di perkotaan cenderung naik tiap tahunnya. Namun pada September 2020 persebaran penduduk miskin baik di Desa maupun Kota mengalami peningkatan. Hal ini sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Tabel 2.23.
Persebaran Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2022

Tahun	Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin	
	Kota	Desa	Kota	Desa
Maret 2013	32,15	273,68	4,92	15,82
September 2013	37,17	293,67	5,52	16,92
Maret 2014	48,25	294,01	7,06	16,78
September 2014	45,79	268,30	6,62	15,17
Maret 2015	52,06	269,82	7,24	15,19
September 2015	56,77	288,25	7,84	16,12
Maret 2016	51,01	275,86	6,74	15,49
September 2016	53,18	274,11	6,87	15,31
Maret 2017	62,75	268,96	7,56	15,29
September 2017	67,96	245,19	7,14	14,74
Maret 2018	66,41	240,69	6,56	14,77
September 2018	70,05	231,80	6,87	14,07

Tahun	Penduduk Miskin (000)		Persentase Penduduk Miskin	
	Kota	Desa	Kota	Desa
Maret 2019	71,82	230,76	6,81	14,09
September 2019	72,58	227,38	6,81	13,77
Maret 2020	76,93	224,89	7,14	13,50
September 2020	73,22	244,10	7,62	13,93
Maret 2021	75,05	243,65	7,66	13,89
September 2021	71,02	252,25	7,14	14,34
Maret 2022	69,94	239,85	6,95	13,57
September 2022	73,71	241,04	7,22	13,60

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Susenas 2013-2021

Penduduk miskin Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara terjabarkan dalam Tabel 2.4. Secara garis besar, jumlah penduduk miskin di semua Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara mengalami naik turun dari tahun 2015 hingga 2020. Beberapa Kabupaten mengalami penurunan jumlah penduduk miskin secara drastis pada tahun 2016. Kabupaten tersebut antara lain Buton dan Muna. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Buton pada tahun 2016 adalah sebanyak 13.030 orang, menurund dari tahun sebelumnya sebanyak 36.600 orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muna pada tahun 2016 sebanyak 32.650 orang yang menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 44.430 orang. Tahun 2020, jumlah penduduk miskin paling banyak berada di Konawe Selatan sebanyak 34.220 orang, sedangkan penduduk miskin paling sedikit berada di Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu sebanyak 5.880 orang.

Tabel 2.24.
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022

No.	Nama Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribu Orang)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Buton	13.41	13.78	13.97	13.68	14,25	13,61
2.	Muna	32.35	29.12	28.47	28.73	30,54	30,48
3.	Konawe	37.99	33.40	31.25	31.63	32,46	32,09
4.	Kolaka	26.64	24.74	24.00	23.76	33,45	31,56
5.	Konawe Selatan	33.73	33.73	33.89	34.22	36,17	35,79
6.	Bombana	21.52	19.77	19.37	18.84	19,73	19,21
7.	Wakatobi	15.48	14.20	14.14	13.75	15,30	15,01
8.	Kolaka Utara	23.42	21.03	19.80	19.83	21,36	20,63
9.	Buton Utara	9.63	9.38	9.18	9.13	9,45	9,13
10.	Konawe Utara	8.44	8.82	8.67	8.78	9,26	9,02
11.	Kolaka Timur	28.86	25.97	26.29	26.38	20,03	19,33
12.	Konawe Kepulauan	5.97	5.87	5.86	5.88	5,98	5,47
13.	Muna Barat	12.89	11.39	11.52	11.32	11,55	11,56
14.	Buton Tengah	16.73	13.72	14.64	14.40	14,73	13,92
15.	Buton Selatan	12.66	11.86	11.81	11.50	11,71	11,57
16.	Kota Kendari	18.44	17.76	17.30	17.46	19,46	18,72
17.	Kota Baubau	13.55	12.59	12.42	12.53	13,30	12,69
18.	Sulawesi Tenggara	331,71	307,10	302,58	301,82	318,70	309,79

Sumber: BPS, 2022



Gambar 2.13
Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020
Sumber: BPS, diolah oleh Penyusun, 2021

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan apirtas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.



Gambar 2.14
Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2020

Secara umum, pembangunan manusia Sulawesi Tenggara terus mengalami kemajuan selama periode 2013 hingga 2020. IPM Sulawesi Tenggara meningkat dari 67,55 pada tahun 2013 menjadi 71,45 pada tahun 2020, walaupun IPM Sulawesi Tenggara masih berada dibawah IPM Nasional 71,94. Selama periode 2013 hingga 2017, IPM Sulawesi Tenggara menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 dan 2020, IPM Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan hingga di atas angka 70 yang tergolong kategori tinggi.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek asensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.25.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara 2015-2022

Komponen	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup Saat lahir (AHH)	Tahun	70,44	70,46	70,47	70,72	70,97	71,22	71,27	71,37
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,07	13,24	13,36	13,53	13,55	13,65	13,68	13,69
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,18	8,32	8,46	8,69	8,91	9,04	9,13	9,25
Pengeluaran per Kapita	Rp000	8.697	8.871	9.094	9.262	9.436	9.331	9.381	9.708
IPM	-	68,75	69,31	69,86	70,61	71,20	71,45	71,66	72,23
Pertumbuhan IPM	Persen	0,99	0,81	0,79	1,07	0,83	0,35	0,29	-

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022

Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2015 hingga 2020, IPM tertinggi adalah di Kota Kendari, dimana pada tahun 2015 sebesar 81,43 dan tahun 2020 sebesar 83,53. Sedangkan untuk Kabupaten dengan IPM paling rendah pada tahun 2020 adalah Kabupaten Buton Tengah.

Tabel 2.26.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Buton	64.47	65.08	65.67	65.98	66,32	67,23
Muna	67.61	68.47	68.97	69.02	69,17	69,61
Konawe	70.24	70.72	71.29	71.35	71,48	72,04
Kolaka	71.46	72.07	73.01	73.45	73,56	73,98
Konawe Selatan	67.23	67.51	67.88	68.20	68,58	69,36
Bombana	64.49	65.04	65.65	66.05	66,25	66,81
Wakatobi	67.99	68.52	68.99	69.48	69,87	70,85
Kolaka Utara	67.77	68.44	68.91	69.31	69,50	70,39
Buton Utara	66.40	67.13	67.68	67.87	68,08	69,00
Konawe Utara	67.71	68.50	69.22	69.86	70,23	71,10
Kolaka Timur	64.55	65.53	66.49	67.02	67,76	68,73
Konawe Kepulauan	63.44	64.36	65.05	65.41	65,73	66,69
Muna Barat	63.43	64.11	64.45	65.08	65,48	66,21
Buton Tengah	62.82	63.46	64.06	64.37	64,55	65,29
Buton Selatan	63.20	63.47	64.37	64.93	64,99	65,44
Kota Kendari	81.83	82.22	82.86	83.53	84,15	84,51
Kota Baubau	74.14	74.67	75.21	75.90	76,26	76,67
Sulawesi Tenggara	69,86	70,61	71,20	71,45	71,66	72,23

Sumber: BPS, 2022

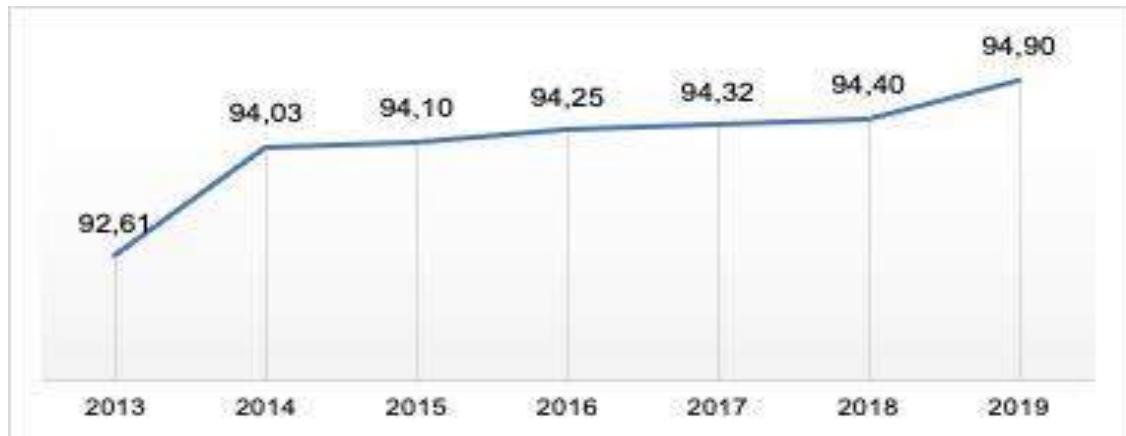


Gambar 2.15
IPM Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020
Sumber: BPS, diolah oleh Penyusun, 2022

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Standar UNDP minimal 0 persen dan maksimal 100 persen. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas di Sulawesi Tenggara telah mencapai diatas 94,90persen. Sejak ahun 2013 hingga tahun 2020, AMH penduduk usia 15 tahun keatas terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2013 AMH penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 92,61 persen, tahun 2014 meningkat 94,03 persen, tahun 2015 dan 2016 Angka Melek Huruf tidak meningkat terlalu tinggi yaitu 94,10 persen dan 94,26 persen, tahun 2017 mencapai 94,32 persen, tahun 2018 meningkat hingga 94,40 persen dan di tahun 2019 berada di angka 94,90 persen. Pada tahun 2020 Angka Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 99,93 persen sedangkan pada tahun 2021 Angka Melek Huruf di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 99,91 persen.



Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2020

Gambar 2.16
Angka Melek Huruf Provinsi Sulawesi Tenggara

Angka Melek Huruf di kabupaten/kota antara tahun 2012 sampai dengan 2020 berkisar antara 85 persen sampai dengan 100 persen. Pada tahun 2012 terdapat lima kabupaten yang angka melek hurufnya berada dibawah 90 persen yaitu Kabupaten Buton, Muna, Bombana, Wakatobi, dan Buton Utara. Tahun 2013 jumlah tersebut tidak berubah dan pada tahun 2014 angka Kabupaten Wakatobi sedikit meningkat mencapai 90,37 persen. Pada tahun 2017 hampir semua kabupaten/kota telah mencapai angka 90 persen kecuali Kabupaten Buton Tengah masih mencapai 76,83 persen, jauh berada dibawah daerah lainnya. Kabupaten/Kota yang hampir mencapai tuntas buta aksara yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan mencapai 99,15 persen dan Kota Kendari mencapai 99,52 persen. Tahun 2019 hampir semua kabupaten mencapai tuntas buta aksara, hanya tersisa enam kabupaten/kota yang masih di bawah 100%. Tahun 2020, beberapa kabupaten yang sudah tuntas buta aksara mengalami penurunan kembali, kabupaten/kota tersebut antara lain Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, dan Kota Kendari.

Tabel 2.27.
Perkembangan Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2020

No.	Kabupaten/Kota	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1.	Buton	85,72	86,57	86,60	86,62	86,65	96,84	90,50	100	99,57
2.	Muna	87,83	87,97	87,99	88,37	88,73	96,59	93,27	100	99,62
3.	Konawe	94,61	94,61	94,66	94,68	94,73	97,57	95,82	100	100
4.	Kolaka	93,16	93,25	93,27	93,30	93,46	96,31	96,08	100	100
5.	Konawe Selatan	94,11	94,12	94,13	94,13	94,15	95,03	94,29	100	100
6.	Bombana	88,49	89,28	89,31	89,53	91,47	94,51	92,83	100	100
7.	Wakatobi	89,13	89,86	90,37	91,35	93,03	95,70	89,30	100	100
8.	Kolaka Utara	93,04	93,07	93,58	93,61	94,54	94,72	93,08	100	100
9.	Buton Utara	86,59	87,02	88,25	88,34	89,36	96,51	96,20	99,74	100

No.	Kabupaten/Kota	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
10.	Konawe Utara	93,80	93,81	93,82	93,84	94,03	96,70	95,33	100	100
11.	Kolaka Timur	*	*	*	*	92,64	95,55	96,66	99,77	100
12.	Konawe Kepulauan	*	*	*	*	90,99	99,15	97,39	100	100
13.	Muna Barat	*	*	*	*	*	90,18	88,33	99,34	100
14.	Buton Tengah	*	*	*	*	*	76,83	84,82	99,91	100
15.	Buton Selatan	*	*	*	*	*	95,89	88,84	99,64	100
16.	Kendari	98,38	98,60	98,63	98,68	98,69	99,52	98,93	100	99,87
17.	Baubau	95,30	95,58	95,60	95,65	95,71	98,29	96,18	99,61	100

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2021

2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

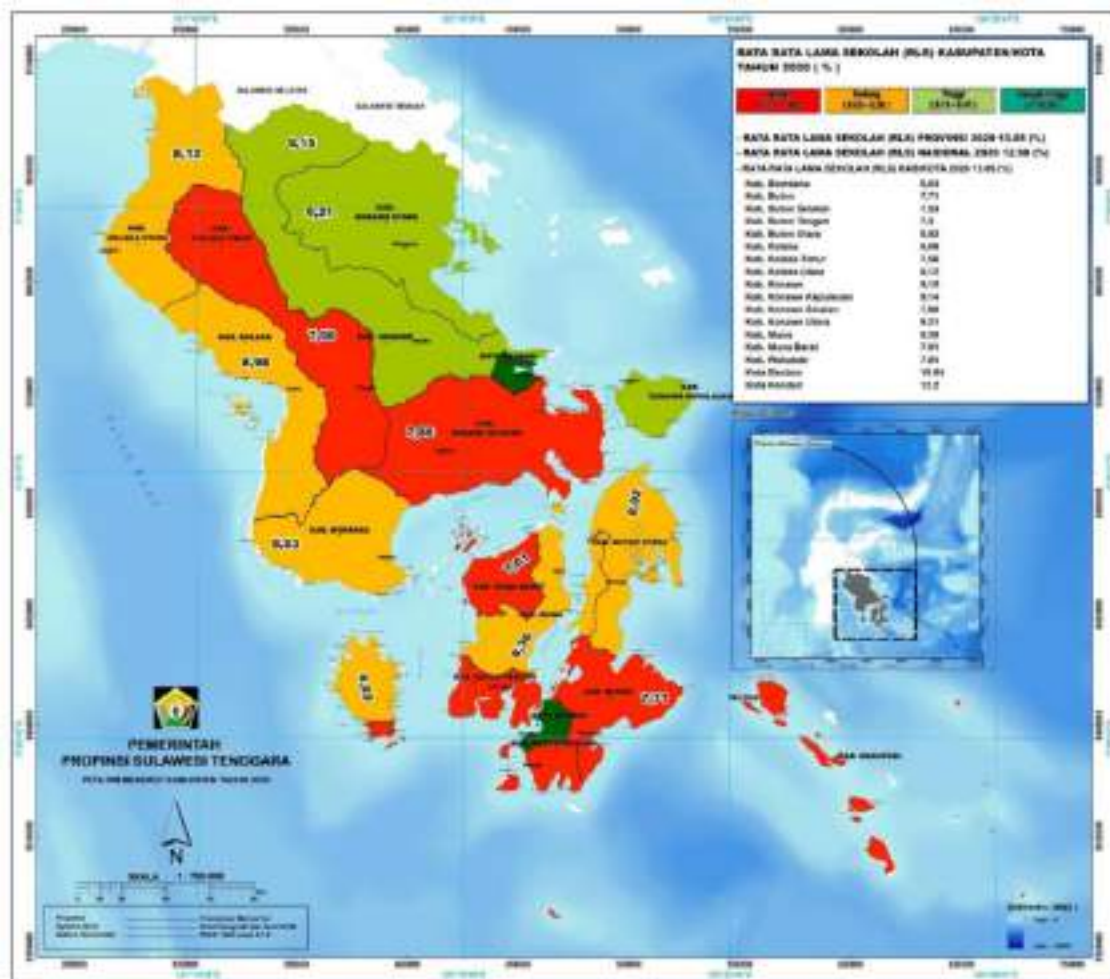
Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun dan level nasional mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun. Pada grafik di bawah ini digambarkan rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :



Gambar 2.17
Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2021

Dari Gambar 2.11 atas terlihat bahwa angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan setiap tahunnya. Diawali pada tahun 2013 berada di angka 7,93 terus meningkat di tahun 2014 menjadi 8,02 dan pada tahun 2020 sesuai dengan data terbaru melonjak hingga angka 9,04. Rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahunnya selalu berada di atas angka nasional. Pada tahun 2014, angka rata-rata lama sekolah nasional hanya 7,75 dan meningkat di tahun 2014 menjadi 7,73 hingga di tahun 2020 berada pada angka 8,48. Sedangkan data terbaru angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 sebesar 9,13 dan tahun 2022 sebesar 9,25. Hal ini mengindikasikan bahwa minat dan tingkat kemauan untuk bersekolah cukup tinggi. Diharapkan dengan terus naiknya angka rata-rata lama sekolah ini, mampu mencetak SDM yang unggul dan berkualitas.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara menunjukkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk belajar secara formal. Gambar 2.18 dan Tabel 2.27 di bawah ini menunjukkan perkembangan rata-rata lama sekolah dari kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara dari tahun 2016 hingga tahun 2020:



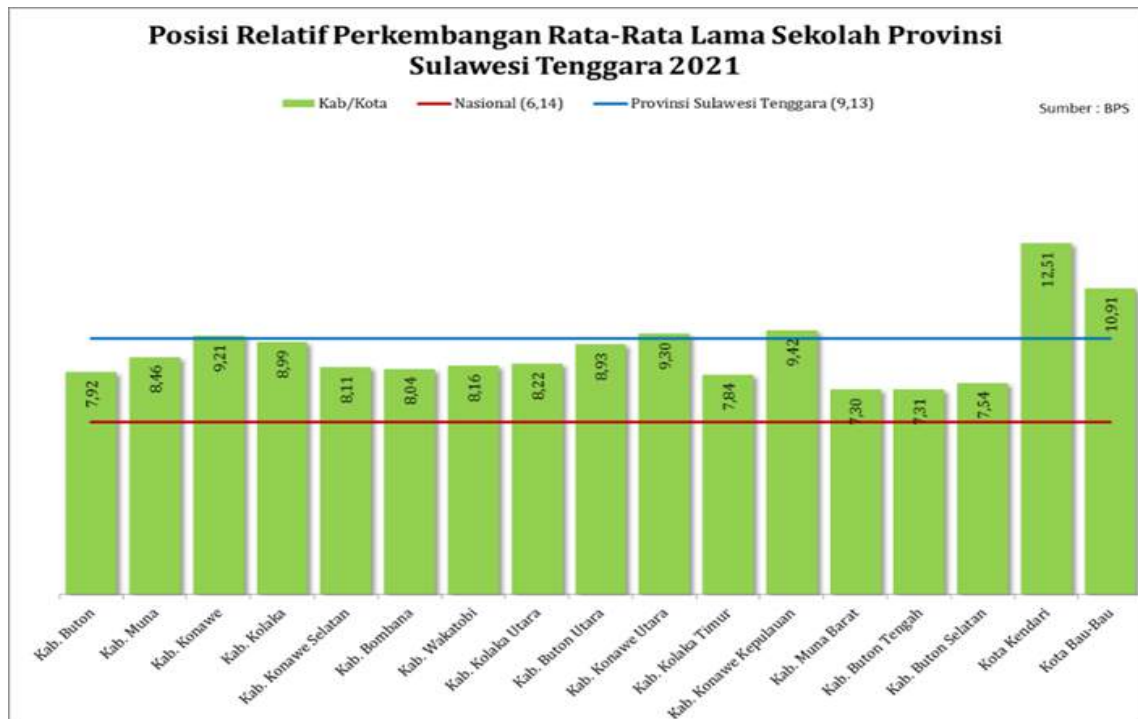
Gambar 2.18
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara
Sumber: BPS, diolah oleh Penyusun, 2022

Tabel 2.28.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2017-2021

No.	Provinsi/Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Buton	7,22	7,50	7,51	7,71	7.92
2.	Muna	7,89	8,19	8,35	8,36	8.46
3.	Konawe	8,77	8,94	9,14	9,15	9.21
4.	Kolaka	8,31	8,57	8,76	8,98	8.99
5.	Konawe Selatan	7,72	7,73	7,74	7,86	8.11
6.	Bombana	7,53	7,54	7,74	8,03	8.04
7.	Wakatobi	7,71	7,72	7,73	7,94	8.16
8.	Kolaka Utara	7,50	7,67	7,86	8,12	8.22
9.	Buton Utara	8,18	8,54	8,75	8,92	8.93
10.	Konawe Utara	8,62	8,81	8,97	9,21	9.30
11.	Kolaka Timur	6,90	7,18	7,35	7,56	7.84
12.	Konawe Kepulauan	8,90	9,17	9,18	9,41	9.42
13.	Muna Barat	6,48	6,76	6,77	7,01	7.30
14.	Buton Tengah	7,02	7,28	7,29	7,30	7.31
15.	Buton Selatan	7,06	7,07	7,32	7,53	7.54
16.	Kendari	11,67	11,69	11,94	12,20	12.51
17.	Baubau	9,90	10,13	10,37	10,64	10.91
Sulawesi Tenggara		8,46	8,69	8,91	9,04	9,13

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022.

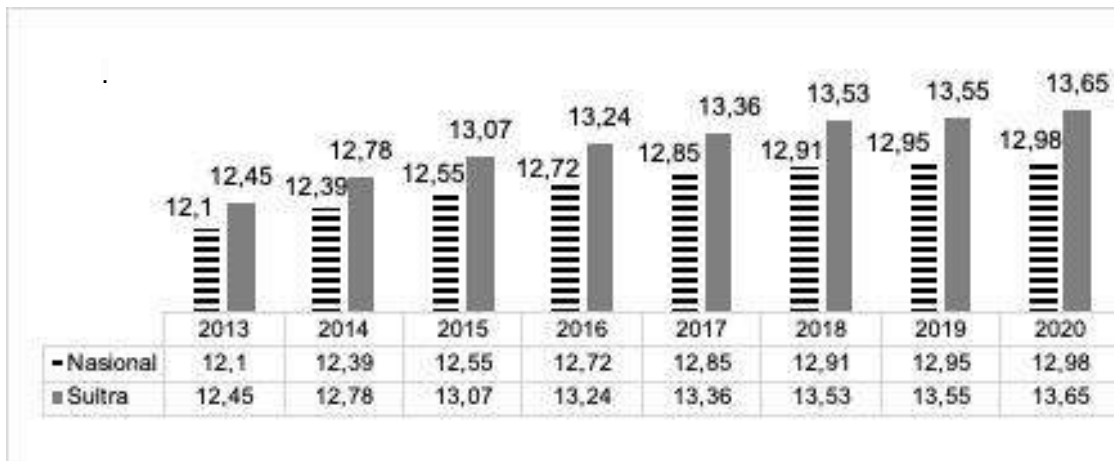
Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah di setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat lima kabupaten dan kota yang memiliki angka rata-rata lama sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi yaitu 9,13 pada tahun 2021. Kelima kabupaten dan kota tersebut adalah Kota Kendari (12,51), Kota Bau-Bau (10,91), Kabupaten Konawe Kepulauan (9,42), Kabupaten Konawe Utara (9,30) dan Kabupaten Konawe (9,21). Sedangkan kabupaten yang memiliki angka rata-rata lama sekolah paling rendah adalah Kabupaten Muna Barat yaitu sebesar (7,30). Berdasarkan data Sakernas, Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 sebesar 9,13. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah ini lebih baik dari capaian Rata-Rata Lama Sekolah Nasional yaitu sebesar 6,14. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2017 - 2021 cenderung meningkat.



Gambar 2.19.
Rata-Rata Lama Sekolah Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota Tahun 2021

2.2.2.3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Gambar 2.12 menunjukkan perbandingan angka harapan lama sekolah di tingkat Sulawesi Tenggara dengan Nasional dari tahun 2013 hingga tahun 2020. Gambar 2.12 memperlihatkan bahwa angka harapan sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan setiap tahunnya. Diawali pada tahun 2013 berada di angka 12,45 terus meningkat di tahun 2014 menjadi 12,78 dan pada tahun 2020 sesuai dengan data terbaru melonjak hingga angka 13,65. Angka harapan lama sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahunnya selalu berada di atas angka nasional. Pada tahun 2014, angka rata-rata lama sekolah nasional hanya 12,1 dan meningkat di tahun 2014 menjadi 12,39 hingga di tahun 2020 berada pada angka 12,98. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah Sulawesi Tenggara pada tahun 2020 sebesar 13,65 tahun. Data terbaru menunjukkan Angka Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Tenggara Tahun 2021 sebesar 13,68 dan pada tahun 2022 sebesar 13,69. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,69 tahun atau setara dengan Diploma II/Diploma III.



Gambar 2.20
Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2021

Angka harapan lama sekolah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara cenderung naik setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Kota Kendari memiliki angka harapan lama sekolah paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya. Pada tahun 2017, angka harapan lama sekolah Kota Kendari 16,06, meningkat pada tahun 2018 menjadi 16,20 dan di tahun 2021 sebesar 16,89 dan pada tahun 2022 berada di angka 16,90. Dengan demikian, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 16,90 tahun atau setara dengan Strata I. Kabupaten Bombana menjadi Kabupaten dengan angka harapan lama sekolah paling rendah di Sulawesi Tenggara pada tahun 2022, yaitu sebesar 11,89. Secara rata-rata anak usia 7 tahun di Kabupaten Bombana yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,89 tahun atau setara dengan SMA. Melihat jarak antara angka harapan lama sekolah dari Kabupaten yang terendah dan tertinggi, maka rata-rata angka harapan lama sekolah di semua Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara memiliki peluang untuk bersekolah hingga tingkat SMA hingga Strata I.

Tabel 2.29.
Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2017-2022

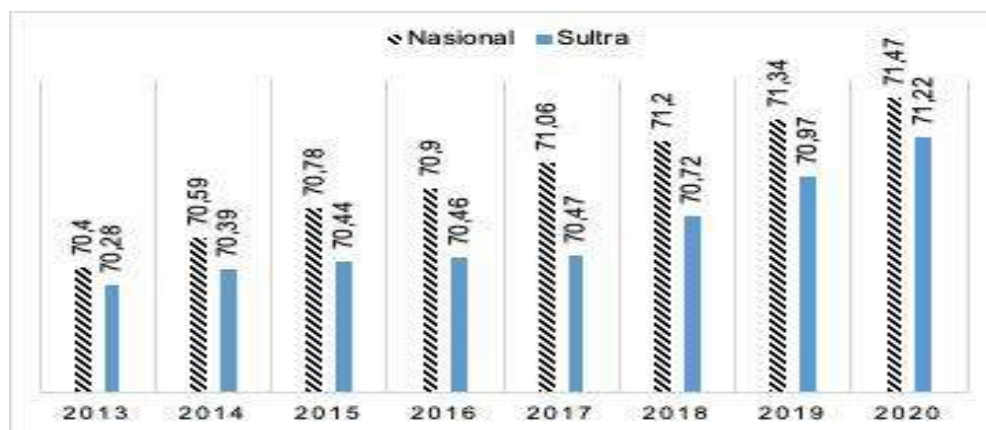
No.	Provinsi/Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Buton	13.52	13.53	13.74	13.75	13.76	13.87
2.	Muna	13.48	13.77	13.78	13.79	13.80	14.01
3.	Konawe	12.97	12.98	12.99	13.00	13.01	13.03
4.	Kolaka	12.38	12.39	12.80	12.81	12.83	13.02
5.	Konawe Selatan	12.22	12.23	12.24	12.36	12.37	12.59
6.	Bombana	11.81	11.82	11.83	11.84	11.85	11.89
7.	Wakatobi	13.14	13.15	13.20	13.50	13.51	13.51
8.	Kolaka Utara	11.93	12.09	12.10	12.11	12.15	12.16
9.	Buton Utara	12.73	12.74	12.75	12.76	12.92	12.99
10.	Konawe Utara	12.02	12.33	12.54	12.83	13.08	13.11
11.	Kolaka Timur	11.58	11.89	12.15	12.41	12.69	12.69
12.	Konawe Kepulauan	11.30	11.59	11.81	12.06	12.32	12.53
13.	Muna Barat	12.06	12.13	12.20	12.50	12.51	12.61
14.	Buton Tengah	12.32	12.35	12.70	13.00	13.12	13.18
15.	Buton Selatan	12.55	12.56	12.94	13.23	13.24	13.25
16.	Kendari	16.06	16.20	16.28	16.62	16.89	16.90
17.	Baubau	14.79	14.80	14.81	15.16	15.17	15.18
Sulawesi Tenggara		13.36	13.53	13.55	13.65	13.68	13.69

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022.



2.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup penduduk Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus meningkat. Meningkatnya atau menurunnya angka harapan hidup tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya ketersediaan sarana kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran masyarakat.



Grafik pada Gambar 2.22 di atas menunjukkan usia harapan hidup masyarakat Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, usia harapan hidup Sulawesi Tenggara berada pada 70,28 tahun, selisih 0,12 dengan pencapaian nasional yaitu 70,4. Sedangkan pada tahun 2020, usia harapan hidup Sulawesi Tenggara sebesar 71,22 selisih 0,25 dengan pencapaian nasional yaitu 71,47. Meningkatnya usia harapan hidup mengindikasikan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

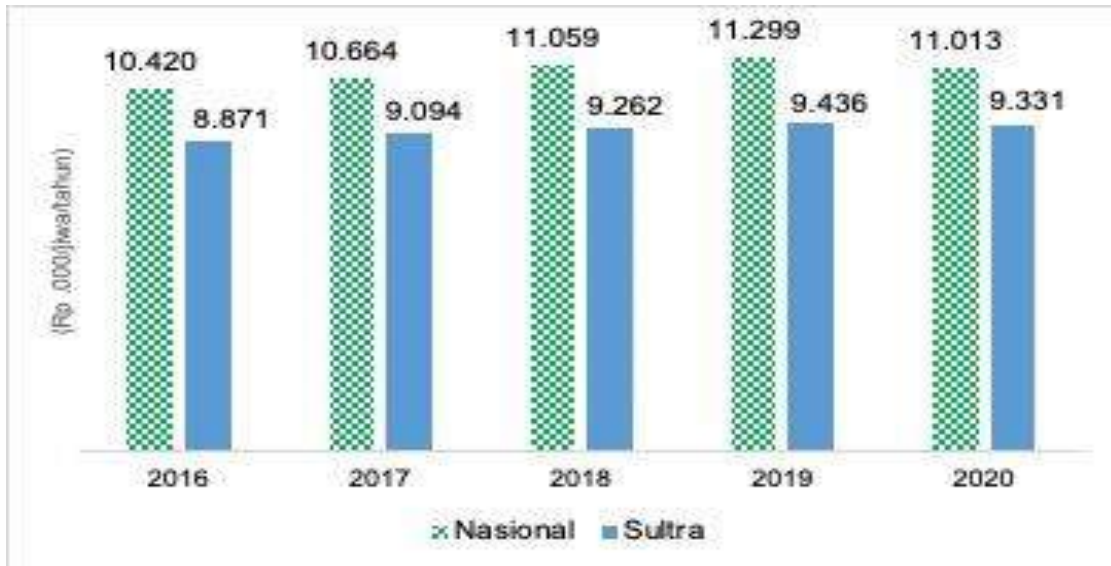
Secara keseluruhan Angka Harapan Hidup Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 terdapat hanya dua kabupaten/kota yang memiliki Angka Harapan Hidup sama/diatas rata-rata provinsi (71,27), yaitu: Kabupaten Kolaka Timur (72,82) dan Kota Kendari (73,83). Terjadi peningkatan angka usia harapan hidup di masing-masing Kabupaten dan Kota. Sedangkan Kabupaten yang paling rendah Angka Harapan Hidupnya tahun 2021 berturut-turut berada di Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan yaitu sebesar 67,69, Kabupaten Buton sebesar 68,39 dan Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 68,43. Secara lebih rinci digambarkan pada Tabel 2. 27 di bawah ini:

*Tabel 2.30.
Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021*

Kabupaten/Kota	2016 (Thn)	2017 (Thn)	2018 (Thn)	2019 (Thn)	2020 (Thn)	2021 (Thn)
Buton	67,23	67,30	67,60	67,69	68,25	68,39
Muna	69,77	69,77	69,97	70,18	70,39	70,41
Konawe	69,48	69,52	69,76	70,02	70,27	70,32
Kolaka	69,97	70,05	70,38	70,72	71,06	71,21
Konawe Selatan	69,93	69,98	70,24	70,52	70,80	70,87
Bombana	67,72	67,82	68,17	68,54	68,92	69,09
Wakatobi	69,54	69,59	69,85	70,13	70,41	70,48
Kolaka Utara	69,62	69,74	69,94	70,15	70,36	70,36
Buton Utara	70,73	70,38	70,56	70,75	70,93	70,93
Konawe Utara	68,64	68,69	68,95	69,23	69,51	69,53
Kolaka Timur	71,68	71,66	71,99	72,33	72,67	72,82
Konawe Kepulauan	67,87	67,88	68,06	68,25	68,43	68,43
Muna Barat	69,78	69,79	69,97	70,16	70,34	70,35
Buton Tengah	67,17	67,17	67,33	67,50	67,66	67,69
Buton Selatan	67,17	67,17	67,33	67,50	67,66	67,69
Kota Kendari	72,98	73,02	73,26	73,52	73,77	73,83
Kota Baubau	70,47	70,50	70,72	70,95	71,19	71,25
Sulawesi Tenggara	70,46	70,47	70,72	70,79	71,22	71,27

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022

Kabupaten/Kota dengan usia harapan hidup tertinggi di tahun 2021 adalah Kota Kendari yaitu sebesar 73,83 tahun, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Buton Tengah dan Buton Selatan dengan angka yang sama yaitu 67,69 tahun. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus meningkat. Meningkatnya atau menurunnya angka harapan hidup tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya ketersediaan sarana kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian perlu adanya tinjauan kembali terkait ketersediaan sarana kesehatan, kualitas SDM kesehatan pada kabupaten/kota yang angka usia harapan hidupnya masih rendah. Sehingga untuk tahun selanjutnya angka harapan hidup bisa terus naik.



Gambar 2.24
Pengeluaran Perkapita Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2021

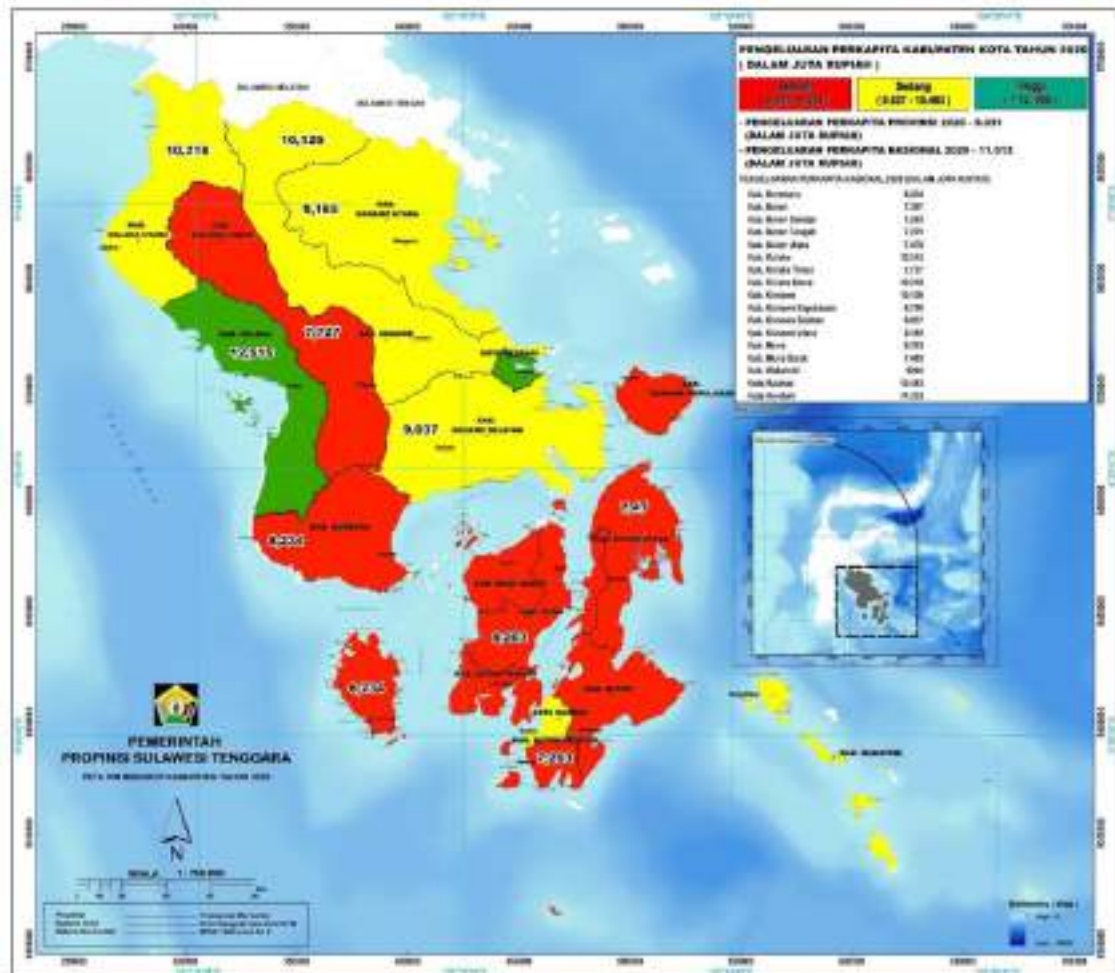
Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran per kapita menggambarkan kelayakan hidup sebagai salah satu pembentuk IPM. Tabel 2.29 menggambarkan pengeluaran perkapita Kabupaten/Kota dari tahun 2016 hingga tahun 2021.

Tabel 2.31.
Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Buton	6.950	7.117	7.209	7.366	7.307	7.32
2	Muna	7.928	8.000	8.098	8.253	8.203	8.22
3	Konawe	9.696	9.857	10.004	10.200	10.126	10.15
4	Kolaka	12.072	12.243	12.384	12.525	12.515	12.53
5	Konawe Selatan	8.660	8.798	8.914	9.115	9.037	9.06
6	Bombana	7.607	7.908	8.190	8.344	8.234	8.31
7	Wakatobi	8.651	8.800	9.136	9.388	9.204	9.28
8	Kolaka Utara	9.846	9.941	10.133	10.258	10.218	10.24
9	Buton Utara	7.168	7.249	7.393	7.534	7.470	7.50
10	Konawe Utara	8.822	8.943	9.050	9.215	9.165	9.18
11	Kolaka Timur	7.283	7.499	7.606	7.832	7.727	7.75
12	Konawe Kepulauan	6.227	6.458	6.601	6.832	6.700	6.74
13	Muna Barat	7.221	7.288	7.405	7.526	7.485	7.50
14	Buton Tengah	6.860	7.012	7.160	7.264	7.221	7.24
15	Buton Selatan	6.859	7.075	7.192	7.293	7.263	7.28
16	Kota Kendari	13.828	13.995	14.168	14.392	14.335	14.36
17	Kota Baubau	10.110	10.223	10.374	10.523	10.483	10.50

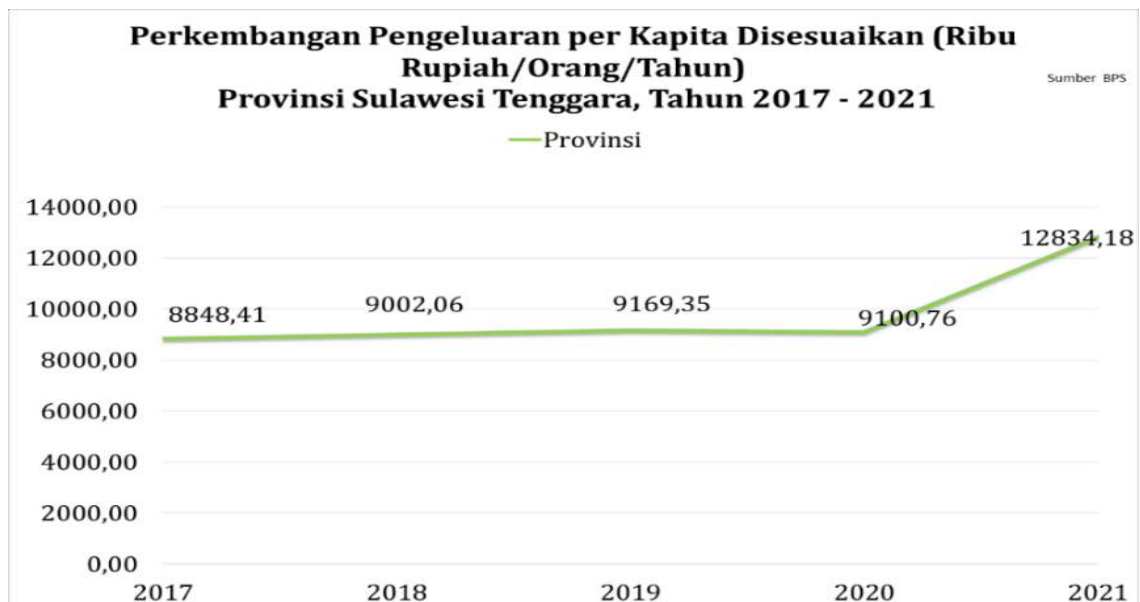
Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pengeluaran perkapita terbesar di tahun 2021 adalah Kota Kendari yaitu sebesar Rp 14.360.000,00 per orang dalam satu tahun. Besaran ini menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 14.335.000,00 per orang dalam satu tahun. Kabupaten Kolaka menjadi Kabupaten kedua tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 12.530.000,00 per orang dalam setahun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp 12.515.000,00 per orang dalam setahun.



Gambar 2.25.
 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020
 Sumber: BPS, diolah oleh Penyusun, 2021

Pengeluaran per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2017 - 2021 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 mencapai Rp 8.848.410 meningkat pada tahun 2018 mencapai Rp 9.002.060, tahun 2019 mencapai Rp 9.169.350, menurun tahun 2020 menjadi Rp 9.100.760, dan kembali meningkat tahun 2021 mencapai Rp 12.834.180. Perkembangan Pengeluaran per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2017 – 2021 disajikan pada grafik berikut:



Gambar 2.26.
Perkembangan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah/orang/tahun)
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 – 2021

Jika dilihat dari grafik di atas tentang Pengeluaran per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019, namun menurun pada tahun 2020, kembali meningkat tahun 2021. Pada tahun 2021 mengalami perbaikan dalam membuat strategi untuk meningkatkan Pengeluaran per Kapita dan program yang dijalankan sudah berjalan lebih efektif dari tahun – tahun sebelumnya sehingga secara berturut turut Pengeluaran per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan. Maka dapat dikatakan bahwa Pengeluaran per Kapita di Sulawesi Tenggara memiliki tren cenderung naik, hal ini berarti kebijakan yang dilakukan dalam mendorong penuntasan Pengeluaran per Kapita berjalan efektif.

2.2.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran. Jumlah Angkatan Kerja Sulawesi Tenggara pada Tahun 2017 sebanyak 1.200.605 orang, mengalami kenaikan hingga tahun 2020 sehingga menjadi sejumlah 1.351.092 orang. Penduduk yang bekerja pada tahun 2020 sebanyak 1.289.232 orang meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 1.217.983 orang.

Tabel 2.32.
Penduduk Usia 15 tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2020

Kegiatan Utama	2017	2018	2019	2020
Penduduk Usia Kerja	1.747.544	1.788.875	1.828.884	1.934.802
Angkatan Kerja	1.200.605	1.248.212	1.263.275	1.351.092
– Bekerja	1.160.974	1.207.488	1.217.983	1.289.232
– Pengangguran	39.631	40.724	45.292	61.860
Bukan Angkatan Kerja	546.939	540.663	565.609	583.710
– Sekolah	162.205	165.099	158.091	156.624
– Mengurus Rumah Tangga	331.001	318.807	351.655	363.818
– Lainnya	53.733	56.757	55.863	65.268
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	68,7	68,75	69,11	69,83
Tingkat Pengangguran (persen)	3,30	3,19	3,52	4,58

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2021

Terkait dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), TPAK di Sulawesi Tenggara berfluktuasi, meskipun menunjukkan tren positif. TPAK pada 2017 tercatat sebesar 68,75 persen terus meningkat hingga tahun 2020 sebesar 69,83 persen. TPAK yang fluktuatif memberikan indikasi adanya potensi ekonomi yang masih belum stabil dalam hal pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Tabel 2.33.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021

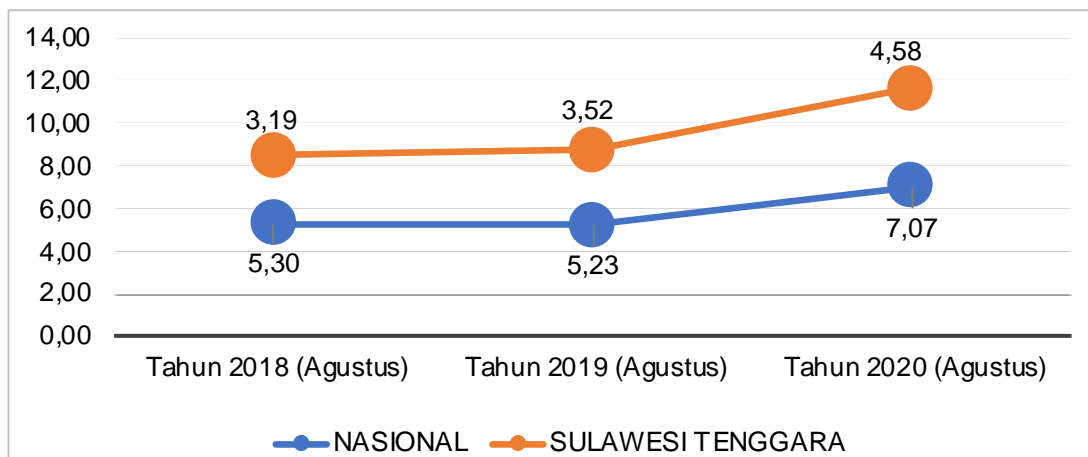
No.	Kabupaten/ Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			
		2018	2019	2020	2021
1.	Buton	70,44	65,81	65,34	64.42
2.	Muna	64,30	65,17	63,21	66.50
3.	Konawe	70,82	68,50	68,24	70.00
4.	Kolaka	69,68	70,42	72,27	69.83
5.	Konawe Selatan	74,63	71,67	71,15	71.98
6.	Bombana	71,91	71,17	72,35	72.77
7.	Wakatobi	71,02	69,65	68,07	70.63
8.	Kolaka Utara	74,00	79,66	82,23	79.76
9.	Buton Utara	75,29	72,16	76,52	75.63
10.	Konawe Utara	75,52	69,26	74,45	70.60
11.	Kolaka Timur	78,08	77,47	77,68	74.79
12.	Konawe Kepulauan	76,62	68,15	70,49	70.76
13.	Muna Barat	77,97	62,35	74,21	71.96
14.	Buton Tengah	63,24	67,13	65,37	63.93
15.	Buton Selatan	62,53	65,18	72,66	73.40
16.	Kota Kendari	61,69	64,80	64,11	65.34
17.	Kota Baubau	68,24	66,36	65,16	68.95
SULAWESI TENGGARA		69,75	69,11	69,83	70.09

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara menunjukkan tren yang beragam. Tahun 2018, TPAK tertinggi di Kabupaten Kolaka Timur sebesar 78,08 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 77,47 persen dan pada tahun 2020 naik kembali menjadi 77,68 persen dan tahun 2021 menurun sebesar 74.79. Tahun 2021 Kabupaten Kolaka Utara menjadi Kabupaten dengan TPAK tertinggi yaitu sebesar 79,76 persen. Sedangkan TPAK terendah pada tahun 2021 adalah Kabupaten Buton Tengah sebesar 63,93 persen.

2.2.2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Secara nasional, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2019 yaitu dari 5,30 persen menjadi 5,23 persen. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan pesat pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,07. Hal ini dikarenakan adanya pandemik Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan ekonomi mengalami kelumpuhan sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, sehingga meningkatkan angka pengangguran. Begitu juga di Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tahun 2020 mengalami peningkatan tingkat pengangguran secara pesat yaitu sebesar 4,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3,52 persen. Sedangkan tahun 2021 menurun menjadi 3,92 persen dan menurun lagi ditahun 2022 sebesar 3,36 persen.



Gambar 2.27
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2021

Tabel 2.34.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/ Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Buton	1,67	1,29	4,78	4,74	2,99
2.	Muna	5,26	4,63	6,45	4,97	3,11
3.	Konawe	2,27	3,01	5,42	4,56	2,73
4.	Kolaka	2,19	3,61	5,29	3,62	4,17
5.	Konawe Selatan	2,59	2,21	2,58	2,14	2,95
6.	Bombana	–	2,42	2,74	3,17	1,47
7.	Wakatobi	2,38	2,43	4,18	2,30	3,53
8.	Kolaka Utara	1,55	1,37	2,13	3,18	2,86
9.	Buton Utara	1,78	2,64	4,11	3,00	2,10
10.	Konawe Utara	3,57	3,84	3,79	3,36	2,01
11.	Kolaka Timur	2,73	3,14	3,29	3,44	2,22
12.	Konawe Kepulauan	1,12	1,79	1,55	1,83	1,85
13.	Muna Barat	2,6	3,1	3,36	2,84	2,40
14.	Buton Tengah	4,14	4,03	4,22	3,77	2,63
15.	Buton Selatan	3,44	3,59	3,9	3,92	4,18
16.	Kota Kendari	6,00	6,09	7,08	5,19	5,23
17.	Kota Baubau	5,76	5,68	6,57	6,87	5,39
SULAWESI TENGGARA		3,19	3,52	4,58	3,92	3,36

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menunjukkan tren yang beragam. Tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Kota Kendari sebesar 6,00 sedangkan pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Kota Baubau sebesar 5.39 persen, Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah pada tahun 2018 adalah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 1,12 persen sedangkan pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka terendah berada di Kabupaten Bombana sebesar 1.47 persen.

Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara hampir semua mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap angka pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi berada di Kota Kendari yaitu sebesar 7,08.



Gambar 2.28
 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Fokus Urusan Pelayanan Wajib Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

a. Indeks Pendidikan

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah pula.

Tabel 2.35.
Tabel Indeks Pendidikan Sulawesi Tenggara

Indikator	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Indeks Pendidikan	63,57	64,52	65,31	66,55

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra, 2021.

Capaian indeks pendidikan cenderung meningkat, masing-masing 63,57 persen (2015); 64,52 persen (2016); 65,31 persen (2017); dan 66,55 (2018). Peningkatan ini, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Sulawesi Tenggara sehingga berdampak produktifitas ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

b. Rata- rata lama sekolah dan harapan Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. Harapan lama sekolah (HLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 tahun ke atas di masa yang akan datang.

Tabel 2.36.
Tabel Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SULAWESI TENGGARA	8.69	8.91	9.04	9.13	9.25
Bombana	7.54	7.74	8.03	8.04	8.05
Buton	7.50	7.51	7.71	7.92	8.25
Buton Selatan	7.07	7.32	7.53	7.54	7.64
Buton Tengah	7.28	7.29	7.30	7.31	7.33
Buton Utara	8.54	8.75	8.92	8.93	9.11
Kolaka	8.57	8.76	8.98	8.99	9.06
Kolaka Timur	7.18	7.35	7.56	7.84	8.15
Kolaka Utara	7.67	7.86	8.12	8.22	8.54
Konawe	8.94	9.14	9.15	9.21	9.30
Konawe Kepulauan	9.17	9.18	9.41	9.42	9.43
Konawe Selatan	7.73	7.74	7.86	8.11	8.27
Konawe Utara	8.81	8.97	9.21	9.30	9.53
Kota Baubau	10.13	10.37	10.64	10.91	10.92
Kota Kendari	11.69	11.94	12.20	12.51	12.52
Muna	8.19	8.35	8.36	8.46	8.52
Muna Barat	6.76	6.77	7.01	7.30	7.60
Wakatobi	7.72	7.73	7.94	8.16	8.50

Sumber: BPS RI 2022

Tabel 2.37.
Tabel Harapan Lama Sekolah Tahun 2018-2022

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
SULAWESI TENGGARA	13.53	13.55	13.65	13.68	13.69
Bombana	11.82	11.83	11.84	11.85	11.89
Buton	13.53	13.74	13.75	13.76	13.87
Buton Selatan	12.56	12.94	13.23	13.24	13.25
Buton Tengah	12.35	12.70	13.00	13.12	13.18
Buton Utara	12.74	12.75	12.76	12.92	12.99
Kolaka	12.39	12.80	12.81	12.83	13.02
Kolaka Timur	11.89	12.15	12.41	12.69	12.69
Kolaka Utara	12.09	12.10	12.11	12.15	12.16
Konawe	12.98	12.99	13.00	13.01	13.03
Konawe Kepulauan	11.59	11.81	12.06	12.32	12.53

Kab/Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Konawe Selatan	12.23	12.24	12.36	12.37	12.59
Konawe Utara	12.33	12.54	12.83	13.08	13.11
Kota Baubau	14.80	14.81	15.16	15.17	15.18
Kota Kendari	16.20	16.28	16.62	16.89	16.90
Muna	13.77	13.78	13.79	13.80	14.01
Muna Barat	12.13	12.20	12.50	12.51	12.61
Wakatobi	13.15	13.20	13.50	13.51	13.51

Sumber: BPS RI 2022

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Perkembangan capaian Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, diperlihatkan dalam tabel berikut ini

Tabel 2.38.
APK SMA/SMK/MA di Provinsi Sulawesi Tenggara (Persen) Tahun 2018-2022

Indikator	Persentase Capaian APK (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Kasar (A P K) SM/SMK/MA/Paket C	84.83	86.81	87.74	89.50	89.14

Sumber: Susenas BPS, 2022

Capaian Angka Partisipasi Kasar Jenjang Menengah pada Provinsi Sulawesi Tenggara cenderung pluktuatif yaitu masing-masing 84,83 persen (2018); 86,81 persen (2019); 87,74 persen (2020); 89,50 persen (2021); 89,14 persen (2022).

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Tabel 2.39.
APM SMA/SMK/MA Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022 (Persen)

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	62,87	62,92	63,41	63,70	64,11

Sumber: Susenas BPS, 2022

Secara umum dalam rentang tahun 2018- 2022, Perkembangan APM SMA/Sederajat di Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan, yaitu masing-masing 62,87 (2018); 62,92 (2019); dan 63,41 (2020); 63,70 (2021); 64,11 (2022): Peningkatan APM ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan SMA/ Sederajat.

e. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.40.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022 (Persen)

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Sekolah 16-18 Thn	73.47	73.94	74,03	72,67	72.94

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Perkembangan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sulawesi Tenggara untuk APS -18 Tahun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi sudah semakin tinggi, karena jenjang pendidikan menengah pada umumnya disyaratkan pada dunia kerja formal.

f. Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK

Tantangan upaya pemenuhan pendidikan salah satunya adalah permasalahan adanya anak sekolah yang mengalami putus sekolah sebelum menuntaskan pendidikannya dengan berbagai alasan seperti tidak ada biaya, karena bekerja, ataupun alasan lain. Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.

Tabel 2.41.
Angka Putus Sekolah SMA/SMK Tahun 2016-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019
Angka Putus SMA	0,46	0,44	0,49	0,45
Angka Putus SMK	1,05	1,68	1,41	0,46
Jumlah	1,51	2,12	1,9	0,91

Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikbud 2020/2021

Pada Tahun 2016-2019 di Sulawesi Tenggara Angka Putus Sekolah pada jenjang SMA/SMK menunjukkan penurunan, yaitu masing-masing 1,51 persen (2016); sedangkan 0,91 (2019).

g. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolak ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Angka kelulusan tinggi bisa pula dianggap sebuah prestasi sehingga kebanggaan bagi sekolah yang bersangkutan. Tidak sampai disitu, angka kelulusan yang tinggi bisa juga menjadi bahan promosi untuk menarik minat calon siswa baru. Tidak mengherankan angka kelulusan ini menjadi begitu penting dan berharga bagi sekolah, terlebih apabila diumumkan sebagai sekolah dengan tingkat kelulusan atau nilai tertinggi. Kelulusan sebenarnya terkait erat dengan mutu pembelajaran, karena anak dapat lulus jika daya serap mereka cukup bagus, sehingga lulus ujian akhir yang diikuti. Oleh

karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan akan paralel dengan peningkatan mutu pembelajaran.

Perkembangan Angka kelulusan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2019 sebagai berikut:

Tabel 2.42.
Angka Kelulusan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2019

TAHUN	SMA (persen)	SMK (persen)
2017	97,97	93,10
2018	97,45	91,98
2019	97,51	93,28
2020	99,77	99,56

Sumber: Pusat Data Dan Statistik Pendidikan Kemdikbud 2020/2021

Angka kelulusan sekolah setingkat SMA/SMK dalam empat tahun terakhir (2017- 2020) mengalami peningkatan, yaitu di SMA 97,97 persen (2017); dan 93,10 persen (2020). sedangkan SMK 93,10 persen (2017); 99,56 persen (2020);). Hal ini memberikan gambaran adanya peningkatan kualitas jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di Sulawesi Tenggara, Hal ini disebabkan secara umum angka kelulusan meningkat mendekati angka sempurna yaitu 100 persen.

Tabel 2.43.
Angka Tingkat Penyelesaiannya Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan (SMA/Sederajat)	67.75	67.67	64.26	68.28	70.65

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, PDSPK 2021

Angka Tingkat penyelesaian pendidikan sekolah setingkat SMA/SMK dalam empat tahun terakhir (2017- 2021) mengalami peningkatan, yaitu di SMA/ sederajat Tahun 1017 dengan jumlah 67,75 persen, Tahun 2018 berjumlah 67,67 persen, Tahun 2019 berjumlah 64,26 persen, Tahun 2020 berjumlah 68,28 persen, Tahun 2021 berjumlah 70,65 persen.

h. Angka Anak Tidak Sekolah.

Perkembangan Angka Anak Tidak Sekolah Usia 16-18 Tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.44.
Capaian Angka Anak Tidak Sekolah Usia 16-18 tahun di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Anak Tidak Sekolah Usia 16-18 tahun (%)	27,06	26,53	25,97	25,5	24,96	25,47

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, PDSPK 2021

i. Angka Melanjutkan Sekolah

Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.45.
Capaian Angka Melanjutkan (AM) Sekolah Dasar hingga Menengah Atas di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017/2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	96,45	99,07	99,07	103,08	102,07	-	102,82

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, PDSPK 2020

j. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Pendidikan adalah semua sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas pembelajaran. Kondisi Bangunan Sekolah di Sulawesi Tenggara digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.46.
Fasilitas Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Ruang Kelas Baik Terhadap Ruang Kelas (SMA)	38,77	24,65	56,27	48,44	52,15
Persentase Ruang Kelas Baik Terhadap Ruang Kelas (SMK)	N/A	23,13	45,59	49,50	50,41
Persentase Ruang Kelas Baik Terhadap Ruang Kelas (SLB)	N/A	13,66	37,03	32,92%	38,69

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, PDSPK Tahun 2020

k. Guru Sertifikasi

Untuk melihat jumlah guru yang sudah tersertifikasi, dapat dilihat pada tabel 2.39 berikut:

Tabel 2.47.
Data Sertifikasi Guru SMA, SMK dan SLB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022

Jenjang	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
S M A	3670	3640	3417	3368	3378
S M K	1540	1456	1416	1399	1453
S L B	130	90	91	91	89

Selama tahun 2018-2021 jumlah Guru SMA/SMK dan SLB yang sudah tersertifikasi trennya menurun, hal ini disebabkan karena banyak Guru SMA/SMK dan SLB yang sudah pensiun. Pada tahun 2022 Guru SMA/SMK dan SLB yang sudah tersertifikasi sudah mulai mengalami peningkatan dari tahun 2021.

Tabel 2.48
Persentase Guru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan \geq DIV Atau S1

Jenjang	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
SMA	N/A	90,75	98,36	99,03	99,03
SMK	N/A	93,03	96,82	96,92	96,74
SLB	N/A	86,61	87,44	72,04	90,13

Sumber: Statistik Persekolahan SMA, SMK DAN SLB , Pusdatin Kemendikbud Ristek 2023

Dari table diatas menunjukkan peningkatan jumlah Guru yang kualifikasi pendidikannya diatas DIV atai S1 terjadi di ketiga jenjang pendidikan yakni SMA, SMK dan SLB

l. Kondisi Mutu Pendidikan

Kondisi mutu pendidikan, dilihat dari kondisi tenaga pendidik, sekolah, sarana dan prasarana sekolah serta kepala sekolah. Berikut ini merupakan Kondisi Mutu Pendidikan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022

Tabel 2.49.
Data Sarana dan Prasarana SMA, SMK dan SLB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022

No	Kondisi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Guru Jenjang SLB	Jumlah	590	527	545	557	606
2.	Jumlah Guru Jenjang SMA	Jumlah	6.420	6.602	6.885	6.718	7.603
3.	Jumlah Guru Jenjang SMK	Jumlah	3.214	2.666	2.458	3.248	3.629
4.	Jumlah Kepala Sekolah SMA	Jumlah	281	281	291	309	322
5.	Jumlah Kepala Sekolah SMK	Jumlah	148	152	153	171	174
6.	Jumlah Laboratorium SMA	Jumlah	613	758	857	864	872
7.	Jumlah Laboratorium SMK	Jumlah	189	190	268	241	250

No	Kondisi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
8.	Jumlah Perpustakaan SMA	Jumlah	260	294	324	291	287
9.	Jumlah Perpustakaan SMK	Jumlah	111	101	146	126	120
10.	Jumlah Rombel SMA	Jumlah	3.384	3.328	3.348	3.366	3.251
11.	Jumlah Rombel SMK	Jumlah	1.567	1.272	1.649	1.719	1.604
12.	Jumlah Ruang Kelas SMA	Jumlah	3.456	3.753	4.187	3.661	3.547
13.	Jumlah Ruang Kelas SMK	Jumlah	1.520	1.333	1.884	1.643	1.594
14.	Jumlah Sekolah SLB	Jumlah	71	75	76	78	82
15.	Jumlah Sekolah SMA	Jumlah	293	299	299	309	322
16.	Jumlah Sekolah SMK	Jumlah	158	163	165	171	174
18.	Jumlah Tenaga Kependidikan SMA	Jumlah	613	675	671	941	941
19.	Jumlah Tenaga Kependidikan SMK	Jumlah	311	300	297	444	444

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

m. SPM Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM), menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya dibidang pendidikan berwenang terhadap penyelenggaraan SPM Pendidikan Menengah dan Pendidikan khusus/layanan khusus, hal ini juga diperkuat dengan adanya Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 yang mengatur tentang Standar teknis pelayanan minimal bidang Pendidikan.

Tabel 2.50.
Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Kinerja				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	N/A	74,04%	74,50%	83,37%	85,64%
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	N/A	73,71%	77,94%	77,63%	79,29%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan partisipasi anak usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang Pendidikan menengah, begitupun dengan anak usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas (Pendidikan Khusus), walau ditahun 2021 pendidikan khusus ini ada penurunan sebesar 0,31% dari tahun 2020, tetapi secara umum selama 4 (empat) tahun terakhir rata-rata terjadi kenaikan, artinya dari 2 (dua) komponen pelayanan dasar yakni Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pemerintah Provinsi Sulawesi mampu menarik masyarakat untuk Kembali ke sekolah.

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

a. Upaya Kesehatan

- 1) Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota.

Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan melalui pendampingan dan bimbingan teknis pra akreditasi dan pasca akreditasi terhadap seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada. Tujuannya adalah untuk peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem

manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko. Tahapan akreditasi ini secara nasional dimulai sejak tahun 2014, namun baru terlaksana di Sulawesi Tenggara pada tahun 2016 yang diawali dengan tahapan pemetaan dan road map persiapan lokasi fokus puskesmas untuk diakreditasi dimana 4 puskesmas dilakukan tahapan survey akreditasi. Capaian akreditasi Puskesmas hingga tahun 2021 telah mencapai 263 puskesmas atau 90,06%, terdiri dari puskesmas yang terakreditasi dengan tingkat dasar sebanyak 93 puskesmas, tingkat madya sebanyak 141 puskesmas, tingkat utama sebanyak 27 puskesmas dan puskesmas yang terakreditasi tingkat paripurna baru 2 puskesmas. Dan masih tersisa 29 puskesmas dari 8 kabupaten/kota yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti akreditasi di tahun berikutnya. Untuk akreditasi Rumah Sakit di tahun 2020 telah mencapai 30 rumah sakit dari 34 rumah sakit milik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI/Polri, BUMN dan swasta. Adapun RS milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 100% telah terakreditasi. Kendati secara umum seluruh fasyankes telah memperoleh akreditasi, namun status akreditasinya dominan berada pada level dasar dan madya. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang dilaksanakan baru terpenuhi 25-53% sesuai standar. Artinya setiap fasilitas pelayanan kesehatan tetap mengupayakan peningkatan sekaligus menjaga kelestarian manajemen dan mutu pelayanan termasuk dukungan melalui bimbingan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan Provinsi secara berjenjang dan berkala.

Peningkatan kapasitas rumah sakit menjadi tantangan tersendiri khususnya menghadapi lonjakan kasus covid-19 yang kemungkinan terjadi setiap saat ditambah lagi dengan penanganan pasien penyakit lainnya yang juga tidak sedikit jumlahnya. Secara umum data tahun 2020, rasio daya tampung atau jumlah tempat tidur rumah sakit dibandingkan dengan jumlah penduduk di Sulawesi Tenggara sebesar 0,88:1.000. Artinya per 1.000 penduduk, hanya tersedia 0,88 tempat tidur perawatan di rumah sakit. Saat ini, dengan populasi 2,6 juta jiwa, di Sulawesi Tenggara terdapat sekitar 2.306 tempat tidur perawatan di rumah sakit. Rasio daya tampung rumah sakit yang telah memenuhi standar 1:1.000 adalah RSUD Bahteramas 1,33, RSUD Kota Baubau 1,04 dan RSUD Konawe Utara 1,09.

Untuk meningkatkan perluasan jaminan kesehatan nasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui strategi SULTRA SEHAT mengembangkan kegiatan prioritas yaitu Jamkesda Sultra Sehat terintegrasi JKN-KIS. Jamkesda Sultra Sehat bertujuan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat Sulawesi Tenggara yang miskin/tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu secara bebas biaya melalui pelayanan kesehatan rujukan rawat inap tingkat lanjut kelas III dari puskesmas ke RSUD Kab/Kota dan dari RSUD Kab/Kota ke RSUD BLUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai jenis dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2020 sekitar 2.274.072 (86%) penduduk Sulawesi Tenggara telah terdaftar dan memiliki kartu JKN-KIS. Penduduk miskin dan tidak mampu yang memiliki jaminan dan telah mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan baik terdaftar sebagai PBI pusat, provinsi dan kabupaten/kota tercatat 1.651.115 (62%) jiwa. Siasanya adalah peserta mandiri 622.957 (24%) dan peserta yang belum memiliki jaminan adalah 375.773 (14%) jiwa. Berdasarkan data Susenas pada Maret 2022, tercatat 69,75% penduduk telah memiliki BPJS Kesehatan. Selain itu, ada yang memiliki Jamkesda (2,83%), asuransi swasta (0,16%), dan dibiayai perusahaan/kantor (1,06%). Masih terdapat 27,04% penduduk yang tidak memiliki jaminan kesehatan

Tabel 2.51.

Capaian Kinerja Pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) rujukan tingkat Daerah provinsi/ lintas Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	23,6	56,7	91,0	90,1	99.73
2.	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi (%)	47,4	73,7	100	26,3	100
3.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit (1:1000 Penduduk)	0,83	0,91	0,85	0,88	1.4
4.	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Fasilitas pelayanan kesehatan mutlak diperlukan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan di tingkat pertama/primer, sekunder dan tersier. Dalam kurun lima tahun terakhir fasilitas pelayanan kesehatan primer yakni puskesmas berkembang cukup signifikan, dari 280 unit pada tahun 2016 menjadi 292 unit di tahun 2020. Hal ini seiring dengan komitmen pemerintah yang terus berupaya meningkatkan akses masyarakat ke layanan kesehatan kepada masyarakat di seluruh wilayah. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat maka ketersediaan puskesmas minimal harus memenuhi rasio 1:30.000 penduduk, artinya satu puskesmas maksimal melayani 30.000 penduduk. Adapun di Sulawesi Tenggara, rasio puskesmas di tahun 2020 telah mencapai 3:30.000 penduduk.

Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder dalam hal ini rumah sakit juga menunjukkan peningkatan dari 30 unit di tahun 2016 menjadi 37 unit di tahun 2020. Penambahan jumlah rumah sakit yang sangat signifikan adalah rumah sakit swasta, adapun rumah sakit milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota cenderung tidak bertambah. Bertambahnya rumah sakit tentunya harus diikuti dengan peningkatan mutu dan kualitas tenaga, sarana dan prasarana serta alat kesehatan yang sesuai dengan standar kebutuhan rumah sakit. Olehnya itu setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi persyaratan dan ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar dengan capaian minimal 70%. Hal ini untuk mendukung akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Rumah sakit dengan kelengkapan SPA tertinggi adalah RSUD Konawe 93,34%, RSUD Bahteramas 83,29% dan RSUD Baubau 80,49%. Kelengkapan SPA terendah adalah RSUD Buton Tengah 33,07%.

Tabel 2.52.
Fasilitas Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020

Jenis Fasilitas	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Puskesmas:					
- Puskesmas Perawatan	91	94	86	94	96
- Puskesmas Non Perawatan	189	186	196	195	196
Jaringan Puskesmas:					
- Puskesmas Keliling	141	132	159	152	152
- Puskesmas Pembantu	372	437	493	453	453
UKBM:					
- Posyandu	3.178	3.182	3.182	3.200	3.200
- Posbindu	586	1.039	1.182	1.430	1.430
Rumah Sakit:					
- RS Milik PemerintahProvinsi/Kab/Kota/ TNI/POLRI/BUMN	21	21	21	21	21
- RS Milik Swasta	8	14	14	14	15
- Rumah Sakit Jiwa	1	1	1	1	1
Jumlah Tempat Tidur (TT) RS Pemerintah	2.499	2.840	3.053	2.960	3.548
Rasio Puskesmas terhadap Penduduk	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan hanya 3 (tiga) rumah sakit. RSUD BLUD Bahteramas ditetapkan sebagai RS Rujukan Provinsi dan sebagai RS Rujukan Regional adalah RSUD Baubau dan RSUD BLUD Benyamin Guluh Kolaka. Hal ini berdasarkan SK Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK 02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional. Kedepan akan dilakukan usulan untuk menambah jumlah rumah sakit rujukan regional guna meningkatkan kemampuan optimal alur rujukan terutama terhadap kasus-kasus emergency yang membutuhkan penanganan lanjutan dengan lebih cepat dan tepat. Usulan penambahan RS Rujukan Regional ini dilakukan dengan merevisi wilayah binaan masing-masing rumah sakit rujukan tersebut. Kedua rumah sakit tambahan dimaksud adalah RSUD Kota Kendari dan RSUD Raha. Keempat rumah sakit rujukan regional tersebut akan mengampuh wilayah binaan sebagai berikut:

*Tabel 2.53.
Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara*

NO	Kab/Kota	RS Rujukan Regional	Wilayah Binaan Rujukan	
1	Kota Baubau	RSUD Palagimata	1. Kota Baubau 2. Kab. Buton	3. Kab. Busel 4. Kab. Wakatobi
2	Kab. Kolaka	RSUD Benyamin Guluh	1. Kab. Kolaka 2. Kab. Koltim	3. Kab. Kolut 4. Kab. Bombana
3	Kota Kendari	RSUD Kota Kendari (Usulan)	1. Kota Kendari 2. Kab. Konawe 3. Kab. Konse	4. Kab. Konut 5. Kab. Konkep
4	Kab. Muna	RSUD Raha (Usulan)	1. Kab. Muna 2. Kab. Buteng	3. Kab. Butur 4. Kab. Mubar

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2021

2) Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) daerah Provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di Provin Sulawesi Tenggara meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, kesehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan primer, Adapun capaian kinerja upaya kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 2.54.
Capaian Kinerja Pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) daerah Provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas daerah kabupaten/kota Tahun 2017-2021*

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH (AKI)*	145	117	128	119	244
2.	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH (AKB)*	9	9	9	9	8
3.	Prevalensi Balita Stunting (%)	36,4	28,7	31,44	18,49	16,4
4.	Angka Penemuan Kasus TB (Case Detection Rate) %	32	13,3	14,51	24	41,4
5.	Jumah Kasus infeksi HIV	134	134	191	322	285
6.	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Malaria	0	8	9	10	13
7.	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Kusta	0	6	9	11	12
8.	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap/IDL (%)	86,57	92,17	92,63	82,0	82
9.	Jumlah kasus penyakit jantung	12.189	16.737	14.843	5.830	-
10.	Jumlah Kabupaten/Kota memiliki regulasi KTR	12	15	17	17	17
11.	Persentase desa melaksanakan STBM (%)	17,2	46,4	51,8	67,5	67,79

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2021

Mewabahnya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 hingga saat ini sangat berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagian besar capaian kinerja program menurun namun ada juga yang naik atau cenderung tetap.

Angka Kematian Ibu (AKI) cukup fluktuatif dalam kurun waktu 2017-2021, dimana peningkatan yang signifikan terlihat pada tahun 2020 ke 2021, dimana angka kematian ibu melonjak naik sekitar 105% dari 119 menjadi 244 kematian per 100.000 KH. Angka ini masih jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu kurang dari 70 per 100 ribu kelahiran. Namun disapritas AKI tertinggi berturut-turut terdapat di Kabupaten Buton, Buton Utara dan Muna Barat, sementara AKI terendah dimiliki oleh Kabupaten Konawe Kepulauan dengan zero AKI. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kasus kematian ibu yang cukup signifikan di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi 117 kasus dari 61 kasus tahun sebelumnya, secara prevalensi angka tersebut masih sangat tinggi. Catatan kematian ibu tertinggi dilaporkan oleh Kabupaten Konawe Selatan dengan 91 kasus.

Kematian ibu pada tahun 2021 ini umumnya disebabkan oleh penyebab-penyebab lain (Retensio Urine, Asma Bronkial, Febris, Post Sectio Caesarea, sesak nafas, Dekompensasi Cordis, Plasenta Previa, komplikasi TBC, gondok, gondok beracun, TBC), diikuti oleh perdarahan, Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK), infeksi, gangguan metabolisme dan gangguan sistem peredaran darah. Tingginya AKI di sebagian Kabupaten/Kota disebabkan berbagai hal, diantaranya kondisi wilayah, kesadaran masyarakat terutama ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan secara rutin, serta situasi pandemi covid 19 pada tahun 2020 yang belum reda, yang cukup membatasi mobilitas baik masyarakat maupun tenaga kesehatan.

Salah satu tujuan pelayanan kesehatan bayi adalah menekan jumlah kematian bayi. Angka Kematian Bayi (AKB) memberikan gambaran kesehatan bayi yang sesungguhnya karena diperoleh dari perbandingan jumlah kematian bayi berusia di bawah 1 (satu) tahun per 1000 kelahiran yang terjadi setiap tahunnya. Dari tabel terlihat angka kematian bayi menunjukkan tren fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 terjadi lonjakan AKB dari 3 menjadi 9. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian definisi operasional yang digunakan, dimana pada tahun 2019 kematian neonatal tidak masuk dalam perhitungan. AKB tertinggi terdapat di Kabupaten Kolaka, sementara yang terendah adalah kabupaten Konawe Utara. Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2021 adalah 411 kasus, dimana jumlah ini sudah termasuk dengan jumlah kematian neonatal yaitu bayi yang baru lahir sampai berusia 28 hari.

Stunting (pendek dan sangat pendek) adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Ini terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun atau 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pemerintah pusat telah menetapkan target stunting secara nasional adalah 14% pada tahun 2024, sementara pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan penurunan angka stunting menjadi 15%. Dari hasil Survey Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2016 dan 2017, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 dan hasil integrasi survei kesehatan nasional (SUSENAS) dan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Pada tahun 2022, SSGI merilis prevalensi balita stunting di Sulawesi Tenggara sebesar 27,7%, atau berhasil turun 2,5% dari tahun 2021. Namun angka ini masih berada di atas standar WHO yaitu 20% dan belum mencapai target di provinsi maupun nasional. Prevalensi balita stunting terendah tahun 2020 adalah Kota Kendari yaitu sebesar 19,5% dan tertinggi di Kabupaten Buton Tengah dengan tingkat prevalensi stunting 31,62%. Selain SSGI juga terdapat data dari aplikasi Sistem Informasi Gizi yaitu e-pggbm (electronic pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat) yang diperoleh dari petugas puskesmas dengan coverage penginputan data balita baru mencapai 40% dari seluruh sasaran balita di 292 puskesmas yang ada di Sulawesi Tenggara.

Salah satu indikator utama untuk menilai tingkat keberhasilan program pengendalian TB adalah menggunakan indikator angka penemuan kasus (*Case Detection Rate/CDR*). Capaian CDR Sulawesi Tenggara tahun selama lima tahun terakhir cenderung meningkat, dimana pada tahun 2021 merupakan capaian tertinggi sebesar 41,4%. Ini menunjukkan adanya konsistensi data dan membaiknya sistem pencatatan dan pelaporan data program, baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi, misalnya dengan adanya Program Indonesia Sehat melalui kunjungan rumah yang salah satu kegiatannya adalah pemantauan penderita TB yang berobat secara teratur dan tuntas. Akan tetapi, Untuk mengeliminir kasus baru, cakupannya diharapkan minimal 70 persen. Apabila proporsi pasien baru BTA+ dibawah 70 persen maka hal itu menunjukkan mutu diagnosis yang rendah dan kurang memberikan prioritas untuk menemukan pasien yang menular (Pasien BTA+). Rendahnya cakupan penemuan kasus TB ini juga dipengaruhi karena pandemi covid-19.

Kejadian kasus HIV/AIDS di Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, baik jumlah maupun wilayah penyebarannya. Berdasarkan data kumulatif dari tahun 2010 hingga 2021 tercatat jumlah kasus HIV/AIDS mencapai 2.030 kasus. Adanya peningkatan kasus yang ditemukan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain jumlah kasus yang terus bertambah akibat penularan atau masuknya penderita dari daerah lain ke Provinsi Sulawesi Tenggara, serta semakin bertambahnya jumlah layanan Tes dan Konseling HIV

(TKHIV) untuk meningkatkan cakupan tes HIV, sehingga semakin banyak orang yang mengetahui status HIV nya dan dapat segera mendapatkan akses layanan lebih lanjut yang dibutuhkan. Peningkatan cakupan tes HIV dilakukan dengan menawarkan tes HIV kepada ibu hamil, pasien IMS, pasien TB dan Hepatitis B atau C dan pasangan ODHA, serta melakukan tes ulang HIV 6 bulan sekali pada populasi kunci (pengguna napza suntik, pekerja seks, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki serta pasangan seksualnya dan waria). Penemuan kasus baru HIV/AIDS tahun 2021 sebanyak 422 kasus yang terdiri 285 kasus HIV dan 137 kasus AIDS. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, kasus HIV+ dan AIDS lebih banyak terjadi pada laki-laki baik itu HIV maupun AIDS yaitu hampir 3 kali lipat lebih banyak dari perempuan.

Indikator berikutnya yang menjadi capaian kinerja pelayanan kesehatan adalah jumlah kabupaten/kota eliminasi malaria. Morbiditas malaria yang dinilai melalui indikator *Annual Parasite Incidence* (API, <1 per 1.000 penduduk) menunjukkan penurunan pada tingkat provinsi dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021 tercatat 353 kasus malaria dan Angka Kesakitan Malaria (API) sebesar 0,1 yang termasuk dalam kategori rendah. Namun belum ada kabupaten/kota mencapai nol kasus penularan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sehingga dapat masuk kriteria eliminasi. Kabupaten Muna merupakan kabupaten dengan jumlah kasus malaria tertinggi, sementara Kabupaten Konawe Utara dan Konawe mencatat 0 kasus di tahun 2021. Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton merupakan daerah endemis malaria dan sampai saat ini belum bisa dieliminasi.

Eliminasi kusta hingga tahun 2020 telah mencapai 12 kabupaten/kota. Sesuai dengan tahapan eliminasi, enam kabupaten/kota lainnya yaitu Buton, Kolaka, Baubau, Konawe Utara dan Buton Tengah direncanakan akan tuntas eliminasi di tahun 2024. Jumlah kasus kusta yang terdaftar di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 sebesar 212 kasus, yang terdiri dari Kusta Pause Basiller dan Kusta Multi Basiller. Adapun proporsi dari kedua jenis kusta tersebut tertinggi pada jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 57,5% dan pada perempuan sebesar 42,5%. Penemuan kasus baru kusta terendah ada di Kabupaten Konawe Utara dengan 1 (satu) kasus, sementara Kota Baubau memiliki jumlah kasus tertinggi (47 kasus). Adapun untuk eliminasi tingkat provinsi, Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 telah mencapai status eliminasi dengan prevalensi kusta 0,8 per 10.000 penduduk, dimana angka ini sudah mencapai target nasional sebesar <1/10.000 penduduk.

Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada anak umur 0-11 bulan mengalami penurunan capaian dari 92,91% di tahun 2020 menjadi 82,13% pada tahun 2021. Jika ditinjau di tingkat kabupaten/kota, terdapat 6 kabupaten/kota yang telah memiliki capaian di atas 90% yaitu Kabupaten Konawe, Bombana, Buton Tengah, Kolaka Utara, Konawe Utara dan Buton Utara. Capaian IDL tertinggi di Kabupaten Buton Utara sebesar 96,3% dan terendah di Kabupaten Kolaka Timur sebesar 63,66%. Beberapa faktor yang mengakibatkan pencapaian Imunisasi dasar Lengkap (IDL) berada di bawah dari target indikator keberhasilan adalah ketidaklengkapan pemberian lima imunisasi dasar pada bayi, kurangnya pemahaman para Petugas imunisasi imunisasi tentang cara penentuan UCI desa, pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan imunisasi pada buku desa tidak lengkap serta keterlambatan distribusi vaksin. Selain itu, penurunan cakupan pada tahun terakhir juga disebabkan oleh pandemi Covid-19 dimana sebagian masyarakat memiliki kekhawatiran untuk memberikan suntikan imunisasi kepada bayi dan anaknya, serta keterbatasan ruang gerak petugas kesehatan selama masa pandemi.

Situasi penyakit tidak menular digambarkan dengan indikator penyakit Hipertensi dan Penyakit Jantung. Trend penyakit jantung di Sulawesi Tenggara terus meningkat sejalan dengan berubahnya pola penyakit sejak tahun 2016 terdapat 8.041 jiwa yang menderita penyakit jantung dan meningkat pada tahun 2017 sejumlah 12.159 jiwa. Kematian yang diakibatkan oleh gagal jantung sejumlah 60 jiwa pada tahun 2016 dan 53 jiwa pada tahun 2017. Dan hasil risekdas tahun 2018 prevalensi penyakit jantung menurut jenis kelamin di sultra untuk laki-laki sejumlah 1,34 % dan perempuan sejumlah 1,45 %.

Regulasi KTR adalah bagian dari upaya pengendalian dan pengamanan bahaya rokok terutama di kawasan sekolah dan tempat umum lainnya. Persentase Kabupaten/Kota yang

melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal di 50% sekolah yang ada di wilayah kabupaten/kota hingga tahun 2021 telah mencapai 100%. Hal ini merupakan upaya perlindungan terhadap anak usia sekolah yang menjadi perokok pemula, melalui role model perilaku sehat tanpa merokok dan agent of change (agen perubahan perilaku) dari kelompok sebaya. Sehingga pada akhirnya dapat menurunkan prevalensi perokok pemula. Peraturan KTR, bervariasi dari yang tertinggi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yaitu 7 kab/kota (Kota Kendari, Kab. Kolaka Utara, Kab. Muna, Kab. Konawe, Kab. Buton, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Kepulauan). Dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) di 8 kabupaten yaitu Bombana, Muna Barat, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Wakatobi, Buton Tengah, Buton Utara dan Buton Selatan. Adapun Kota Baubau berupa Instruksi Walikota, dan yang terendah melalui Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan yang ada di Kabupaten Kolaka. Diharapkan regulasi ini akan meningkat sehingga pada akhirnya memiliki Perda KTR di seluruh Kab/Kota atau minimal Perbup/Perwali.

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan upaya untuk mendukung pencapaian universal akses sanitasi layak bagi masyarakat Indonesia. Program pemicuan STBM mencakup lima pilar yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum/makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM terus meningkat setiap tahunnya yaitu 17,2% di tahun 2017 menjadi 67,79% di tahun 2020.

3) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang kewenangan provinsi terkait penerbitan izin rumah sakit tipe B serta Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020, menyebutkan bahwa izin mendirikan maupun izin operasional rumah sakit diterbitkan oleh lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *One Single Submission* (OSS) yakni dibawah koordinasi Lembaga Penanaman Modal Daerah. Satu satunya rumah sakit tipe B milik pemerintha provinsi yang mendapatkan izin operasioanal adalah RSUD Bahtermas dengan masa berlaku izin yaitu Tgl 5 Agust. 2019 s/d 5 Agust. 2024.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di daerah salah satunya dengan melihat jumlah tenaga kesehatan. Berikut ini gambaran ketersediaan tenaga kesehatan menurut kabupaten/kota lebih rinci dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55.
Cakupan Penyediaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021

No	Idikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tenaga Medis:					
	- Dokter Spesialis	223	318	214	286	273
	Rasio (standar 11: 100.000)	8	12	8	11	9.95
	- Dokter Umum	423	474	571	571	800
	Rasio (standar 45: 100.000)	16	18	21	23	29.6
	- Dokter Gigi	161	182	184	213	252
	Rasio (standar 13: 100.000)	6	7	7	8	9.18
3	Perawat	4,324	5.466	6.019	7.218	7,408
	Rasio (standar 180: 100.000)	164	206	223	275	270
4	Bidan	3.152	4.265	4.475	5.656	5,492
	Rasio (standar 120: 100.000)	120	161	165	215	200
5	Kefarmasian	641	791	957	1.157	1,191
	Rasio (standar 36: 100.000)	24	30	35	44	43.41
6	Kesehatan Masyarakat	866	1.336	1.414	1.918	1,978
	Rasio (standar 16: 100.000)	33	51	52	73	72.11
7	Kesehatan Lingkungan	355	393	431	484	474
	Rasio (standar 13: 100.000)	13	15	16	18	17.27
8	Gizi	639	412	648	771	750
	Rasio (standar 14: 100.000)	24	16	24	29	27.34
9	Keterampilan Fisik	-	57	76	9	100

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
10	Rasio (standar 5: 100.000)		2	3	4	3.65
	Keteknisian Medik	-	314	327	383	392
	Rasio (standar 16: 100.000)		12	12	15	14.29

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Sebagai gambaran, saat ini jumlah SDM Kesehatan yang bekerja pada seluruh Institusi Kesehatan di Sulawesi Tenggara berjumlah 19.1107 orang. Dari jumlah tersebut, jenis tenaga keperawatan menempati proporsi terbesar yakni 38,7% dan yang paling sedikit jumlahnya adalah tenaga keterampilan fisik yaitu 0,04%. Untuk menilai dan menentukan proyeksi ketersediaan, kebutuhan, dan kesenjangan kebutuhan SDM Kesehatan menurut jenis dan jumlah SDM Kesehatan tertentu adalah dengan menggunakan metode rasio. Data rasio SDM Kesehatan menggambarkan jumlah per jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk. Dengan mengacu pada standar target kebutuhan SDM Kesehatan jangka menengah (tahun 2014, 2019 dan 2025) berdasarkan Kepmenko Bidang Kesra No.54 tahun 2013 sebagaimana tercantum pada tabel 2.47, maka empat jenis tenaga strategis yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu dokter umum, dokter gigi, keperawatan dan kebidanan baru terpenuhi 50%. Hal ini menjadi tugas berat pemerintah daerah untuk berupaya memenuhi ketersediaan SDM Kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan, mengingat Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 menyebutkan untuk menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan hak yang sama memperoleh akses sumber daya kesehatan. Upaya pemenuhan tenaga kesehatan telah ditempuh melalui Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan pada Program Nusantara Sehat guna memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Pusat Kesehatan Masyarakat serta pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit yang membutuhkan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan per 31 Desember 2021, terdapat 72 (24,6%) puskesmas yang telah memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar dalam Permenkes Nomor 75 tahun 2014. Kota Baubau paling banyak memiliki puskesmas yang telah tersedia tenaga sesuai standar (82,4%), diikuti oleh Kota Kendari (66,7%). Terdapat 56 (19%) puskesmas dari 4 kabupaten yang sama sekali tidak memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar, juga terdapat 13 puskesmas (4,4%) yang sama sekali tidak ada dokter. Adapun ketersediaan tenaga medis 4 spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang di rumah sakit tipe C berdasarkan Permenkes 56 tahun 2014 baru terpenuhi 5 (36%) rumah sakit dari 14 rumah sakit tipe c di tahun 2020. Rumah sakit yang telah memenuhi standar tenaga spesialis dasar dan penunjang tersebut adalah RSUD Buton, RSUD Muna, RSUD Konawe, RSUD Benyamin Guluh Kolaka dan RSUD Kota Kendari.

Tabel 2.56.
Cakupan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Puskesmas dengan Jenis Nakes sesuai standar	7,45	7,45	24,6	24,6	41.35
2.	Persentase RSUD Kabupaten/Kota Tipe C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya (%)	-	28,6	36	36	41

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Obat dan vaksin adalah komoditi kesehatan yang menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan barang publik yang perlu dijamin ketersediaannya dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan. Pemantauan ketersediaan obat periode tahun 2016 – 2021 digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat ketersediaan obat di Puskesmas. Obat dan vaksin yang dipantau ketersediannya merupakan

obat indikator yang mendukung pelayanan kesehatan dasar dan terdapat didalam Formularium Nasional (Fornas). Kondisi rata-rata tingkat provinsi tahun 2021 sudah mencapai kondisi 100%.

Ada dua kewenangan provinsi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan UU 23 tahun 2014 yaitu penerbitan pengakuan pedangan besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) dan penerbitan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). PBF yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha sudah mencakup 100%, begitu pula dengan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan berusaha.

Tabel 2.57.
Cakupan Kinerja Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	7	4	6	5	100%
2	Persentase Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	3	2	2	3	100%
3	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	0	0	0	0	100%
4	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	57	47	90	85	100%

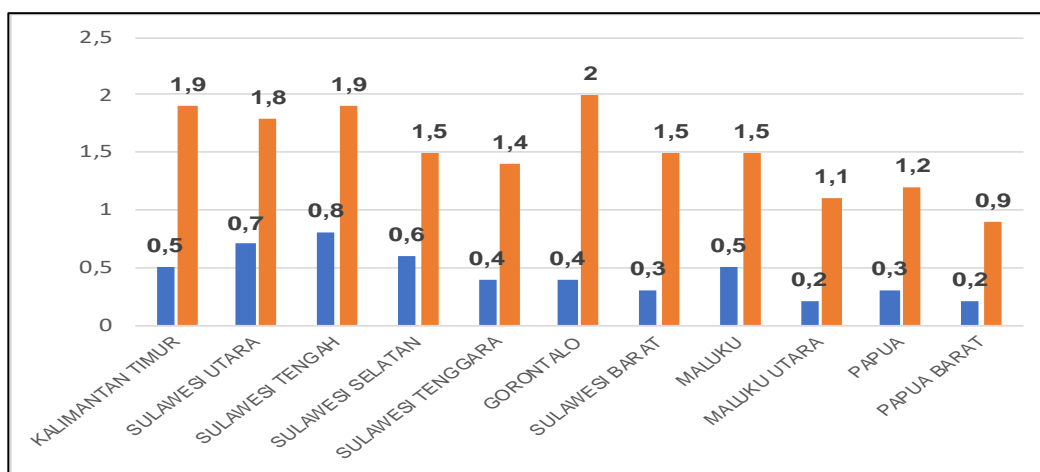
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

d. Derajat Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Angka kematian pada umumnya dapat dihitung dengan melakukan berbagai survei dan penelitian. Peristiwa kematian pada dasarnya merupakan proses akumulasi akhir dari berbagai penyebab kematian langsung maupun tidak langsung. Secara umum kejadian kematian pada manusia berhubungan erat dengan permasalahan Kesehatan sebagai akibat dari gangguan penyakit atau akibat dari proses interaksi berbagai factor yang secara sendiri sendiri atau Bersama-sama mengakibatkan kematian dalam masyarakat, Salah satu alat untuk menilai keberhasilan program pembangunan Kesehatan yang telah dilaksanakan selama ini adalah dengan melihat perkembangan angka kematian dari tahun ke tahun.

Prevalensi Hipertensi

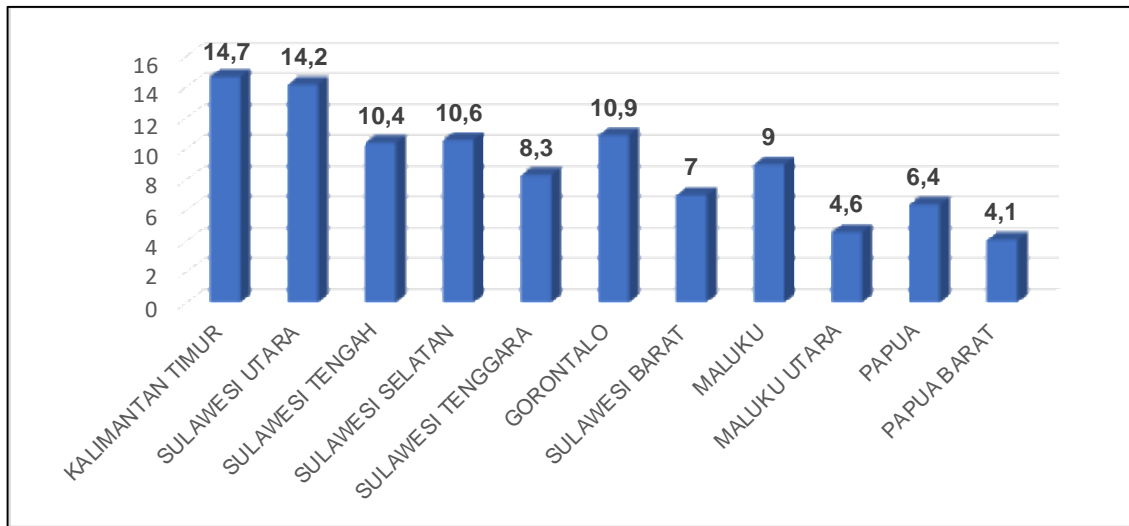
Prevalensi penyakit jantung di 11 Provinsi meningkat drastis pada tahun 2018, hal ini mendorong Provinsi Sulawesi Tenggara mengembangkan pembangunan Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah yang kedepannya dapat dijadikan Rumah Sakit Rujukan Regional Indonesia bagian Timur.



Gambar 2.29
Prevalensi Jantung 11 Propinsi Tahun 2013 sampai 2018
Sumber: Hasil Riskesdas Tahun 2013 dan 2018

Prevalensi Stroke

Prevalensi penyakit stroke di 11 Propinsi meningkat drastic pada tahun 2018 hal ini mendorong Propinsi Sultra mengembangkan pembangunan Rumah Sakit Jantung yang kedepannya dapat dijadikan Rumah Sakit Rujukan Regional Indonesia bagian Timur.



Gambar 2. 30
Prevalensi Stroke RISKESDAS Tahun 2013-2018
Sumber: Hasil Riskesdas Tahun 2013 dan 2018



Gambar 2.31
Kunjungan Pasien Jantung 2015-2019

Berdasarkan gambar diatas menunjukan jumlah kunjungan pasien baik itu rawat jalan dan rawat inap terakhir pada tahun 2018 sejumlah 17.917 kunjungan. Jika dilihat dari tahun 2015 kunjungan pasien jantung meningkat setiap tahunnya.

Rata-rata peningkatan setiap tahun 1.528 kunjungan sehingga untuk prediksi kunjungan tahun 2022 adalah sejumlah 24.029 kunjungan, dimana rata-rata kunjungan selama 4 tahun (2019 - 2022) ditambah dengan jumlah kunjungan terakhir pada tahun 2018. Jumlah pasien diprediksi untuk tahun 2022 dikarenakan rencana operasional Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yii Ko akan dioperasikan pada tahun 2022. Pasien rawat jalan rata-rata kenaikan setiap tahun sejumlah 1.471 kunjungan yang berarti prediksi kunjungan rawat jalan

pada tahun 2022 adalah 22.548 kunjungan pasien. Sedangkan untuk pasien rawat inap rata-rata kenaikan kunjungan setiap tahunnya sejumlah 58 kunjungan pasien rawat inap sehingga prediksi kunjungan tahun 2022 adalah sejumlah 1.481 kunjungan pasien rawat inap. Dari jumlah kunjungan pasien tersebut dapat dihitung prediksi pendapatan setiap tahun dengan biaya yang dikeluarkan oleh pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

e. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada SPM daerah provinsi yang wajib untuk dipenuhi 100 persen. Standar pelayanan pertama yaitu pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana. Dalam hal ini, layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selama tahun 2020 tercatat satu kali kejadian bencana banjir bandang. Musibah tersebut terjadi di Kabupaten Kolaka Utara, dimana 3 (tiga) kecamatan yang paling terdampak yaitu Kecamatan Lasusua, Kecamatan Rante Angen dan Kecamatan Wawo. Akibatnya 1.022 KK harus mengungsi karena rumah mereka terendam air dan lumpur. Pada tahun 2021, bencana yang terjadi di Sulawesi Tenggara yaitu banjir, tanah longsor, angin puting beliung (cuaca ekstrem) dan gelombang pasang. Bencana banjir masih menjadi bencana yang memiliki dampak terbesar yaitu 4 orang meninggal dan 14.996 penduduk terdampak dan mengungsi. Kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi penyediaan logistik, pembentukan pos kesehatan dan tenaga kesehatan untuk memberikan bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak. Capaian untuk standar pelayanan 100% untuk tahun 2021 dan 2022.

Kewajiban SPM provinsi kedua adalah pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi. Pelayanan ini merupakan pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB. Mewabahnya pandemi covid-19 sejak ditetapkan WHO pada tanggal 11 maret 2020 juga berdampak pada provinsi Sulawesi Tenggara. Resiko penularannya yang sangat mudah dan cepat diikuti dengan tingkat kematian yang cukup tinggi menjadikan penanganan dan pengendalian covid-19 memerlukan upaya yang ekstra keras dari pemerintah daerah bersama dengan seluruh elemen masyarakat. Sampai dengan 31 Desember tahun 2021, total kasus covid-19 yang terkonfirmasi di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 20,173 kasus dengan tingkat kesembuhan mencapai 19.639 kasus atau mencapai 93.75%. Adapun Pelayanan yang telah dilakukan antara lain adalah isolasi bagi pasien positif dengan gejala covid-19 di fasilitas kesehatan rujukan covid baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, karantina pasien positif tanpa gejala di fasilitas yang telah dipersiapkan khusus, pemberian multivitamin untuk meningkatkan imunitas tubuh baik pasien positif dengan gejala covid maupun tanpa gejala, penyediaan BMHP serta penyediaan sarana dan prasarana serta alat kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian penyebaran virus covid-19. Selain penanganan pandemi covid, juga dilakukan pelayanan kesehatan terhadap 295 pasien KLB difteri dan keracunan.

Tabel 2.58.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan SPM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100	100	100	100	100
2.	Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi	100	100	100	100	100

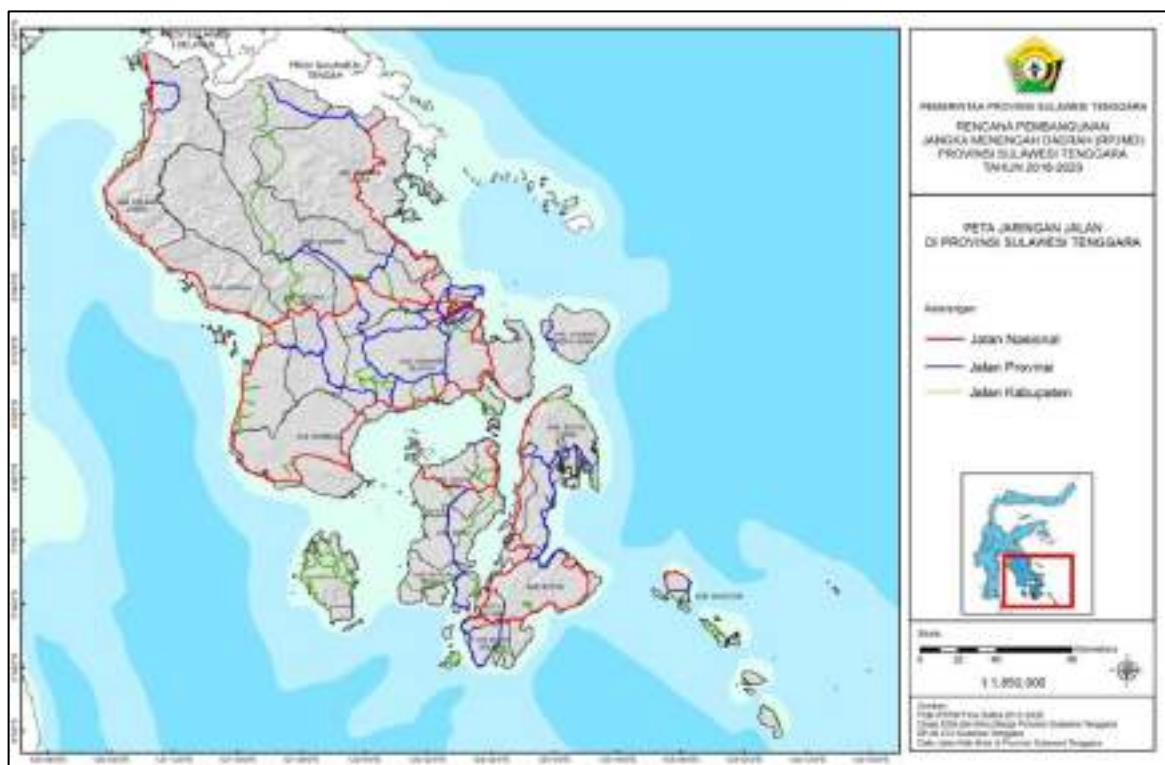
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Wilayah Sulawesi Tenggara sangat penting karena mempermudah akses transportasi, memfasilitasi aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain aspek fisik, pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Wilayah Sulawesi Tenggara akan menjadi lebih berkelanjutan dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, sanitasi, serta bangunan pelengkap kegiatan pemukiman lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Agar tetap mampu berperan dengan baik, infrastruktur jalan harus dijaga kualitasnya melalui pemeliharaan baik rutin maupun berkala. Dibidang pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan yang telah terbangun di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga tahun 2021 adalah 12.866,81 km, yang terbagi menjadi tiga klasifikasi status jalan yaitu 1.497,81 km jalan nasional (sesuai Kepmen PUPR No. 290/KPTS/M/2015), 1.009,28 km jalan provinsi (sesuai SK Gubernur Sulawesi Tenggara No. 511 Tahun 2015, dan 10.359,72 km jalan kabupaten/kota.



Gambar 2.32
Peta Jaringan Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: Dinas SDA Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara ,2020

Tabel di bawah menunjukkan informasi data dan kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021.

*Tabel 2.59.
Data dan Kondisi Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021*

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Status Jalan (Km)						
1.	Nasional	1.497,81	1.497,81	1.497,81	1.497,81	1.497,81
2.	Provinsi	1.009,28	1.009,280	1.009,28	1.009,28	1.009,28
3.	Kabupaten/ Kota	10.757	10.233,81	10.422,13	10.422,13	10.359,72
	Total Panjang (Km)	13.264,09	12.740,9	12.929,22	12.929,22	12.866,81
Jenis Permukaan (km)						
1.	Aspal	649,93	667,18	634,43	673,74	710,23
2.	Tidak diaspal	359,35	342,10	374,85	335,54	299,05
Kondisi Jalan						
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (persen)	31,48	56,6	53,51	42,57	47,72
2.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (persen)	71,88	75,07	78,13	78,64	81,79
3.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk (M/orang)	4,9	4,85	4,76	4,9	4,84

Sumber: Dinas SDA & Bina Marga Prov. Sultra, Balai Jalan Nasional XXI Sultra, BPS Provinsi Sultra Tahun 2022

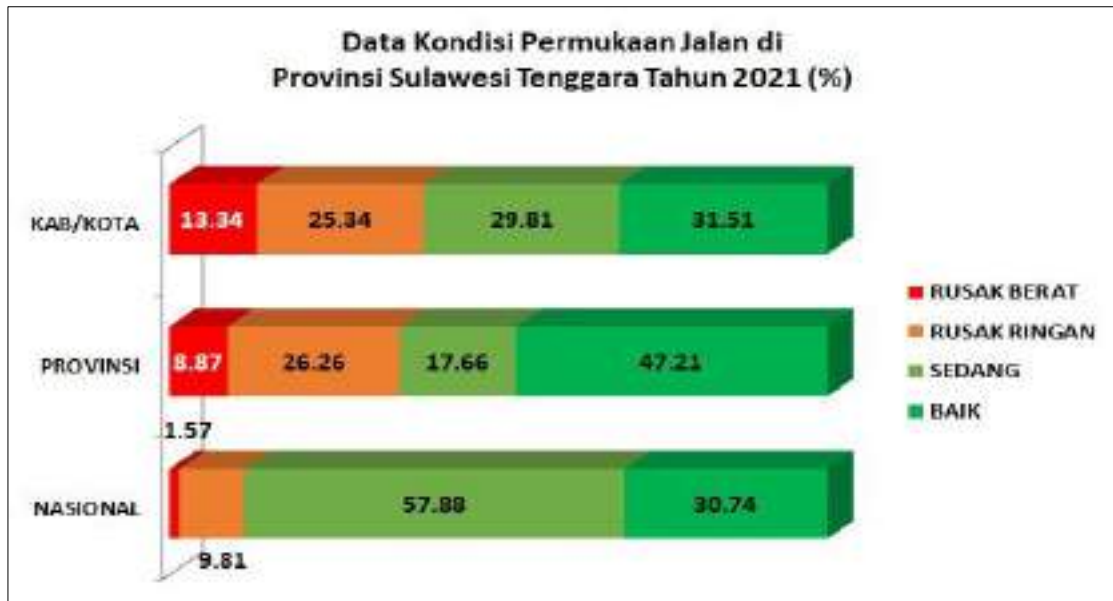
Tabel di atas menunjukkan informasi mengenai panjang jalan berdasarkan statusnya pada tahun 2017 sampai 2021 di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat tiga kategori status jalan yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Untuk jalan nasional, panjang jalannya tidak terjadi perubahan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2017 - 2021 yaitu sebesar 1.497,81 km. Sementara itu, untuk jalan provinsi juga memiliki panjang yang sama dalam kurun waktu lima tahun yaitu 1.009,28 km. Hal ini disebabkan karena tidak terjadi perubahan SK terkait penetapan ruas jalan, baik jalan nasional maupun jalan provinsi. Sedangkan untuk jalan kabupaten/kota, terjadi perbedaan panjang jalan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, panjang jalan kabupaten/kota sebesar 10.757 km, menurun pada tahun 2018 menjadi 10.233,81 km, kemudian naik pada tahun 2019 menjadi 10.422,13 km, dan tetap stabil pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 10.422,13 km dan 10.359,72 km. Secara umum, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2017 - 2021 panjang jalan nasional dan provinsi tetap sama, sedangkan panjang jalan kabupaten/kota mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya, penjelasan mengenai jenis permukaan jalan pada status jalan provinsi pada tahun 2017 sampai 2021. Terdapat dua jenis permukaan jalan yaitu permukaan aspal dan permukaan tidak diaspal. Untuk permukaan aspal, terjadi perubahan panjang jalan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, panjang jalan aspal sebesar 670,58 km, menurun pada tahun 2018 menjadi 667,18 km, kemudian naik pada tahun 2019 menjadi 673,74 km, dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 709,33 km dan tahun 2021 menjadi 733,85 km. Sedangkan untuk permukaan tidak diaspal, terjadi perubahan juga dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, panjang jalan tidak diaspal sebesar 338,70 km, meningkat pada tahun 2018 menjadi 342,10 km, kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 335,54 km, dan terus menurun pada tahun 2020 menjadi 299,95 km dan tahun 2021 menjadi 271,34 km. Secara umum, dapat diketahui bahwa panjang jalan aspal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan panjang jalan tidak diaspal mengalami penurunan. Ini menunjukkan adanya upaya untuk memperluas jalan dengan permukaan aspal dan memperbaiki kualitas jalan pada wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya terkait kondisi jalan, berdasarkan tabel ini diketahui informasi mengenai kondisi jalan pada status jalan provinsi pada tahun 2017 sampai 2021. Terdapat dua kondisi jalan yang menjadi fokus pembahasan yaitu Jalan dengan kondisi pelayanan baik dan Jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Untuk Jalan dengan kondisi pelayanan baik, terjadi perubahan proporsi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 31,48 persen, meningkat pada tahun 2018 menjadi 56,60 persen, kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 53,51 persen, dan terus menurun pada tahun 2020 menjadi 42,57 persen, namun naik pada tahun 2021 menjadi 47,72 persen. Untuk jalan provinsi dengan kondisi pelayanan mantap, terjadi peningkatan proporsi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, proporsi jaringan

jalan dalam kondisi mantap sebesar 71,88 persen, meningkat pada tahun 2018 menjadi 75,07 persen, kemudian meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 78,13 persen, dan terus meningkat pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing menjadi 78,64 persen dan 81,79 persen.

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap berarti ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Lawan dari jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah jalan dengan kondisi pelayanan tidak mantap yaitu jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Untuk penanganannya selain pemeliharaan rutin, diperlukan juga pemeliharaan berkala untuk pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Pada kondisi yang lebih parah, diperlukan penanganan berupa rehabilitasi untuk menangani kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain.



Gambar 2.33.
Kondisi Permukaan Jalan Berdasarkan Status Jalan Pada Tahun 2021
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara (diolah), 2022

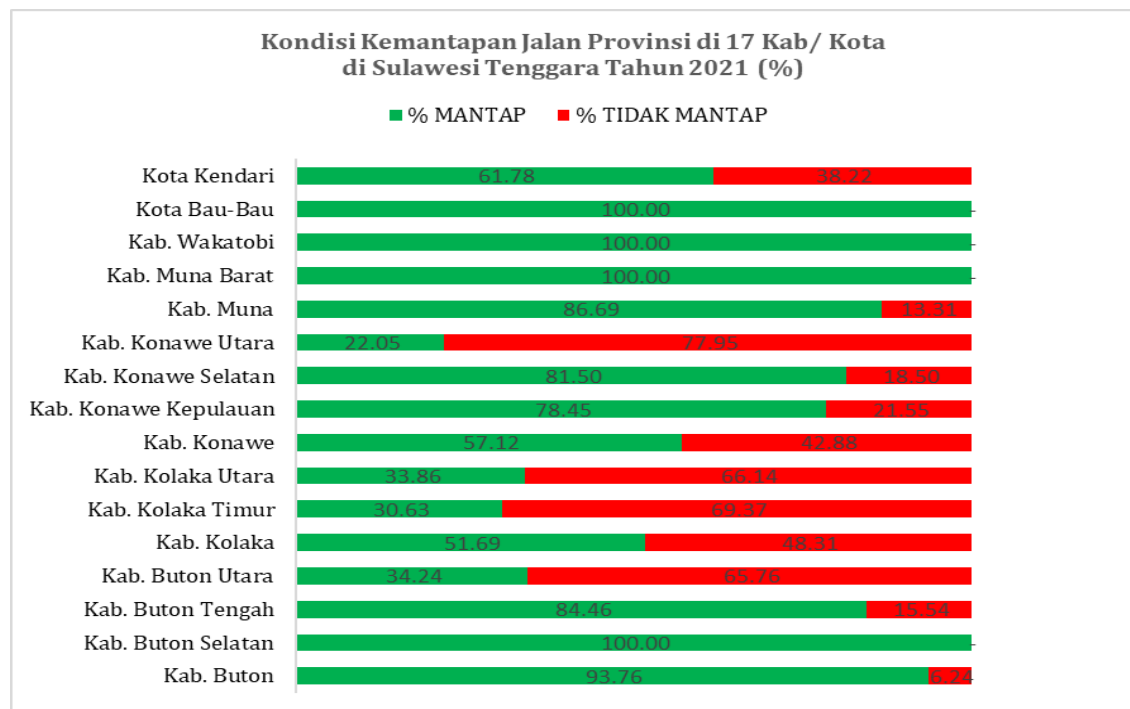
Berdasarkan data di atas menunjukkan distribusi persentase jenis permukaan jalan pada tahun 2021 berdasarkan status jalan (Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten/Kota) di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Data tersebut memberikan gambaran kualitas jalan pada tahun tersebut dan dapat memberikan dasar untuk membuat kebijakan dan program pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan.

- Persentase permukaan jalan kondisi baik pada jalan provinsi lebih tinggi dibandingkan jalan nasional dan jalan kabupaten/kota, yaitu sekitar 47,21% versus 30,74% dan 31,51%.
- Persentase permukaan jalan kondisi sedang pada jalan nasional lebih tinggi dibandingkan jalan provinsi dan lebih rendah dibandingkan jalan kabupaten/kota, yaitu sekitar 57,88% versus 17,66% dan 29,81%.
- Untuk permukaan jalan kondisi rusak ringan, persentase pada jalan provinsi lebih tinggi dibandingkan jalan nasional dan jalan kabupaten/kota, yaitu sekitar 26,26% versus 9,81% dan 25,34%.
- Persentase permukaan jalan kondisi rusak berat pada jalan kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan jalan nasional dan jalan provinsi, yaitu sekitar 13,34% versus 1,57% dan 8,87%.

Secara keseluruhan, jalan nasional memiliki kualitas permukaan jalan yang lebih baik dimana persentase jalan nasional yang dikategorikan sebagai jalan kondisi mantap mencapai 88,63%, lebih tinggi dibandingkan jalan provinsi sebesar 64,87% dan jalan kabupaten/kota sebesar 61,32%. Sementara itu, jalan kabupaten/kota memiliki persentase jalan kondisi tidak

mantap yang lebih tinggi yaitu sebesar 38,68% dibandingkan jalan nasional sebesar 11,37% dan jalan provinsi sebesar 35,13%.

Kondisi kemandapan jalan provinsi di seluruh wilayah kabupaten dan kota sudah menunjukkan angka yang cukup baik. Secara umum, dapat dilihat bahwa beberapa Kabupaten/Kota memiliki tingkat kemandapan jalan tinggi seperti Kota Baubau, Kab. Buton Selatan, Kab. Muna Barat, dan Kab. Wakatobi, di mana semua jalan kewenangan provinsi di wilayah tersebut dikategorikan sebagai mantap 100%. Namun, terdapat juga beberapa kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemandapan jalan yang rendah Contohnya, Kab. Buton Utara yang hanya memiliki tingkat kemandapan jalan sebesar 34,24%, serta Kab. Konawe Utara yang hanya memiliki tingkat kemandapan jalan sebesar 22,05%. Namun, secara keseluruhan, mayoritas Kabupaten/Kota memiliki tingkat kemandapan jalan dengan persentase jalan mantap yang berada antara 50% hingga 80%. Kota Kendari misalnya, memiliki 61.78% jalan yang dikategorikan sebagai mantap dan 38.22% jalan yang dikategorikan sebagai tidak mantap. Kondisi kemandapan jalan yang beragam ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang membutuhkan perhatian dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas jalannya. Hal ini penting untuk mempermudah aksesibilitas dan membantu meningkatkan ekonomi lokal. Kondisi kemandapan jalan provinsi pada wilayah 17 kabupaten dan kota dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.34.
Diagram Kondisi Kemandapan Jalan Provinsi di Wilayah Kabupaten dan Kota Tahun 2021
Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara (diolah), 2022

Infrastruktur fisik merupakan hal yang sangat penting bagi kelancaran dan kenyamanan dalam beraktivitas. Selain jalan, jembatan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam membangun infrastruktur fisik yang baik. Jembatan kewenangan provinsi adalah jembatan yang terletak di ruas jalan kewenangan provinsi.

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 571 buah jembatan kewenangan yang membantu masyarakat dalam beraktivitas. Dari 17 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya 14 kabupaten/kota yang memiliki jembatan kewenangan provinsi. Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Bombana adalah tiga kabupaten/kota yang tidak memiliki jembatan kewenangan provinsi.

Dengan adanya jembatan kewenangan provinsi, maka akan membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan mempermudah aksesibilitas antar daerah. Hal ini sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya untuk membangun infrastruktur fisik yang baik, termasuk memperbaiki dan membangun jembatan kewenangan provinsi. Tabel di bawah ini merupakan rekap kondisi jembatan kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.60.
Data dan Kondisi Jembatan Kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021

No	Kota / Kabupaten	Jenis Penanganan			
		Pemeliharaan Rutin	Rehabilitasi	Pergantian	Total
1	Kota Bau-Bau	1	0	0	1
2	Kab. Buton	18	1	3	22
3	Kab. Buton Selatan	41	0	0	41
4	Kab. Buton Tengah	2	0	0	2
5	Kab. Buton Utara	52	10	14	76
6	Kota Kendari	40	1	1	42
7	Kab. Kolaka Timur	34	0	2	36
8	Kab. Kolaka Utara	10	0	1	11
9	Kab. Konawe	67	2	29	98
10	Kab. Konawe Kepulauan	2	0	1	3
11	Kab. Konawe Selatan	181	2	4	187
12	Kab. Konawe Utara	8	0	38	46
13	Kab. Muna	5	0	0	5
14	Kab. Wakatobi	1	0	0	1
15	Kab. Bombana	-	-	-	-
16	Kab. Muna Barat	-	-	-	-
17	Kab. Kolaka	-	-	-	-
Total		462	16	93	571

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara (diolah), 2022

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kab. Konawe Selatan merupakan wilayah yang dilakukan pemeliharaan rutin jembatan terbanyak dengan jumlah pemeliharaan sebanyak 181 jembatan. Sementara itu, Kabupaten/kota yang pada wilayahnya dilakukan rehabilitasi jembatan terbanyak adalah Kab. Buton Utara dengan jumlah rehabilitasi sebanyak 10 jembatan. Terakhir, kabupaten/kota yang pada wilayahnya dilakukan pergantian jembatan terbanyak adalah Kab. Konawe Utara dengan jumlah pergantian sebanyak 38 jembatan. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa jenis penanganan jembatan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tingkat kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tindakan dan alokasi anggaran yang sesuai perlu dilakukan agar jembatan-jembatan tersebut dapat terjaga kondisinya dan memenuhi standar keamanan yang dibutuhkan.

Secara umum, walaupun aspek ketersediaan jalan dan jembatan sudah mencukupi, akan tetapi disisi lain terdapat beberapa aspek yang masih harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Beberapa aspek tersebut antara lain belum terintegrasinya secara menyeluruh antara pusat-pusat kegiatan/produksi ke daerah pemasaran, di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya arus barang dan jasa antar wilayah tersebut. Selain itu, masih adanya kondisi jalan yang rusak, baik rusak ringan, maupun berat juga berdampak pada bertambahnya waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai suatu wilayah tertentu, sehingga biaya operasional kendaraan akan meningkat.

Dalam bidang infrastruktur pengairan, pembangunan fokus pada upaya untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat sehari-hari. Selain itu, pemenuhan ketersediaan air irigasi bagi pertanian juga menjadi prioritas utama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun, upaya pemenuhan ketersediaan air tidak hanya sebatas pada sektor pertanian. Dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga berfokus pada pemenuhan ketersediaan air baku bagi masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan air bersih dan berkualitas sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain pemenuhan ketersediaan air, pemerintah juga fokus pada upaya penanggulangan bahaya banjir dan abrasi kawasan pantai. Banjir dan abrasi menjadi ancaman bagi masyarakat, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan harus dilakukan sejak dini. Pembangunan infrastruktur pengairan juga dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masa depan. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan dapat memenuhi ketersediaan air bagi masyarakat dan pertanian, serta memastikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya untuk membangun infrastruktur pengairan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut di atas, diantaranya melalui pembangunan sarana pengelolaan air minum, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi/normalisasi sungai serta pembangunan/rehabilitasi bangunan penahan gelombang laut.

*Tabel 2.61.
Pembangunan Infrastruktur di bidang Pengairan
(Irigasi, Pemenuhan Air Baku, Penanggulangan Bahaya Banjir dan Abrasi Pantai)*

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Sumber Daya Air						
1.	Rasio Luas Lahan Sawah Beririgasi (%)	57.43	60.29	60.91	60.66	63.89
2.	Pembangunan Turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (lokasi)	24	22	14	7	13

Sumber: Dinas SDA & Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022

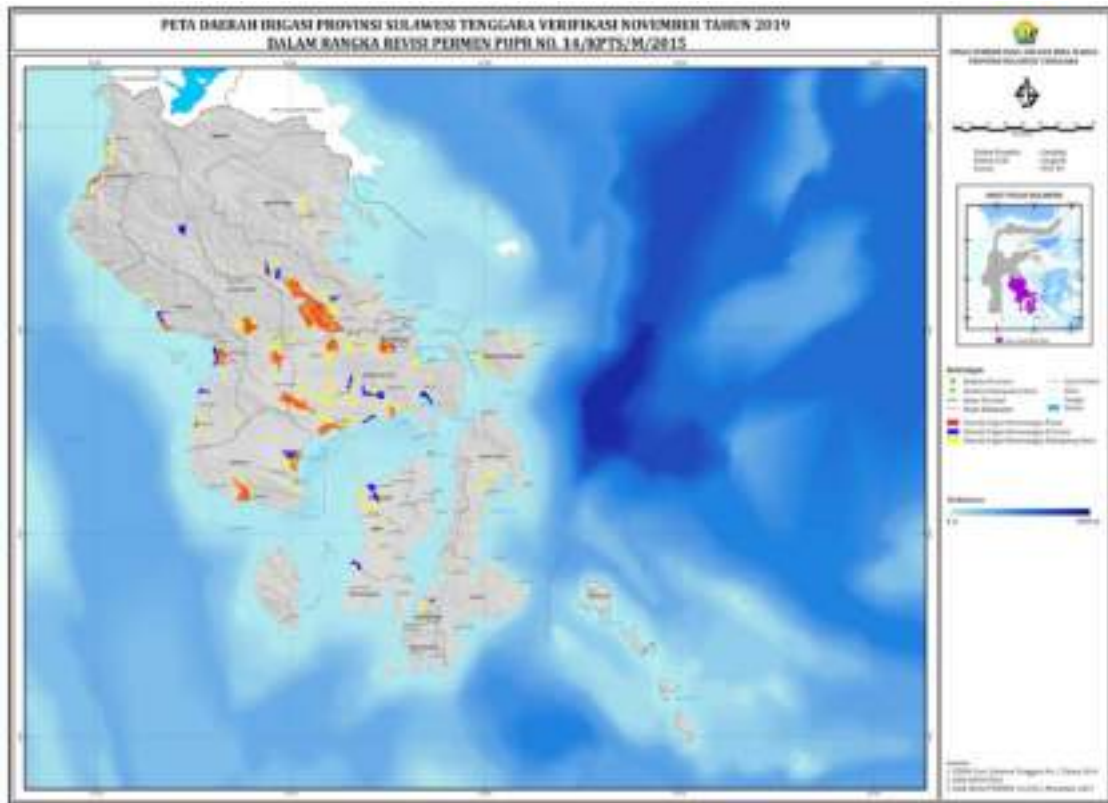
Irigasi memainkan peran penting dalam menjaga produktivitas tanaman dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dalam hal ini, irigasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antar berbagai pihak, seperti pemerintah, industri pertanian, dan masyarakat setempat. Kewenangan provinsi dalam hal irigasi merupakan bagian dari otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan sistem irigasi di wilayahnya, serta memastikan bahwa sistem irigasi memenuhi kebutuhan pertanian dan masyarakat setempat.

Luas irigasi kewenangan provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari tiga kategori, yaitu luas baku (luas rencana), luas potensial, dan luas fungsional. Luas baku (luas rencana) merupakan akumulasi dari luas potensial dan luas belum potensial. Menurut data tahun 2021, diketahui Luas irigasi kewenangan provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

- Luas baku (luas Rencana) sebesar 12.688 ha adalah luas bersih dari suatu daerah irigasi, yang berdasarkan perencanaan teknis dapat dialiri oleh jaringan irigasi.
- Luas potensial sebesar 11.911 ha adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) telah selesai dibangun
- Luas fungsional sebesar 8.097 ha merupakan bagian dari luas potensial yang telah dilayani dengan jaringan tersier sehingga jaringan irigasi yang sudah ada berfungsi untuk mengairi lahan sawah yang masuk dalam wilayah pelayanannya.

Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa di provinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat sejumlah wilayah yang potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian yang membutuhkan irigasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga untuk terus mengembangkan sistem irigasi dan

memanfaatkan potensial wilayah yang ada untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 2.35
Peta Irigasi di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: DEM SRTM USGS, RTRW Prov. Sultra, Desk Revisi Permen14/2015,2020

b. Penataan Ruang

Dalam mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan keajahteraan masyarakat dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antara sektor, daerah dan masyarakat, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2014-2034 melalui Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2014 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana didalamnya telah ditetapkan struktur dan pola ruang serta kawaan strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah dapat ditinjau kembali dalam 5 (lima) tahun setelah RTRW ditetapkan, dimana saat ini RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara sedang dalam proses revisi

Tabel 2.62.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara (Penetapan Perda RTRW)

No.	Kabupaten/Kota/Provinsi	Status Perda RTRW	Status Revisi Perda RTRW saat ini
1.	Buton	Perda No. 1 Tahun 2014	Proses Revisi (berlaku)
2.	Baubau	Perda No. 2 Tahun 2014	Proses Revisi (berlaku)
3.	Muna	Perda No. 4 Tahun 2014	Proses Revisi (berlaku)
4.	Konawe	Perda No. 9 Tahun 2014	Proses Revisi (berlaku)
5.	Bombana	Perda No. 20 Tahun 2013	Proses Revisi (berlaku)
6.	Kendari	Perda No. 1 Tahun 2012	Proses Revisi (berlaku)

No.	Kabupaten/Kota/Provinsi	Status Perda RTRW	Status Revisi Perda RTRW saat ini
7	Buton Utara	Perda No. 5 Tahun 2012	Proses Revisi (berlaku)
8	Kolaka Utara	Perda No. 6 Tahun 2012	Proses Revisi (berlaku)
9	Wakatobi	Perda No. 12 Tahun 2012	Proses Revisi (berlaku)
10	Kolaka	Perda No. 16 Tahun 2012	Proses Revisi (berlaku)
11	Konawe Utara	Perda No. 20 Tahun 2014	Proses Revisi (berlaku)
12	Buton Selatan	-	Pembahasan Lintas sektor di Kemen ATR/BPN
13	Kolaka Timur	Perda No. 78 Tahun 2020	Berlaku
14	Konawe Selatan	Perda No. 5 Tahun 2020	Berlaku
15	Buton Tengah	Perda No. 6 Tahun 2020	Berlaku
16	Muna Barat	Perda No. 10 Tahun 2020	Berlaku
17	Konawe Kepulauan	Perda No. 2 Tahun 2021	Berlaku
18	Sulawesi Tenggara	Perda No. 2 Tahun 2014	Revisi, Proses Integrasi Muatan RTRW dan RZWP3K

Sumber: Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Tahun 2023

Tabel 2.53 di atas menunjukkan tentang status RTRW Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana masih terdapat 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini , dimana masih terdapat 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Buton Selatan yang belum mempunyai Peraturan Daerah RTRW dan dokumen rancangan RTRW Kabupaten Buton Selatan masih proses pembahasan untuk mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah. Sedangkan untuk 16 (enam belas) Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai Peraturan Daerah RTRW, walaupun 11 (sebelas) Kabupaten/Kota sedang melaksanakan proses revisi RTRW.

Tabel 2.63.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang Prov. Sultra (Penetapan Perkada RDTR)

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAHAN JUMLAH RDTR	JUMLAH PERKADA RDTR
1	KENDARI	5	1
2	KONAWA	6	1
3	KONAWA SELATAN	4	-
4	KONAWA UTARA	8	-
5	KOLAKA	8	1
6	KOLAKA UTARA	5	-
7	KOLAKA TIMUR	5	1
8	MUNA	2	-
9	MUNA BARAT	8	-
10	BUTON	4	-
11	BOMBANA	6	1
12	BUTON UTARA	7	-
13	BUTON TENGAH	9	1
14	BAU-BAU	4	-
15	WAKATOBI	10	1
16	BUTON SELATAN	3	-
17	KONAWA KEPULAUAN	8	-
18	SULAWESI TENGGARA		
JUMLAH		102	7

Sumber: Kabupaten dan Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Sedangkan untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten / Kota lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berjumlah 102 dan 7 (tujuh) RDTR sudah diundangkan menjadi peraturan. Sehingga diperlukan upaya dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera menyusun dan mengundang RDTR sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan mendukung proses perizinan pemanfaatan ruang di daerah.

c. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil

upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus terpenuhi. Secara umum berdasarkan data Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2022 Provinsi Sulawesi Tenggara masih membutuhkan rumah (backlog) sebesar 71.945 unit, selain itu saat ini di Provinsi Sulawesi Tenggara masih terdapat 115.050 unit rumah tidak layak huni walaupun data tersebut mengalami penurunan rumah tidak layak huni dari tahun 2021.

Tabel 2.64.
Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan		Backlog Penghunian		Jumlah RTLH (unit)		Jumlah RTLH dalam Kawasan Kumuh (unit)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Kab. Kolaka	11.229	10.8	10.191	9.762	8.599	8.825	6.599	6.431
Kab. Konawe	8.245	6.245	3.855	2.855	12.815	10.815	1.066	866
Kab. Muna	5.420	5.256	3.620	3.511	19.156	4.809	-	-
Kab. Buton	9.365	8.475	3.169	2.852	6.830	6.219	1.174	1.099
Kab. Konawe Selatan	63.676	62.976	11.364	10.513	17.742	17.242	1.658	1.608
Kab. Bombana	2.827	2.707	2.827	2.707	12.936	12.21	2.236	2.036
Kab. Wakatobi	2.228	6.138	1.54	1.654	5.063	4.465	1.558	1.575
Kab. Kolaka Utara	5.843	5.837	394	388	8.115	8.009	1.899	1.859
Kab. Konawe Utara	1.111	1.061	602	587	6.780	6.58	900	700
Kab. Buton Utara	1.181	1.045	995	881	4.529	4.008	1.989	1.76
Kab. Kolaka Timur	2.282	2.282	631	631	2.444	2.249	294	294
Kab. Konawe Kep.	333	300	1.668	1.501	4.740	4.266	2.635	2.372
Kab. Muna Barat	278	278	4.763	4.763	7.516	6.280	3.018	2.958
Kab. Buton Tengah	3.316	2.616	3.191	2.341	6.931	6.431	2.303	2.253
Kab. Buton Selatan	7.243	7.243	10.266	10.266	3.523	2.870	3.268	3.268
Kota Kendari	30.536	30.536	10.623	10.623	5.307	2.757	4.954	4.711
Kota Bau-Bau	9.648	9.498	6.668	6.110	7.443	7.025	5.863	5.613
Sulawesi Tenggara	164.761	163.293	76.367	71.945	140.469	115.060	41.414	39.403

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2023

Persebaran Kawasan kumuh yang penanganannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi terdapat di 16 (enam belas) kabupaten/kota. Kawasan kumuh tersebut ada yang mengalami perubahan dikarenakan adanya pendataan atau peninjauan terhadap Kawasan kumuh yang ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah berdasarkan kondisi terkini di lapangan. Dimana pendataan yang dilakukan telah membagi Kawasan dengan deliniasi yang jelas yang disesuaikan dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Sehingga dari adanya pendataan dan peninjauan tersebut akan merubah data numerik yang telah ada baik itu penambahan maupun pengurangan Kawasan kumuh.

Tabel 2.65.
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2022

No	Kab/Kota	Luas Kawasan Kumuh 10- 15 Ha		Keterangan
		2021	2022	
1	Buton	48,22	33,08	Tahun 2022 dilakukan Peninjauan SK Kumuh Tahun 2019
2	Muna	240,86	240,86	
3	Konawe	10,8	10,8	
4	Kolaka	101,4	21,63	Tahun 2022 dilakukan Peninjauan SK Kumuh Tahun 2019
5	Konawe Selatan	89,93	89,93	
6	Bombana	21,62	21,62	

No	Kab/Kota	Luas Kawasan Kumuh 10- 15 Ha		Keterangan
		2021	2022	
7	Wakatobi	33,59	33,59	
8	Kolaka Utara	25,34	25,34	
9	Buton Utara	25,34	25,34	
10	Konawe Utara	21,76	64.1	Tahun 2022 dilakukan Peninjauan SK Kumuh Tahun 2019
11	Kolaka Timur	0	0	
12	Konawe Kepulauan	0	57.86	Tahun 2022 dilakukan Peninjauan SK Kumuh Tahun 2016
13	Muna Barat	72	46.43	Tahun 2022 dilakukan Peninjauan SK Kumuh Tahun 2017
14	Buton Tengah	22.49	22.49	
15	Buton Selatan	101.58	101.58	
16	Kota Kendari	132.61	50.71	Tahun 2022 dilakukan Peninjauan SK Kumuh Tahun 2020
17	Kota Baubau	44.43	83.53	Tahun 2022 dilakukan Peninjauan SK Kumuh Tahun 2019
Jumlah		991.98	928.89	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sultra, Tahun 2022

Urusan Perumahan merupakan urusan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) salah satunya terkait SPM Urusan Perumahan dan Permukiman. Adapun SPM Perumahan yang diatur dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 ada 2 yaitu terkait Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Baru terbentuk di Tahun 2017, adapun kegiatan rehab rumah dan fasilitasi rumah layak huni diadakan di Tahun 2019, 2020, 2022.

Tabel 2.66.
Pemenuhan SPM Urusan Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Bidang Urusan/Indikator	Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi (unit)	-	-	73	72	-	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi (unit)	-	-	-	65	-	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov.Sultra, Tahun 2022

2.3.1.4. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara ditangani dengan cukup baik ini terlihat dari suasana yang kondusif, aman dan terkendali. Indikator kondusif, aman dan terkendalnya stabilitas ketentraman serta ketertiban tersebut, antara lain ditunjukkan oleh kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang berlangsung dalam suasana tertib, aman dan demokratis. Upaya Pemerintah dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.67.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	10.336	10.336	10.336	3.929	4.568
2.	Jumlah Personil Satpol PP (orang)	83	79	78	78	76
3.	Jumlah PPNS Provinsi	3	3	3	3	3
4.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Penegakan Perda	87,5%	80%	75%	95%	36%

Sumber: Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang merupakan salah satu dari Standar Pelayanan Minimum (SPM) berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2017 menjadi kewenangan Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara adalah terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam skala/issue lintas wilayah Kabupaten/Kota atau dalam skala provinsi. Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya ASN yang meninggal dunia, pensiun serta pindah tugas (mutasi/promosi). Hal ini sejalan dengan pencapaian tingkat penyelesaian keamanan ketertiban dan keindahan (K3) di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tertangani dengan baik, atau 100 persen dapat diatasi.

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Keputusan Kepala Daerah. Dalam pelaksanaan penegakkan perundang-undangan daerah dimaksud dalam pelaksanaannya adalah dilakukan oleh PPNS melalui mekanisme Pro Justisia (diputuskan melalui pengadilan). Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari tahun 2017-2021 khususnya Satpol PP Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 3 personil. Hal ini masih tergolong sangat minim, namun dengan jumlah personil PPNS tersebut tidak mempengaruhi nilai persentase angka penegakkan Perda di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2017 sudah mencapai angka 87,5 persen. Namun di tahun 2021 terjadi penurunan senilai 36%, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan terjadi revocusing anggaran sehingga porsi kegiatan dikurangi. Adapun Jumlah PPNS yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.68.
Jumlah PPNS Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021

No	Prov/Kab/Kota	Jumlah PPNS (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sulawesi Tenggara	3	3	3	3	3
2.	Kendari	10	5	4	-	-
3.	Baubau	3	1	1	1	1
4.	Buton	2	1	-	-	-
5.	Buton Tengah	-	-	-	-	-
6.	Buton Utara	5	1	1	-	-
7.	Buton Selatan	-	-	-	-	-
8.	Wakatobi	6	1	1	1	1
9.	Muna	2	2	1	-	-
10.	Muna Barat	-	-	-	-	-
11.	Bombana	3	2	-	-	-
12.	Konawe	6	3	1	1	-
13.	Konawe Selatan	4	2	-	-	-
14.	Konawe Utara	5	2	-	-	-
15.	Konawe Kepulauan	-	-	-	-	-
16.	Kolaka	3	1	1	1	-
17.	Kolaka Utara	1	1	-	-	-
18.	Kolaka Timur	-	-	-	-	-
Jumlah		53	25	13	7	5

Sumber: Kanwil Hukum dan Ham Sulawesi Tenggara Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Tenggara 2022

Kehidupan beragama dan kegiatan beribadah masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum telah berjalan dengan baik. Dilihat dari sisi kuantitas, jumlah rumah-rumah ibadah terjadi peningkatan disetiap tahunnya, dan hal ini telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.69.
Tempat Ibadah di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019

Tahun	Masjid	Mushola	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Pura	Vihara
2015	3.352	900	47	299	254	19
2016	3.401	1.044	62	298	252	16
2017	3.424	911	60	294	252	15
2018	3.401	974	60	283	253	15
2019	3.424	911	49	291	255	17

Sumber: Sulawesi Tenggara Dalam Angka, Tahun 2022

Bencana juga merupakan salah satu urusan dalam ketentraman dan ketertiban. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab melindungi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk penanggulangan bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Urusan sub bencana merupakan urusan dasar pada Standar Pelayanan Minimal yang termuat dalam Peraturan Mendagri Nomor 101 Tahun 2018 yang terkait dengan : a. pelayanan informasi rawan bencana; b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

2.3.1.5. Urusan Sosial

Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Propinsi yang terdiri atas :

Tabel 2.70.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2022

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,06	0,07	0,06	0,03	0,03	15,8	2	3
2.	Persentase PMKS yang tertangani	0,06	0,07	0,06	0,03	0,03	15,8	2	3
3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0,19	0,16	0,11	0,07	0,07	0,06	4,4	8
4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	50	50	50	25	25	25	25	8
5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	100	100	25	25	25	25	25

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Rendahnya capaian indikator sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial dikarenakan tingkat populasi PPKS yang cukup tinggi dan tersebar di hampir semua wilayah Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara sedangkan jumlah yang ditangani setiap tahunnya relatif kecil, hal lain yang membuat kinerja penanganan urusan sosial belum maksimal juga banyak disebabkan oleh kesulitan dalam melakukan Updating dan Pemutakhiran data khususnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sangat diperlukan untuk akurasi data calon sasaran penerima untuk pemberian bantuan sosial. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2022 melalui dana APBD baru dapat menyentuh 5 (lima) jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diantaranya Keluarga Fakir Miskin, Lanjut usia terlanter, anak terlanter, korban bencana alam, Pembinaan Eks Napi, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada.

Sebagai upaya mendukung Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial maka disamping menangani permasalahan sosial yang ada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga terus menggali Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, TKSK dan KKDU untuk senantiasa menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Urusan Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai panduan bagi setiap OPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial juga diatur melalui Permendagri Nomor 59 tahun 2021, Urusan Sosial sesuai SPM Sosial Daerah Provinsi diantaranya:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam Pant
- b. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di dalam panti
- c. Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi.

Dari lima Standar Pelayanan Minimal (SPM) di atas, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk sampai dengan tahun 2021 urusan sosial baru melaksanakan 2 urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu yang terkait dengan Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di dalam panti dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi hal ini disebabkan karena Dinas Sosial sebagai Penyelenggara Urusan wajib Sosial baru memiliki 1 (satu) UPTD yang menangani anak terlantar dalam panti, namun untuk tahun 2022 untuk urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah coba dilakukan penanganan untuk ke 5 urusan terkait SPM dengan melakukan kemitraan dengan Panti-panti non pemerintah dengan capaian kinerja sebagai berikut:

*Tabel 2.71.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022*

No.	Urusan	Capaian						Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar didalam Panti	-	-	-	-	-	5,893	Belum ada Panti Penyandang Disabilitas terlantar yang dikelola Dinsos Prop.
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak terlantar di dalam Panti	90	70	70	70	70	70	Capaian mengalami penurunan karena kondisi sebagian besar sarana dan Prasarana UPTD Panti Sosial banyak yang mengalami kerusakan sehingga jumlah klien yang ditangani terpaksa dilakukan pengurangan
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia terlantar di dalam Panti	-	-	-	-	0	80	Belum ada Panti Lanjut Usia terlantar yang dikelola Dinsos
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan Pengemis di dalam Panti	-	-	-	-	-	90	Belum ada Panti Tuna Sosial yang dikelola Dinsos Prop.
5.	Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100	100	11227	52213	4136	1314	Korban bencana alam pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana skala Propinsi yang terdata dapat tertangani

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022.

Saat ini Dinas Sosial Provinsi untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) hanya memiliki 1 UPTD yang menangani Anak terlantar dalam Panti, dengan kondisi sebagai berikut:

*Tabel 2.72.
Kondisi Panti Anak Terlantar Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2022*

No.	Uraian	Kondisi		
		2020	2021	2022
1.	Penerima yang membutuhkan pelayanan dalam panti	43.838 orang	43.838 orang	43.838 orang
2.	Daya tampung panti milik pemerintah daerah	70 orang	70 orang	70 orang
3.	Sarana prasarana	asrama klien 11 unit, ruang belajar, dapur umum, kantor, ruang kelas, ruang praktek keterampilan	asrama klien 11 unit, ruang belajar, dapur umum, kantor, ruang kelas, ruang praktek keterampilan	asrama klien 11 unit, ruang belajar, dapur umum, kantor, ruang kelas, ruang praktek keterampilan
4.	SDM dalam panti	jumlah pegawai 20 orang, pekerja sosial 2 orang, dokter, perawat, operator computer, juru masak masing-masing 1 orang	jumlah pegawai 18 orang, pekerja sosial 2 orang, dokter, perawat, operator computer, juru masak masing-masing 1 orang	jumlah pegawai 18 orang, pekerja sosial 2 orang, dokter, perawat, operator computer, juru masak masing-masing 1 orang

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

2.3.2. Fokus Urusan Pelayanan Wajib Non Dasar

2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga kerja yang ditangani pemerintah meliputi : masalah sengketa pekerja, keselamatan dan perlindungan kerja, keterampilan tenaga kerja dan kewirausahaan, dimana urusan tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 2.73.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020*

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	NA	476	0	0	0
2.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	NA	4.478	766	595	260
3.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	1,84	2.032	179	249	261
4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	300	150	170	170	200
5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	NA	800	30	30	30

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Tahun 2020.

Pandemi Covid-19 pada awal Tahun 2020 memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang menurun. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga terdampak Covid-19.

Data Sakernas Agustus 2021 BPS Sulawesi Tenggara, mengelompokkan Penduduk usia kerja (PUK) yang terdampak Covid-19 ke dalam 4 (empat) komponen, yaitu (a) Pengangguran; (b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja selama pandemi; (c) Sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan (d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Gambaran dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.74.
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Periode Agustus 2020-2021

Komponen	2020			2021		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
Pengangguran karena Covid-19	4.893	5.873	10.766	6.333	2.988	9.321
Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19	1.440	4.632	6.072	896	3.247	4.143
Sementara Tidak Bekerja karena Covid-19	8.390	9.755	18.145	6.133	5.445	11.578
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena Covid-19	101.088	83.601	184.689	62.732	52.147	114.879
Total PUK terdampak Covid-19	115.811	103.861	219.672	76.094	63.827	139.921
Penduduk Usia Kerja (PUK)	962.055	972.747	1.934.802	979.058	991.670	1.970.728
Persentase terhadap PUK (%)	12,04	10,68				

Sumber: BPS Prov. Sultra

Tabel. 2.75.
Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Daerah Tempat Tinggal Periode Agustus 2020-2021

Komponen	2020		2021	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
Pengangguran Karena Covid-19	5.792	4.974	4401	4920
Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19	3.038	3.034	2427	1716
Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19	11.115	7.030	7305	4273
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	93.241	91.448	60335	54544
Total PUK terdampak covid	113.186	106.486	74460	65461

Sumber: BPS Prov. Sultra

Dari tabel 2.66 menunjukkan adanya penurunan penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dari 219.672 di tahun 2020, menjadi 139.921 di tahun 2021 atau turun sebesar 36,3%. Kelompok dewasa (usia 25-29 tahun) merupakan kelompok umur yang terkena dampak paling besar saat pandemi yaitu sebesar 81,35% karena kelompok ini masih mendominasi tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari 4 (kategori) PUK terdampak Covid-19, 3 (tiga) kategori menunjukkan penurunan, kecuali jumlah pengangguran yang meningkat dalam kurun waktu pandemi Covid-19. Berkurangnya jam kerja karena Covid-19 merupakan dampak yang paling banyak dirasakan yaitu mencapai 139.921 atau 82,10%. Kemudian diikuti oleh Sementara Tidak Bekerja karena Covid-19 sebesar 11.578 atau 8,27%, serta Pengangguran karena Covid-19 sebanyak 9.321 pekerja atau 6,66%. Untuk kategori dampak terendah yaitu Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 hanya mencakup 2,96% dari total PUK yang terdampak Covid-19. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 ini merupakan penduduk usia kerja yang bukan kategori angkatan kerja namun memiliki pengalaman kerja dimana berhenti bekerja karena Covid-19 selama pandemi.

2.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender menjadi arus utama. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural di masyarakat yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan menunjukkan peningkatan, membuktikan bahwa peran perempuan di lembaga pemerintahan semakin menguat yang disebabkan oleh kapasitas dan kemampuan perempuan.

Isu pengarusutamaan gender merupakan salah satu isu yang tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 serta indikator-indikator Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada Tujuan . Sasaran pembangunan perspektif gender mencakup peningkatan kualitas hidup perempuan. Peningkatan pweran perempuan diberbagai

bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah, keberhasilan pengarusutamaan gender dapat diukur melalui IPG atau Indeks pembangunan Gender dan Indeks pemberdayaan Gender (IDG) serta jumlah perempuan yang bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dan jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Terkait dengan kesetaraan gender dalam rumah tangga, terdapat pengaduan atas kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terus mengalir, hal ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan KDRT dan telah adanya jejaring dalam penanganan KDRT. Permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah, semakin meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk mewujudkan Provinsi Layak Anak masih perlu partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Untuk mengukur kesetaraan gender dan mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, antara lain :

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:

Tabel 2.76.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,23	90,24	90,24	90,56	90,50	NA
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,51	70,76	71,54	71,40	72,54	NA
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	61,42	54,93	55,97	55,13	56,02	56,27
4.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	17,78	17,78	18,18	17,78	19,05	20,00
5.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	7,12	7,11	7,45	7,78	7,37	6,97
6.	Kasus KDRT	336	259	212	201	194	145

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan 2019 pencapaian pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan naik turun. IPG Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 2013-2017 telah meningkat sebesar 1.00 poin dari 89,24 pada tahun 2013 menjadi 90,24 pada tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 90,56, namun tahun 2019 menurun kembali menjadi 90,24. Perubahan IPG selama kurun waktu tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) diberbagai bidang pembangunan yang secara terus menerus dilakukan pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender. Dimana fokus utama pembangunan pemberdayaan perempuan yang dilakukan adalah pendekatan pembangunan manusia berdasarkan kesetaraan gender dengan mempertimbangkan perbedaan aspirasi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.

IPG merupakan ukuran keberhasilan pembangunan kesetaraan gender (laki-laki dan perempuan) dari dimensi kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan ekonomi (pengeluaran perkapita). Dalam kurun waktu 2013–2019 pencapaian pembangunan gender di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan. IPG Sulawesi Tenggara pada tahun 2013 – 2019 telah meningkat 1.32 poin dari 89,24 pada tahun 2013 menjadi 90,56 pada tahun 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0.06 poin dari 90,56 pada tahun 2019 menjadi 90,50 pada tahun 2020. Adanya fluktuasi nilai IPG ini merupakan akibat perubahan dari sisi kecepatan capaian pembangunan laki-laki, yang memiliki akselerasi lebih tinggi. Peningkatan IPG selama kurun waktu 2013 - 2019 merupakan dampak kebijakan pemberdayaan perempuan melalui strategi

PUG di berbagai bidang pembangunan yang secara terus menerus dilakukan pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG dibentuk oleh tiga komponen yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Secara umum capaian IDG Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2013-2017, walaupun pernah mengalami penurunan pada tahun 2016 yang disebabkan menurunnya angka keterwakilan perempuan di parlemen dari 20 persen pada tahun 2015 menjadi 17,78 persen tahun 2016 dan perempuan sebagai tenaga profesional dari 48,73 persen pada tahun 2015 menjadi 47,42 persen pada tahun 2016. Namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2017 meskipun tidak terlalu signifikan. Namun tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi 71,40, sedangkan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 71,54. IDG Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, komponen pembentukan IDG adalah sebagai berikut:

1) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 maupun 2016 menunjukkan angka yang sebanding. Apalagi hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan peluang dan partisipasi perempuan dalam jabatan struktural yang berkorelasi positif dengan golongan ruang. Sehingga tidak terdapat kesenjangan akses bagi PNS perempuan untuk menduduki jabatan struktural.

2) Partisipasi Perempuan di dalam Lembaga DPRD Provinsi

Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam Undang-Undang tersebut diamanatkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD sebagai aksi afirmasi (*affirmative action*). Selama Tahun 2013-2017 keterwakilan perempuan dalam parlemen (DPRD) di Sulawesi Tenggara berfluktuasi pada angka 13,33-20,00 persen. Namun tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan menjadi 18,27 dan 21,17. Angka ini belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan. Ada beberapa persoalan terkait masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik yaitu umumnya perempuan belum mengerti makna demokrasi dan pentingnya institusi pemilu sebagai sarana untuk membangun masa depan Indonesia yang demokratis, perempuan belum memahami hak asasi mereka termasuk hak asasi dalam bidang politik, dan pendidikan politik bagi perempuan belum diselenggarakan secara sungguh-sungguh, terencana dan kontinyu. Selain itu budaya patriarki yang telah lama mengakar kuat di Indonesia menjadi salah satu penghambat kiprah perempuan dalam kancah politik. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik ini menjadi suatu tantangan untuk lebih melahirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan perempuan.

3) Persentase persentase perempuan sebagai tenaga profesional

Selama tahun 2013-2016, persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Sulawesi Tenggara berfluktuasi pada angka sekitar 40 persen. Pada tahun 2017, perempuan yang berprofesi sebagai tenaga profesional sebesar 47,92 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian Nasional 46,31 persen. Capaian ini meningkat sebesar 2,48 persen dari tahun 2013. Capaian persentase perempuan sebagai tenaga profesional tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 48,73 persen.

4) Sumbangan Pendapatan Perempuan

Pada tahun 2017, sumbangan pendapat perempuan di Sulawesi Tenggara sebesar 36,03 persen. Capaian ini meningkat sebesar 0,17 persen dan merupakan capaian tertinggi sepanjang tahun 2013-2017. Jika dibandingkan dengan sumbangan pendapatan laki-laki,

capaian ini memang masih cukup jauh. Namun komponen sumbangan pendapatan perempuan menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perempuan Indonesia umumnya dan Sulawesi Tenggara khususnya saat ini semakin membaik.

c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja yang sudah bekerja atau masih mencari pekerjaan terhadap penduduk usia kerja yaitu 15 tahun ke atas. Pada tahun 2013 TPAK perempuan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 50,03%, mengalami peningkatan sebesar 11,39% pada tahun 2016 menjadi 61,42%, namun mengalami penurunan sebesar 6,29% sampai dengan tahun 2019. Tahun 2021 dan 2022 TPAK perempuan kembali mengalami peningkatan sebesar 56,02% dan 56,27%. Berdasarkan data BPS TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan, dimana selama kurun waktu 2013 – 2021 meningkat dari 80,85% pada tahun 2013 menjadi 84,08% pada tahun 2021. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek ketenagakerjaan. Adanya kesenjangan pada partisipasi kerja juga terlihat dari status pekerjaan utama. Persentase perempuan sebagai pekerja keluarga mencapai hampir 35 persen dari semua perempuan usia 15 tahun keatas yang bekerja. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari persentase laki-laki yang hanya 3 persen. Hal ini menunjukkan persentase perempuan yang bekerja namun tidak mendapat upah jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kesenjangan dari kesempatan kerja juga terlihat dari rata-rata upah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Rata-rata upah yang diterima pekerja laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Tingkat pendapatan yang diperoleh laki-laki dan perempuan akan sangat mempengaruhi tingkat daya beli atau pengeluaran masing-masing.

d. Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penanganan kasus KDRT merupakan mandat SPM urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana tertuang dalam SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (SPM ini berakhir pada tahun 2015, urusan PPPA tidak lagi menangani SPM sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014). Pelayanan terpadu ini menuntut jejaring kerja antar lembaga pemerintah yang meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPPKB, Kementerian Agama, Bapas dan Lapas, serta lembaga non pemerintah dalam penyediaan layanan bantuan hukum dan konseling psikologis. Kasus KDRT di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 sebanyak 336 kasus yang dilaporkan dan kasus yang terselesaikan sebesar 312, pada Tahun 2017 Kasus KDRT yang dilaporkan mengalami penurunan yaitu sebesar 259 dan kasus yang berhasil ditangani adalah sebesar 221 kasus. Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat tertangani 100 persen.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Data kasus kekerasan merupakan data yang mengacu pada tindak kekerasan yang dilaporkan dan dicatat pada unit-unit layanan penanganan kekerasan dengan beragam nama, seperti *Women Crisis Center*, Pusat Pelayanan Terpadu, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang didalamnya terdiri dari unsur OPD terkait, rumah sakit atau layanan medis, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak dan Organisasi Keagamaan. Tabel 2.67 menunjukkan kasus KDRT yang dilaporkan selama kurun waktu 2016–2021 di Sulawesi Tenggara cenderung mengalami penurunan dari 336 kasus pada tahun 2016 menjadi 145 kasus pada tahun 2021.

2.3.2.3. Urusan Pangan

Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota dengan total penduduk sebesar 2.659.156 jiwa pada tahun 2021 (BPS) dengan perekonomian yang tergantung pada

sektor pertanian sebesar 24,08 persen. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan dampak pertumbuhan ekonomi global yang melambat, maka ketahanan pangan dan gizi terus menjadi perhatian utama. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2020, perkembangan konsumsi kalori dan protein di Sulawesi Tenggara sebesar 2.332,37 kkal per kapita per hari mengalami peningkatan sebesar 12,37 kkal per kapita per hari dibandingkan dengan Tahun 2017 yaitu sebesar 2.320 kkal per kapita per hari.

Ketahanan Pangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien (sementara). Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, kepemilikan lahan, distribusi pendapatan, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, dan lain-lain.

Tahun 2021 Berdasarkan hasil analisis komposit ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang masuk dalam kategori Prioritas 1 sampai 3 yaitu sebanyak 16 kecamatan (7,2%) masuk dalam prioritas-2 (rentan), dan sebanyak 21 kecamatan (9,4%) masuk dalam prioritas-3 (agak rentan), adapun kecamatan yang masuk prioritas-1 tidak ada. Kecamatan yang masuk kategori Prioritas 4-6 sebagai berikut: 28 kecamatan (12,6%) prioritas-4 (agak tahan), 65 kecamatan (29,3%) prioritas-5 (tahan), dan 92 kecamatan (41,4%) prioritas-6 (sangat tahan). Sedangkan Tahun 2022 hasil analisis komposit ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang masuk dalam kategori Prioritas 1-3 yaitu sebanyak 2 kecamatan (0,90%) masuk dalam prioritas-2 (rentan), dan sebanyak 8 kecamatan (3,60%) masuk dalam prioritas-3 (agak rentan), adapun kecamatan yang masuk prioritas-1 tidak ada. Kecamatan yang masuk kategori Prioritas 4-6 dengan sebanyak 212 kecamatan dengan rincian sebagai berikut: 48 kecamatan (21,62%) prioritas-4 (agak tahan), 41 kecamatan (18,47%) prioritas-5 (tahan), dan 123 kecamatan (55,41%) prioritas-6 (sangat tahan). Ini menunjukkan adanya intervensi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penanganan daerah-daerah rentan rawan pangan. Wilayah-wilayah yang rentan rawan pangan dapat diatasi sehingga masyarakat yang berdampak dapat terpenuhi kebutuhan pangannya.

Kecamatan-kecamatan yang berada di kabupaten masuk dalam kelompok rentan rawan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 10 kecamatan diindikasikan oleh: i) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita, ii) tingginya penduduk miskin, iii) tingginya rumah tangga tanpa akses ke air bersih, iv) tingginya angka kesakitan, v) tingginya rata-rata sekolah perempuan di atas 15 tahun, dan vi) tingginya prevalensi balita *stunting*. Penting untuk diingat bahwa tidak semua kecamatan yang masuk dalam prioritas 3 itu dianggap rentan terhadap kerawanan pangan, demikian juga pada prioritas 4, 5, dan 6 tidak semua kecamatan dalam wilayah tersebut aman terhadap kerawanan pangan berdasarkan per indikator.

Pemerintah Indonesia telah menekankan ketahanan pangan sebagai salah satu dari prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Mekanisme yang diidentifikasi untuk mencapai prioritas kelima (Ketahanan Pangan) termasuk: peningkatan kemandirian pangan nasional lewat mempertahankan revitalisasi pertanian; peningkatan kemampuan kompetitif produk-produk pertanian; peningkatan pendapatan petani; dan untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya alam (Rencana Strategis Kementerian Pertanian).

Dalam 2 tahun terakhir periode 2020-2021, ketersediaan pangan yang mengalami penurunan rata-rata per tahun, terutama : Beras, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu dan Daging Sapi yang dipengaruhi oleh kebutuhan konsumsi total. Sedangkan untuk komoditi yang mengalami kenaikan ketersediaan adalah Daging Ayam dan Telur. Ketersediaan dan Kebutuhan Komoditi Pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.77.
Neraca Ketersediaan dan Kebutuhan Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2020 dan 2021

No	Komoditas	Tahun 2020 (Ton)				Tahun 2021 (Ton)			
		Ketersediaan	Kebutuhan	Perimbangan Vol	Persen	Ketersediaan	Kebutuhan	Perimbangan Vol	persen
Pangan Nabati									
1.	Beras	375.711,57	259.328,48	116.383	44,88	304.079,23	247.806,75	56.272	22,71
2.	Jagung	146.698,48	18.242,00	128.456	704,18	79.051,11	13.295,78	65.755	494,56
3.	Kedelai	1.427,00	440,89	986,11	223,66	536,25	12.019,39	- 11.483	- 95,54
4.	Kacang Tanah	1.338,21	7.164,53	-5826,32	-81,32	1.269,53	5.876,73	- 4.607	- 78,40
5.	Ubi Jalar	19.290,93	20.666,92	-1.375,99	-6,66	14.680,16	4.414,20	10.266	232,57
6.	Ubi Kayu	132.442,05	17.911,33	114.530,72	639,43	104.643,47	19.465,02	85.178	437,60
7.	Sayuran	-	-	-	-	35.970,83	133.223,72	- 97.253	- 73,00
8.	Buah-buahan	-	-	-	-	191.933,89	133.489,63	58.444	43,78
Pangan Hewani									
1.	Daging Sapi	4.393,49	440,89	3.952,60	896,50	2.647,28	452,06	2.195,22	485,60
2.	Daging Ayam	8.623,73	7.164,53	1459,2	20,37	9.315,36	8.083,83	1.231,53	15,23
3.	Telur	7.237,85	14.329,06	-7.091,21	-49,49	9.314,30	15.263,56	- 5.949,26	- 38,98
4.	Ikan	-	-	-	-	647.659,99	106.632,16	541.027,83	507,38

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Tabel 2.78.
Neraca Ketersediaan Energi dan Protein per kapita Tahun 2017-2021

No.	Jenis Komoditi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Energi (kkl/kap/hari)	3.036	3.120	3.339	4.079	3.523
2.	Protein (gr/kap/hari)	85,19	85,00	93,76	120,02	79,02
3.	Anjuran WKNPG-VIII					
	a. Energi (kkl/kap/hari)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	b. Protein (gr/kap/hari)	57	57	57	57	57

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Produksi Padi mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Salah satu penyebabnya adalah akibat Pandemi Covid-19. Ketersediaan Energi Tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena produksi komoditi bahan makanan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketersediaan Protein Tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena produksi komoditi bahan makanan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

2.3.2.4. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan di Provinsi Sulawesi Tenggara digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.79.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kabupaten/Kota	Hak Guna Bangunan		Hak Milik		Hak Pakai	
		Pemilik	Luas (M ²)	Pemilik	Luas (M ²)	Pemilik	Luas (M ²)
1.	Buton	3	6.943	5.788	23.602.298	55	715.869
2.	Muna	11	34.521	6.490	22.597.396	11	44.901
3.	Konawe	17	66.046	7.950	30.598.666	40	438.304
4.	Kolaka	43	230.381	6.708	21.516.786	9	98.532
5.	Konawe Selatan	317	1.279.108	8.196	46.200.464	7	7.141.071
6.	Bombana	25	12.607	7.697	38.418.709	10	70.033
7.	Wakatobi	7	49.617	1.585	814.731	76	162.380
8.	Kolaka Utara	58	4.955	5.557	18.496.881	5	18.457
9.	Buton Utara	-	-	3.752	24.291.465	2	58.935
10.	Konawe Utara	3	1.949	3.161	16.538.604	47	323.612
11.	Kolaka Timur	50	39.876	5.284	36.346.580	45	366.846
12.	Konawe Kepulauan	-	-	3.407	8.202.960	1	4.993
13.	Muna Barat	3	19.387	3.288	23.023.229	9	87.601
14.	Buton Tengah	2	1.043	3.323	3.868.130	16	96.338
15.	Buton Selatan	5	3.778	3.612	2.892.719	11	92.179

No	Kabupaten/Kota	Hak Guna Bangunan		Hak Milik		Hak Pakai	
		Pemilik	Luas (M ²)	Pemilik	Luas (M ²)	Pemilik	Luas (M ²)
16.	Kendari	1.121	855.666	6.004	5.724.688	10	128.691
17.	Baubau	154	79.962	6.286	44.212	95	192.120
	Jumlah	1.819	2.685.843	88.088	327.555.570	449	9.990.855

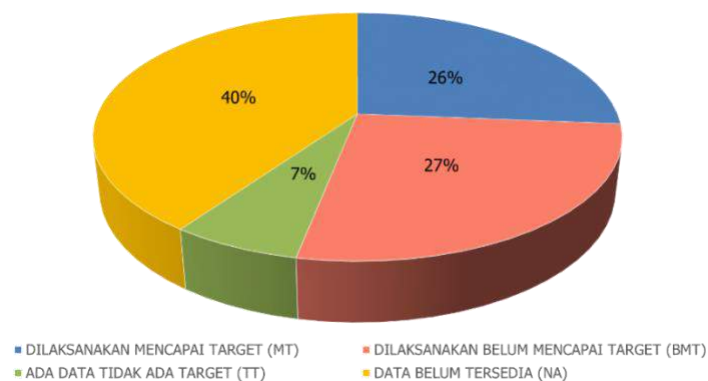
Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Tahun 2018

2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara dapat digambarkan melalui beberapa indikator, seperti: pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), pengelolaan sampah, kapasitas pengelolaan lingkungan hidup daerah, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

a. Pelaksanaan TPB/SDGs

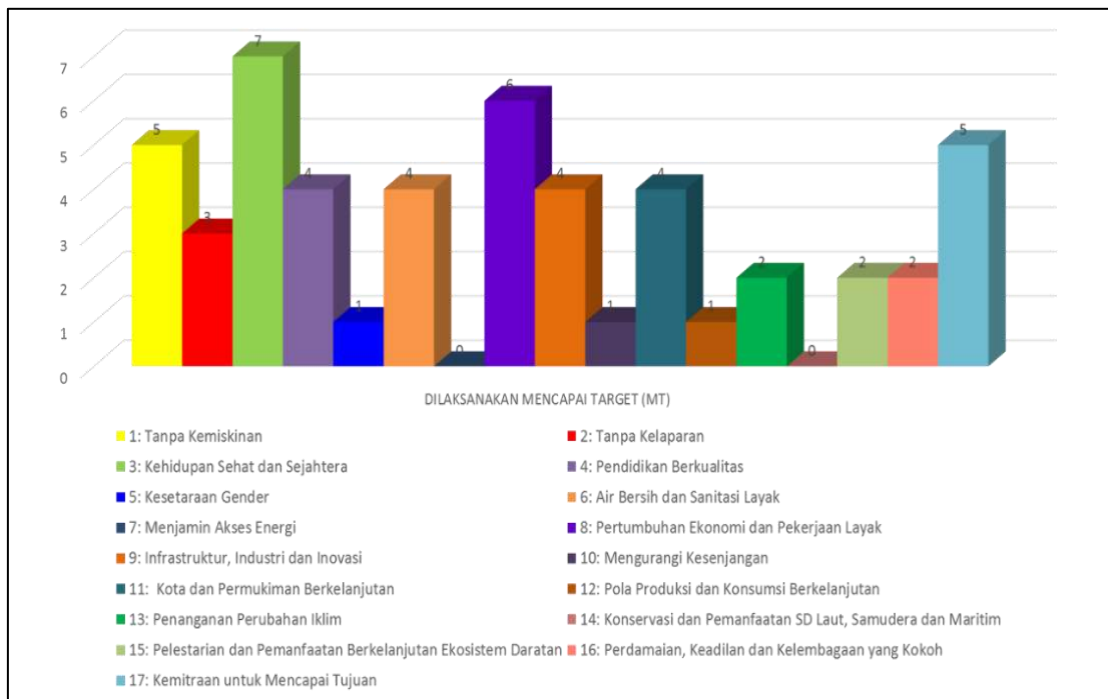
Indikator TPB di Sulawesi Tenggara yang telah dilaksanakan dan mencapai target sampai Tahun 2020 hanya sebanyak 26,29 % (51 indikator) dari total 194 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sementara itu, indikator TPB yang belum mempunyai data mencapai porsi yang lebih besar, yaitu 40,21% (78 indikator). Porsi capaian indikator TPB, disajikan pada Gambar 2.32.



Gambar 2.36
Proporsi Capaian TPB Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

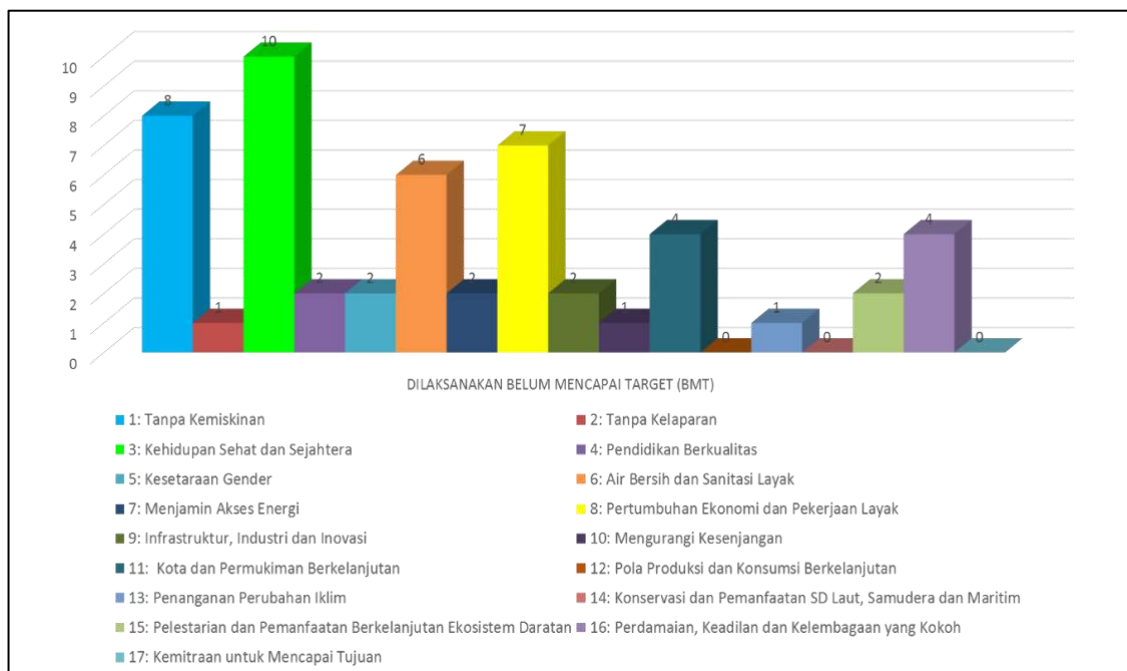
Secara keseluruhan, indikator TPB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah 234 indikator. Dari jumlah tersebut, sebanyak 194 indikator telah dilaksanakan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana 51 indikator telah mencapai target nasional sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017. Selanjutnya, terdapat 52 indikator yang juga sudah dilaksanakan kendati belum mencapai target secara nasional, kemudian terdapat 13 indikator yang telah dilaksanakan namun di dalam RPJMD Sulawesi Tenggara belum terdapat targetnya serta sisanya sebanyak 78 indikator belum memiliki data.

Target TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target adalah sebanyak 51 indikator atau 26,29% dari total 194 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Capaian paling tinggi dicapai oleh tujuan 3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera yaitu sebanyak 7 indikator yang telah dilaksanakan dan sudah mencapai target, diikuti oleh tujuan 8 yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak, dengan jumlah indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target sebanyak 6 indikator. Indikator capaian masing-masing tujuan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat pada grafik berikut:



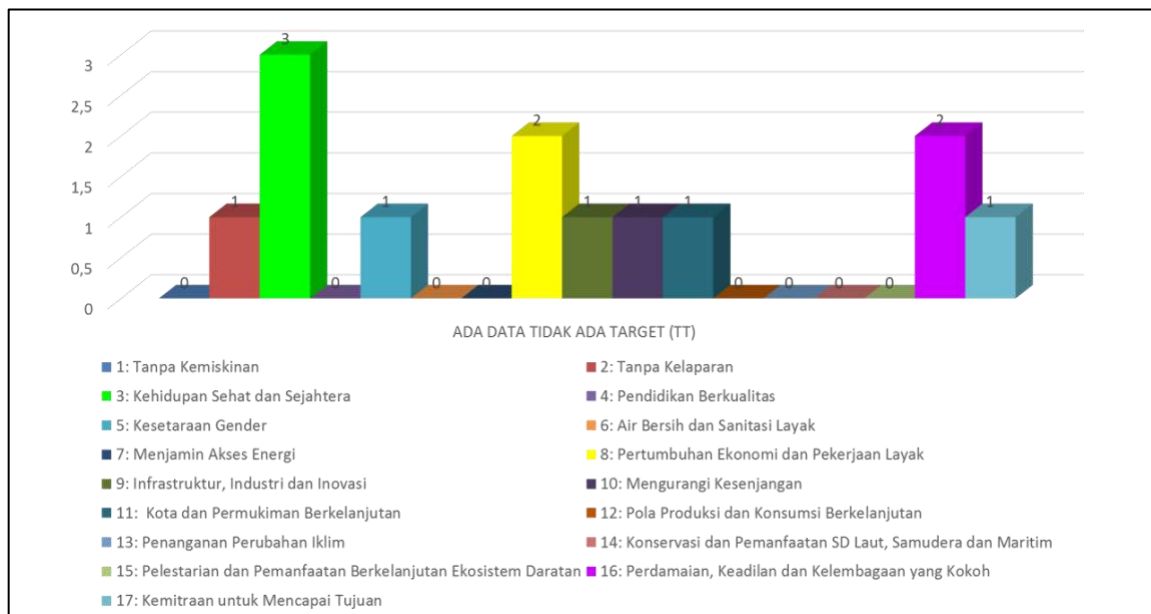
Gambar. 2.38.
Capaian TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021.

Target TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target sebanyak 52 indikator atau 26,80% dari keseluruhan indikator yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Indikator yang paling banyak termasuk dalam kategori ini adalah tujuan 3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera dan tujuan 1 yaitu Tanpa Kemiskinan dengan jumlah indikator masing-masing adalah 10 dan 8 indikator. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan tetapi Belum Mencapai Target (SB), disajikan pada gambar berikut.



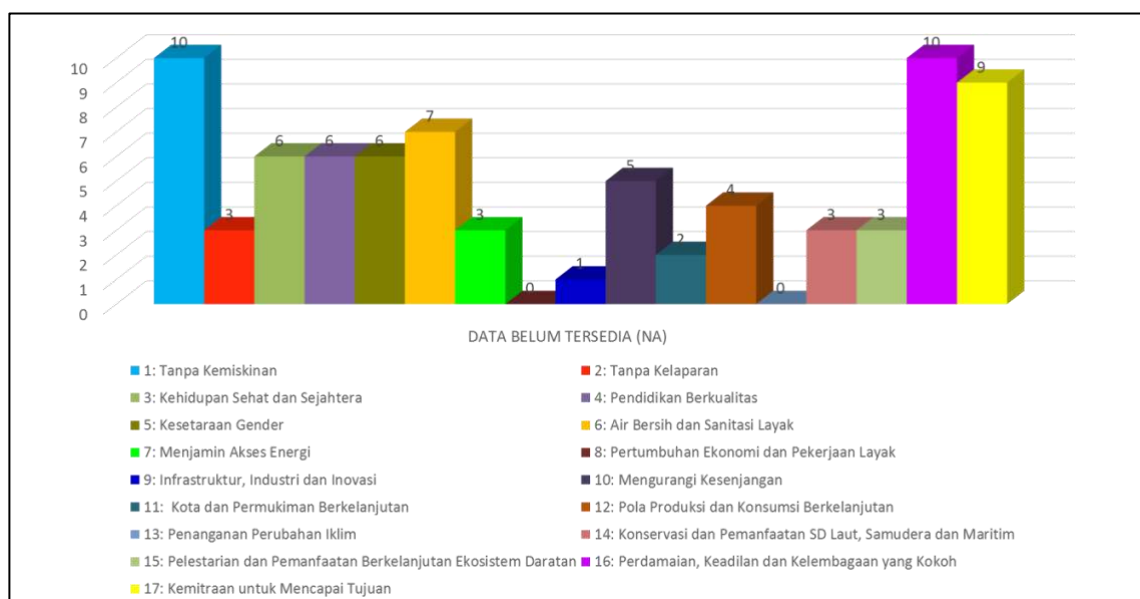
Gambar.2.39.
Capaian TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021.

Target TPB yang memiliki data namun tidak memiliki target sebanyak 13 indikator atau 6,70% dari keseluruhan indikator yang merupakan kewenangan provinsi. Adapun tujuan TPB yang paling banyak memiliki indikator pada kategori ini adalah tujuan 3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebanyak 10 indikator. Target indikator TPB yang memiliki data namun tidak memiliki target disajikan pada Gambar 2.35.



Gambar 2.40
Capaian TPB yang Ada Data Namun Belum Menjadi Indikator dalam RPJMD
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Secara keseluruhan, jumlah indikator TPB yang belum memiliki data masih mendominasi dinamika pelaksanaan TPB di Sulawesi Tenggara. Sebanyak 78 indikator atau 40,21% belum memiliki data sama sekali. Indikator yang paling banyak termasuk dalam kategori ini adalah indikator dari tujuan 1 dan 16 yaitu Tanpa Kemiskinan dan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kokoh masing-masing sebanyak 10 indikator. Target indikator TPB yang tidak/belum memiliki data disajikan pada Gambar dibawah ini.



Gambar.2.41.
Capaian TPB yang Belum Memiliki Data
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021.

Secara keseluruhan menurut kategori dan jumlah total indikator yang digunakan dalam analisis capaian TPB di Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:



Gambar 2.42.
Capaian TPB Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Target Nasional
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021

Berdasarkan penilaian capaian indikator TPB di Sulawesi Tenggara terhadap target nasional, maka hanya terdapat satu TPB yang memiliki indikator yang di analisis sebanyak sekaligus memiliki target tercapai terbanyak yaitu TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dengan 7 indikator. Sementara itu, untuk TPB 7 (Menjamin Akses Energi) dan TPB 14 (Konservasi dan Pemanfaatan SD Laut, Samudera dan Maritim), masing-masing belum memiliki satupun indikator yang telah tercapai.

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup, yang dihitung dari indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas air laut (IKAL), indeks kualitas udara (IKU), dan indeks tutupan lahan (ITL). Pada tahun 2020, kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara digambarkan oleh IKA sebesar 50,55; IKU sebesar 90,01 dan IKTL sebesar 74,67, dengan capaian IKLH sebesar 72,04. Sedangkan pada Tahun 2021, Kondisi Lingkungan Hidup di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang cukup baik dapat di gambarkan oleh IKA sebesar 53,26; IKU sebesar 90,89; IKTL sebesar 74,34, dengan capaian IKLH sebesar 74,97. Capaian IKA, IKU, IKTL dan IKLH Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2020 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.80.
Capaian IKLH Prov.Sultra Tahun 2016-2021

Indikator	CAPAIAN IKLH Sultra Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IKA	80.00	51.00	54.00	53.10	50.55	53,26
IKU	83.50	91.04	91.10	91.22	90.01	90,89
IKTL	65.48	69.14	69.14	69.14	74.67	74,34
IKLH	75.24	70.27	71.19	70.95	72.04	74,97

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022

c. Pengelolaan Sampah

Secara umum kondisi pelayanan penanganan sampah di Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara sebagian besar belum memenuhi standar. Cakupan layanan rata-rata penanganan sampah masih dibawah 50% kecuali untuk Kota Kendari yang sudah berada pada kisaran layanan 62%. Bangunan Tempat Proses sementara terpadu (TPST) belum banyak dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan biaya operasional dan keterbatasan sumberdaya manusia dalam mengelola sampah. Model layanan masih mengikuti pola kumpul-angkut dan buang ke TPA. Kabupaten/Kota yang memiliki TPA standar baru mencakup:

- 1) TPA Kota Kendari seluas 13 ha di Kelurahan Puwatu dengan system operasional controlled landfill
- 2) TPA Patioso Kab. Kolaka seluas 12 ha di Kelurahan Latambaga dengan system operasional controlled landfill
- 3) TPA Wakonti Kota Bau-Bau dengan luas 12 ha di kel. Wakonti dengan system operasional Controlled Landfill.
- 4) TPA To Tallang Kab. Kolaka Utara dengan luas 7 ha di Desa To Tallang dengan system operasional open dumping.
- 5) TPA Mataiwoi Kab. Konawe dengan luas 5 ha di kel. Tonggouna dengan system operasional open dumping.
- 6) TPA Wambeamali Kab. Wakatobi dengan luas 6 ha di Desa Komala dengan system operasional open dumping.
- 7) TPA Lakoduma Kab. Muna dengan luas 5 ha di Desa Lakoduma dengan system operasional open dumping.
- 8) TPA Kaombu Kab. Buton dengan luas 5,8 ha di Desa Kaombu dengan system operasional open dumping.

Di tingkat provinsi, kondisi eksisting pengelolaan sampah digambarkan sebagai berikut:

- 1) Belum ada penanganan sampah lintas kabupaten/kota
- 2) Terdapat perkembangan yang pesat pada beberapa daerah otonom kab/kota yang bersinggungan dalam satu kawasan (seperti Kota Kendari dan kota-kota satelit di sekitarnya, antara lain Ranomeeto, Konda, Sampara, Toronipa dan Kawasan Industri Morosi);
- 3) Institusi Pengelolaan Sampah tingkat provinsi belum memiliki kemampuan melakukan pengelolaan sampah yang menjadi kewenangan provinsi, antara lain disebabkan:
 - Belum memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas operasional pengelolaan sampah (TPA, Gedung Kantor, fasilitas pengangkutan dan pemrosesan sampah);
 - Struktur kelembagaan terbatas (Kepala UPTD eselon IV.a dengan 1 KTU eselon IV.b, tidak memiliki tenaga/staf penanganan sampah).

d. Kapasitas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kapasitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih tergolong rendah yang digambarkan oleh tidak adanya ketersediaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), keterbatasan sarana dan prasarana pengendalian dampak lingkungan, penegakan hukum lingkungan yang lemah, serta partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah. Jumlah Pejabat Pengawas PPLH di Tahun 2020 sampai di Tahun 2021 mengalami penambahan anggota pejabat pengawas PPLH, di Tahun 2020 jumlah pejabat pengawas PPLH sebanyak 2 orang sedangkan di Tahun 2021 jumlah pejabat pengawas PPLH sebanyak 4 orang.

e. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan di Sulawesi Tenggara diindikasikan dengan rendahnya nilai indeks kualitas air (IKA) yang pada Tahun 2020 hanya sebesar 50,55, sedangkan di Tahun 2021 mengalami kenaikan di bandingkan di tahun 2020 sebesar 53,26, yang berarti bahwa sudah terjadi pencemaran. Indikasi lainnya adalah ditemukannya parameter kualitas air di beberapa sungai yang telah melewati baku mutu air (BMA) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, diantaranya pH, residu tersuspensi (TSS), biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), oksigen terlarut (DO), Nitrit (NO₃), Besi (Fe) dan Clorida (Cl), bakteri coli form, dan Coli Tinja).

Beberapa lokasi sungai yang mengalami pencemaran di Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil pengujian kualitas air oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini.

*Tabel 2.81.
Status Mutu Air pada Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara*

No.	Nama Sungai	Status Mutu Air	Parameter yang melebihi baku mutu
1.	Sungai Sabilambo	Cemar berat	BOD, Fosfat, Nitrit, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga, Timbal
2.	Sungai Wanggu	Cemar ringan-sedang	Posfat, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga dan Timbal
3.	Sungai Poleang	Cemar berat	Posfat, Nitrit, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga, Timbal
4.	Sungai Roraya	Cemar berat	BOD, Posfat, Nitrit, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga dan Timbal
5.	Sungai Lasolo-Lalindu	-	-
6.	Sungai Toari	Cemar ringan-sedang	Posfat, Nitrit, Sulfida, Klorin bebas, Seng, Cadmium, Tembaga dan Timbal
7.	Sungai Kaongkeongkea	Cemar berat	Posfat, Sulfida, Klorin, Seng, Minyak dan lemak, Tembaga dan Timbal

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022

Selain sungai, pencemaran air juga telah ditemukan di perairan laut, seperti perairan Teluk Kendari. Hasil studi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Haluoleo (2017), perairan Teluk Kendari telah tercemar logam berat khususnya Kromium (Cr) dan Kadmium (Cd). Perairan Teluk Kendari memiliki potensi pencemaran yang cukup tinggi, karena bentuknya yang semi tertutup. Sedimentasi dan air limbah dari berbagai aktivitas seperti pertambangan, perhotelan, perdagangan, pelayaran, pariwisata, pelabuhan, industri, pertambangan dan pertanian di sekitar daerah aliran sungai akan bermuara di Teluk Kendari.

Berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup, daerah yang paling banyak mendapat tekanan adalah kawasan pertambangan dan dan perkebunan yang mengalami peningkatan pesat selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Aktivitas pertambangan khususnya tambang nikel di beberapa daerah seperti Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe Utara dan Bombana cukup tinggi. Selain kerusakan lingkungan, pertumbuhan investasi di sektor pertambangan yang cukup pesat juga telah memicu terjadinya alih fungsi penggunaan lahan. Salah satu kasus alih fungsi penggunaan lahan di Sulawesi Tenggara yang ikut menyita perhatian pemerintah pusat adalah pengembangan Kawasan Industri Konawe (KIK) di Kabupaten Konawe. Di dalam deliniasi KIK tersebut terdapat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kementerian Pertanian serta aset saluran irigasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Meskipun demikian, telah diambil beberapa langkah penyelesaian, yaitu mengidentifikasi luasan lahan KIK yang beririsan dengan LP2B dan aset saluran irigasi yang menjadi dasar pengalihan fungsi lahan dan aset tersebut.

f. Kebencanaan dan Perubahan Iklim

Potensi kebencanaan di Provinsi Sulawesi Tenggara cukup bervariasi dimana bencana dominan adalah banjir dan tanah longsor. Berdasarkan peta indeks rawan bencana Indonesia, Sulawesi Tenggara berada pada zona merah atau zona tinggi. Hal tersebut didukung oleh data kejadian bencana di Sulawesi Tenggara utamanya banjir, longsor, kekeringan dan puting beliung/gelombang laut.

Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di daerah morfologi dataran sungai, misalnya di Sampara, Pondidaha, Lambuya Kabupaten Konawe, Lasolo Kabupaten Konawe Utara, Punudoho Batu Putih Kabupaten Kolaka, daerah Lawele Lasalimu Kabupaten Buton dan daerah Lepolepo di Kota Kendari. Salah satu faktor penyebab terjadinya bencana banjir di Sulawesi Tenggara ini adalah tingginya tingkat erosi di daerah hulu yang dimungkinkan karena vegetasi penutup relatif berkurang, yang pada tahapan lebih lanjut akan membentuk sedimentasi di daerah hilir.

g. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup merupakan input penting dalam proses kegiatan

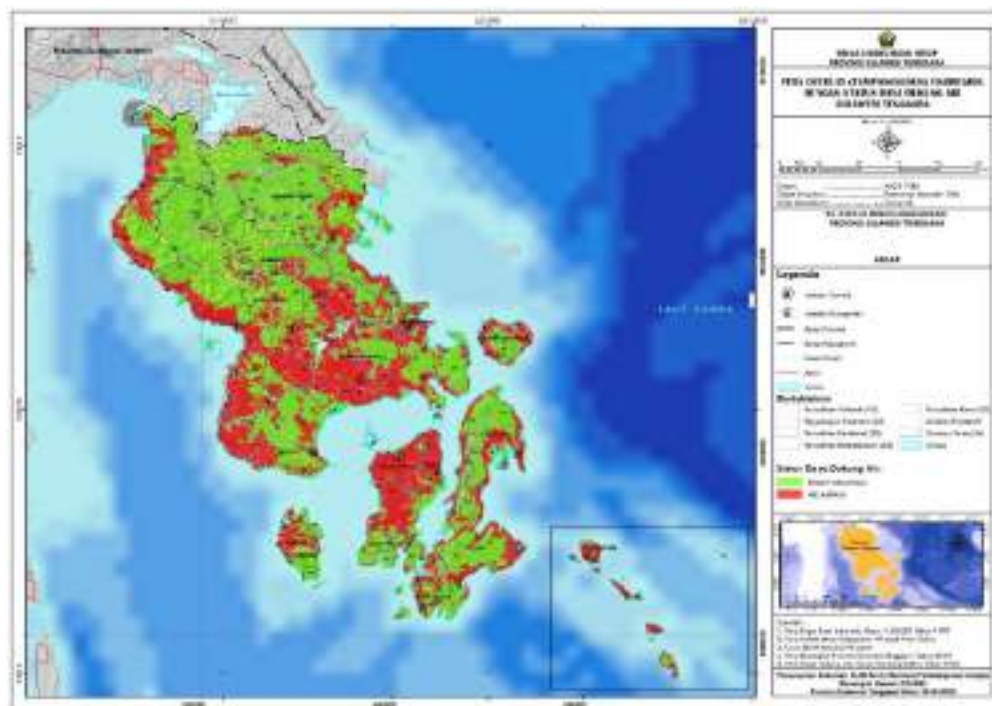
pembangunan. Dukungan sumberdaya alam berupa air, pangan, dan lahan merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunann. Ketersediaan dan pencadangan sumberdaya alam pendukung kegiatan pembangunan harus dipastikan mampu mencukupi kegiatan pembangunan saat ini dan generasi yang akan datang.

h. Daya Dukung Air

Berdasarkan hasil analisis daya dukung air di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa ketersediaan air sebesar 20.54 milyar m^3 /tahun, sementara kebutuhan air hidup layak mencapai 8.68 milyar m^3 /tahun. Dengan demikian daya dukung lingkungan hidup dalam menyediakan air bagi kebutuhan layak penduduk Sulawesi Tenggara masih surplus sebesar 11,8 milyar m^3 /tahun dengan dukungan ketersediaan yang surpuls air seluas 3.091.453,90 ha (72,24%) dari kebutuhan air, sedangkan ketersediaan lahan yang defisit air seluas 599.6060,30 ha (15,37 %). Ambang batas ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sebesar 279, 94 juta.

Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tenggara masih surplus air. Hal ini juga terlihat untuk hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air masing-masing kabupaten/kota cenderung sama dengan hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air Provinsi Sulawesi Tenggara. Seluruh kabupaten/kota masih surplus air, namun secara spasial terdapat beberapa bagian wilayah kabupaten/kota yang cenderung mengalami defisit air. Defisit air disebabkan karena ketersediaan air (air permukaan dan air tanah) pada setiap grid lebih rendah jika dibandingkan kebutuhan air pada grid tersebut.

Berdasarkan anlaisis daya dukung air Sulawesi Tenggara tersebut maka pada tahun 2018 potensi sekita 20,54 milyar m^3 /tahun dengan jumlah penduduk 2.653.654 jiwa sehingga kebutuhan air total sebesar 8,68 milyar m^3 . Dengan demikian Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 mengalami surplus sebesar 11.86 milyar m^3 /tahun dengan daya dukung sebesar 2,4. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan air akan meningkat yang dapat mempengaruhi daya dukungnya. Dengan proyeksi pertambahan penduduk pada tahun 2023 sebesar 2.931.349 jiwa maka kebutuhan total air di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mencapai 9.5 milyar m^3 sehingga dengan asumsi potensi air sebesar 20,54 milyar m^3 /tahun maka Sulawesi Tenggara masih mengalami surplus air sebesar 11.02 milyar m^3 dengan daya dukung mengalami penurunan menjadi 2,2.



Gambar 2.43.
Peta Daya Dukung Air Sulawesi Tenggara
Sumber: DLH Prov. Sultra, 2021.

i. Daya Dukung Pangan

Berdasarkan hasil analisis dari 17 Kabupaten/Kota memiliki ketersediaan pangan sebesar 3.12 triliun kkal, sedangkan kebutuhan pangan tahun 2018 sebesar 2.08 triliun kkal, sehingga dengan demikian provinsi sultra masih mengalami surplus sebesar 1.044 triliun. Kondisi ini didukung oleh ketersediaan lahan yang surplus sebesar 2.935.300,23 Ha (75,24 %) dari wilayah Sulawesi Tenggara dan lahan yang defisit sebesar 966.004,29 ha (24,76%) dari wilayah Sulawesi Tenggara. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk kebutuhan pangan akan meningkat yang dapat mempengaruhi daya dukungnya. Dengan proyeksi pertambahan penduduk pada tahun 2023 sebesar 2.931.349 jiwa maka kebutuhan total pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 mencapai 2,3 triliun kkal sehingga dengan asumsi potensi pangan sebesar 3,13 triliun maka Sulawesi Tenggara masih mengalami surplus pangan sebesar 826 milyar kkal dengan daya dukung mengalami penurunan menjadi 1,36.

Nilai indeks jasa ekosistem penyediaan pangan pangan rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 3,23 yang tergolong kategori sedang, sementara itu indeks jasa ekosistem penyediaan air dan serat masing-masing sebesar 2,53 (rendah) dan 2,92 (sedang). Indeks jasa ekosistem pengaturan rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi Jasa ekosistem pengaturan meliputi jasa pengaturan kualitas udara (3,13), iklim (3,32), pencegahan dan perlindungan terhadap longsor (3,14), pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir (3,12), pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran (2,79), air (3,22), pemurnian air (2,15), penyerbukan alami (3,0) dan jasa pengaturan pengendalian hama (3,18), sementara itu jasa ekosistem pendukung meliputi jasa pendukung habitat dan keanekaragaman hayati mempunyai nilai indeks jasa ekosistem sebesar 3,09 dan jasa pendukung pembentukan dan regenerasi tanah dengan indeks jasa ekosistem sebesar 2,16.

Secara keseluruhan maka status daya dukung dan daya tampung pangan Provinsi Sulawesi Tenggara masih surplus. Ini berarti bahwa ketersediaan pangan Provinsi Sulawesi Tenggara masih lebih besar jika dibandingkan kebutuhan pangan penduduk. Hasil analisis menunjukkan bahwa neraca pangan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah surplus, namun demikian beberapa kabupaten/kota di wilayah tersebut sudah mencapai defisit. Beberapa wilayah yang mempunyai neraca pangan surplus adalah Kabupaten Bombana, Buton, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara dan Kabupaten Muna Barat. Selanjutnya wilayah-wilayah yang defisit pangan adalah Kabupaten Buton Selatan, Buton Tengah, Muna, Wakatobi, Kota Baubau dan Kota Kendari.

Selain kondisi lingkungan hidup yang digambarkan di atas, terdapat beberapa capaian indikator yang terkait dengan lingkungan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.82.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2021

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada	ada
2.	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada
3.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada
4.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada	ada
5.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada	ada
6.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	52,00	50,00	54	53,1	50,55	53,26
7.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	83,0	91,04	91,1	91,22	90,01	90,89
8.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,26	69,14	69,14	69,14	74,67	74,34
9.	Laporan Inventarisasi GRK	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada
10.	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada
11.	Jumlah limbah B3 yang dikelola	0	0	0	0	0	1
12.	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada
13.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin	40	0	0	18,5	20	25

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
14.	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						
15.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	1	1	1	0	0	0
16.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	100	100	100	100	100	100
17.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada
18.	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di Provinsi	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terdapat peningkatan capaian kinerja, terkait tersedianya dokumen RPPLH Provinsi dan tersusunnya RPPLH Provinsi mengalami peningkatan kinerja karena di tahun 2020 dan 2021 tersedianya dokumen RPPLH Provinsi, dimana pada tahun sebelumnya belum terdapat dokumen tersebut. Namun adanya dokumen tersebut belum terintegrasi dengan dokumen perencanaan provinsi. Selain itu, terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Provinsi dan dokumen KLHS Provinsi juga sudah ada mulai tahun 2020 dan 2021. Terkait Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mengalami peningkatan setelah tahun 2018. Pada tahun 2021 juga sudah tersedia data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi.

2.3.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dibidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan tiga (3) program strategis nasional, yaitu pemutakhiran data penduduk, pemberian NIK dan penerapan e-KTP melalui pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk perekaman e-KTP yang dilakukan secara massal yang bertujuan agar semua tercatat dalam database kependudukan sebagai acuan dasar perencanaan pembangunan. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdapat 22 (dua puluh dua) layanan yang berupa kartu, akta dan surat untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dirjen Dukcapil memberikan kebijakan baru berupa pembebasan biaya pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk digratiskan dan pengurusan KTP-el serta Akta Kelahiran bisa dilakukan tanpa pengantar ketua RT/RW atau dari kelurahan/desa.

Adapun peningkatan layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di 17 Kab/Kota se Sultra tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.83.
Daftar Perekaman e-KTP per Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

Kab/Kota	Jumlah penduduk	Jumlah KK	Jumlah Wajib KTP	persen perekaman KTP-el	Jumlah Perekaman KTP-el	Blanko KTP-el		Peralatan Pelayanan KTP-el				
						Yg diterima thn 2022	tercetak	Jumlah peralatan		Kondisi		
								Yg ada di dinas	Yg ada di kec.	Baik	Tdk Baik	
Kolaka	240,749	122,711	164,110	98.98	162,444	23,356	23,356	2 SERVER, 4 PC	0	BAIK	0	
Konawe	260,765	81,374	182,804	94.42	172,600	23,528	23,528	1 SERVER, 4 PC	9 PC	SERVER, 4 PC	9 PC	
Muna	225,283	68,426	154,086	98.14	151,221	20,500	21.680	2 server 2 PC	3 PC	-	3 pc	
Buton	119,650	33,084	79,747	95.27	75,971	12,000	11,955	1 server, 2 PC	-	baik	-	
Konawe selatan	315,659	98,704	217,698	98.13	213,619	10,000	9,985	2 server 9 PC	5 pc			
Bombana	158,830	49,923	108,387	98.79	107,075	11,000	11,000	2 SERVER, 4 PC	2 pc	BAIK	0	
Wakatobi	115,717	35,923	82,770	91.21	75,493	12000	12000	1 SERVER, 6 PC	8 PC	1 SERVER, 6 PC	8 PC	
Kolaka Utara	135,928	41,294	94,697	97.79	92,600	17000	15090	1 Server, 9 PC	10 pc	1 Server, 9 PC	2 server 2 pc	

Kab/Kota	Jumlah penduduk	Jumlah KK	Jumlah Wajib KTP	persen perekaman KTP-el	Jumlah Perekaman KTP-el	Blanko KTP-el		Peralatan Pelayanan KTP-el			
						Yg diterima thn 2022	tercetak	Jumlah peralatan		Kondisi	
								Yg ada di dinas	Yg ada di kec.	Baik	Tdk Baik
Konawe utara	74,105	22,672	49,956	99.55	49,732	8,400	8,416	1 SERVER 7 PC	0	1 SERVER, 7 PC	0
Buton Utara	70,337	20,624	47,621	98.82	47,058	-	-	1 SERVER 4 PC	0	1 SERVER 4 PC	0
Kolaka Timur	125,311	40,419	89,572	96.56	86,490	9500	9365	SERVER, 11 PC	0	1 SERVER, 11 PC	0
Konawe Kep.	40,427	12,727	27,590	99.05	27,327	5775	5275	1 server 3 pc	0	BAIK	0
Muna Barat	85,118	26,020	59,662	95.94	57,237	4,000	3,985	2 SERVER, 3 PC	0	2 SERVER, 3 PC	0
Buton Tengah	119,418	34,288	78,626	90.51	71,165	9,000	8,686	1 SERVER, 2 PC	1 PC	BAIK	BAIK
Buton Selatan	100,140	27,068	66,224	88.39	58,533	8,000	6,450	1 SERVER, 2 PC	0	0	TDK BAIK
Kendari	344,281	101,987	238,065	96.09	228,753	15,075	240,780	3 SERVER, 7 CLIENT	11 pc		
Baubau	159,073	45,717	109,307	94.15	102,910	13,000		1 SERVER, 5 PC	0	1 SERVER, 5 PC	0
Jumlah	2,690,791	862,961	1,850,922	96.18	1,780,228	187,074	389,871	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Capaian kinerja pelayanan adminduk dan pencapil provinsi sulawesi tenggara dari tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, layanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil atas kerja keras aparatur baik secara online maupun pelayanan keliling atau jemput bola dilapangan. Capaian peningkatan kinerja pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.84.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	37.44	38.59	42.29	46.96	95.82
2.	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	86.58	88.64	90.43	95.55	96.48
3.	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	86.27	90.34	99.93	99.93	99.95
4.	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Nikah	13.89	24.72	36.2	40.32	40.85
5.	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Cerai	9.47	15.24	7.16	10.03	30.63
6.	Persentase Penduduk yang memiliki Akte Kematian	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Walaupun OPD Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara baru terbentuk tahun 2017, namun kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil Provinsi Sulawesi Tenggara sudah cukup baik, dari target capaian di atas dapat dilihat bahwa persentase kinerja kependudukan dan catatan sipil Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2018-2022 selalu meningkat.

2.3.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu urusan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat perdesaan. Peningkatan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa meliputi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan, dan peningkatan sarana prasarana kelembagaan dan pengembangan regulasi desa/kelurahan.

Semangat otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi gerbang pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemekaran daerah. Terbentuknya beberapa daerah otonomi baru di Sulawesi Tenggara merupakan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan terbentuknya daerah otonomi baru

dapat pula meningkatkan kinerja pemerintah daerah mulai di tingkat kabupaten/kota hingga di tingkat desa/kelurahan. Terbentuknya pemerintahan daerah baru berarti terbaginya lembaga pemerintahan dibawahnya.

Tabel 2.85.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	70	80	80	83	83 70	86 83	74
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	40	40	50	35	35 54	38 71	70
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100	100	100 82	86	86 82	86 84	87
4.	Persentase LSM aktif	-	-	-	-	-	-	-
5.	Persentase LPM Berprestasi	15	15	20	73 23	73 26	73 30	35
6.	Persentase PKK aktif	100	100	100	838 100	838 100	838 98	99
7.	Persentase Posyandu aktif	60	70	80	164 96	164 97	164 98	98
8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	30	30	35	86 60	86 60	86 58	62
9.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	35	40	40	52	55 46	65 49	66

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

2.3.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Urusan Pelayanan Umum Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang digambarkan dari beberapa indikator terkait dengan keluarga berencana dan sejahtera untuk menurunkan jumlah penduduk dan menekan angka kemiskinan Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara, sebagaimana kita ketahui dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB dan Jumlah cakupan peserta KB aktif.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Tenggara diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.86.
Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Aktif, dan Peserta KB Baru di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2022

No	Kabupaten/ Kota	2019		2020		2021		2022	
		PUS	Peserta KB	PUS	Peserta KB	PUS	Peserta KB	PUS	Peserta KB
1.	Buton	18.329	344	18.858	13.610	19.239	14.718	NA	NA
2.	Muna	29.276	684	38.192	30.710	32.034	22.802	NA	NA
3.	Konawe	45.199	349	44.545	34.223	46.742	36.113	NA	NA
4.	Kolaka	43.485	877	40.911	29.608	40.614	30.193	NA	NA
5.	Konawe Selatan	54.956	505	60.518	44.375	57.119	41.884	NA	NA
6.	Bombana	23.757	82	24.768	18.243	25.341	20.857	NA	NA
7.	Wakatobi	19.419	565	19.446	14.245	17.811	12.234	NA	NA
8.	Kolaka Utara	23.822	240	23.653	20.438	24.376	20.951	NA	NA
9.	Buton Utara	11.109	120	11.078	8.498	11.080	8.246	NA	NA
10.	Konawe Utara	18.279	41	18.276	13.959	19.886	15.709	NA	NA
11.	Kolaka Timur	24.578	130	26.111	19.949	25.140	19.374	NA	NA
12.	Konawe Kep.	7.849	9	7.844	6.212	8.093	6.495	NA	NA
13.	Muna Barat	12.223	263	14.369	9.221	11.941	8.399	NA	NA
14.	Buton Tengah	19.341	758	15.826	10.553	18.020	12.014	NA	NA
15.	Buton Selatan	14.140	286	14.410	10.618	15.209	10.948	NA	NA
16.	Kota Kendari	53.878	605	55.217	40.952	57.455	40.985	NA	NA
17.	Kota Baubau	23.762	649	21.380	17.991	24.999	20.115	NA	NA

No	Kabupaten/ Kota	2019		2020		2021		2022	
		PUS	Peserta KB	PUS	Peserta KB	PUS	Peserta KB	PUS	Peserta KB
	Prov. Sultra	453.402	6.507	455.402	343.405	455.099	342.037	NA	NA

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Tahun 2020 - 2022

Tabel 2.87.

Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	NA*	2,18	2,10	NA	1.75	NA
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,80	2,88	2,89	2,92	2,71	NA
3.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	15,2	15,3	16,8	21,4	24,0	NA
4.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,5	-	23,29	24,17	NA	NA
5.	Jumlah akseptor KB	402.700	332,621	338.525	343,318	NA	NA
6.	Jumlah Tenaga Medis Pengelola Program KB :		-	-	-	NA	NA
7.	- Dokter	311	331	321	309	NA	NA
	- Bidan	1808	1980	2025	1979	NA	NA
	- PPLKB	120	177	136	219	NA	NA
	- Penyuluh KB	315	309	304	297	NA	NA
8.	Persentase Keluarga Sejahtera	24,52	2,18	2,10	NA	NA	NA

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Tahun 2018, BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

2.3.2.9. Urusan Perhubungan

Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara menjadi suatu prioritas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan mobilitas dan distribusi barang lintas daerah. Tidak hanya pemenuhan kuantitas sarana dan prasarana saja namun peningkatan kualitas yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana perhubungan secara maksimal. Berikut ini ketersediaan sarana angkutan udara dan laut dan pemanfaatannya dalam mobilitas penumpang dan distribusi barang lintas daerah.

Tabel 2.88.

Arus Lalu Lintas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-7-2022

No.	Bidang Urusan/Indikator	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum :						
	- Arus kedatangan Transportasi Darat	27.266	27.871	27.266	14.996	17.341	18.208
	- Arus keberangkatan Transportasi Darat	26.605	27.110	26.605	14.633	16.837	17.679
	- Arus kedatangan Transportasi Laut	819,01	819,00	819,01	450,45	1.760.526	1.599.164*
	- Arus keberangkatan Transportasi Laut	886,78	803,00	886,78	487,73	1.764.514	1.675.983*
	- Arus kedatangan Transportasi Udara	927.321	1.024.958	727.872	429.771	420.659	513.580 *
	- Arus keberangkatan Transportasi Udara	974.465	1.029.849	735.186	431.570	417.893	523.091 *
2.	Rasio ijin trayek	0,0001	0,00002	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	264	(bukan kewenangan)	(bukan kewenangan)	(bukan kewenangan)		
4.	Jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis						
	- Bandara	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi
	- Pelabuhan	13 Lokasi	13 Lokasi	13 Lokasi	13 Lokasi	13 Lokasi	13 Lokasi
	- Terminal Type B	2 lokasi	5 lokasi	8 lokasi	11 lokasi	11 lokasi	11 lokasi

No.	Bidang Urusan/Indikator	CAPAIAN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5.	Persentase layanan angkutan darat	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	0	(bukan kewenangan)	(bukan kewenangan)	(bukan kewenangan)		
7.	Pemasangan Rambu-rambu	24,72	25,50	26,70	26,70	28,12	28,12
8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3,82	3,35	2,76	2,76	2,71	2.71
9.	Jumlah orang/barang yg terangkut angkutan umum						
	- Arus kedatangan Transportasi Darat	27.266	27.871	27.266	14.996	17.341	18.208
	- Arus keberangkatan Transportasi Darat	26.605	27.110	26.605	14.633	16.837	17.679
	- Jumlah Barang Masuk	267.813	272.902	267.813	147.297	168.734	173.325
	- Jumlah Barang Keluar	263.64	268.215	263.641	145.002	155.579	160.421
10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara /terminal per tahun						
	- Arus penumpang melalui dermaga	1.705,79	1.622,00	1.705,79	938,18	3.535.040	3.275.147
	- Arus penumpang melalui Bandara	1.630,66	1.092,54	1.617,06	758,81	838.552	1.036.671
	- Arus penumpang melalui transportasi darat	53.871	54.981	53.871	29.629	34.178	35.887
11.	Persentase Angka Kecelakaan lalu lintas	11,03	14,05	4,49	20,78	24,01	20,66

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Data di atas menunjukkan lalu lintas pesawat udara dan penumpang dari lima bandara di Sulawesi Tenggara memperlihatkan jumlah yang beragam dari tahun ke tahun. Pada Bandara Halu Oleo Kendari sejak tahun 2011 hingga 2020 jumlah lalu lintas pesawat udara terus meningkat demikian halnya jumlah penumpang datang dan berangkat, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana bandara semakin baik. Demikian halnya dengan bandara lainnya yang terus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, karena ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menjadi garansi bagi pihak maskapai dan penumpang untuk memanfaatkan bandara tersebut untuk kebutuhan mobilitas penumpang dan distribusi barang. Sementara itu, distribusi barang bongkar maupun muat akan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya lalu lintas pesawat udara yang mereduksi rentan waktu pendistribusian. Namun demikian, distribusi barang masih didominasi melalui angkutan darat dan laut karena selain kapasitas angkut yang lebih besar juga besaran biaya distribusi yang lebih minim.

Terminal Penumpang yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 ada 2 terminal penumpang, yaitu Terminal Penumpang Tipe A yang berlokasi di Kota Kendari, dan Terminal Penumpang Tipe B yang masih dalam proses perencanaan pembangunan dengan lokasi di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu di Kabupaten Konawe, Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe utara, Kolaka Timur, Buton Utara dan Kota Baubau. Selain itu direncanakan juga akan dibangun Terminal Barang berupa terminal truk angkutan barang yang lokasinya dekat pergudangan, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyebarangan yaitu direncanakan di Kota Kendari, Baubau, Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Muna, Buton dan Buton Utara.

Tabel 2.89.
Terminal Tipe B yang ada di Sulawesi Tenggara

No.	Terminal	Lokasi	Keterangan
1	Baruga	Kota Kendari	Beroperasi
2	Rahabangga	Kab. Konawe	Beroperasi
3	Lahimbua	Kab. Konut	Beroperasi
4	Tawainalu	Kab. Koltim	Beroperasi

No.	Terminal	Lokasi	Keterangan
5	Larumbalangi	Kab. Kolaka	Beroperasi
6	Lacaria	Kab. Kolut	Belum Beroperasi
7	Sangi-Sangi	Kab. Konse	Belum Beroperasi
8	Kasipute	Kab. Bombana	Belum Beroperasi*
9	Labuan	Kab. Butur	Belum Beroperasi
10	Wasaga	Kab. Buton	Belum Beroperasi
11	Lakologou	Kota Baubau	Beroperasi
12	Lombe	Kab. Buteng	Belum Beroperasi
13	Raha	Kab. Muna	Belum Beroperasi*
14	Lagadi	Kab. Mubab	Belum Beroperasi*
15	Sampolawa	Kab. Busel	Belum Beroperasi*
16	Langara	Kab. Konkep	Belum Beroperasi*
17	Patinggu	Kab. Wakatobi	Belum Beroperasi*

Sumber: Dishub Prov. Sultra, Tahun 2022

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pelabuhan Pengumpan Regional merupakan kewenangan provinsi sebagai pengelola namun sampai saat ini masih dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Pelabuhan Pengumpan Regional berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi. Berikut ini Pelabuhan Pengumpan Regional yang ada di Sulawesi Tenggara:

Tabel 2.90.
Pelabuhan Pengumpan Regional di Sulawesi Tenggara

No.	Pelabuhan	Lokasi	Keterangan
1	Ereke Lasora	Kab. Butur	
2	Pomalaa/Dawi-Dawi	Kab. Kolaka	
3	Langara	Kab. Konkep	
4	Lakara	Kab. Konse	
5	Talaga Raya	Kab. Buteng	
6	Lameruru	Kab. Konut	
7	Banabungi Pasarwajo	Kab. Buton	
8	Lapuko	Kab. Konse	Usulan
9	Molawe	Kab. Konut	Usulan
10	Sikeli	Kab. Bombana	Usulan
11	Lawe	Kab. Buton	Usulan

Sumber: SK Menhub No.KP 432 Tahun 2017

Pada tabel 2.90 di atas, pelabuhan pengumpan regional berada di Kabupaten Buton Utara, Kolaka, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Buton Tengah, Konawe Utara dan Buton, namun terdapat beberapa pelabuhan pengumpan lainnya yang masih dalam tahap proses usulan pelimpahan kewenangan dari nasional ke provinsi yaitu berada di Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Bombana dan Buton.

Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Dermaga pelabuhan penyeberangan merupakan pelabuhan umum untuk kegiatan penyeberangan.

*Tabel 2.91.
Pelabuhan Penyeberangan di Sulawesi Tenggara*

No.	Pelabuhan	Lokasi	Kondisi		Keterangan
			Sisi Darat	Sisi Laut	
1	Pelabuhan Penyeberangan Kendari	Kota Kendari	Sedang	Baik	Mantap
2	Pelabuhan Penyeberangan Wawonii	Kab. Konkep	Sedang	Baik	Mantap
3	Pelabuhan Penyeberangan Torobulu	Kab. Konse	Sedang	Baik	Mantap
4	Pelabuhan Penyeberangan Tampo	Kab. Muna	Sedang	Sedang	Belum Mantap
5	Pelabuhan Penyeberangan Baubau	Kota Baubau	Sedang	Rusak	Belum Mantap
6	Pelabuhan Penyeberangan Waara	Kab. Buteng	Sedang	Sedang	Belum Mantap
7	Pelabuhan Penyeberangan Kamaru	Kab. Buton	Sedang	Rusak	Belum Mantap
8	Pelabuhan Penyeberangan Wanci	Kab. Wakatobi	Sedang	Sedang	Belum Mantap
9	Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka	Kab. Buteng	Sedang	Rusak	Belum Mantap
10	Pelabuhan Penyeberangan Dongkala	Kab. Bombana	Sedang	Rusak	Belum Mantap
11	Pelabuhan Penyeberangan Tondasi	Kab. Mub	Sedang	Rusak	Belum Mantap
12	Pelabuhan Penyeberangan Amolengo	Kab. Konse	Sedang	Baik	Mantap
13	Pelabuhan Penyeberangan Labuan	Kab. Butur	Sedang	Sedang	Belum Mantap

Sumber: Dishub Prov. Sultra, Tahun 2022

Pada tabel di atas, terdapat beberapa pelabuhan penyeberangan dalam kondisi mantap (baik) dan kondisi belum mantap (rusak/sedang). Pelabuhan penyeberangan dalam kondisi mantap terdapat di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Kepulauan dan Konawe Selatan. Sedangkan pelabuhan penyeberangan dalam kondisi belum mantap terdapat di Kabupaten Muna, Bau-Bau, Buton Tengah, Buton, Wakatobi, Bombana, Muna Barat dan Buton Utara.

2.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika cukup memegang peranan yang penting dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi yang akurat dan benar, dan tidak menyesatkan yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik kecuali selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan. Perkembangan media komunikasi dan informasi di Provinsi Sulawesi Tenggara memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat namun, hal ini tentunya sangat didukung dengan kebutuhan masyarakat akan media komunikasi dan informatika yang terus meningkat. Gambaran tentang perkembangan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 2.92.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021*

No	Indikator	Realisasi Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	0% (Belum Ada)	0% (Belum Ada)	36,07%	29,73%	29,73%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (Jaringan Komunikasi dan Internet)	0% (Belum Melakukan Pendataan)	63,48% (Cakupan Area berbanding Luas Wilayah Prov. Sultra)	63,48% (Cakupan Area berbanding Luas Wilayah Prov. Sultra)	63,48% (Cakupan Area berbanding Luas Wilayah Prov. Sultra)	63,48% (Cakupan Area berbanding Luas Wilayah Prov. Sultra)
3	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sultra yang telah Menggunakan Website/ Portal Sub Domain Resmi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12,50%	25%	43,75%	46%	50%

No	Indikator	Realisasi Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
4	Tersedianya Media/Sarana Informasi kepada Masyarakat	Media Cetak, Website	Media Cetak, Media Elektronik, Media Sosial, Website,	Media Cetak, Media Elektronik, Media Online, Media Sosial, Website	Media Cetak, Media Elektronik, Media Online, Media Sosial, Website	Media Cetak, Media Elektronik, Media Online, Media Sosial, Website

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022

Berdasarkan data di atas, setelah disosialisasikan Permen Kominfo Nomor 08/ Tahun 2010 di Kab/Kota untuk pembentukan KIM. Hingga pada tahun 2019 belum ada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan. Tahun 2022 terdapat penambahan kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi 29,73%. Untuk cakupan layanan Telekomunikasi, persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler, serta Proporsi Rumah Tangga dengan akses Internet sudah cukup tinggi, hal ini disebabkan karena kemudahan masyarakat dalam akses untuk memiliki telepon seluler didukung dengan adanya operator *provider* yang menyediakan tower jaringan ke seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga layanan Komunikasi dan akses internet sangat mudah didapatkan sampai ke pelosok desa walaupun jaringan yang tersedia kecepatannya masih rendah karena hanya menggunakan jaringan radio dan pita kecil, sehingga ada beberapa kabupaten yang masih sulit jaringan telekomunikasinya. Terkait cakupan layanan telekomunikasi pada tahun 2018 tidak ada kegiatan pendataan dilakukan, tahun 2019 mengalami penurunan cakupan layanan telekomunikasi dikarenakan tidak semua wilayah dilakukan pendataan, dan tahun 2020 dinas kominfo tidak melakukan pendataan dikarenakan pengalihan anggaran ke refocusing percepatan penanganan Covid-19. Capaian Indikator Persentase Perangkat Daerah Lingkup Pemprov Sultra yang telah Menggunakan Website/Portal Sub Domain Resmi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat peningkatan dari 2018 hingga 2022. Pada tahun 2022 sudah terdapat 24 OPD yang menggunakan domain resmi Kominfo atau sekitar 50%.

2.3.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan Koperasi aktif di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2018, namun ditahun 2019 jumlah koperasi aktif cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2022, hal ini disebabkan penurunan dari permodalan, daya saing yang lemah, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, kurang optimalnya tenaga profesional dalam mengelola koperasi, dan ketidakadilan dalam pengenaan pajak koperasi, serta dampak dari pandemic covid-19. Akan tetapi, tidak semua kabupaten/kota mengalami penurunan secara signifikan, beberapa justru meningkat atau bahkan mengalami kestabilan setiap tahunnya. Berikut data perkembangan koperasi aktif Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017 - 2022.

Tabel 2.93.
Perkembangan Koperasi Aktif Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kendari	547	468	466	465	201	204
2	Baubau	191	272	124	140	149	152
3	Konawe	262	279	287	297	186	124
4	Konawe Utara	229	168	136	137	143	144
5	Konawe Selatan	85	187	122	141	152	157
6	Konawe Kepulauan	44	28	2	5	15	19
7	Kolaka	284	377	301	244	135	136
8	Kolaka Utara	137	137	136	137	143	144
9	Kolaka Timur	73	138	32	15	16	16
10	Buton	134	13	98	157	161	163
11	Buton Utara	73	181	45	60	44	44

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Aktif					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
12	Buton Selatan	47	88	86	38	38	39
13	Buton Tengah	85	75	20	20	20	21
14	Muna	229	264	272	298	260	261
15	Muna Barat	100	103	113	118	116	86
16	Wakatobi	101	164	175	191	66	66
17	Bombana	141	203	123	63	40	40
18	Provinsi	289	159	171	290	340	384
Jumlah		3.051	3.304	2.709	2.816	2.225	2.200

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Capaian Kinerja Koperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022 untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.94.
Indikator Capaian Koperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Koperasi Aktif (persen)	69,39	69,39	69,54	68,72	69,87	69,98
2.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96,5	96,65	96,65	96,84	96,84	97,01

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, persentase koperasi aktif setiap tahunnya mengalami persentase peningkatan yang kecil, hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan koperasi tidak sebesar jumlah koperasi yang aktif. Tahun 2020 persentase jumlah koperasi aktif mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, selain di akibatkan oleh pandemic covid-19 juga diakibatkan lesuhnya aktivitas perekonomian karena roda penggerak utama dikoperasi adalah kegiatan ekonomi, yang mengakibatkan beberapa koperasi tidak dapat menjalankan unit usahanya. Jumlah koperasi aktif di Sulawesi Tenggara berjumlah 2.200 unit dari total koperasi sebanyak 4.374 unit.

Persentase Usaha mikro dan kecil pada tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan walaupun dalam masa pandemic covid-19. Hal ini disebabkan oleh banyaknya usaha mikro dan kecil beralih usaha menjadi usaha yang lebih produktif dengan menyesuaikan dengan kondisi covid-19. Jumlah usaha mikro di Sulawesi Tenggara sebanyak 121.145 unit, usaha kecil 48.924 unit, usaha menengah sebanyak 13.051 sehingga total UMKM di Sulawesi Tenggara berjumlah 183.124 unit.

Penurunan dari permodalan hendaknya menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan juga pusat terkait perkembangan koperasi, hal ini menyebabkan optimism koperasi dalam pertumbuhannya terhambat dan cenderung mogok apabila kurang diperhatikan, selain itu daya saing yang lemah akibat kurangnya sarana dan prasarana yang ada di beberapa koperasi khususnya kab/kota yang jauh dari ibu kota provinsi terhambat dan memiliki cost yang tinggi untuk mendapatkan *resource* atau bahan baku produksi yang dibutuhkan. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota harus ditingkatkan melalui binaan, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis perkoperasian, manajemen resiko, manajemen operasisonal, manajemen sdm, serta manajemen pemasaran agar mampu menumbuhkan potensi diri bagi para anggota koperasi dalam melakukan inovasi dan kreatifitas guna mengembangkan koperasi yang dimaksud. Dalam menanggapi kurang optimalnya tenaga professional dalam mengelola koperasi, pemerintah harus memberikan tenaga terampil yang memang memenuhi kualifikasi perkoperasian sebagai Pembina bagi setiap koperasi binaan provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

2.3.2.12. Urusan Penanaman Modal

Provinsi Sulawesi Tenggara yang kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam, tentunya menjadi perhatian khusus bagi para penanam modal untuk berinvestasi. Kondisi ini

diperlihatkan melalui berkembangnya modal investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.95.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022

No	Uraian	Capaian Kinerja					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	25 Perusahaan	296 Perusahaan	746 Perusahaan	169 Perusahaan	1.542 Perusahaan	1.116 Perusahaan
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)	13,7 triliun	15,5 triliun	18,64 triliun	21,13 triliun	27,93 triliun	21,73 triliun
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	-	-	-	-	-	-
4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	2,57%	27,13%	17,67%	17,67%	20,13%	-22,20%

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Selama kurun waktu tahun 2017 - 2022, Jumlah Investor Berskala Nasional, Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional, dan Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN mengalami fluktuatif hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 dan adanya sengketa tumpang tindih lahan IUP.

Pada tahun 2022 Jumlah perusahaan yang berskala nasional baik PMA maupun PMDN sebanyak 1.116 perusahaan. Nilai realisasi investasi Sultra tercatat sebesar Rp.21,73 triliun atau terkoreksi 22,20% dari tahun 2021 sebesar Rp. 27,93 triliun. Penurunan ini disebabkan karena Kabupaten Konawe yang ditargetkan menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 71,81% tidak mencapai target. Kabupaten Konawe hanya berkontribusi sebesar Rp. 7,298 triliun atau 2,92% dari target Rp 24,94 triliun. Hasil pantauan dilapangan menunjukkan pemicu rendahnya realisasi investasi tersebut adalah terjadinya konflik internal di tubuh perusahaan, sehingga mereka enggan melakukan penanaman modal berupa pembelian tanah, pembangunan gedung, ataupun pengadaan peralatan.

Jumlah tenaga kerja pada sektor penanaman modal dari tahun 2018-2022 masing-masing secara berturut-turut : 9.679 orang; 9.495 orang; 9.832 orang; 16.024 orang; dan 20.132 orang. Angka ini masih harus disandingkan dengan data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengkalkulasi rasio daya serap tenaga kerja.

2.3.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pelayanan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut dapat diukur dari indikator yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.96.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Uraian	Realisasi Capaian Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Kepemudaan						
1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	120	120	120	120	120	120
2	Persentase Wirausaha Muda	50	50	50	50	50	50
B	Keolahragaan						
1	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah Pelatih yang bersertifikat	14	7	6	9	9	9
3	Jumlah atlet muda/pelajar yang dibina	66	46	46	46	46	40
4.	Jumlah atlet berprestasi (Binaan Diskepora)	11	5	11	0	15	12
5.	Jumlah prestasi olahraga (cabang olah raga yang dimenangkan)	9	4	7	0	5	5
6.	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	0	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Realisasi Capaian urusan Kepemudaan dan Olahraga di tiap tahunnya tidak signifikan karena berbagai faktor sehingga terjadi penurunan prestasi di Bidang Olahraga, hal ini disebabkan karena sarana prasarana olahraga yang kurang memadai, kurangnya jumlah pelatih

yang bersertifikat, serta adanya pengurangan cabang olahraga pelajar dari kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan adanya pengurangan atlet menjadi salah satu faktor atau dampak menurunnya prestasi olahraga yang menjadi binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

a. Kepemudaan

- 1) Persentase Organisasi Pemuda yang aktif adalah Organisasi Pemuda yang ada di Sulawesi Tenggara yang aktif kepengurusannya dan legalitas jelas.
- 2) Persentase Wirausaha Muda adalah Realisasi jumlah wirausaha muda yang mengikuti kegiatan kepelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga tiap tahun.

b. Keolahragaan

- 1) Cakupan Pembinaan Olahraga adalah Persentase hasil pembinaan setiap tahunnya.
- 2) Jumlah Pelatih yang bersertifikat adalah merupakan jumlah pelatih yang melaksanakan tugas sebagai pelatih atlet usian pelajar di Pusat Pembinaan Pelatihan Pelajar (PPLP).
- 3) Jumlah Atlet Muda/Pelajar yang dibina adalah merupakan atlet yang binaan langsung oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan menggunakan anggaran APBN.
- 4) Jumlah Atlet Berprestasi adalah merupakan atlet yang berprestasi yang masih berusia pelajar dan menjadi Binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengikuti Kompetisi tiap tahunnya.
- 5) Jumlah Prestasi Olahraga adalah merupakan Cabang Olahraga yang berprestasi di tiap tahunnya atau Cabang Olahraga yang mengikuti Ivent Tingkat Nasional seperti Kejurnas, PON, Sea Games dan Asian Games.
- 6) Jumlah Sarana Prasarana Olahraga adalah merupakan Sarana Prasarana yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: Gor Apriani, Kolam Rerang dan Stadion Lakidende, adapun Sarana Prasarana yang digunakan untuk kebutuhan Prestasi Olahraga yang sangat Minim adalah: Sarana/Peralatan Latihan Atlet PPLP yang menjadi Binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga antara lain Cabor Dayung, Atletik, Karate, Taekwondo dan Pencak Silat.

2.3.2.14. Urusan Statistik

Urusan statistik di Provinsi Sulawesi Tenggara selain ditangani oleh Badan Pusat Statistik, berdasarkan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibentuk pada tahun 2016. Namun dalam penyelenggaraan urusan statistik Dinas Kominfo belum menjalankan sepenuhnya sehingga kinerja penyelenggaraan urusan statistik belum optimal dan masih didominasi oleh BPS sebagai wali data. Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. BPS menyajikan data melalui media elektronik maupun media cetak. Untuk media elektronik BPS memberikan layanan berupa sistem data informasi dan statistik Provinsi Sulawesi Tenggara berbasis internet yang dapat diakses melalui website BPS, sedangkan media cetak BPS menyajikan dalam bentuk produk Buku Sulawesi Tenggara dalam Angka dan Buku PDRB baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara. Capaian Kinerja Urusan statistik Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Tabel 2.97.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022*

No.	Indikator	Realisasi Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Presentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral (DSS) Pemprov. Sultra	-	36,36%	48,48%	57,58%	90,91%
2	Buku "Sulawesi Tenggara Dalam Angka"	-	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022

Pada tabel di atas, ketersediaan Data Statistik Sektoral (DSS) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hingga tahun 2022 terdapat 30

DSS atau 90,91% dari keseluruhan 33 jumlah DSS pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.3.2.15. Urusan Persandian

Kebijakan urusan pemerintah dibidang persandian sangat penting sesuai Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada perangkat Daerah Bidang Persandian dalam menangani pengamanan informasi dan pola hubungan komunikasi persandian antar perangkat daerah, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan informasi yang dikecualikan maupun informasi yang terbuka, kinerja sarana dan prasarana persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 2.98.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Provinsi Sulawesi Tenggara*

No.	Indikator	Realisasi Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	-	20,83%	52,08%	75%	75%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022.

Data di atas menunjukkan masih rendahnya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, hal ini disebabkan karena Organisasi Pemerintah yang menangani urusan Persandian yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian baru dibentuk tahun 2017, begitu pula Peraturan yang menjadi payung Hukum urusan Persandian yaitu Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota juga baru dikeluarkan pada tahun 2017. Namun peningkatan secara signifikan terjadi di tahun 2018, dimana persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah meningkat menjadi 20,83 dan meningkat menjadi 75% pada tahun 2020, dan ditahun 2021 meningkat menjadi 75%. Pada tahun 2022 tidak mengalami penambahan jumlah OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah.

2.3.2.16. Urusan Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan program/kegiatan yang berkaitan dengan kesenian, perfilman, cagar budaya, permuseuman, sejarah dan nilai-nilai budaya. Dalam melaksanakan tugas, bidang kebudayaan mempunyai fungsi :

- Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang kesenian dan perfilman di daerah;
- Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang cagar budaya dan permuseuman di daerah; dan
- Penyelenggara kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang sejarah dan nilai budaya di daerah.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. Berikut indeks pemajuan kebudayaan di Provinsi Sulawesi Tenggara,

*Tabel 2.99.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022*

Indikator	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	47,62	49,1	48,91	48,62	N/A

Sumber: Kemdikbud RI

2.3.2.17. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dengan demikian garis besar kegiatan perpustakaan adalah pengelolaan koleksi, sementara garis besar kearsipan meliputi penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan (kronologis).

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode tahun 2018 -2023 ditetapkan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai alat ukur pencapaian kinerja. Di bidang perpustakaan selama tahun 2018 hingga 2022 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah provinsi dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

*Tabel 2.100.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022*

No	Uraian	Realisasi Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	14.115	22.514	12.681	9.472	18.822
2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	77.176	77.176	77.176	204.708	224.168
3.	Rasio Perpustakaan persatuan penduduk	14.000	14.000	14.000	14.000	14.035
4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	12.000	22.514	12.681	9.472	15.521
5.	Jumlah Koleksi Judul Buku	73.197	0	250	77.176	81.068
6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	12	28	40	58	58

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Berdasarkan data tabel di atas kunjungan setiap orang di perpustakaan selama lima tahun terakhir (2018-2022) menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, pengunjung dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini diikuti dengan menurunnya jumlah Judul Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah. Berkurangnya jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan bisa menjadi penyebab menurunnya jumlah pengunjung per tahun selain itu dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai literatur dan informasi yang diperlukan. Di bidang Urusan Kearsipan, indikator capaian kinerja pelayanan kearsipan adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.101.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2022*

No	Uraian	Realisasi Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	2,4 %	2,7 %	2,9 %	10,90%	14,58
2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	100%	100%	100%	57,14%	209,09%

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

2.3.3. Fokus Urusan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Sulawesi Tenggara didominasi oleh perikanan budidaya, dengan produksi sebesar 406,32 ton pada tahun 2021 yang didominasi oleh hasil budidaya laut. Sedangkan untuk perikanan tangkap, terjadi penurunan produksi, yaitu sebesar 255,18 ton pada tahun 2020 turun menjadi 254,55 ton pada tahun 2021. Nilai produksi ini yang menjadikan sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara. Jika dibandingkan dengan awal masuknya pandemi Covid 19, kontribusi PDRB pada tahun 2019 sebesar 11,24 persen mengalami peningkatan sejumlah 0,36 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 11,6 persen. Hal ini turut berpengaruh terhadap nilai ekspor hasil perikanan yang meningkat, pada tahun 2019 sebesar 5.439,86 USD meningkat sebesar 7.116,67 USD pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena wilayah Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya kelautan yang besar dan beragam juga merupakan salah satu sektor yang diminati oleh investor.

Akan tetapi upaya peningkatan produksi harus diikuti dengan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. Kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing di Sulawesi Tenggara masih sering terjadi yaitu kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, penambangan pasir dan perizinan usaha perikanan yang belum lengkap. Keberlanjutan pengelolaan perikanan juga didukung oleh tersedianya kawasan konservasi perairan. Perkembangan luas kawasan konservasi laut dan perairan untuk sektor perikanan selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dimana tahun 2017 dari 1,84 Juta Ha menjadi 1,96 Juta Ha di tahun 2021. Kondisi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.102.
Kondisi Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Fungsi Ekonomi					
1.	Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Provinsi ADB (%)	12,70	11,32	11,24	11,6	11,6
2.	Produksi Perikanan (ribu ton)					
	- Perikanan Tangkap	232,86	240,34	254,03	255,18	254,55
	- Perikanan Budidaya	1.016,38	631,23	453,38	381,69	406,32
3.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD ribu)	8.324,94	2.678,57	5.439,86	5.256,21	7.116,67
4.	Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	64,02	65,14	71,13	70,51	70,95
5.	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (unit)	671	1.057	1.636	1.636	1.636
6.	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan	122,68	123,46	117,02	97,45	102,54
B.	Fungsi Lingkungan					
1.	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (juta ha)	1,84	1,84	1,96	1,96	1,96
2.	Jumlah Pulau-Pulau Kecil Termasuk Pulau Kecil Terluar yang Dikelola (pulau)	117	117	117	117	117
3.	Jumlah Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas)	135	135	138	144	156

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

2.3.3.2. Urusan Pariwisata

Perkembangan Kepariwisata Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang cukup baik sejalan dengan meningkatnya kualitas aksesibilitas, amenitas dan sarana penunjang dalam melakukan perjalanan di Destinasi Wisata. Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara bahkan bagi Negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segmen yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja. Capaian kinerja Pariwisata berdasarkan pengukuran dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.103.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Realisasi Capaian Per-Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kunjungan Wisata (Org)	2.419.776	2.481.632	2.556.554	878.198	927.469	4.832.290*
				8.720.256**	1.927.142**	2.539.976**	
2.	Rata-rata tinggal wisatawan (Hari)	5,69	2,9	2,78	1,67	1,66	1,69
3.	Jumlah PAD Sektor Pariwisata (Rp)	804.500.000	1.030.411.500	1.118.285.000	402.973.900	621.330.000	1.122.401.000
4.	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Rp)**			960.790	3.667.350	3.331.250	3,497.813

*) Data estimasi sementara

**) Data bersumber dari MPD (Mobile Positioning Data) Kemenparekraf RI dan BPS (Badan Pusat Statistik)

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, periode tahun 2017 hingga 2022 jumlah kunjungan wisata, rata-rata tinggal wisatawan, jumlah PAD sektor pariwisata dan Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah PAD berangsur naik dan semakin memperlihatkan peningkatan pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena telah berakhirnya masa pandemi dan beralih ke masa *new normal*.

Pada tahun 2019, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan sistem teknologi *Mobile Positioning Data* (MPD) untuk menghitung jumlah kunjungan dan memantau pergerakan wisatawan nusantara. Metode MPD pada era digital saat ini dinilai valid, akurat dan *real-time* dalam pendistribusian data untuk menghitung pergerakan wisatawan di Indonesia. Rata – rata jumlah pengeluaran wisatawan dalam menyumbang perekonomian Sulawesi Tenggara juga mengalami peningkatan sejak tahun 2019, walaupun sempat menurun pada tahun 2021 disebabkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah dan meningkat kembali pada tahun 2022. Menyambut keadaan ini, Pemerintah gencar melaksanakan program – program kepariwisataan untuk kembali menarik minat wisatawan berkunjung ke Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.3.3.3. Urusan Pertanian

a. Pertanian

Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar bagi PDRB di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian besar penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara bermata pencaharian sebagai petani. Urusan pertanian meliputi kondisi lahan, jenis pengairan/irigasi, serta produksi dan produktivitas pertanian. Pertanian di Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi berdasarkan jenis pengairannya, tabel di bawah ini menampilkan Luas Lahan berdasarkan jenis pengairan dan frekuensi penanaman padi di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2020-2021.

Tabel 2.104.
Luas Lahan sawah berdasarkan jenis Pengairan dan Frekuensi Penanaman Padi (Ha) di Sulawesi Tenggara Tahun 2020 dan 2021

No.	Jenis Pengairan	Frekuensi Penanaman			Tidak Ditanami Padi *)	Jumlah
		1 X	2 X	3 X		
Tahun : 2020						
1	Irigasi	43,0	73.642,3	14.090,0	9.315,4	97.090,7
2	Tadah Hujan	6,0	3.780,8	10.973,3	7.140,0	21.900,1
3	Rawa Pasang Surut	0,0	639,0	813,0	1.696,5	3.148,5
4	Rawa Lebak	0,0	191,0	50,0	1.630,0	1.871,0
	Jumlah	49	78.253,1	25.926,3	19.781,9	124.010,3
Tahun : 2021						
1	Irigasi	974,0	68.846,8	11.137,3	8.996,4	89.954,5
2	Tadah Hujan	15,2	9.851,6	11.605,2	5.437,3	26.909,3
3	Rawa Pasang Surut	0,0	617,0	2.017,0	1.797,5	4.431,5
4	Rawa Lebak	0,0	191,0	50,0	1.630,0	1.871,0
	Jumlah	989,2	79.506,4	24.809,5	17.861,2	123.166,3

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Pada sektor pertanian tanaman pangan, tanaman pangan yang diusahakan di Sulawesi Tenggara terdapat 8 jenis tanaman yang utama yaitu : padi sawah dan padi ladang, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Dari jenis tanaman pangan, padi masih mendominasi produksi tanaman pangan di Sulawesi Tenggara dengan jumlah produksi padi (sawah dan ladang) sebesar 530.029 ton pada tahun 2021, kemudian jagung dengan jumlah produksi 150.561 ton pada tahun 2021 dan ubi kayu dengan produksi sebesar 137.657 ton pada tahun 2021. Pada tabel di bawah ini menunjukkan data luas tanaman, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017-2021.

*Tabel 2.105.
Luas Tanaman, Luas Panen, Produksi & Produktivitas Padi & Palawija
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 - 2021*

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Realisasi Capaian Per-Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	Produksi (Ton)					
1.	Jumlah Padi (Padi Sawah + Padi Ladang)	516.292	709.516	656.691	532.774	530.029
2.	Jagung	78.448	221.498	279.170	179.906	150.561
3.	Kedelai	3.710	9.853	1.540	629	574
4.	Kacang Tanah	5.199	2.054	3.221	3.046	3.104
5.	Kacang Hijau	1.076	510	449	804	296
6.	Ubi Kayu	175.719	210.387	144.752	167.769	137.657
7.	Ubi Jalar	29.411	20.291	17.682	17.707	15.469
II	Produktivita (Ku/Ha)					
1.	Jumlah Padi (Padi Sawah + Padi Ladang)	41,51	39,15	38,85	39,85	41,57
2.	Jagung	37,48	40,54	41,75	35,83	33,17
3.	Kedelai	16,72	18,18	16,93	14,50	17,12
4.	Kacang Tanah	7,50	6,14	8,23	7,36	7,77
5.	Kacang Hijau	8,45	8,33	8,28	14,67	8,58
6.	Ubi Kayu	242,51	239,57	234,56	255,05	265,26
7.	Ubi Jalar	128,38	124,44	122,70	119,66	115,18
III	Luas Panen (Ha)					
1.	Jumlah Padi (Padi Sawah + Padi Ladang)	171.398,0	181.211,4	169.032,1	133.697,2	127.517,3
2.	Jagung	45.917,1	54.635,1	66.868,3	50.212,8	45.386,9
3.	Kedelai	2.425,4	5.420,7	910,0	433,9	335,3
4.	Kacang Tanah	3.490,3	3.346,8	3.915,6	4.139,90	3.996,20
5.	Kacang Hijau	806,2	612,4	542,1	548,20	344,90
6.	Ubi Kayu	10.016,1	8.781,8	6.171,1	6.578,00	5.189,50
7.	Ubi Jalar	1.928,1	1.630,6	1.441,1	1.479,80	1.343,00
IV	Luas Tanam (Ha)					
1.	Jumlah Padi (Padi Sawah + Padi Ladang)	176.237,8	187.594,5	168.515,5	192.515,50	182.595,60
2.	Jagung	61.215,3	57.995,4	63.797,0	58.402,40	53.154,80
3.	Kedelai	1.900,30	6.236,00	653,20	505,8	4.472,70
4.	Kacang Tanah	3.273,1	4.088,5	2.972,1	4.853,00	3.337,30
5.	Kacang Hijau	688,9	590,4	548,0	613,20	264,10
6.	Ubi Kayu	9.553,0	8.087,3	5.799,3	7.515,50	5.416,70
7.	Ubi Jalar	1.643,6	1.640,7	1.193,9	1.684,20	1.395,70

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

*Tabel 2.106.
Luas Lahan yang di tanami padi dan tidak ditanami padi serta frekuensi penanamannya
di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2021*

No.	Tahun	Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi *)		Jumlah
		Satu kali	Dua Kali	≥ Tiga kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak Ditanami apa pun	
1.	2019	24.810,0	76.139,0	1.685,9	7.240,0	13.415,0	123.289,9
2.	2020	25.926,3	78.253,1	49,0	7.502,0	12.279,9	124.010,3
3.	2021	24.809,5	79.506,4	989,2	7.358,3	10.502,9	123.166,3

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Tabel 2.107.
Luas Lahan Pertanian Tanaman Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Luas Lahan
		(ha)
1.	Buton	1.339,64
2.	Muna	4.450,00
3.	Konawe	-
4.	Kolaka	7.385,00
5.	Konawe Selatan	163.821,00
6.	Bombana	21.186,00
7.	Wakatobi	2.536,44
8.	Kolaka Utara	1.328,79
9.	Buton Utara	-
10.	Konawe Utara	21.142,41
11.	Kolaka Timur	-
12.	Konawe Kepulauan	1.909,00
13.	Muna Barat	0
14.	Buton Tengah	44.476,00
15.	Buton Selatan	1.829,74
16.	Kendari	379,41
17.	Baubau	2.910,01
Jumlah		274.693,44

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

b. Perkebunan

Sektor Perkebunan merupakan penyumbang nilai tertinggi pada sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yakni sebesar 52,9 persen. PDRB dari golongan tanaman perkebunan dengan nilai 8.618,62 Miliar Rupiah dihitung atas dasar harga berlaku. Dari nilai tersebut kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 6,20 persen. Pada Tahun 2021 atas dasar harga konstan pertumbuhan PDRB sektor perkebunan mengalami pertumbuhan sebesar 2,49 persen.

Sektor Hortikultura yang merupakan salah satu lapangan usaha penyumbang 0,94 persen PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai 1.306,98 Miliar rupiah pada tahun 2021. Pada Tahun 2021 atas dasar harga konstan pertumbuhan PDRB sektor tanaman hortikultura meningkat 0,76 persen, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.108.
Kontribusi Sektor Perkebunan & Hortikultura terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Realisasi Capaian Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Perkebunan						
1.	Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan ADHB (Miliar Rupiah)	6.865,81	7.430,81	8.140,79	8.186,84	8.618,62
2.	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara ADHB (persen)	24,08	23,96	23,73	24,14	23,80
3.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan terhadap Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (persen)	51,96	52,23	52,87	52,41	52,90
4.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara (persen)	6,39	6,29	6,30	6,29	6,20
5.	Pertumbuhan PDRB golongan tanaman perkebunan ADHK (persen)	6,81	8,72	6,91	-3,80	2,49
Hortikultura						
6.	Nilai PDRB Sub Sektor Hortikultura ADHB (Miliar Rupiah)	1.036,15	1.119,18	1.241,04	1.264,12	1.306,98
7.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura terhadap Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (persen)	7,84	7,87	8,06	8,09	8,02
8.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara (persen)	0,96	0,95	0,96	0,97	0,94
9.	Pertumbuhan PDRB golongan tanaman hortikultura ADHK (persen)	-2,97	5.50	5,91	-2,66	0,76

Sumber: Badan Pusat Statistik (Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2022)

2.3.3.4. Urusan Kehutanan

Perkembangan pengelolaan kawasan hutan di Sulawesi Tenggara terus dilakukan berupa kegiatan rehabilitasi hutan, pengembangan produksi hasil hutan, pengamanan kebakaran kawasan hutan, pengawasan hutan, penetapan tapal batas kawasan hutan serta perencanaan pembangunan kehutanan. Kondisi pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.109.
Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2020

No	Uraian	2016 (Ha)	2017 (Ha)	2018 (Ha)	2019 (Ha)	2020 (Ha)	2021 (Ha)
1.	Hutan Lindung	1.081.489	1.081.489	1.081.489	1.081.261,87	1.081.261,87	1.081.826,00
2.	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	282.924	282.924	282.924	287.334,06	287.334,06	288.291,00
3.	Hutan Produksi						
	- Terbatas	466.854	466.854	466.854	447.905,59	447.905,59	409.001,94
	- Tetap	404.893	404.893	404.893	409.829,48	409.829,48	448.017,68
	- Dapat di Konversi	96.995	96.995	96.995	96.134,51	96.134,51	96.175
	Jumlah	2.333.155	2.333.155	2.333.155	2.322.465,51	2.322.465,51	2.322.312

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki kawasan Perhutanan Sosial yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Perhutanan Sosial terbagi atas Hutan Desa, Hutan yang pengelolaannya oleh masyarakat adat berdasarkan hukum Adat (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan kemitraan. Di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat Hutan Desa, Hutan yang dikelola oleh adat terbagi di beberapa lokasi Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara, yaitu: Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Buton, kabupaten Buton Tengah, kabupaten Kolaka, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe. Hutan HTR hanya terdapat di Kabupaten Muna dan Hutan Kemitraan terdapat di Kabupaten Buton.

Dari tahun 2013-2016 tidak mengalami perubahan penurunan maupun peningkatan, di Tahun 2017 Hutan yang pengelolaannya oleh masyarakat yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKM) sebanyak 3.728 Ha (7 izin), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 1.817 Ha (3 izin), Kemitraan 501,30 Ha (1 izin) dan di Tahun 2018 data Perhutanan Sosial mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 39.122 Ha. Sedangkan di Tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 25.747 Ha. Pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 5.244 Ha dan Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 11.440 Ha. Tabel di bawah ini menggambarkan Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2021.

Tabel 2.110.
Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2020

No	Uraian	2017 (Ha)	2018 (Ha)	2019 (Ha)	2020 (Ha)	2021 (Ha)
PERHUTANAN SOSIAL						
1.	Hutan Desa	-	29317 (11 izin)	-	349 (1 izin)	1.810 (9 izin)
2.	HKM	3728 (7 izin)	8643 (22 izin)	13215 (55 izin)	4860 (33 izin)	9.630 (62 izin)
3.	HTR	1817 (3 izin)	1067 (2 izin)	273 (1 izin)	-	-
4.	Kemitraan	501,30 (1 izin)	95 (1 izin)	12.259 (10 izin)	35 (1 izin)	-

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Urusan Kehutanan juga melaksanakan beberapa urusan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan, dibawah ini ditampilkan tabel capaian indikator urusan kehutanan tahun 2013-2021 Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 2.111.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2021

No	Indikator	Realisasi Capaian Per-Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Total Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	2.849,53 Ha	1.116 Ha	1.250 Ha	1.333 Ha	2.547 Ha	931 Ha
2.	Produksi Hasil Hutan:						
	- Hasil Hutan Kayu (M³)	48.060,19 M3	46.462,07 M3	103.529,47 M3	88.993,02 M3	76.860 M3	84.617,77 M3
	- Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	-	1554,00 Ton	1354,32 Ton	1214,43 Ton	864.,55 Ton	0
3.	Penurunan Luas Kerusakan kawasan hutan	81.710,75 Ha	81.635,59 Ha	80.888,6 Ha	2.893,107 Ha	3.209,04 Ha	1.825,25 Ha
		-0,20%	-0,03%	-0,03%	0,12	0,14%	0,080%
4.	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	58,48%	58,48%	58,48%	58,48%	58,48%	58,98%
5.	Peningkatan Kapasitas Penanganan Kasus Kejahatan Kehutanan (persen)	62,50%	91,67%	175 %	0	0	0
		(Kasus yg terselesaikan)	(Kasus yg terselesaikan)	(Kasus yg terselesaikan)	(Penanganan Kasus di limpahkan ke Ditjen Penegakan Hukum KLHK)	(Penanganan Kasus di limpahkan ke Ditjen Penegakan Hukum KLHK)	(Penanganan Kasus di limpahkan ke Ditjen Penegakan Hukum KLHK)

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Semakin rendahnya capaian indikator Rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis (RHL) setiap tahun, antara lain disebabkan oleh:

- Terbatasnya alokasi anggaran RHL yang menurun setiap tahun.
- Laju Kebakaran hutan yang tinggi berdampak langsung terhadap kerusakan kawasan hutan.
- Penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin dan fungsi kawasan hutan menimbulkan kerusakan kawasan hutan yang signifikan.
- Keterbatasan SDM dan sarpras pengamanan hutan serta peralatan pemadaman kebakaran hutan.

Untuk Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan tidak ada perubahan hingga saat ini, hal ini disebabkan karena tidak ada alih fungsi kawasan hutan lindung sehingga rasio kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan Sulawesi Tenggara tetap dapat dipertahankan.

2.3.3.5. Urusan Perindustrian dan Perdagangan

a. Perkembangan Sektor Industri

Perkembangan sektor industri di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021, masing-masing secara berturut-turut : 9.471, 13.213, 13.436, 13.921 dan 14.628. Jenis industri yang mengalami peningkatan cukup baik pada tahun 2017-2021 yaitu IK Hasil Pertanian dan Kehutanan, IK Kimia dan IK Aneka. Perkembangan Sektor Industri Tahun 2017-2022 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.112.
Perkembangan Sektor Industri Kecil di Sulawesi Tenggara, Tahun 2017-2021

Kelompok / Jenis Industri	2017	2018	2019	2020	2021
Industri Kimia	1557	10	10	10	10
Industri Logam dan Mesin	1335	1	2	3	3
Industri Aneka	1	1	1	1	1

Kelompok / Jenis Industri	2017	2018	2019	2020	2021
Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	6.579	205	209	209	209
Industri Kecil :					
- IK Hasil Pertanian dan Kehutanan	1.779	1.781	1.881	7.110	7.412
- IK Kimia	1.566	1.568	1.588	2.064	2.174
- IK Logam dan Mesin	3.184	3.186	3.206	2.498	2.655
- IK Aneka	6.458	6.461	6.536	2.026	2.164
Jumlah	9.471	13.213	13.436	13.921	14.628

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

b. Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerbitkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2039 sebagai pijakan dan langkah untuk panduan sekaligus *road map* bagi hilirisasi produk-produk unggulan di Sulawesi Tenggara. Komoditi prioritas yang akan dibangun dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

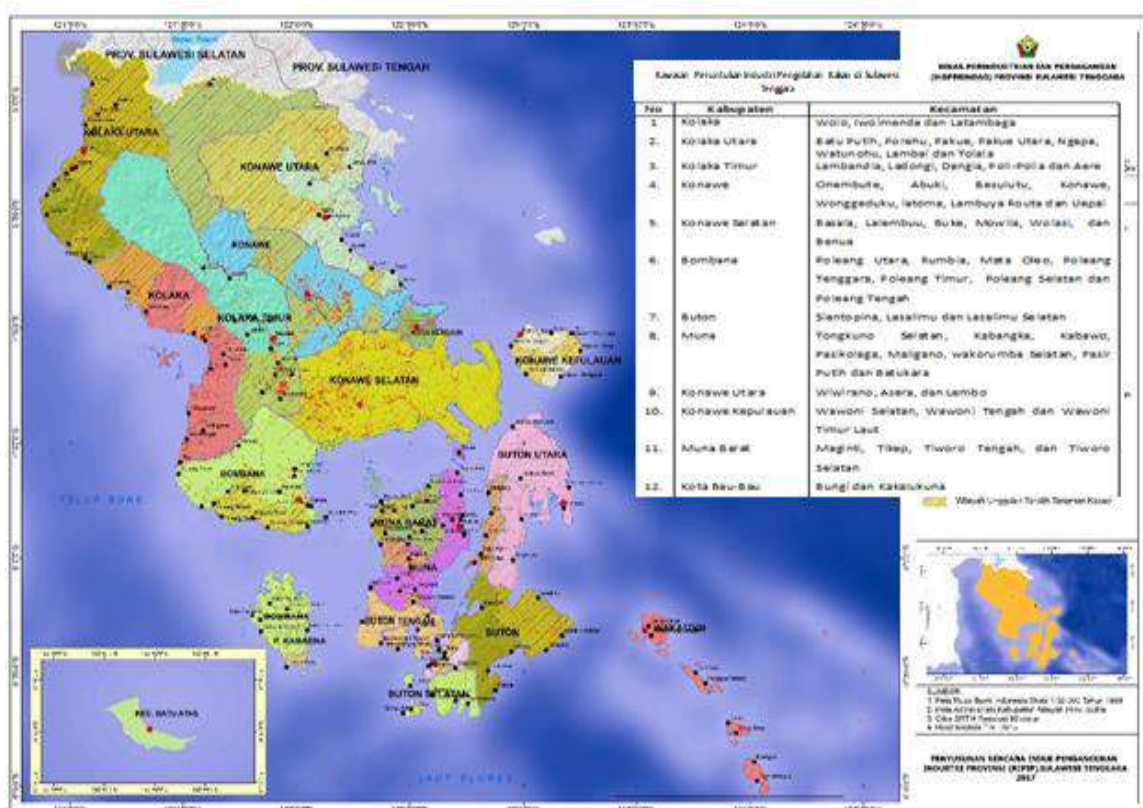
Tabel 2.113.
Komoditi Prioritas yang akan dibangun dalam Rencana Pembangunan Industri
Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri		
		2019-2023	2024-2029	2030-2039
1.	Indikator Kakao, Cokelat dan Kembang Gula	Industri Kakao	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula
	Wilayah Potensial: Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana, Kab. Konawe Utara, Kab. Buton, Kab. Muna, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Muna Barat, Kota Baubau.			
2.	Industri Pengolahan Kelapa Terpadu	Industri Kopra, Industri minyak goreng kelapa, industri kerajinan YTDL	Industri tepung dari pellet kelapa, industri serat sabut kelapa	Industri produk masak dari kelapa
	Wilayah Potensial: Kab. Buton, Kab. Muna, Kab. Konawe, Kab. Wakatobi, Kab. Kolaka Utara, Kab. Buton Utara, Kab. Konawe Utara, Kab. Kolaka Timur, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Muna Barat, Kab. Buton Tengah, Kab. Buton Selatan, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kota Kendari, Kota Baubau, dan Kab. Bombana.			
3.	Industri Pengolahan Rumput Laut	Industri Pengolahan Rumput Laut (alkali treated caragenan chips, karagenan)	Industri Pengolahan Rumput Laut (agar-agar)	Industri Pengolahan Rumput Laut (gelatin dan lainnya)
	Wilayah Potensial: Kab. Kolaka, Kab. Konawe Selatan, Kab. Buton, Kab. Buton Tengah, Kab. Buton Selatan, Kab. Muna, Kab. Muna Barat, Kab. Buton Utara, Kab. Bombana.			
4.	Industri Pengolahan Perikanan Tangkap	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	Industri minyak ikan
	Wilayah Potensial: Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara, Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe, Kab. Bombana, Kab. Konawe Utara, Kab. Buton, Kab. Muna, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Muna Barat, Kab. Buton Utara, Kab. Buton Tengah, Kab. Buton Selatan, Kab. Wakatobi, Kota Kendari.			
5.	Industri Logam Dasar	Industri pembuatan logam dasar bukan besi (Nikel Murni atau NPI, stainless steel biller dan stainless steel slab)	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja
	Wilayah Potensial: Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kab. Kolaka, Kab. Konawe Utara, Kab. Kolaka Utara, Kab. Buton dan Kab. Konawe.			

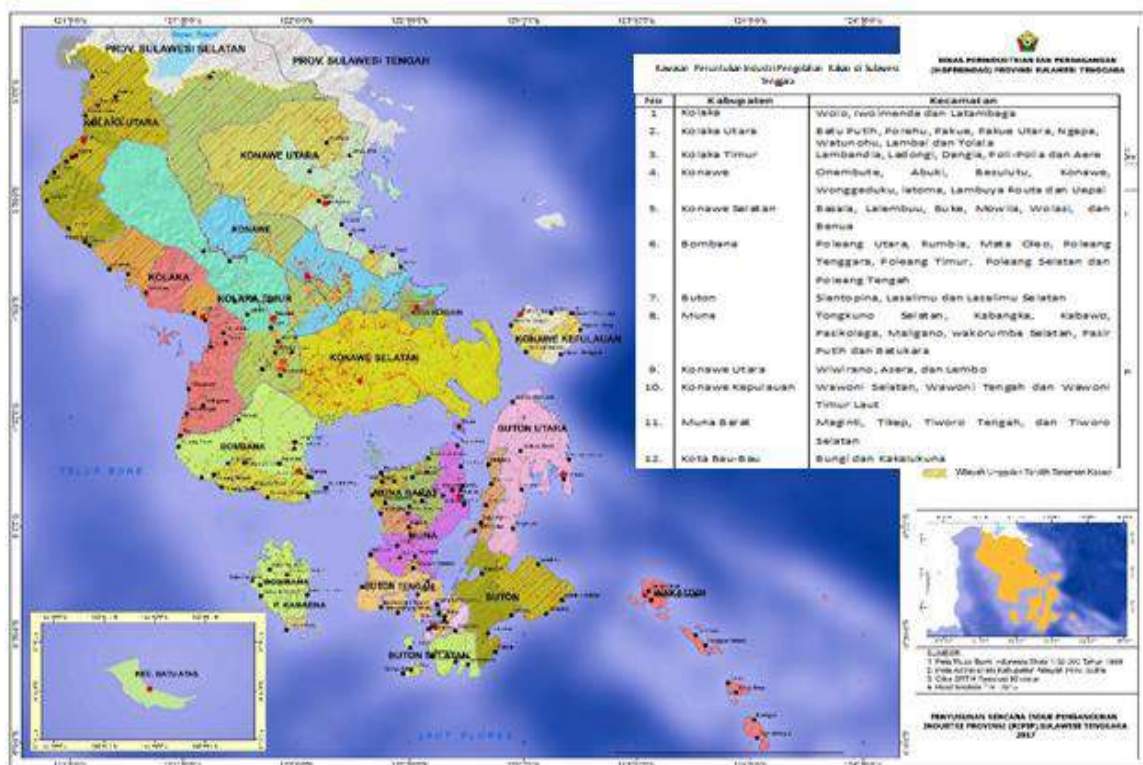
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra, 2021.



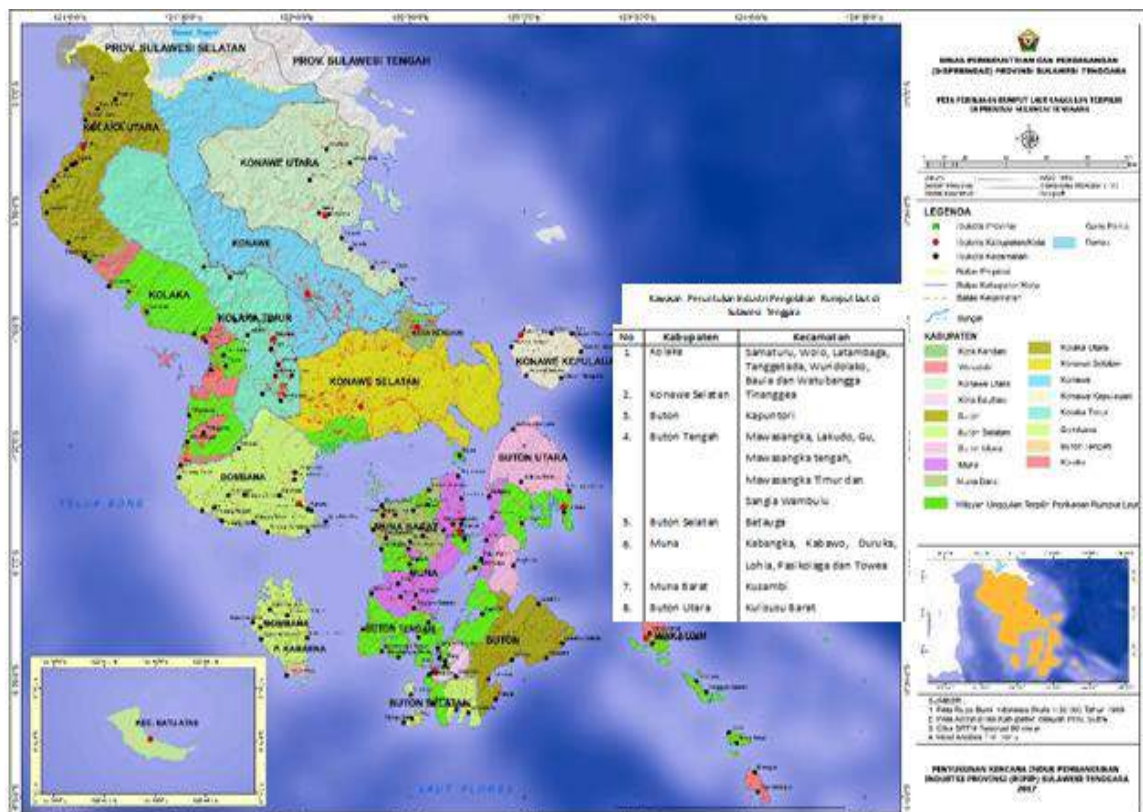
Gambar 2.44
Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra, 2021.



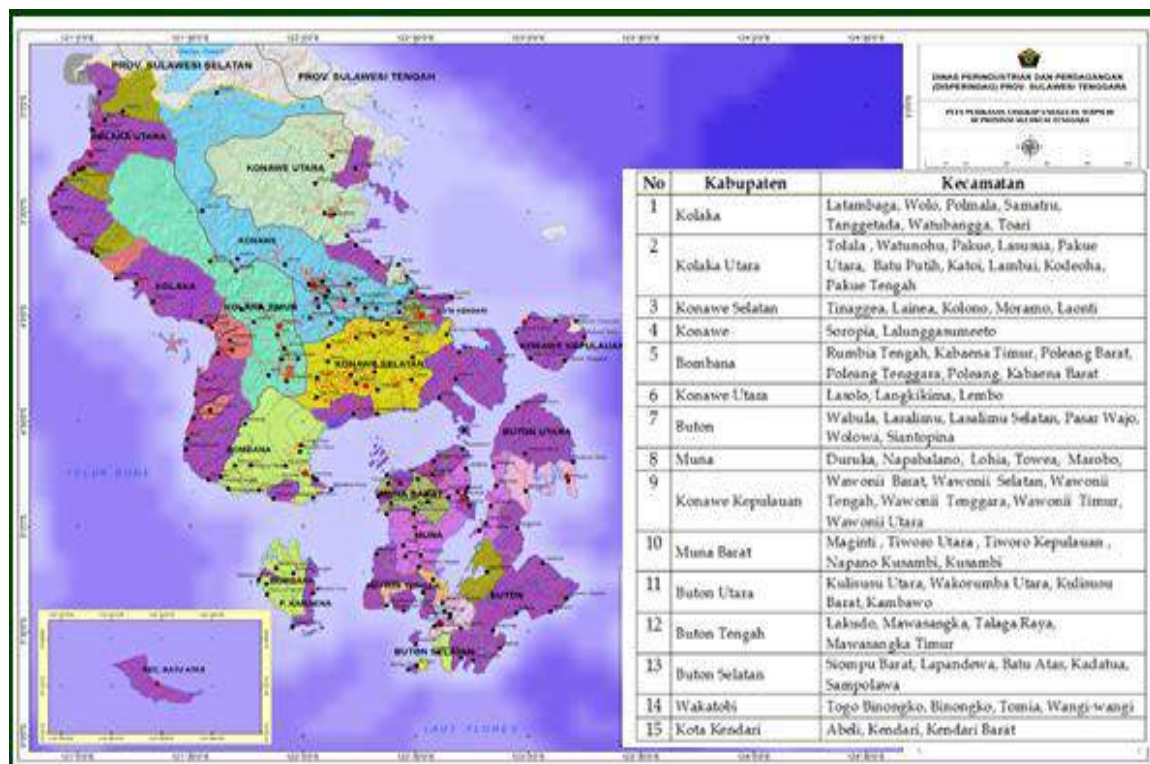
Gambar 2.45
Kawasan Peruntukan Industri Pengolahan Kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra, 2021.



Gambar 2.46
Kawasan Peruntukan Industri Kelapa Terpadu di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra, 2021.



Gambar 2.47
Kawasan Peruntukan Industri Pengolahan Rumput Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra, 2021.



Gambar 2.48
Kawasan Peruntukan Industri Pengolahan Perikanan Tangkap di Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sultra, 2021.

2.3.3.6. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Bidang energi dan sumber daya mineral mempunyai kontribusi cukup besar dalam mendukung perekonomian Sulawesi Tenggara. Aktivitas pertambangan merupakan sektor yang paling besar dalam menyumbangkan pendapatan daerah dan mendorong perekonomian daerah.

a. Pertambangan

Pertambangan merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penerimaan Daerah dari sektor pertambangan Tahun 2013-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.114.
Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan daerah dari sektor Pertambangan	132.986.023.894	256.996.000.56	581.855.707.509	1.038.711.685.941	1.529.449.502.612	2.628.629.926.509
Royalti	122.612.925.329	241.132.371.321	571.215.915.458	1.020.807.628.425	1.574.837.258.515	2.609.288.376.014
Iuran Tetap	10.373.098.565	15.863.629.244	17.904.057.516	17.904.057.516	17.612.244.097	19.341.550.495
Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Tambang Nikel dan Aspal merupakan dua jenis produksi pertambangan yang menonjol di Sulawesi Tenggara. Produksi dan nilai produksi kedua jenis tambang tersebut ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.115.
Keadaan Komoditas Pertambangan Nikel dan Aspal di Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2020

Tahun	Produksi (ton)			Nilai Produksi (Rp. Juta Rupiah)		
	Bijih Nikel	Ferro Nikel	Aspal	Bijih Nikel	Ferro Nikel	Aspal
2013	29.431.004	15.535	583.830	5.398	2.563.275	175.148
2014	1.387.140	16.851	27.529	138.714	1.152	27.529
2015	932.539	17.350	18.150	709.290	41.550	6.676
2016	1.539.426	18.000	50.435	753.291	2.020.750	5.589
2017	9.043.232,94	112.490	17.039	4.059.613	3.073.548	15.960
2018	16.926.763	24.135	53.000	-	-	-
2019	22.576.054	119.900	25.846	-	-	-
2020	22.531.686	-	91.000	-	-	-
2021	22.531.686	-	91.000	-	-	-

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Sampai saat ini, izin pertambangan di Sulawesi Tenggara semakin diperketat dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penambangan liar.

Tabel 2.116.
Pertambangan Tanpa Izin di Sulawesi Tenggara

No	Indikator	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas areal penambangan liar yang ditertibkan	662,25	47,68	0	199,62	8,96	8,96
2.	Luas areal penambangan liar	511	108,48	33,91	25,04	36,311	36,311
3.	Pertambangan tanpa izin	129,60	43,95	0	797	25	25

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Tahun 2013, kewenangan perizinan mineral dan batubara masih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga tidak ada data penambangan liar. Data luas area penambangan liar diperoleh dari hasil pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap bukaan lahan usaha pertambangan tanpa izin, data luas penambangan liar yang ditertibkan diperoleh dari perhitungan luas lahan usaha pertambangan yang telah ditertibkan Izin Usaha Pertambangan.

b. Listrik

Pertumbuhan permukiman di Sulawesi Tenggara signifikan dengan penambahan cabang dan ranting perusahaan listrik Negara, banyaknya pelanggan, tenaga listrik yang terjual serta nilai penjualan listrik. Keadaan perkembangan listrik di Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.117.
Perkembangan Kelistrikan di Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Elektrifikasi (persen)	78,06	82,1	78,11	91,47	94,94	95,96
Daya Terpasang	223,730	243,520	257,690	-	91,70	91,70

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2020.

Pertumbuhan permukiman, industri dan perdagangan di Sulawesi Tenggara signifikan dengan penambahan cabang dan ranting Perusahaan Listrik Negara, banyaknya pelanggan, tenaga listrik yang terjual serta nilai penjualan listrik. Meningkatnya Tenaga Listrik yang Terjual di Tahun 2018 sebesar 674.565.130 kwh dengan Jumlah pelanggan sebanyak 394.406 Pelanggan. di Tahun 2019 Tenaga Listrik yang Terjual sebesar 730.790.409 kwh dengan jumlah pelanggan sebanyak 390.982 pelanggan, dan di Tahun 2020 Tenaga Listrik yang terjual sebesar 794.358.766 kwh dengan jumlah pelanggan 427.833 Pelanggan. Keadaan perkembangan listrik di Sulawesi Tenggara tahun 2018-2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.118.
Jumlah Pelanggan, Tenaga Listrik yang terjual, dan Nilai Penjualan Tenaga Listrik Menurut Kategori Pelanggan Tahun 2018-2020

Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan			Tenaga Listrik yang terjual			Nilai Penjualan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Industri	221	271	358	37.653.494	38.412.733	42.757.076	43.698.717	44.101.823,20	50.138.661
Bisnis	17.743	19.508	21.296	136.904.573	150.665.147	154.633.658	173.752.523	192.570.271,91	192.954.447
Penerangan jalan	430	460	-	13.038.993	13.065.291	-	19.189.612	19.177.112.97	-
Jawatan	2.943	3.113	3.901	27.868.060	30.265.751	45.588.009	37.372.781	40.749.579,90	63.077.077
Rumah tangga	321.218	359.736	393.355	432.277.434	457.725.254	518.712.576	504.014.472	529.415.918,00	549.258.164
Sosial	6.806	7.818	8.837	24.622.189	28.822.019	30.722.402	20.261.535	23.970.192,52	25.003.352
Lainnya	45	76	86	2.200.387	11.834.214	1.945.046	3.275.363	17.678.807,11	4.710.441
Jumlah	349.406	390.982	427.833	674.565.130	730.790.409	794.358.766	801.565.003	867.663.705,60	885.322.142

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Tahun 2020

c. Energi Baru Terbarukan

Bauran energi primer Sulawesi Tenggara Tahun 2015 didominasi oleh minyak bumi atau sekitar 88,5 persen. Selanjutnya adalah batubara dengan pangsa sekitar 6,7 persen serta gas sebesar 4,0 persen. Selain itu, bauran energi lainnya berupa energi baru terbarukan menyumbang sebagian kecil keseluruhan bauran energi daerah atau sebesar 0,8 persen. Energi fosil berupa cadangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia diperkirakan habis dalam 12 tahun mendatang, sehingga bauran energi primer Sulawesi Tenggara yang didominasi oleh minyak bumi dikhawatirkan ketahanan dan keberlanjutannya.

Sulawesi Tenggara memiliki potensi energi terbarukan seperti panas bumi, surya, air, angin/bayu, biomassa dan lainnya. Potensi-potensi tersebut seharusnya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mengganti dominasi minyak bumi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi.

Tabel 2.119.
Bauran Energi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

No.	Jenis Energi	Satuan	Potensi
1.	Panas Bumi	MW	6.340*
2.	Mikro Hidro	MW	896
3.	Biomassa	MW	301
4.	Surya	MW	164
5.	Bayu	MW	3.917
6.	Minyak Bumi	MW	257
7.	Gas Bumi	MMSTB	0,1
		BCF	0,5

Sumber: Rencana Umum Energi Nasional
Ket : * Sulseltra

2.3.3.7. Urusan Transmigrasi

Urusan pilihan adalah urusan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*Core Competence*) yang menjadi kekhasan daerah salah satu diantaranya adalah urusan pilihan ketransmigrasian. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah penerima warga transmigrasi terbanyak di Indonesia. Namun seiring dengan bertambahnya penduduk dan pemekaran daerah, maka ketersediaan lahan untuk permukiman transmigrasi semakin berkurang sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan transmigran. Keadaan permukiman transmigrasi sejak tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.120.
Keadaan Penerimaan Transmigrasi Umum menurut Jenis Transmigrasi Tahun 2017-2021

Tahun	Umum		Transmigrasi Swakarsa Mandiri		Total	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
2017	163	649	-	-	163	649
2018	115	454	-	-	115	454
2019	240	802	-	-	240	802
2020	-	-	-	-	-	-
2021	45	217	-	-	45	217

Sumber: Dinas Nakertrans Prov. Sultra, 2022

Tabel 2.120 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerimaan transmigran dalam kurun waktu 2017-2019. Penempatan transmigran mengacu pada daya tampung UPT yang tersedia, dimana setiap transmigran yang ditempatkan memperoleh hak atas lahan pekarangan seluas 0,25 ha untuk lahan tempat tinggal dan 0,75 ha untuk lahan usaha. Pada tahun 2020 tidak ada penerimaan transmigran dikarenakan pandemi covid-19. Kemudian pada tahun 2021 penerimaan transmigran dibuka kembali dengan jumlah 45 KK. Total jumlah transmigran di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2021 adalah 1.463 KK (5.511 jiwa) yang tersebar di 10 (sepuluh) kabupaten (Kemendesa, PDT dan Transmigrasi, 2021).

Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan, pembangunan transmigrasi di Sulawesi Tenggara secara spesifik merupakan upaya pembangunan dan pengembangan wilayah berbasis kawasan untuk mengintegrasikan pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan dalam satu kesatuan pengembangan ekonomi; mendayagunaan potensi sumberdaya alam; memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdampak pada peluang penyaluran sumber daya Transmigran Daerah Asal (TPA) dan memberikan manfaat pula bagi sumber daya daerah penerima sebagai Transmigran Penduduk Setempat (TPS); dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, terintegrasi melalui sektor-sektor pembangunan.

Di Sulawesi Tenggara saat ini terdapat 11 (sebelas) Kawasan Transmigrasi, 3 (tiga) Kawasan Transmigrasi diantaranya menjadi bagian dari 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional RPJMN 2020 -2024, meliputi Kawasan Transmigrasi: Mutiara (Kab. Muna), Asinua/Routa (Kab. Konawe) dan Tinanggea (Kab. Konawe Selatan). Serta 8 (Delapan) Kawasan Transmigrasi yang menjadi bagian dalam 100 Kawasan Transmigrasi prioritas Kementerian yang di revitalisasi, meliputi kawasan transmigrasi: Kantisa (Kab. Muna Barat), Uluiwoi (Kab. Kolaka Timur), Lasalimu (Kab. Buton), Hialu (Kab. Konawe Utara), Anawua (Kab. Kolaka), Lambale (Kab. Buton Utara) dan Mawasangka (Kab. Buton Tengah), Kolono (Kab. Konawe Selatan). Kawasan transmigrasi di Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.121.
Kawasan Transmigrasi di Sulawesi Tenggara Tahun 2021

No	Kawasan Transmigrasi	Luas (Ha)	Potensi Pengembangan				Komoditas Unggulan
			KPB	SP- Baru	SP- Pugar	SP- Tempatan	
1.	Mutiara, Kabupaten Muna	30.578	Wakorumba	16 Desa	11 Desa	8 Desa	Padi sawah/ladang, palawija, mete, kelapa, kakao, kambing, ayam, perikanan tangkap
2.	Asinua/Routa Kabupaten Konawe	50.244	Waworaha Latoma	8 Desa	7 Desa	13 desa	padi, jagung, kacang tanah, sapi, ayam, kerbau, perikanan tambak, kakao, lada, nilam, kopi
3.	Tinanggea, Kabupaten Konawe selatan	18.822	Andoolo	1 Desa	22 Desa	37 desa	Padi sawah, jagung, kedelai, kacang tanah, hortikultura, kakao, mete, ternak besar.
4.	Kantisa, Kabupaten Muna Barat	45.276	Sido Makmur	2 Desa	5 Desa	29 desa	Jagung, kakao, sapi, kambing, hortikultura, tambak, perikanan
5.	Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur	26.662	Ueesi	3 Desa	6 Desa	12 desa	padi, jagung, kedelai, kacang tanah, nilam hortikultura, kakao, pala
6.	Lasalimu, Kabupaten Buton	26.870	Ambuau Indah	--	15 Desa	19 Desa	padi, jagung, kambing, sapi, kakao, pala, Sektor pariwisata
7.	Hialu, Kabupaten Konawe Utara	30.110	Hialu Utama	4 Desa	18 Desa	15 desa	padi sawah/ladang, kacang tanah, ubi, sapi, kambing, ayam, sawit, kakao, mete, lada, cengkeh

No	Kawasan Transmigrasi	Luas (Ha)	Potensi Pengembangan				Komoditas Unggulan
			KPB	SP-Baru	SP-Pugar	SP-Tempatan	
8.	Lambale, Kabupaten Buton Utara	36.678	Kepisino, Bonegunu	3 Desa	8 Desa	24 Desa	Padi ladang, bawang merah, jagung, mete, ternak sapi
9.	Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah	33.990	Mawasangka	1 Desa	11 Desa	22 Desa	Tanaman pangan, ternak besar, perikanan dan perkebunan
10.	Anawua, Kabupaten Kolaka	36.566	Kel. Watubangga	1 Desa	8 Desa	27 Desa	Padi sawah, Hortikultura, Kakao, Lada, Cengkeh, Kelapa, Kelapa sawit, Kopi, Vanili, ternak besar
11.	Kolono, Kabupaten Konawe Selatan	12.765	Desa Roda	1 Desa	1 Desa	1 Desa	Padi sawah/ladang, Hortikultura, Kakao, Lada, Cengkeh, Kelapa, Kopi, ternak besar dan perikanan

Sumber: Dinas Transnaker Prov.Sultra, Tahun 2022

2.3.4. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

2.3.4.1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai kewenangan :

- Melakukan Perumusan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan program kerja dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan rapat berkala untuk mendapatkan masukan dan mengetahui hambatan pelaksanaan tugas masing-masing serta mengupayakan pemecahannya;
- Melaksanakan penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan penyusunan Rencana Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi sesuai usulan program masing-masing yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan penyusunan rencana kerja pengalokasian dana yang bersumber dari APBN sebagai masukan BAPPENAS dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- Melaksanakan tugas perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Provinsi sesuai petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Provinsi dalam rangka menciptakan sinkronisasi program kegiatan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta berusaha menjangkau aspirasi masyarakat dan pelaku pembangunan se-Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Melaksanakan tugas koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam hal Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi serta perubahannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi serta membina hubungan kerja dengan Lembaga Non Departemen dan Swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- j. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah pada setiap OPD lingkup Pemerintah Provinsi sebagai bahan penyusunan program kerja pembangunan tahun berikutnya;
- k. Melaksanakan pengkajian dan penelitian serta Inovasi Daerah untuk perencanaan pembangunan Daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur.

Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

*Tabel 2.122.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2022*

No	Indikator	Capaian								Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (RPJPD 2005-2025)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perda No. 4 Tahun 2012
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (RPJMD 2018-2023)	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perda No. 9 Tahun 2019 (RPJMD Tahun 2018-2023)
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : Perubahan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023)	-	-	-	-	-	-	Ada	Ada	Perda No. 8 Tahun 2021 (RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023)
4.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada (RKPD 2023)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Pergub No.15 Tahun 2022 (RKPD Tahun 2023)
5.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda (RTRW 2014-2034)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perda No. 2 Tahun 2014
6	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (persen)	100	73,56	80	85	90	95	100	100	

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

2.3.4.2. Urusan Keuangan

Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

*Tabel 2.123.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022*

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum Audit
2.	SILPA terhadap APBD	352.655.750.081,43	104.891.579.152,00	281.175.078.407,00	155.273.768.956,00	241.066.735.765	428.410.072.113
3.	belanja pendidikan (20 persen)	1.382.083.378.850	1.051.345.034.750	1.129.534.858.500	1.146.590.474.101	1.647.172.242.478	1.415.842.253.559
4.	belanja kesehatan (10 persen)	238.465.376.802	345.198.679.488	314.147.161.072,42	525.671.193.348,47	591.615.201.750	774.743.533.804

Sumber: BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

2.3.4.3. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian meliputi pendidikan ASN, jabatan struktural, jabatan fungsional. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN merupakan tanggungjawab dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sedangkan untuk data terkait jabatan struktural, jabatan fungsional menjadi wewenang dari Badan Kepegawaian Daerah. Tabel-tabel di bawah ini menunjukkan

capaian indikator pelayanan urusan pendidikan dan pelatikepegawaian di Provinsi Sulawesi Tenggara:

*Tabel 2.124.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022*

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	10,69 %	8,17 %	7,36 %	2,12 %	1,46 %
2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	6,48 %	0%	3,24 %	4,98%	3,03 %

Sumber: BPSPDM Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

*Tabel 2.125.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020*

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	55	54	54	54	54
2.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1.076	1,182	1182	1186	1217
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.027	7,731	7731	8024	8024

Sumber: BKD Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

2.3.4.4. Urusan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Indikator capaian Kinerja Urusan Badan Riset dan Inovasi Daerah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 2.126.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Riset dan Inovasi daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020*

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100	100	100
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	40	60	100	100	100
3.	Penerapan SIDa					
4.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	24	24	0	30	40
5.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	6	12	18	30	40

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

2.3.4.5. Urusan Pengawasan

Urusan pengawasan menangani masalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di Pemerintahan seperti persentase pelanggaran pegawai, pelanggaran keuangan dan tindak lanjut temuan yang akan dilakukan. Fungsi Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat dan BPK.

*Tabel 2.127.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2016-2021*

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah temuan BPK (Rp ribu)	438.434.618	517.589	3.912.568	1.971.896	6.329.556	3.228.578
2.	Persentase tindak lanjut temuan (persen)	69,15	70,47	89,4	63,7	96,9	76,7
3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Level)	-	-	-	2	2	2
4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Level)	-	-	-	2	3	3

Sumber: Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

2.3.4.6. Urusan Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan memiliki fungsi urusan penunjang dalam Pemerintahan. Fungsi Sekretariat Dewan dalam Pemerintahan :

- Memastikan tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota.
- Memastikan tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).
- Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Dewan DPRD.

Berikut adalah data-data capaian kinerja Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut :

Tabel 2.128.
Capaian Kinerja Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2022

No	Keputusan/Ketetapan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Peraturan Daerah	10	9	22	9	5
2.	Keputusan DPRD	26	15	19	14	18
3.	Pernyataan	-	-	-	-	0
4.	Keputusan Pimpinan	10	9	11	7	11
5.	Keputusan Panitia	6	11	6	15	15
Total		52	44	58	41	49

Sumber: Biro Hukum Setda dan Set. DPRD Prov. Sultra, 2022

Tabel 2.129.
Capaian Kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021

No.	Kegiatan/Keputusan	2018	2019	2020	2021
1.	Rapat Paripurna Dewan	37	60	40	40
2.	Rapat Paripurna Istimewah	8	-	0	0
3.	Rapat Paripurna Khusus	-	-	0	0
4.	Rapat Kerja/Rapat Gabungan Komisi	7	11	12	12
5.	Rapat Fraksi-Fraksi	-	2	0	3
6.	Rapat Pimpinan Dewan	-	2	0	2
7.	Rapat Panitia Khusus	8	9	7	8
8.	Rapat Panitia Anggaran	5	8	15	10
9.	Rapat Panitia Musyawarah	11	6	16	15
10.	Rapat Panitia Teknis	-	-	0	0
11.	Kunjungan Keluar Daerah	195	180	66	77
12.	Kunjungan Kerja Dalam Daerah Prov	283	125	101	214
13.	Kunjungan Kerja Keluar Negeri	-	-	0	0
14.	Kunjungan Kerja Komisi	187	187	90	126
15.	Kunjungan Kerja Pimpinan Dewan Bersama Dengan Gubernur KDH		5	3	4
16.	Reses	-	2	3	3
17.	Rapat Komisi-Komisi				
	a. Komisi I	6	12	3	24
	b. Komisi II	3	9	4	23
	c. Komisi III	-	11	5	65
	d. Komisi IV	7	9	5	24
18.	Rapat Koordinasi Pimpinan Ketua Fraksi Dengan Gubernur	-	-	0	0
19.	Rapat Badan Pertimbangan Daerah	-	-	0	0
20.	Dengar Pendapat Komisi ABCDE	42	25	74	48
21.	Menerima Unjuk Rasa	83	83	65	98

Sumber: Set. DPRD Prov. Sultra, 2022

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Faktor utama yang berperan dalam menciptakan kemajuan ekonomi daerah adalah adanya kejelasan sasaran dan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil, manfaat dan dampaknya bagi peningkatan produktivitas daerah. Hal ini ditandai dengan semakin mantapnya stabilitas makro ekonomi daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.130.
Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara

Indikator	Satuan	Capaian
Inflasi Kota Kendari, Desember 2022 (mtm)	Persen	0,52
Inflasi Kota Kendari, Desember 2022 (yoy)	Persen	7,11
Inflasi Kota Kendari, Desember 2022 (ytd)	Persen	7,11
Pertumbuhan Ekonomi, Triwulan III 2022 (q-to-q)	Persen	3,88
Pertumbuhan Ekonomi, Triwulan III 2022 (y-on-y)	Persen	5,40
Pertumbuhan Ekonomi, Triwulan III 2022 (c-to-c)	Persen	5,52
Persentase Penduduk Miskin, September 2022	Persen	11,27
Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2022	Persen	3,36
Gini Rasio, September 2022	Persen	0,366
Indeks Pembangunan Manusia, 2022	Persen	72,23
Ekspor Sulawesi Tenggara, November 2022	US\$	497,67 Juta
Impor Sulawesi Tenggara, November 2022	US\$	204,02 Juta
PDRB ADHK 2010, triwulan III-2022	Triliun	Rp. 26,07
PDRB Atas Harga Berlaku, triwulan III-2022	Triliun	Rp. 40,61
Nilai Tukar Petani, Desember 2022	Persen	99,514

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga disini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga. Melambatnya tingkat konsumsi rumah tangga menjadi biang utama pelambatan pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga perlu diwaspadai, sebab berpengaruh terhadap perlambatan daya beli.

Salah satu determinan dari kesejahteraan ekonomi penduduk adalah kemampuan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Karena itu besarnya konsumsi/pengeluaran penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Jadi, diperlukan upaya untuk menjaga daya beli guna mempertahankan kesejahteraan penduduk di tengah dinamika ekonomi yang terjadi saat ini.

Tabel 2.131.
Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan (rupiah) menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2017-2021

Daerah Tempat Tinggal	2017	2018	2019	2020	2021
Perkotaan	1.135.615	1.255.958	1.305.906	1.316.402	1.383.129
Perdesaan	720.667	792.012	838.114	857.621	895.889
Perkotaan + Perdesaan	853.720	969.749	1.021.290	1.037.799	1.070.493

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan dari tahun 2017 – 2021, masing-masing secara berturut-turut : sebesar Rp.853.720, Rp. 969.749, Rp. 1.021.290, Rp 1.037.799 dan Rp. 1.070.493. Hal tersebut dikarenakan jumlah Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di perkotaan dan perdesaaan mengalami peningkatan di tahun yang sama pula.

Tabel 2.132.
Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk Makanan dan Bukan Makanan (rupiah) menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2017-2021

No.	Daerah Tempat Tinggal	Makanan	Bukan Makanan	Makanan + Bukan Makanan
Tahun 2017				
1.	perkotaan	483.416	652.235	1.135.651
		42,57%	57,43%	100%
2.	perdesaan	375.142	345.525	720.667
		52,05%	47,95%	100%
3.	perkotaan + perdesaan	409.857	443.863	853.720
		48,01%	51,99%	100%
Tahun 2018				
1.	perkotaan	534.142	721.816	1.255.958
		42,53%	57,47%	100%
2.	perdesaan	409.899	382.113	792.012
		51,75%	48,25%	100%
3.	perkotaan + perdesaan	457.497	512.253	969.749
		47,18%	52,82%	100%
Tahun 2019				
1.	perkotaan	551.173	754.733	1.305.906
		42,21%	57,79%	100%
2.	perdesaan	426.330	411.784	838.114
		50,87%	49,13%	100%
3.	perkotaan + perdesaan	475.215	546.075	1.021.290
		46,53%	53,47%	100%
Tahun 2020				
1.	perkotaan	572.119	744.283	1.316.402
		43,46%	56,54%	100%
2.	perdesaan	464.458	393.163	857.621
		54,16%	45,84%	100%
3.	perkotaan + perdesaan	506.740	531.060	1.037.799
		48,83%	51,17%	100%
Tahun 2021				
1.	Perkotaan	593.611	789.519	1.383.129
		42,92%	57,08%	100%
2.	Perdesaan	462.873	433.016	895.889
		51,67%	48,33%	100%
3.	perkotaan + perdesaan	509.723	560.770	1.070.493
		47,62%	52,38%	100%

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk kelompok makanan dan bukan makanan untuk daerah perkotaan dan perdesaan pada tahun 2017-2021. Pada tahun 2018 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan adalah Rp.457.497 atau 47,18% terjadi kenaikan sebesar Rp.47.640, jika dibandingkan dengan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.409.857 atau 48,01%. Sedangkan, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi bukan makanan pada tahun 2018 adalah Rp.512.253 atau 52,82% terjadi kenaikan sebesar Rp.68.390, jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 443.863 atau 51,99%.

Pada tahun 2019 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan adalah Rp.475.215 atau 46,53% terjadi kenaikan sebesar Rp.17.718, jika dibandingkan dengan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 457.497 atau 47,18%. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi bukan makanan pada tahun 2019 adalah Rp.546.075 atau 53,47% terjadi kenaikan sebesar Rp.33.822, jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp.512.253 atau 52,82%. Pada tahun 2020 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan adalah Rp.506.740 atau 48,83% terjadi kenaikan sebesar Rp.31.525, jika dibandingkan dengan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.475.215 atau 46,53%. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi bukan makanan pada tahun 2020 adalah Rp. 531.060 atau 51,17% terjadi penurunan sebesar Rp.15.015, jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp.546.075 atau 53,47%. Pada

tahun 2021 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan adalah sebesar Rp.509.723 atau 47,62% terjadi kenaikan sebesar Rp.3000, jika dibandingkan dengan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp.506.740 atau 48,83%. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi bukan makanan pada tahun 2021 adalah Rp.560.770 atau 52,38% terjadi kenaikan sebesar Rp.29.710, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp.531.060 atau 51,17%

Indikator lain yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang dihitung berdasarkan kandungan kalori dan protein makanan yang dikonsumsi penduduk. Besarnya konsumsi kalori dan protein dihitung dengan mengkonversikan kuantitas makanan yang dikonsumsi kedalam kalori atau protein setiap komoditas makanan yang dikonsumsi kemudian dijumlahkan. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2008, angka kecukupan kalori penduduk Indonesia adalah 2100 kkal per orang per hari. Sedangkan, angka kecukupan protein berdasarkan WNPG 2008 tersebut dipatok sebesar 57 gram per orang per hari.

Tabel 2.133.
Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Sehari Menurut Klasifikasi Daerah Tahun 2017-2021

Daerah Tempat Tinggal	Kalori(kkal/kapita/hari)					Protein(gram/kapita/hari)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Perkotaan	2.129,73	2.166,62	2.075,07	2.016,16	2.021,49	66,75	66,47	64,07	64,14	64,91
Perdesaan	2.132,62	2.099,44	2.088,39	2.035,04	2.060,13	59,68	59,22	59,28	58,89	58,70
Perkotaan + Perdesaan	2.131,69	2.125,18	2.083,17	2.027,62	2.046,29	61,95	62,00	61,16	60,95	60,92

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata konsumsi kalori di Sulawesi Tenggara pada tahun 2017-2018 sudah di atas standar kecukupan gizi yang sesuai dengan WNPG (2.100 kkal/kapita/hari), masing-masing sebesar 2.131,69 kkal dan 2.125,18 kkal. Sedangkan, tahun 2019-2021 rata-rata konsumsi kalori berada di bawah standar kecukupan gizi yang telah ditentukan, masing-masing secara berturut-turut : 2.083,17 kkal, 2.027,62 kkal dan 2.046,29 kkal. Selain konsumsi kalori, konsumsi protein juga dijadikan ukuran *proxy* terhadap kesejahteraan rumah tangga. Rata-rata konsumsi protein di Sulawesi Tenggara dari tahun 2017-2021 sudah di atas standar kecukupan gizi yang sesuai dengan WNPG (57 gram/kapita/hari), masing-masing secara berturut-turut : 61,95 gram, 62,00 gram, 61,16 gram, 60,95 gram dan 60,92 gram.

2.4.2. Fokus Iklim Investasi

2.4.2.1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan cerminan kondisi keamanan dan ketertiban di suatu daerah. Daerah yang aman dan tertib akan menarik investor untuk berinvestasi. Angka kriminalitas Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.134.
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total) dan Persentase Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (Clearance Rate) menurut Kepolisian Resort Tahun 2017- 2021

Kab/Kota	Jumlah Kejahatan					Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Buton	122	67	73	76	68	61,48	62,69	58,9	76,32	92,65
Muna	830	530	565	681	471	56,75	66,04	60,18	64,76	64,76
Konawe	499	390	353	265	277	81,96	81,28	109,07	77,36	72,92
Kolaka	344	299	214	214	212	61,34	70,57	71,32	70,56	92,45
Konawe Selatan	386	217	373	427	391	59,07	47,01	68,9	53,86	72,38
Bombana	181	134	35	37	53	67,23	88,81	-	75,68	100
Wakatobi	276	227	226	218	204	77,17	49,78	69,47	61,93	75,98
Kolaka Utara	235	54	145	149	67	76,03	64,82	79	77,18	91,04
Buton Utara	211	175	156	116	124	62,56	67,43	91	74,14	75,81
Konawe Utara	146	91	68	92	126	76,03	70,33	73,53	66,3	88,1
Kolaka Timur	230	38	20	44	26	61,3	86,84	50	38,64	96,15
Konawe Kepulauan	-	19	7	27	7	-	21,05	42,86	81,48	0,00
Muna Barat	174	151	132	-	81	59,77	60,26	64,39	-	85,19

Kab/Kota	Jumlah Kejahatan					Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Buton Tengah	-	-	-	-	28	-	-	-	-	60,71
Buton Selatan	-	-	-	-	30	-	-	-	-	93,33
Kota Kendari	1.449	981	585	1.079	590	55,35	96,13	50,26	47,17	67,46
Kota Baubau	499	441	223	225	245	59,52	76,19	73,09	70,67	88,98
Sulawesi Tenggara	5.582	4.655	3.716	3.650	3.000	915,56	1.009,23	962,0	936,1	1.317,9

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kejahatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2017 – 2021 cenderung menurun, masing-masing secara berturut-turut : 5.582, 4.655, 3.716, 3.650 dan 3.000. Dari segi jumlah kejahatan selama tahun 2021 kota Kendari dan Kabupaten Muna tercatat memiliki angka jumlah kejahatan terbanyak sebesar 590 kasus untuk kota Kendari dan 471 untuk kabupaten Muna. Sedangkan wilayah kabupaten Konawe Kepulauan, Buton Tengah, dan Buton Selatan adalah wilayah yang paling sedikit jumlah kejahatannya selama tahun 2021, yaitu total sebanyak 7 kasus untuk kabupaten Konawe Kepulauan, 28 kasus untuk Kabupaten Buton Tengah dan 30 kasus untuk Kabupaten Buton Selatan.

Persentase penyelesaian tindak kejahatan di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan peningkatan yang baik pada tahun 2021 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk jumlah penyelesaian kasus kejahatan beberapa Polres melaporkan kenaikan jumlah penyelesaian kasus kejahatan pada tahun 2021 seperti Polres Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka Timur.

2.4.2.2. Pengenaan Pajak Daerah

Pengenaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah. Realisasi pajak dan macam pajak Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017- 2021 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.135.
Realisasi Pajak dan Macam Pajak Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2021

Jenis Pajak	Realisasi (Rp juta)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Daerah	614 .04,32	688 866,50	706.099,66	948 253,36	931. 823,51
Retribusi Daerah	16.193,05	21.109,51	14.438,07	19.591,16	24. 380,91
Bagian Laba BUMD	39.417,84	47.274,75	46.096,12	56.845,49	64.694,89
Lain-Lain Pendapatan	136.689,03	146.698,24	138.601,27	163.528,52	135.749,56
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	71.365,19	124.542,95	160.272,72	97.441,26	41. 053,87
Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	141.714,43

Sumber: BPS Sulawesi Tenggara, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, Pajak Daerah dari tahun 2017 – 2020 cenderung meningkat, masing-masing secara berturut-turut 614.04,32, 688.866,50, 706.099,66, 948 253,36, dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 931. 823,51. Selama kurun waktu tahun 2017 – 2021 Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami nilai tertinggi di Tahun 2021 masing-masing secara berturut-turut : 24. 380,91, 64.694,89. 141.714,43. Sedangkan, nilai Lain-Lain Pendapatan dan Penerimaan Bagi Hasil Pajak cenderung menurun di tahun 2021 masing-masing secara berturut-turut : 135.749,56 dan 41. 053,87.

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk bekerja adalah dengan melihat tingkat pendidikan yang ditamatkan. Dilihat dari faktor tersebut, tingkat pendidikan penduduk bekerja di Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 sebagian besar masih memiliki ijazah SD ke bawah. Hal ini juga dapat menggambarkan bahwa penduduk dengan pendidikan rendah lebih mudah masuk ke pasar kerja dikarenakan kebanyakan mereka cenderung tidak memilih-milih

jenis pekerjaan dan bersedia masuk ke pasar kerja informal dibanding mereka yang berpendidikan menengah atau tinggi.

Tabel 2.136.

Persentase Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja			
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja		Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah Bukan Angkatan Kerja
SD/MI	444.740	7.558	452.298	98.33	12.664	141.105	35.826	189.595
SMP/MTs	211.261	6.072	217.333	97.21	92.325	65.335	8.624	166.284
SMA/SMK/MA	434.224	28.922	463.146	94.76	44.738	141.271	13.504	199.513
Diploma	39.603	1.985	41.588	95.23	229	8.303	586	9.118
Perguruan Tinggi	197.241	9.597	206.838	95.36	340	21.219	3.456	25.015
Jumlah	1.327.069	54.134	1.381.203	96.08	150.296	377.233	61.996	589.525

Sumber: BPS, 2022

2.4.4. Fokus Kewilayahan

Ketimpangan kewilayahan dapat dilihat beberapa indikator kunci pada aspek sosial dan ekonomi, diantaranya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Gini Ratio Tahun 2021 yang berada pada angka 0,394, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota cenderung meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang Gini Rationya berada pada angka 0.388.

Data kinerja pembangunan pada tahun 2020 dan 2021 memiliki kecenderungan yang sama, dimana data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan pada wilayah daratan dan kepulauan khususnya untuk 4 (empat) indikator sosial dan ekonomi. Data kinerja pada Tahun 2021 untuk wilayah daratan dan kepulauan yang menunjukkan rata-rata capaian kinerja semua indikator pada wilayah daratan berada di atas capaian kinerja daerah di wilayah kepulauan. Walaupun pada indikator kemiskinan yang menunjukkan jumlah jiwa angka kemiskinan lebih banyak di wilayah daratan, namun dari data persentase angka kemiskinan menunjukkan kinerja yang sebaliknya. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 2.114 serta untuk gambaran ketimpangan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (daratan dan kepulauan) dapat dilihat pada gambar 2.33 Sedangkan capaian kinerja detail masing-masing kabupaten dan kota menunjukkan hal yang sama yaitu adanya ketimpangan antar daerah baik pada tinjauan kewilayahan daratan dan kepulauan maupun secara menyeluruh daerah dilingkup provinsi. Data kinerja 4 (empat) indikator aspek sosial dan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.137.
Data Rata-Rata Kinerja Indikator Kunci pada Aspek Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota pada Wilayah Daratan dan Kepulauan Tahun 2021

Wilayah	TPT	Kemiskinan*		IPM	Pertumbuhan Ekonomi**	Pdrb per Kapita (Juta Rupiah)
		Jumlah (Ribuan Jiwa)	(%)			
Daratan	3.58	23.99	11.86	71.44	4.38	41.93
Kepulauan	3.80	14.09	14.14	67.83	3.32	26.86

Sumber: Bappeda 2023 (Data Diolah)

Kaitannya dengan kondisi ketimpangan wilayah yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, beberapa indikator kinerja dapat digambarkan secara spasial (keruangan) yang dibagi dalam beberapa tipologi daerah, yaitu tipologi daerah berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, tipologi daerah berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia (IPM) dan PDRB per kapita, tipologi daerah berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, tipologi daerah berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, tipologi daerah berdasarkan indikator kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 2.138.
Data Kinerja Indikator Kunci pada Aspek Sosial dan Ekonomi Kabupaten dan Kota

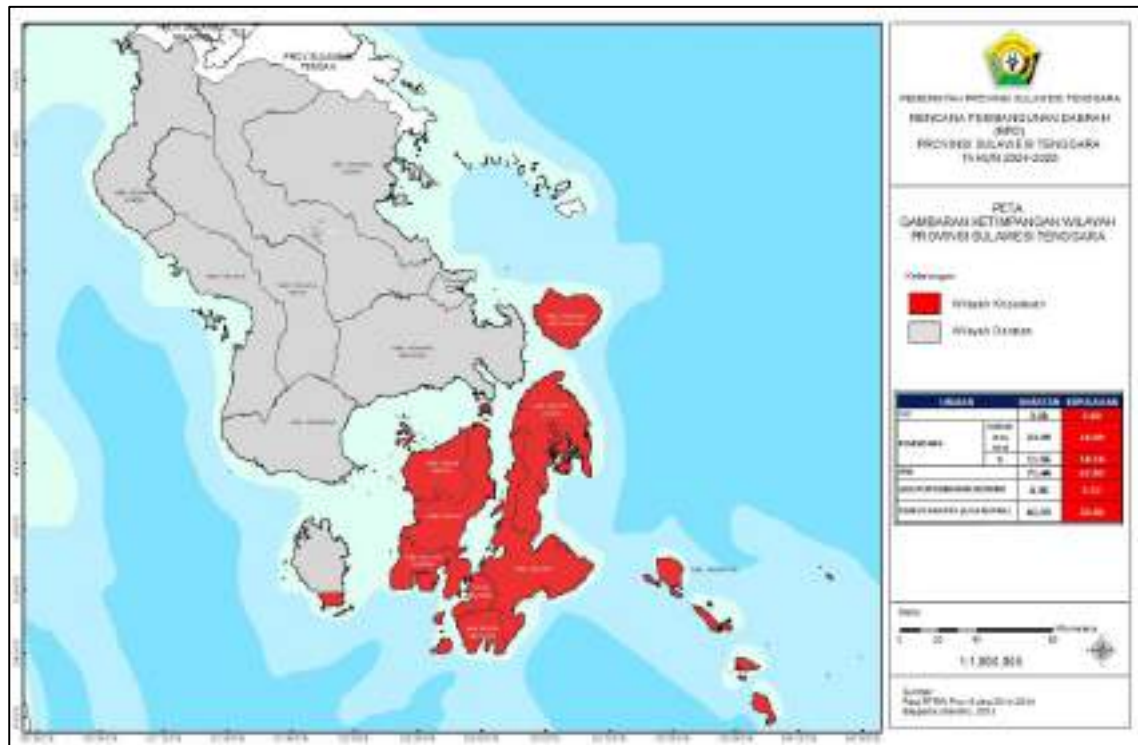
Kab/Kota	2020						2021					
	TPT	Kemiskinan*		IPM	LPE** (%)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	TPT	Kemiskinan*		IPM	LPE*** (%)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
		Jumlah (Ribuan Jiwa)	(%)					Jumlah (Ribuan Jiwa)	(%)			
Buton	4.78	13.68	13.21	65,98	-0,54	26,49	4.74	14.25	13.92	66.32	2.62	24.33
Muna	6.45	28.73	12.83	69,02	0,07	22,31	4.97	30.54	13.54	69.17	3.18	23.88
Konawe	5.42	31.63	12.2	71,35	6,42	28,22	4.56	32.46	13.03	71.48	6.51	29.97
Kolaka	5.29	23.76	11.63	73,45	-3,40	68,52	3.62	33.45	12.43	73.56	4.21	78.72
Konawe Selatan	2.58	34.22	10.74	68,20	-2,22	25,86	2.14	36.17	11.34	68.58	4.84	27.68
Bombana	2.74	18.84	10.01	66,05	0,56	24,88	3.17	19.73	10.76	66.25	3.5	32.08
Wakatobi	4.18	13.75	14.31	69,48	0,76	32,22	2.3	15.3	14.91	69.87	4.02	28.47
Kolaka Utara	2.13	19.83	12.96	69,31	0,40	41,37	3.18	21.36	13.79	69.5	2.66	46.87
Buton Utara	4.11	9.13	14.1	67,87	0,99	34,63	3	9.45	14.89	68.08	4.08	34.59
Konawe Utara	3.79	8.78	13.53	69,86	-0,72	43,39	3.36	9.26	14.32	70.23	4.59	42.89
Kolaka Timur	3.29	26.38	13.47	67,02	-0,31	24,02	3.44	20.03	14.35	67.76	4.83	28.22
Konawe Kepulauan	1.55	5.88	17.01	65,41	-0,63	30,20	1.83	5.98	17.81	65.73	2.3	28.46
Muna Barat	3.36	11.32	13.3	65,08	0,42	22,36	2.84	11.55	13.96	65.48	4.09	22.72
Buton Tengah	4.22	14.4	15.32	64,37	3,07	18,36	3.77	14.73	15.8	64.55	3.12	15.09
Buton Selatan	3.9	11.5	14.11	64,93	-0,71	25,30	3.92	11.71	14.62	64.99	2.29	21.78
Kota Kendari	7.08	17.46	4.34	83,53	-1,30	40,89	5.19	19.46	4.87	84.15	3.86	49.01
Kota Baubau	6.57	12.53	7.15	75,90	-0,81	37,29	6.87	13.3	7.78	76.26	4.15	42.42
Sulawesi Tenggara	4.58	301.82	11.00	71,45	-0,65	33,91	3.92	318.7	11.66	71.66	4.1	36.8

Sumber: BPS,2022 (diolah)

* referensi waktu maret

** angka sementara

*** angka sangat sementara

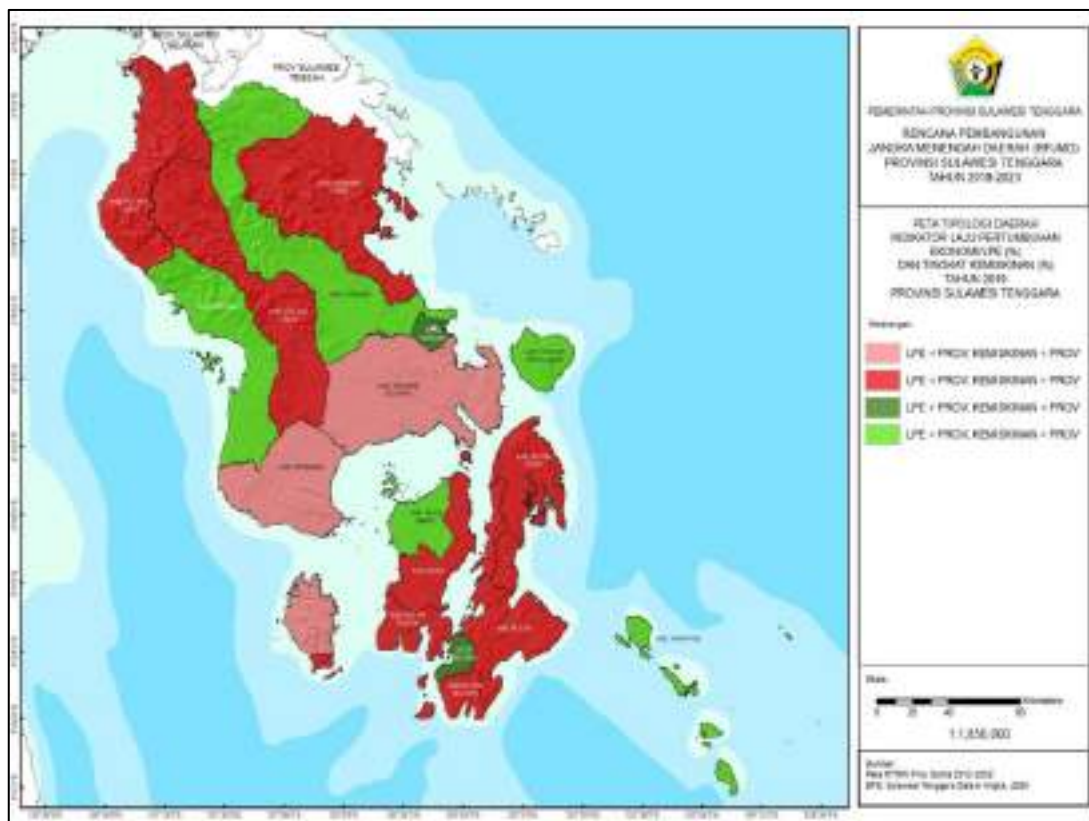


Gambar 2.49
Peta Gambaran Ketimpangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Sesuai
Indikator Sosial dan Ekonomi Pada Tahun 2021
Sumber: Bappeda Prov. Sultra, 2023

a. Tipologi Daerah Berdasarkan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan tipologi daerah dengan indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Povinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2021, masih ada kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang relative rendah dari angka provinsi, yakni Kabupaten Buton, Muna, Kolaka Timur, Buton Utara, Buton Selatan, Kolaka Utara, dan Konawe Utara. Adapun provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah serta pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi ialah Kota Kendari dan Kota Baubau. Selanjutnya yang perlu diwaspadai pula ialah jika tingkat kemiskinan relatif lebih rendah namun pertumbuhan ekonomi relatif lebih rendah dari angka provinsi seperti yang terjadi pada Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan. Sebab jika tidak segera diantisipasi maka tingkat kemiskinan meningkat, sehingga dapat masuk pada kategori kabupaten yang relatif tertinggal. Adapun Kabupaten Konawe, Konawe Kepulauan, Kolaka, Muna Barat, dan Wakatobi memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi, namun sayangnya tingkat kemiskinannya juga relatif tinggi.

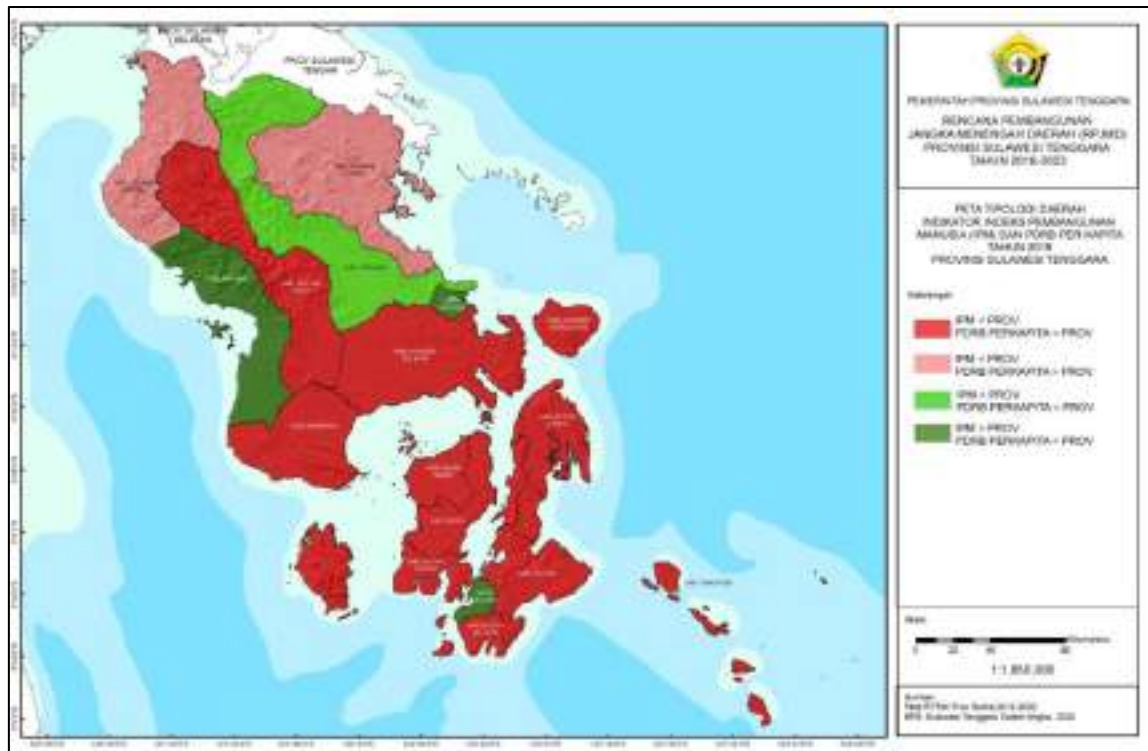
Namun demikian Kabupaten Konawe masih lebih maju dibanding kabupaten/kota yang berada pada kategori relative tertinggal. Dengan demikian Kabupaten Konawe bisa menjadi motivasi bagi masyarakat karena memiliki peluang untuk meningkatkan taraf pendapatan (dengan pendekatan PDRB per kapita) sebab modal pembangunan SDM telah dimiliki. Dengan peningkatan keahlian SDM, diharapkan ada peluang untuk meningkatkan pendapatan.



Gambar 2.50
Peta Tipologi Daerah Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Tingkat Kemiskinan (%) Pada Tahun 2019
Sumber: Bappeda Prov. Sultra, 2021

b. Tipologi Daerah Berdasarkan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan PDRB Per Kapita

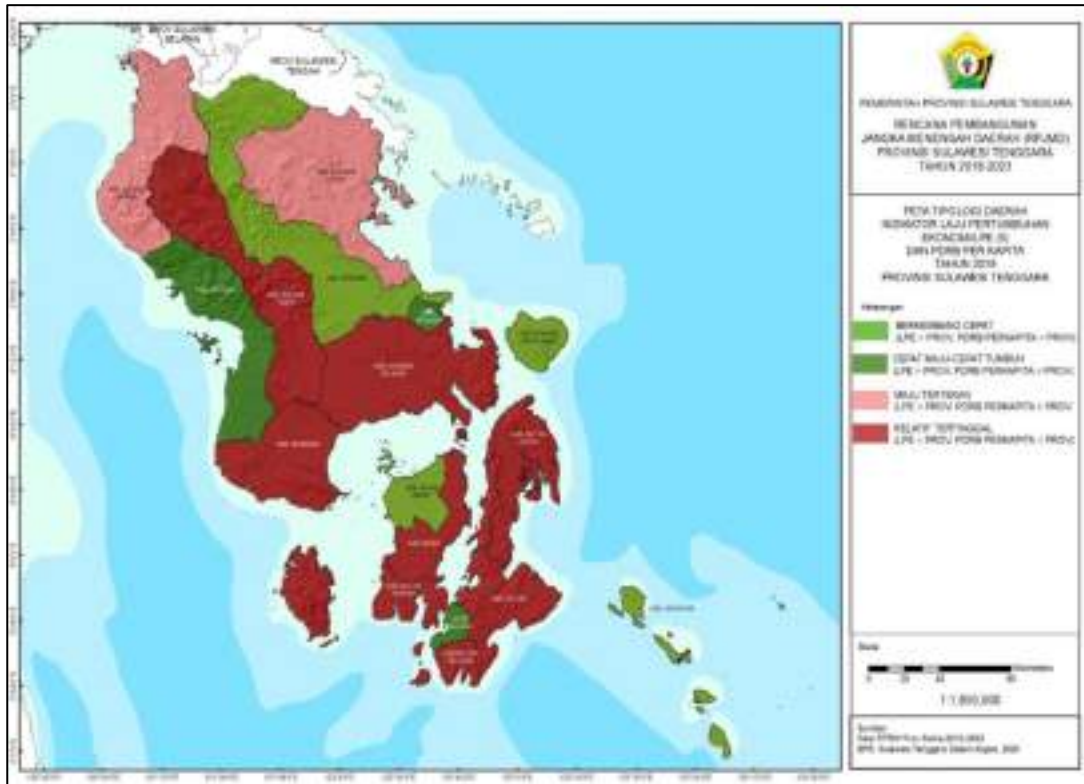
Berdasarkan data indeks pembangunan manusia dan data PDRB Per Kapita, masi menunjukkan adanya ketimpangan beberapa kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan, Muna Barat, Konawe Kepulauan, Buton, Bombana, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Wakatobi, Muna dan Buton Utara, merupakan kawasan yang relatif tertinggal dalam hal PDRB per kapita dan pembangunan manusia karena berada di bawah angka IPM dan PDRB per Kapita Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun Kabupaten Konawe yang angka IPMnya lebih tinggi 0,09 poin dari angka IPM Provinsi Sulawesi Tenggara masih dikategorikan IPM relatif tinggi namun masih perlu terus meningkatkan pembangunan manusia-nya. Selain itu, Kabupaten Konawe juga perlu meningkatkan PDRB per kapitanya karena masih relatif rendah,



Gambar 2.51
Peta Tipologi Daerah Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB Per Kapita Tahun 2019
 Sumber: Bappeda Prov. Sultra, 2021

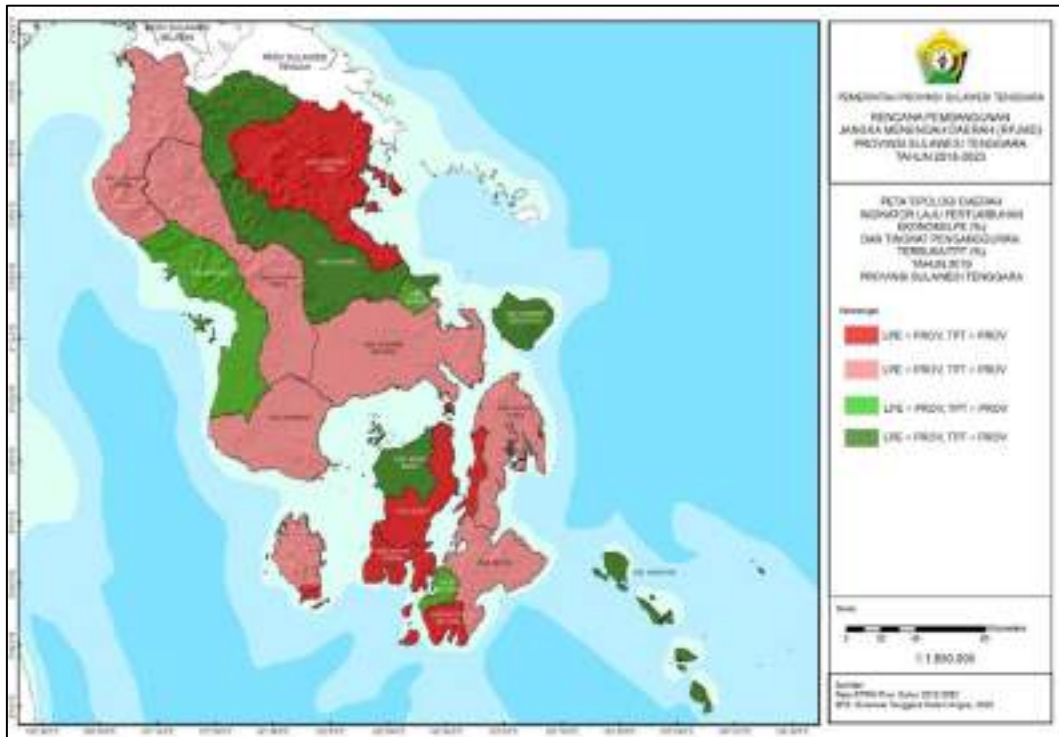
c. **Tipologi Daerah Berdasarkan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Dan PDRB Per Kapita**

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan data PDRB Per Kapita terlihat bahwa masih ada beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara yang “relatif tertinggal” dari kabupaten/kota lain berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita di provinsi tersebut (acuan menggunakan angka dari indikator yang sama di Provinsi Sulawesi Tenggara), yakni Kabupaten Buton, Muna, Kolaka Timur, Konawe Selatan, Buton Selatan, Bombana, Buton Tengah, dan Buton Utara. Adapun daerah yang terklasifikasi dalam kelompok “cepat maju dan cepat tumbuh” ialah Kabupaten Kolaka, Kota Kendari, dan Kota Baubau. Selanjutnya provinsi yang termasuk dalam kategori daerah “maju tertekan” ialah Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka Utara, dimana meskipun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 (y on y) relatif tertekan, namun PDRB per kapita-nya relatif tinggi Adapun Kabupaten Buton Utara masih perlu meningkatkan PDRB per kapita agar masuk dalam kategori ini. Selanjutnya untuk kabupaten yang potensial untuk “berkembang cepat” di Sulawesi Tenggara ialah Kabupaten Konawe, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Wakatobi, dimana meskipun PDRB per kapita relatif rendah, namun pertumbuhan ekonominya relatif lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar 2.52.
Peta Tipologi Daerah Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan PDRB Per Kapita Tahun 2019
Sumber: Bappeda Prov. Sultra, 2021

Tipologi Daerah Berdasarkan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Berdasarkan data indikator pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan bahwa Kota Baubau, Kota Kendari, dan Kabupaten Kolaka memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi namun tingkat pengangguran terbuka-nya juga relatif tinggi berdasarkan acuan angka Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun sebaliknya, kabupaten di Sulawesi Tenggara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) relatif lebih rendah namun pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih kecil, ialah Kabupaten Bombana, Kolaka Utara, Konawe Selatan, Buton Utara, dan Kolaka Timur. Selanjutnya, Kabupaten Konawe, Konawe Kepulauan, Wakatobi, dan Muna Barat termasuk dalam kelompok daerah di Sulawesi Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi dan tingkat pengangguran yang relatif lebih rendah. Adapun daerah yang relatif tertinggal dalam hal pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan angka acuan Provinsi Sulawesi Tenggara ialah Kabupaten Konawe Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, dan Muna. Di wilayah tersebut, pertumbuhan ekonomi-nya relatif lebih rendah disertai dengan tingkat pengangguran terbuka yang relatif lebih tinggi.

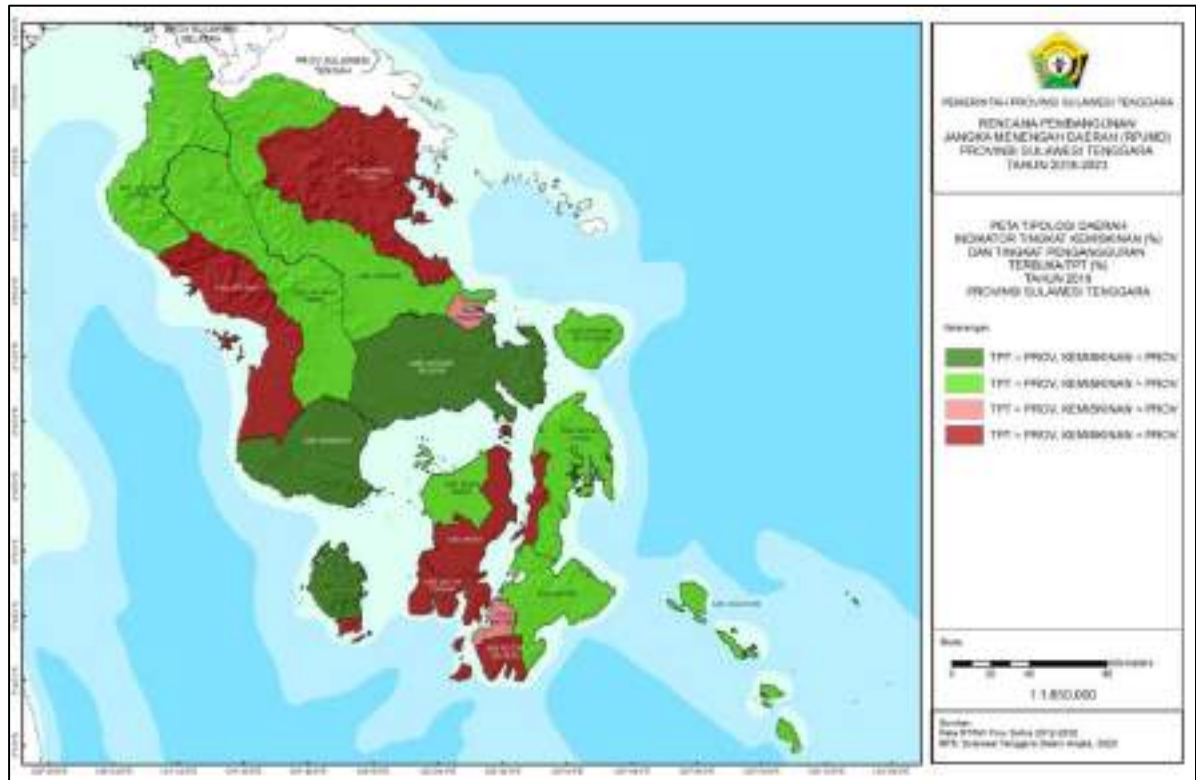


Gambar 2.53
Peta Tipologi Daerah Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2019
Sumber: Bappeda Prov. Sultra, 2021

d. Tipologi Daerah Berdasarkan Indikator Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Berdasarkan tipologi daerah menurut tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, Konawe Utara, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Muna menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi. Sebenarnya ini wajar karena tingkat pengangguran yang tinggi mengakibatkan taraf pendapatan menurun sehingga pengeluaran masyarakat baik makanan dan non makanan juga menurun sehingga berada di bawah garis kemiskinan. Dampaknya, persentase penduduk miskin menjadi relatif lebih besar.

Adapun yang menjadi masalah baru dalam hal ini ialah terdapat beberapa kabupaten dengan tingkat pengangguran yang relatif lebih rendah namun tingkat kemiskinannya yang relatif lebih tinggi, seperti pada Kabupaten Kolaka Timur, Muna Barat, Konawe, Buton Utara, Wakatobi, Konawe Kepulauan, Kolaka Utara, dan Kabupaten Buton. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa penduduk yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya namun belum cukup untuk mengangkat taraf hidupnya agar dapat melewati garis kemiskinan (khususnya makanan). Maka kebijakan yang bisa dilakukan stakeholder terkait ialah pengawasan pada usaha-usaha yang masih belum menerapkan gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK). Diharapkan dengan pengawasan tersebut akan lebih meningkatkan pendapatan dari para pekerja/ karyawan/ buruh pada daerah-daerah tersebut di Sulawesi Tenggara. Adapun pada Kabupaten Bombana dan Konawe Selatan, tingkat pengangguran dan kemiskinan relatif lebih rendah. Selanjutnya Kota Kendari dan Kota Baubau termasuk dalam daerah di Sulawesi Tenggara dengan tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah, namun tingkat pengangguran relatif lebih tinggi.



Gambar 2.54.
Peta Tipologi Daerah Indikator Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2019
Sumber: Bappeda Prov. Sultra, 2021

Apabila dilihat berdasarkan data kondisi tahun 2019, melalui rangkuman analisis tipologi wilayah pada 5 (lima) jenis perbandingan indikator sosial ekonomi. Sehingga dibuatlah skor berdasarkan indikator ketimpangan sosial ekonomi dengan kategori wilayah relatif tertinggal berdasarkan nilai acuan dari angka Provinsi Sulawesi Tenggara. Skor yang diberikan pada kabupaten/kota yang relatif tertinggal tersebut ialah “1”. Selanjutnya, skor “relatif tertinggal” tersebut dijumlahkan. Terlihat bahwa skor “relatif tertinggal” terbanyak ialah Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Muna berdasarkan indikator sosial ekonomi berupa Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita; PDRB per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi; Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kemiskinan.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Dalam batasan konseptual secara umum, keuangan daerah diartikan sebagai suatu bentuk kekayaan uang atau lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sedangkan pengelolaan keuangan daerah didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan tugas dan kewenangan daerah. Rangkaian kegiatan yang dimaksud meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Dalam proses rangkaian tersebut pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, partisipatif, rasional dan akuntabel dengan memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia secara sistematis diatur dalam beberapa aturan perundangan antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; serta (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam proses perencanaan pembangunan daerah perlu mempertimbangkan kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dengan menganalisis pengelolaan keuangan daerah yang terwujud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 ini, dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja APBD tahun 2018 – 2023 dan Neraca Keuangan Daerah Tahun 2018 -2023. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena mengatur semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kapasitas atau kemampuan keuangan daerah Pemerintah Sulawesi Tenggara, merupakan gambaran tentang kapasitas daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, keuangan daerah telah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah pada periode 3 (tiga) tahun terakhir telah diarahkan untuk menjamin ketersediaan anggaran bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, namun kondisi yang terjadi pada awal tahun 2020 yaitu penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) atau lebih dikenal dengan sebutan Virus Corona yang dinyatakan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO (*World Health Organization*) sebagai pandemi karena telah menyebar hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia berdampak cukup parah bagi pembangunan ekonomi nasional,

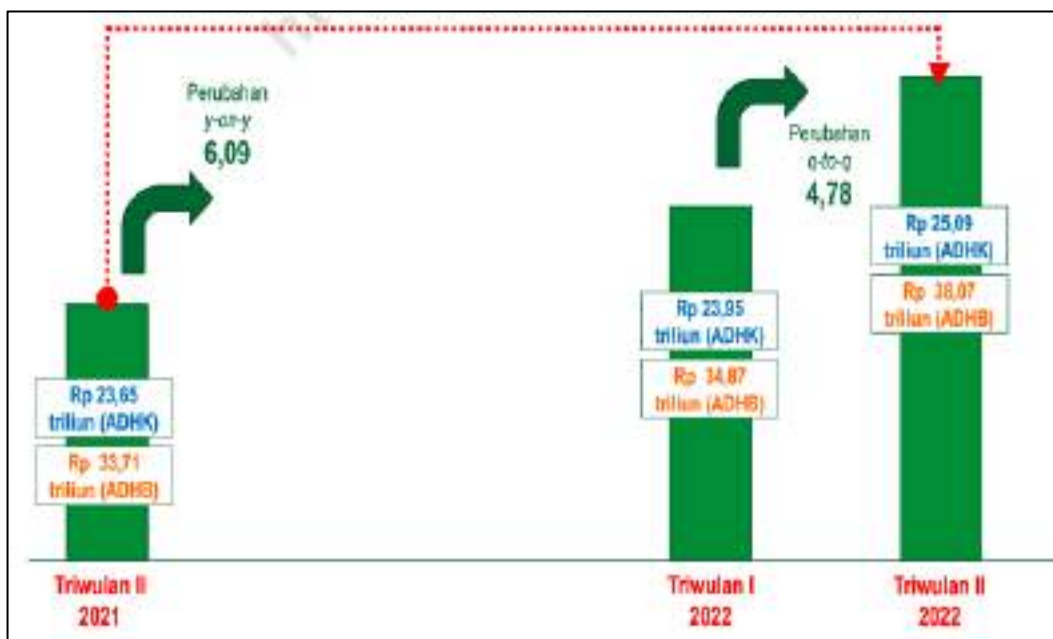
pembangunan manusia dan kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga pemerintah menyatakan pandemi Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan yang harus segera ditangani secara menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia dengan menetapkan kebijakan yang terfokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi nasional pada sejumlah sektor akibat Covid-19 di tahun 2021. Terdapat empat sektor akan menjadi fokus pemerintah yakni pemulihan sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengamanan sosial dan reformasi sistem ketahanan negara.

Selanjutnya sebagai dampak terjadinya dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah melakukan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan. Regulasi ini mencabut beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya. Implikasi berlakunya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 adalah adanya beberapa perubahan diantaranya klasifikasi komponen APBD yang kemudian menjadi (1) Komponen Pendapatan, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja, yang di dalamnya terdapat Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3.1. Kondisi Perekonomian Daerah

Perekonomian Sulawesi Tenggara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II tahun 2022 mencapai Rp. 38,07 Triliun dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 25,09 Triliun, sehingga pada posisi tersebut jika dibandingkan dengan posisi triwulan II Tahun 2021, perekonomian Sulawesi Tenggara pada triwulan II tahun 2022 secara tahunan tumbuh sebesar 6,09 persen. Apabila dibandingkan dengan posisi triwulan II Tahun 2022 dengan triwulan I Tahun 2022, maka perekonomian Sulawesi Tenggara tumbuh positif sebesar 4,78 persen. Sedangkan pada Tahun 2018-2020 mengalami fluktuasi. Tahun 2020 Perekonomian Sulawesi Tenggara hanya tumbuh sebesar 0,65 persen (yoy), mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan Tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,50 persen (c-to-c). Hal ini disebabkan sebagian besar lapangan usaha masih berkontraksi akibat adanya pandemi Covid-19.

Adapun Perkembangan PDRB Sulawesi Tenggara Beserta Persentase Perubahannya (y-on-y dan q-to-q) untuk Triwulan II Tahun 2021, Triwulan I Tahun 2022 dan Triwulan II tahun 2022 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.1.

Perkembangan PDRB Sulawesi Tenggara beserta Persentase Perubahannya (y-on-y dan q-to-q), Triwulan II Tahun 2021, Triwulan I Tahun 2022 dan Triwulan II tahun 2022

Sumber: BPS, 2022

3.2. Kinerja Keuangan Daerah

Indikator kinerja keberhasilan dalam pengelolaan keuangan suatu daerah digambarkan pada pemberian Opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria tertentu yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi dan kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*).

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada kurun waktu Tahun 2018-2022, secara umum mengembirakan meskipun masih terdapat beberapa kendala. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara selama 5 (lima) tahun berturut-turut yaitu Tahun 2018-2022. Selain itu, keberhasilan juga terlihat pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dicapainya berbagai target indikator kinerja pembangunan daerah, baik indikator kinerja ekonomi makro maupun sektoral. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Sulawesi Tenggara dalam pengelolaan keuangan daerah adalah belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018-2021

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LKPJ Gubernur Sulawesi Tenggara, 2018-2021

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion* selama kurun waktu lima tahun tersebut berarti bahwa Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yaitu material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam pembangunan daerah. Meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun merupakan gambaran kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan APBD Tahun 2018 sampai dengan 2021. Kinerja ini dapat dilihat dari hasil realisasi capaian target APBD yang telah melalui proses audit dan pertanggungjawaban APBD.

Kinerja pelaksanaan APBD dapat terlihat dari struktur Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Kinerja APBD juga dapat terlihat pada struktur Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Pembiayaan daerah. Kinerja Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan selama periode APBD Tahun 2019-2021 sebagaimana yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2021

No	Uraian	Realisasi			Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	
1	Pendapatan Asli daerah	1.128.441.587.992,08	1.017.138.016.007,18	1.373.793.724.628,50	5,95
1.1	Pajak Daerah	864.165.451.959,00	752.773.001.060,00	1.052.629.511.015,00	5,97
1.2	Retribusi Daerah	22.220.731.782,00	21.121.610.015,00	34.672.223.312,00	11,97
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	56.453.230.742,00	64.676.071.288,00	66.150.050.423,00	4,89
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	185.602.173.509,08	178.567.333.644,18	220.341.939.878,50	5,26
2	Pendapatan Transfer	2.960.196.139.377,00	2.920.645.996.673,00	3.119.960.554.389,00	1,71
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.960.196.139.377,00	2.920.645.996.673,00	3.119.960.554.389,00	1,71
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	77.905.655.777,00	74.551.023.637,00	35.496.874.787,00	-39,82
3.1	Pendapatan Hibah	77.905.655.777,00	74.551.023.637,00	35.496.874.787,00	-39,82
	Jumlah Pendapatan	4.166.543.383.146,08	4.012.335.036.317,18	4.529.251.153.804,50	2,67
1	Belanja Operasi	2.548.945.885.374,05	2.692.850.494.992,00	2.754.858.067.032,00	2,49
1.1	Belanja Pegawai	1.395.866.951.804,00	1.455.086.821.825,00	1.475.632.390.431,00	1,80
1.2	Belanja Barang	655.031.639.928,00	711.222.489.023,00	770.685.412.031,00	5,00
1.3	Belanja Bunga	2.626.313.642,05	7.193.323.944,00	20.692.768.602,00	29,10
1.4	Belanja Hibah	495.420.980.000,00	519.347.860.200,00	483.094.420.968,00	-0,85
1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	4.753.075.000,00	33,33
2	Belanja Modal	1.194.738.481.989,00	1.048.329.030.395,00	1.246.770.023.310,00	1,39
2.1	Belanja Modal Tanah	3.285.163.550,00	36.445.450,00	31.766.122.103,00	29,89
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.112.728.313,00	150.844.342.326,00	149.029.032.823,00	3,34
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	502.108.101.882,00	441.036.935.087,00	505.517.578.611,00	0,22
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	522.582.633.904,00	419.033.190.331,00	535.296.261.162,00	0,79
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.649.854.340,00	37.378.117.201,00	25.161.028.611,00	-9,92
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
3	Belanja Tidak Terduga	-	51.240.779.355,00	238.208.325,00	33,33
3.1	Belanja Tidak Terduga	-	51.240.779.355,00	238.208.325,00	33,33

No	Uraian	Realisasi			Rata - Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	
4	Belanja Transfer	384.865.314.162,00	406.009.914.371,00	494.003.908.382,00	7,36
4.1	Belanja Bagi Hasil	371.716.607.534,00	385.547.662.271,00	473.897.757.482,00	7,19%
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	13.148.706.628,00	20.462.252.100,00	20.106.150.900,00	11,53
Jumlah Belanja		4.128.549.681.525,05	4.198.430.219.113,00	4.495.870.207.049,00	2,72
3.1	Penerimaan pembiayaan	506.116.441.139,58	563.493.624.089,61	816.223.101.701,79	12,66
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	485.194.593.185,58	449.958.890.339,61	358.472.473.490,79	-11,78
3.1.2	Penerimaan pinjaman daerah	20.921.847.954,00	113.534.733.750,00	457.750.628.211,00	31,81
3.2	Pengeluaran pembiayaan	94.151.252.421,00	18.962.992.674,00	25.000.000.000,00	-92,20
3.2.1	Penyertaan modal daerah	35.950.078.741,00	11.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-14,60
3.2.2	Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo	58.201.173.680,00	7.962.992.674,00	-	0,00
Pembiayaan Netto		411.965.188.718,58	544.530.631.415,61	791.223.101.701,79	15,98

Sumber : Data diolah oleh Bappeda Prov. Sultra, Tahun 2019-2021

Tabel 3.2. menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah selama periode 2019 sampai dengan 2021 sebesar 5,95 persen dan pertumbuhan rata-rata Belanja Daerah mencapai 2,27 persen sedangkan capaian pertumbuhan Pembiayaan Daerah sebesar 12,66 persen.

3.2.2. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Merujuk pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pendapatan daerah terdiri atas tiga kelompok yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pajak Daerah Retribusi Daerah, Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun pendapatan dari Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Bantuan/Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Kapasitas fiskal pada periode Tahun 2019-2021 Sulawesi Tenggara mengalami fluktuasi dimana pada Tahun 2020 mengalami kondisi yang kurang baik, hal ini disebabkan terjadinya Pandemi Covid-19. Kontribusi penyumbang terbesar pendapatan daerah dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Tenggara bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Proporsi sumber pendapatan terbesar masih dari dana perimbangan yaitu 55 – 75 Persen, Pendapatan asli daerah sebesar 22 – 27 persen dan sisanya walaupun mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya Dana Hibah berasal dari lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah memegang peranan penting dalam pembangunan, sebagai kapasitas fiskal pemerintah daerah, maka pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat vital dalam struktur APBD. Pada Tahun 2019, sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari (a) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (b) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK); (c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada periode 2019 sampai dengan 2022, walaupun kontribusi dana perimbangan tergolong tinggi dan terus meningkat, tetapi kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah juga memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pendapatan secara keseluruhan. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2019 sampai dengan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019-2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	1.006.057.866.578,00	967.417.961.308,22	1.252.152.656.907,00	1.393.023.978.645,00	6,94%
1.1	Pajak Daerah	775.421.955.060,00	781.688.899.954,00	1.009.823.505.992,00	1.137.269.003.345,00	7,95%
1.2	Retribusi Daerah	19.204.066.050,00	18.422.834.642,00	36.884.710.963,00	53.531.662.136,00	16,03%
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	56.845.491.441,00	56.845.491.400,00	64.694.885.668,00	64.694.885.668,00	3,03%
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	154.586.354.027,00	110.460.735.312,22	140.749.554.284,00	137.528.427.496,00	-3,10%
2	Pendapatan Transfer	3.043.027.272.000,00	2.968.154.889.223,00	2.956.733.347.000,00	2.445.585.074.000,00	-6,11%
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.043.027.272.000,00	2.968.154.889.223,00	2.956.733.347.000,00	2.445.585.074.000,00	-6,11%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	82.521.176.000,00	75.341.061.000,00	41.219.542.660,00	1.863.141.500,00	-10,82%
3.1	Pendapatan Hibah	82.521.176.000,00	75.341.061.000,00	41.219.542.660,00	1.863.141.500,00	-10,82%
JUMLAH PENDAPATAN		4.131.606.314.578,00	4.010.913.911.531,22	4.250.105.546.567,00	3.840.472.194.145,00	-1,90%

Sumber : Data diolah oleh BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2019-2022

3.2.3. Neraca Daerah

Neraca daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah dan kondisi kewajiban pemerintah daerah. Kondisi asset dan kewajiban ini memberi gambaran tentang jumlah kemampuan atau nilai asset yang dimiliki daerah dan kewajiban besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Neraca juga menggambarkan kondisi ekuitas dana yang tersedia, yaitu selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah, yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Perkembangan kondisi neraca daerah Provinsi Sulawesi Tenggara periode pencatatan 2018 – 2021.

Kapasitas Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan pemerintahan daerah selama tahun 2018-2021 menunjukkan trend positif. Ekuitas dana lancar bertumbuh rata-rata 6 persen selama 3 (Tiga) tahun tersebut. Berkat pertumbuhan ekuitas dana lancar, yang menggambarkan modal sendiri yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara tetap bertumbuh dan mampu menciptakan keseimbangan keuangan yang baik, antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana yang sama-sama bertumbuh secara rata-rata 7 persen selama periode 2018-2020 tersebut.

Kapasitas Sulawesi Tenggara dalam mengelola keuangannya dapat juga terlihat dari Rasio Likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio Likuiditas terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat menunjukkan kapasitas asset pemerintah daerah untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas yang baik ditunjukkan nilai rasio lebih dari 1 (Satu). Rasio keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2021 selengkapnya pada tabel berikut ini :

*Tabel 3.4.
Rasio Liquiditas dan Rasio Solvabilitas Neraca 2019-2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2021*

Uraian	2019	2020	2021
Rasio Likuiditas			
- Rasio Lancar	3,00	2,93	3,03
- Rasio Quick	2,86	2,63	2,75
Rasio Solvabilitas			
- Rasio Kewajiban Terhadap Total Aset	0,04	0,05	0,06
- Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	0,04	0,06	0,06

Sumber : Data diolah oleh BPKAD, Tahun 2019-2021

Nilai Rasio Likuiditas secara keseluruhan lebih dari 1 (satu) di atas, memberikan gambaran bahwa pemerintah Sulawesi Tenggara pada periode 2019 – 2021 memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk melaksanakan kewajibannya dalam melunasi utangnya dengan memperhitungkan atau tidak memperhitungkan persediaan. Sejalan dengan itu, rasio Solvabilitas yang nilainya kecil menggambarkan total kewajiban pemerintah daerah sangat kecil nilainya dibandingkan dengan asset yang dimiliki. Perkembangan kondisi asset, kondisi kewajiban dan kondisi ekuitas dana pemerintah daerah Pemerintah Sulawesi Tenggara periode pencatatan 2019-2021, ditunjukkan pada Neraca berikut ini.

*Tabel 3.5.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah 2018-2021 Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2021*

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
I	ASET	9.969.851.312.761,14	10.808.634.473.573,00	11.458.279.416.049,70	13.254.413.167.336,90	6,20%
1	ASET LANCAR	581.706.609.030,12	512.595.943.865,75	464.311.010.544,00	971.220.410.028,89	10,03%
	Kas	485.194.593.185,58	449.963.180.798,61	359.309.494.973,36	824.892.018.442,29	10,30%
	Piutang	66.293.038.422,25	36.566.284.404,11	56.391.871.671,60	86.168.079.791,87	5,77%
	Persediaan	30.210.227.422,29	25.288.041.163,03	48.127.143.899,04	59.590.311.794,73	12,33%
	Belanja Dibayar Di muka	8.750.000,00	778.437.500,00	482.500.000,00	570.000.000,00	24,62%
2	ASET TETAP	8.478.759.861.391,13	9.226.559.621.033,67	9.878.717.989.225,57	11.060.104.104.833,20	5,83%
	Tanah	4.095.089.943.419,00	4.124.655.098.719,00	4.169.302.335.496,33	4.359.336.523.648,93	1,52%
	Peralatan dan mesin	808.651.241.596,93	899.323.381.630,27	1.118.046.902.868,54	1.257.888.331.367,53	8,93%
	Gedung dan bangunan	2.406.331.892.425,05	2.749.426.949.286,42	3.105.067.217.979,62	3.592.410.397.304,62	8,25%
	Jalan, irigasi, dan jaringan	2.579.022.935.790,04	3.064.020.119.091,39	3.352.190.449.136,39	3.555.335.194.214,39	6,87%
	Aset tetap lainnya	82.593.371.855,58	114.462.101.010,58	131.346.179.233,58	131.069.548.469,47	9,25%
	Konstruksi dalam pengerjaan	55.746.830.218,14	235.791.954.742,14	493.882.932.848,14	1.060.802.198.584,15	23,69%
	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	11,63%
3	ASET LAINNYA	454.819.179.361,07	548.121.731.259,06	553.931.863.315,06	576.361.770.964,65	5,27%
	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-	-	-	-	-

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Kemitraan dengan pihak Ketiga	11.710.810.000,00	11.710.810.000,00	11.710.810.000,00	11.710.810.000,00	0,00%
	Aset tak berwujud	3.281.312.000,00	4.997.054.000,00	4.997.054.000,00	6.145.436.000,00	11,65%
	Akumulasi Amortisasi	-	-	-	-	10,80%
	Aset Non Lancar Lainnya	178.169.371.057,39	270.021.420.455,39	344.785.364.411,39	-	#DIV/0!
	Aset Lain-lain	263.305.689.637,00	263.305.689.637,00	195.131.497.637,00	561.407.233.397,98	13,27%
4	INVESTASI JANGKA PANJANG	454.565.662.978,82	521.357.177.414,49	561.318.552.965,09	646.726.881.510,17	7,43%
	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	#DIV/0!
	Investasi Permanen	454.565.662.978,82	521.357.177.414,49	561.318.552.965,09	646.726.881.510,17	7,43%
II	KEWAJIBAN	384.400.234.400,16	440.643.713.845,31	616.660.098.720,31	1.365.524.267.824,75	17,96%
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	206.230.863.342,77	170.622.293.389,92	158.340.000.558,92	427.964.893.435,77	12,95%
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		4.290.459,00	5.296.977,00	287.969.985,00	25,00%
	Utang Bunga	2.684.315.587,45	-	90.323.188,00	2.929.649.193,85	2,09%
	Utang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Kab/Kota					#DIV/0!
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	45.242.318.400,00				#DIV/0!
	Pendapatan Diterima Di muka	5.832.402.902,00	5.617.336.604,00	5.368.169.806,00	5.134.631.916,00	-3,40%
	Utang Jangka Pendek Lainnya	23.123.903.900,00	28.130.486.500,60	26.365.760.847,60		#DIV/0!
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)/Utang Belanja/Utang Beban	129.347.922.553,32	136.870.179.826,32	126.510.449.740,32	419.612.642.340,92	17,29%
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	178.169.371.057,39	270.021.420.455,39	458.320.098.161,39	937.559.374.388,98	20,25%
	Utang Pemerintah Pusat/Utang Dalam Negeri		-	113.534.733.750,00	571.285.361.961,00	25,00%
	Utang Jangka Panjang Lainnya	178.169.371.057,39	270.021.420.455,39	344.785.364.411,39	366.274.012.427,98	12,84%
III	EKUITAS DANA	9.585.451.078.360,98	10.367.990.759.727,70	10.841.619.317.329,40	11.888.888.899.512,20	4,84%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.969.851.312.761,14	10.808.634.473.573,00	11.458.279.416.049,70	13.254.413.167.337,00	6,20%

Sumber : Data diolah oleh BPKAD Prov. Sultra, 2018-2022

3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Provinsi Sulawesi Tenggara dalam APBD pada periode 2018-2022 telah melaksanakan Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan untuk pencapaian visi dan misi pemerintah. Kebijakan Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Kebijakan keuangan berisi informasi tentang kebijakan tentang pedoman dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun kedepan. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya fiskal membutuhkan kebijakan yang tepat dalam mengelola aset daerah untuk bisa menunjang penerimaan daerah. Pelaksanaan pembangunan selain ditunjang dengan pendanaan dari APBD, juga terdapat sumber pendanaan lain melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Social Responsibility (CSR).

Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Kebijakan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja dengan arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Sedangkan kebijakan pengelolaan pembiayaan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan pembiayaan (setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan) untuk mengantisipasi terjadinya defisit anggaran daerah.

Kebijakan Pengelolaan keuangan masa lalu tersebut dapat terlihat pada (1) Proporsi penggunaan anggaran dan (2) Analisis pembiayaan berikut.

3.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan Anggaran pemerintah daerah terbagi dalam komponen Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah jenis belanja yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang hasilnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Adapun belanja tidak langsung atau belanja aparatur merupakan anggaran yang diperuntukkan untuk mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dikendalikan oleh aparat pemerintah daerah yang tersebar pada setiap unit dan perangkat daerah terkait.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah terutama dalam penanganan penyebaran COVID-19 atau Virus Corona dalam aspek penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan pelaksanaan jaring pengaman sosial. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga berpedoman pada beberapa regulasi yang harus segera dilaksanakan, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial, mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar yang dijabarkan dalam program/kegiatan OPD sesuai tugas dan fungsinya.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan pilihan serta penunjang urusan di daerah yang

mendukung prioritas nasional, meliputi : 1) Tenaga Kerja; 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3) Pangan; 4) Pertanahan; 5) Lingkungan Hidup; 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 9) penguatan kemandirian ber-KB; 10) Perhubungan; 11) Komunikasi dan Informatika; 12) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 13) Penanaman Modal; 14) Kepemudaan dan Olah Raga; 15) Statistik; 16) Persandian; 17) Kebudayaan; 18) Perpustakaan; 19) Kearsipan; 20) Kelautan dan Perikanan; 21) Pariwisata; 22) Pertanian; 23) Kehutanan; 24) Energi Dan Sumber Daya Mineral; 25) Perdagangan; 26) Perindustrian; 27) Transmigrasi; 28) Otonomi Daerah dan Desentralisasi; 29) Otonomi Khusus; 30) Kesatuan Bangsa dan Politik; 31) Perencanaan Pembangunan Daerah; 32) Pengelolaan Keuangan Daerah; 33) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 34) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 35) Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan 36) Penelitian dan Pengembangan.

Komponen-komponen belanja daerah yang tergolong dalam alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, baik dalam kelompok belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung, meliputi belanja: (1) gaji dan tunjangan, (2) tambahan penghasilan, (3) penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, dan (4) belanja pemungutan pajak daerah. Sedangkan alokasi belanja langsung, meliputi belanja: (1) honorarium PNS, (4) kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS, (5) premi asuransi kesehatan, (6) makanan dan minuman pegawai, (7) pakaian dinas dan atributnya, (8) pakaian khusus dan hari-hari tertentu, (9) perjalanan dinas, (10) perjalanan pindah tugas, (11) pemulangan pegawai, dan (12) belanja modal (kantor, mobil dinas, mebeleur, peralatan dan perlengkapan, dll).

Alokasi belanja aparatur tersebut menjamin kelancaran dan terselenggaranya kegiatan pemerintahan daerah, baik untuk layanan publik maupun untuk penyelenggaraan pembangunan daerah secara berkesinambungan. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6.

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
1.	2018	1.303.814.903.045,00	3.653.023.735.367,00	35,69%
2.	2019	1.395.866.951.804,00	4.222.700.933.946,05	33,06%
3.	2020	1.455.086.821.825,00	4.217.393.211.787,00	34,50%
4.	2021	1.475.632.390.431,00	4.520.870.207.049,00	32,64%
5.	2022	1.635.277.347.138,00	4.830.913.831.684,00	33,85%

Sumber: BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2018-2022

Alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Sulawesi Tenggara Selama pada periode 2018-2021 cenderung berfluktuasi. Alokasi belanja pada tahun 2018 mencapai 35,69 persen lalu menurun pada tahun 2019 menjadi 33,06 persen dan pada Tahun 2020 naik menjadi 34,50 persen kemudian di Tahun 2021 turun menjadi 32,64 persen pada dari total Pengeluaran yang terdiri dari belanja dan pembiayaan pengeluaran daerah. Penurunan belanja tidak langsung ini merupakan gambaran kebijakan keuangan daerah yang lebih berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah pemerintah daerah sebagai upaya untuk lebih mengedepankan alokasi belanja pembangunan daerah untuk pemenuhan layanan masyarakat secara langsung, baik terkait urusan wajib layanan dasar maupun menyangkut urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan

pemerintah daerah yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.

Berikut Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tahun 2021-2023.

Tabel 3.7.
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 – 2023

No	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
	PENDAPATAN DAERAH			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.252.152.656.907	1.420.178.677.326	1.625.581.261.248
1.1	Pajak Daerah	1.009.823.505.992	1.142.269.003.345	1.340.534.498.345
1.2	Retribusi Daerah	36.884.710.963	52.513.062.377	46.614.586.075
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.694.885.668	64.694.885.668	64.694.885.668
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	140.749.554.284	160.701.725.936	173.737.291.160
2	PENDAPATAN TRANSFER	2.956.733.347.000	2.587.684.065.151	2.930.074.487.050
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.956.733.347.000	2.587.684.065.151	2.930.074.487.050
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41.219.542.660	15.853.690.500	1.483.085.800
3.1	Pendapatan Hibah	41.219.542.660	15.853.690.500	1.483.085.800
	JUMLAH PENDAPATAN	4.250.105.546.567	4.023.716.432.977	4.557.138.834.098
	BELANJA			
1	BELANJA OPERASI	2.976.385.044.217	2.881.673.052.573	2.827.157.725.878
1.1	Belanja Pegawai	1.548.299.991.863	1.635.277.347.138	1.628.831.274.282
1.2	Belanja Barang dan Jasa	889.967.930.950	997.160.884.524	1.042.042.508.305
1.3	Belanja Bunga	24.262.828.582	80.000.000.000	60.000.000.000
1.4	Belanja Hibah	509.097.362.822	154.829.570.911	90.135.943.291
1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.756.930.000	14.405.250.000	6.148.000.000
2	BELANJA MODAL	1.736.349.281.731	1.815.379.730.808	1.309.429.678.987
2.1	Belanja Modal Tanah	90.716.482.205	34.104.590.215	2.780.409.119
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.013.648.655	318.838.258.343	212.642.963.375
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	618.067.171.500	670.340.232.835	678.978.438.076
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	801.700.582.371	753.984.700.415	393.451.405.417
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	37.451.397.000	38.111.949.000	21.576.463.000
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	400.000.000	-	-
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.891.565.890	13.472.970.637	23.856.826.000
3.1	Belanja Tidak Terduga	7.430.048.890	13.472.970.637	23.856.826.000
4	BELANJA TRANSFER	517.691.698.599	626.508.952.342	751.723.030.842
4.1	Belanja Bagi Hasil	490.076.454.199	578.900.702.342	677.723.030.842
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	27.615.244.400	47.608.250.000	74.000.000.000
	JUMLAH BELANJA	5.236.317.590.437	5.337.034.706.360	4.912.167.261.707
	Total Surplus/(Defisit)	(986.212.043.870)	(1.313.318.273.383)	(355.028.427.609)
	PEMBIAYAAN	986.212.043.870	1.313.318.273.383	355.028.427.609

No	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.011.212.043.870	1.389.318.273.383	630.028.427.609
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	358.435.448.620	824.604.048.457	533.817.790.526
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	652.776.595.250	564.714.224.926	96.210.637.083
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.011.212.043.870	1.389.318.273.383	275.000.000.000
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	76.000.000.000	275.000.000.000
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	56.000.000.000	255.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000	76.000.000.000	275.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	986.212.043.870	1.313.318.273.383	355.028.427.609

Sumber: BPKAD 2023 (diolah)

3.3.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan pembangunan daerah ditujukan untuk memberikan gambaran tentang keseimbangan keuangan daerah, antara aspek pendapatan dan belanja daerah selama satu periode terakhir dan akan digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Realisasi APBD Sulawesi Tenggara pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 mengalami defisit. Gambaran kondisi riil anggaran provinsi Sulawesi Tenggara tersebut disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8.
Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	3,785,562,578,471.15	4,166,543,383,146.08	4,012,768,503,799.18	4.529.251.153.804,50	4.378.337.860.349,64
2.	Belanja Daerah	3,586,474,436,543	4,128,549,681,525.05	4,198,141,894,958.00	4.495.870.207.049.00	4.782.256.908.292,00
	Surplus/ (Defisit riil)	199,088,141,928.15	37,993,701,621.03	(185,373,391,158.82)	33.380.946.775.50	(403.919.047.942,36)
3.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	352,655,750,081.43	506,116,441,139.58	563,493,624,089.61	816223101701,79	1.054.740.833.745,00
4.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	66,549,298,824.00	94,151,252,421.00	18,962,992,674.00	25.000.000.000.00	48.656.923.392,00
	Surplus/ (Defisit riil)	286,106,451,257.43	411,965,188,718.58	544,530,631,415.61	791.223.101.701,79	1.006.083.910.353,00

Sumber: BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2018-2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi APBD Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami surplus pada Tahun 2018 mencapai Rp.199.088.141.928.15 pada tahun 2019 mencapai Rp.37.993.701.621.03 dan Defisit pada tahun 2020 mencapai penurunan Rp.185.373.391.158.82. sedangkan Tahun 2021 mencapai Rp. 33.380.946.775.50 dan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 403.919.047.942,36.

3.4. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perkiraan penganggaran untuk meleakaskan pembangunan di daerah untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Yaitu pada Tahun 2021-2023.

Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Perkiraan kerangka pendanaan 2021-2023 didasari pada asumsi makro ekonomi dan pertimbangan kondisi sosial yang relevan sebagai faktor determinan penganggaran yang diproyeksikan dalam 3 (Tiga) tahun ke depan.

3.4.1. Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah

Asumsi makro ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat Sulawesi Tenggara 3 (Tiga) tahun ke depan memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik sebagai kondisi sosial ekonomi yang diinginkan maupun sebagai faktor determinan dalam mengkreasikan potensi pendapatan daerah yang mampu diperoleh ke depan. Artinya, indikator-indikator dimaksud selain menggambarkan indikator kinerja pembangunan daerah yang akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah, juga menggambarkan kondisi yang menunjukkan sejumlah peluang bagi pemerintah daerah untuk memperbesar pendapatan daerah ke depan.

Kondisi keuangan daerah Sulawesi Tenggara 3 (Tiga) tahun ke depan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara nantinya. Kondisi pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan PDRB per kapita berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah juga akan memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kondisi makro ekonomi yang baik secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

Capaian dan target makro ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat periode 2018-2023 disajikan pada tabel berikut.

*Tabel 3.9.
Capaian dan Target Makro Ekonomi Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023*

No	Indikator	Tahun								
		Capaian					Target			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,40	6,50	-0,65	4,10	5,53	5,5-6,5	6,0-6,5	6,5-7,0	7,0-7,5
2.	Tingkat Pengangguran (%)	3,19	3,52	4,58	3,92	3,36	3,50-3,90	2,75-3,0	2,50-2,75	2,25-2,50
3.	Rasio Gini (Niai)	0,392	0,393	0,388	0,394	0,366	0,385-0,390	0,380-0,385	0,375-0,380	0,350-0,375
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	11,32	11,04	11,69	11,74	11,27	11,10-11,40	10,5-11,0	10,0-10,5	9,5-10,0
5.	Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	70,61	71,20	71,45	71,66	72,23	71,86-72,16	72,50-72,65	72,65-73,00	73,00-73,40

Sumber: Bappeda Prov. Sultra, diolah

Pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Tenggara untuk 3 (Tiga) tahun ke depan di asumsikan dan ditargetkan bertumbuh secara konsisten dan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan Kondisi ekonomi yang stabil dan meningkat, maka di asumsikan pula bahwa kondisi tersebut akan memberikan kontribusi positif terhadap penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan serta mengendalikan inflasi yang mendukung terciptanya stabilitas harga-harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga pada level lebih tinggi.

Secara umum, perekonomian Sulawesi Tenggara diprediksi akan tumbuh seiring dengan membaiknya ekonomi dunia pasca pandemic covid 19, walaupun kinerja ekspor luar negeri diperkirakan akan kembali mengalami perlambatan. Perlambatan tersebut disebabkan

oleh *based effect point* serta telah berlangsungnya ekspor bijih nikel kadar rendah sehingga peningkatan yang terjadi tidak berdampak signifikan, proses evaluasi pencabutan izin ekspor bijih nikel kadar rendah untuk beberapa perusahaan untuk batas waktu yang belum ditentukan diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja ekspor Sulawesi Tenggara. Meskipun demikian, ekspor komoditas lainnya terutama produk perikanan diperkirakan akan kembali meningkat sejalan dengan bertambahnya pasokan.

Selain itu, adanya proses ekspor langsung ke luar negeri (*tanpa melalui provinsi lain*) dapat menjadi pendorong ekspor di periode mendatang. Sektor *non-tradable* seperti jasa pariwisata juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan semakin berkembangnya pariwisata Sulawesi Tenggara terutama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi. Penguatan iklim investasi melalui kemudahan dan kepastian bagi calon investor, didukung dengan promosi yang tepat akan turut pula meningkatkan daya saing ekonomi Sulawesi Tenggara ke depan.

Indikator makro ekonomi daerah yang terkendali di posisi meningkat dan menurun, akan berpengaruh positif terhadap keuangan rumah tangga dan masyarakat. Jika kemampuan masyarakat meningkat maka kapasitas keuangan daerah Sulawesi Tenggara juga akan semakin besar. Kondisi ini akan menciptakan keadaan yang kondusif untuk meningkatkan layanan sosial ekonomi masyarakat dalam segala aspek, seperti layanan dasar pendidikan, kesehatan, ketertiban, serta aksesibilitas ekonomi yang semakin baik. Kondisi ini, angka mempengaruhi pencapaian Tingkat pembangunan manusia (IPM). IPM Sulawesi Tenggara juga diasumsikan akan terus membaik seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi makro.

3.4.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja 2024 – 2026

Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Disisi lain, Belanja daerah akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan dengan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Belanja daerah akan diarahkan untuk memenuhi hak sosial dan ekonomi masyarakat di perdesaan dan perkotaan atas sandang, pangan, papan, kesehatan, Pendidikan dan penunjang kegiatan perekonomian.

Dalam Upaya untuk mencapai target pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maka akan fokus pada langkah-langkah Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah, Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat dan peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Dalam rangka mencapai target pendapatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melaksanakan strategi sebagai berikut:

- a) Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional dibidang sumber daya

manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian teknologi sehingga prosedur dapat disederhanakan;

- b) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Berikut ini disajikan hasil proyeksi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2024-2026 yang akan datang.

Tabel 3.10.
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	PENDAPATAN DAERAH	4.893.211.883.997	5.315.506.347.479	5.776.678.921.064
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.668.498.553.862	1.768.321.684.331	1.874.775.791.601
1.01	Pajak Daerah	1.340.534.498.345	1407561223262	1.477.939.284.425
1.02	Retribusi Daerah	63.540.805.476	69.894.886.024	76.884.374.626
1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	78.280.811.658	86.108.892.824	94.719.782.107
1.04	Lain-lain PAD yang Sah	186.142.438.383	204.756.682.221	225.232.350.443
2	Pendapatan Transfer	3.223.081.935.755	3.545.390.129.331	3.899.929.142.264
2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.223.081.935.755	3.545.390.129.331	3.899.929.142.264
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.631.394.380	1.794.533.818	1.973.987.200
3.01	Pendapatan Hibah	1.631.394.380	1.794.533.818	1.973.987.200
	JUMLAH PENDAPATAN	4.893.211.883.997	5.315.506.347.479	5.776.678.921.064

Sumber: Bapenda dan BPKAD 2023 (diolah)

Dari tabel di atas, diproyeksikan bahwa dengan tercapainya asumsi kondisi makro ekonomi maka pendapatan daerah akan terus meningkat. Pendapatan Daerah pada tahun 2023 ini mencapai Rp. 4,5 triliun, dan diproyeksikan terus meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp. 5,7 triliun pada tahun 2026. Seluruh komponen pembentuk pendapatan daerah diperkirakan mengalami peningkatan yang konsisten. Pendapatan asli daerah pada tahun 2023 yang mencapai Rp. 1,6 triliun lebih diproyeksikan hanya akan meningkat setiap tahun dan pada tahun 2026 mencapai Rp. 1,8 triliun lebih. Adapun Pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer pada tahun 2023 sebesar Rp 2,9 triliun lebih akan terus meningkat hingga mencapai Rp. 3,8 triliun lebih pada tahun 2026. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2023 mencapai Rp. 1,4 miliar dan di perkirakan hingga mencapai Rp. 1,9 miliar lebih pada tahun 2026.

Peningkatan pendapatan daerah tersebut diyakini berasal dari adanya peningkatan dari semua sumber pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, khususnya DAU dan DAK, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di asumsikan bahwa Pajak akan berkontribusi paling besar pada komponen Pendapatan Asli Daerah karena merupakan komponen pendapatan yang betul-betul berasal dari dalam Sulawesi Tenggara sendiri, sehingga lebih mampu dikontrol oleh pemerintah melalui kebijakan keuangan daerah.

Optimisme pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari daerah sendiri di Sulawesi Tenggara untuk lima tahun ke depan didasari pada berbagai aspek. Terbangunnya infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian masyarakat serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang semakin membaik akan menjadi berkontribusi terhadap berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga akan tercipta sumber-

sumber pendapatan daerah yang baru. Membaiknya pendapatan asli daerah akan mempengaruhi tingkat kemandirian fiskal Sulawesi Tenggara lima tahun ke depan. Ketergantungan pada sumber pendapatan dari luar daerah diharapkan semakin mengecil, sehingga akan menuju keseimbangan sumber keuangan yang baik pada periode-periode pembangunan selanjutnya

Adapun komponen dana perimbangan, khususnya DAU dan DAK yang tidak sepenuhnya mampu dikontrol oleh pemerintah daerah di asumsikan juga akan terus meningkat. Komponen ini diperkirakan akan dipengaruhi oleh adanya kebijakan keuangan negara ke depan, untuk mendorong optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Peluang mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru dan pengalihan pengelolaan pajak yang semakin beragam akan membuka potensi peningkatan kapasitas fiskal Sulawesi Tenggara yang semakin besar. Pada saat yang sama upaya pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan fiskal nasional, nampaknya akan berpeluang meningkatkan pendapatan dalam negeri, sehingga transfer fiskal ke daerah juga akan semakin meningkat.

Berikut ini disajikan hasil proyeksi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2024-2026 yang akan datang.

*Tabel 3.11.
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026*

NO	URAIAN	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	BELANJA	5.403.383.987.878	5.943.722.386.665	6.538.094.625.332
1	Belanja Operasi	3.109.873.498.466	3.420.860.848.312	3.762.946.933.144
1.01	Belanja Pegawai	1.791.714.401.710	1.970.885.841.881	2.167.974.426.069
1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.146.246.759.136	1.260.871.435.049	1.386.958.578.554
1.03	Belanja Bunga	66.000.000.000	72.600.000.000	79.860.000.000
1.04	Belanja Hibah	99.149.537.620	109.064.491.382	119.970.940.520
1.05	Belanja Bantuan Sosial	6.762.800.000	7.439.080.000	8.182.988.000
2	Belanja Modal	1.440.372.646.886	1.584.409.911.574	1.742.850.902.732
2.01	Belanja Modal Tanah	3.058.450.031	3.364.295.034	3.700.724.537
2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	233.907.259.713	257.297.985.684	283.027.784.252
2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	746.876.281.884	821.563.910.072	903.720.301.079
2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	432.796.545.959	476.076.200.555	523.683.820.610
2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.734.109.300	26.107.520.230	28.718.272.253
2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
3	Belanja Tidak Terduga	26.242.508.600	28.866.759.460	31.753.435.406
3.01	Belanja Tidak Terduga	26.242.508.600	28.866.759.460	31.753.435.406
4	Belanja Transfer	826.895.333.926	909.584.867.319	1.000.543.354.051
4.01	Belanja Bagi Hasil	745.495.333.926	820.044.867.318.82	902.049.354.051
4.02	Belanja Bantuan Keuangan	81.400.000.000	89.540.000.000	98.494.000.000
	JUMLAH BELANJA	5.403.383.987.878	5.943.722.386.665	6.538.094.625.332

Sumber: BPKAD 2022 (diolah)

Dari tabel di atas, diproyeksikan untuk belanja daerah akan terus meningkat. pada tahun 2023 ini mencapai Rp. 4,91 triliun, dan diproyeksikan terus meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp. 6,53 triliun pada tahun 2026. Seluruh komponen belanja daerah

diperkirakan mengalami peningkatan yang konsisten. Belanja operasional pada tahun 2023 yang mencapai Rp. 2,82 triliun lebih diproyeksikan hanya akan meningkat setiap tahun dan pada tahun 2026 mencapai Rp.3,76 triliun lebih, Belanja Modal pada tahun 2023 sebesar Rp 1,3 triliun lebih akan terus meningkat hingga mencapai Rp. 1,74 triliun lebih pada tahun 2026,. Belanja Tak Terduga pada tahun 2023 sebesar Rp 23,85 miliar lebih akan terus meningkat hingga mencapai Rp. 31,7 miliar lebih pada tahun 2026, dan Belanja transfer pada tahun 2023 sebesar Rp 751 miliar lebih akan terus meningkat hingga mencapai Rp. 1 triliun lebih pada tahun 2026,

Berikut ini disajikan proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2024-2026 yang akan datang.

Tabel 3.12.
Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 – 2026

No	Uraian	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	793.031.270.370	762.334.397.407	838.567.837.148
3.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	587.199.569.579	645.919.526.536	710.511.479.190
3.01.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	205.831.700.791	116.414.870.870	128.056.357.957
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	793.031.270.370	762.334.397.407	838.567.837.148
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	302.500.000.000	332.750.000.000	366.025.000.000
3.02.01	Penyertaan Modal Daerah	22.000.000.000	24.200.000.000	26.620.000.000
3.02.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	280.500.000.000	308.550.000.000	339.405.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	302.500.000.000	332.750.000.000	366.025.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	490.531.270.370	429.584.397.407	472.542.837.148

Sumber: BPKAD 2022 (diolah)

Dari tabel di atas, diproyeksikan untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah akan terus meningkat. Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2023 ini mencapai Rp. 630 miliar, dan diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai Rp. 838 miliar pada tahun 2026. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 sebesar 275 miliar dan akan di proyeksikan tahun 2026 sebesar 366 miliar.

3.4.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah Sulawesi Tenggara untuk 3 (Tiga) tahun ke depan memaparkan hasil penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan alokasi prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tenggara selama periode 2021-2023 yang akan datang dengan berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.13.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun	Tahun	Tahun
		2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan	4.158.361.809.779	4.218,302,479,833	4,590,316,388,530
2.	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	241.066.735.765	241,066,735,765	253,120,072,553
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	860.763.064.620	845,081,363,998	-
	Total Penerimaan	5,260,191,610,164.00	5,304,450,579,596	5,349,676,606,189.00
	Dikurangi :			
5.	Belanja	5.235.191.610.164	2,728,513,388,547	2,811,893,560,720
6.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000	41,006,943,596	0
	Kapasitas Riil Kemampuan keuangan	-	2,534,930,247,453	2,537,783,045,469

Sumber: BPKAD 2021 (Diolah)

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Sulawesi Tenggara untuk periode 2022-2023 diharapkan meningkat secara konsisten. Pada Tahun 2022 sebesar Rp. 2.534.930.247.453,- dan meningkat menjadi Rp 2,537,783,045,469,- pada tahun 2023. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah ini selain diharapkan didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya pendapatan dalam daerah sendiri, juga diharapkan dari sejumlah pelampauan target pendapatan dari kreativitas dan inovasi pemerintah daerah. Perlampauan sejumlah komponen pendapatan daerah, antara lain perlampauan PAD, perlampauan dana perimbangan, perlampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan lain sebagainya diharapkan dari efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

3.4.4. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko antara para pihak. Penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur strategis, diantaranya bertujuan untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sekaligus sebagai salah satu strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan. Skema KPBU dapat dilakukan dengan prakarsa dari Pemerintah (solicited) maupun prakarsa dari Badan Usaha (unsolicited) dengan masing-masing keunggulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Adapun lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU mencakup sebagian atau seluruh proses kegiatan KPBU, seperti membiayai, merancang, membangun, merehabilitasi, mengoperasikan, memelihara, dan lainnya.

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang. Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB IV

PERMASALAHAN & ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya merupakan tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan. Perumusan permasalahan pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemerintah untuk memperbaiki kegagalan yang terjadi dimasa sebelumnya, serta untuk mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya, selain itu Perencanaan pembangunan merupakan dimensi awal dalam manajemen pemerintahan, yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Sebagai peta jalan menuju tercapainya tujuan nasional bangsa, maka dibutuhkan sinergitas antara semua komponen baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan dan hubungan yang selaras antara perencanaan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Seiring dengan adanya semangat untuk melaksanakan pilkada serentak tahun 2024 yang berujung pada PEMILU, PILPRES, PILKADA dan PILKADES secara serentak pada satu waktu yang bersamaan maka menjadi momentum untuk melakukan perubahan pola perencanaan pembangunan dengan logika kewilayahan. Hal ini memberikan ruang partisipasi bagi daerah menentukan arah masa depan daerahnya yang nantinya diakomodasi dalam satu dokumen pembangunan nasional dengan sistem waktu dan target serta visi yang sama. Semua akan tersinergi dalam satu dokumen perencanaan nasional. Melalui perencanaan yang baru dengan logika kewilayahan maka akan lebih menyentuh kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan lebih terfokus pada kehidupandi tingkat daerah. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Tujuan dari ini adalah agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1.1. Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran

Permasalahan pembangunan mempunyai makna penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dari banyaknya permasalahan daerah biasanya dipilih yang memiliki prioritas paling tinggi, kondisi ini jika prioritas berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang masuk dalam RPD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional yang bersifat wajib atau mandatori.

Dari pemetaan rumusan permasalahan yang diidentifikasi dengan mengacu data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut disusun menjadi masalah pokok daerah yang dapat dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran. Permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang bersifat makro, meliputi:

- 1) Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tenggara masih berada diatas rata-rata nasional;
- 2) Tingkat Pengangguran masih berfluktuasi seiring meningkatnya lapangan pekerjaan pada sektor industri;
- 3) Kualitas pembangunan manusia masih berada dibawah rata-rata nasional;

- 4) Masih rendahnya pemerataan dan mutu pendidikan;
- 5) Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
- 6) Kerentanan terhadap kerawanan pangan yang tinggi;
- 7) Kontribusi PDRB sektor unggulan masih rendah;
- 8) Kuantitas dan kualitas infrastruktur belum memadai;
- 9) Konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota masih rendah;
- 10) Kesenjangan antar daerah cukup tinggi;
- 11) Pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ancaman bencana;
- 12) Pendapatan Asli Daerah masih rendah;
- 13) Profesionalitas aparatur masih rendah;
- 14) Dampak pandemik COVID-19 yang berpengaruh terhadap semua aktivitas masyarakat dan berdampak pada segi kesehatan, sosial, dan ekonomi.

4.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perumusan permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat berdasarkan urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Berdasarkan pada bab selanjutnya atau pada gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara teridentifikasi beberapa permasalahan pembangunan yang dapat dirangkum berdasarkan hasil perumusan permasalahan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, antara lain sebagai berikut :

4.1.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- Belum meratanya kualitas layanan pendidikan;
- Pencapaian kompetensi peserta didik belum memadai;
- Masih adanya anak tidak mampu secara ekonomi yang mengalami hambatan pendidikan;
- Belum optimalnya sinergi pembangunan pendidikan dengan sektor tenaga kerja;
- Masih terdapat bangunan sekolah yang tidak memadai/masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana sekolah;
- Masih tingginya angka putus sekolah;
- Masih rendahnya jumlah dan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- Masih rendahnya literasi dan numerasi peserta didik hasil dari assesment nasional;
- Masih rendahnya daya serap lulusan SMK ke dunia kerja.

2) Kesehatan

- Meningkatnya kasus Gangguan Jiwa berat Skizofrenia/Psikosis di Sultra melebihi rata-rata Nasional (prevalensi 5,9/mil)
- Angka Kematian Neonatal yang masih tinggi, Angka Kematian bayi dan Kematian balita masih tinggi dibanding dengan Angka Nasional;
- Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi 0 – 11 bulan belum tercapai;
- Prevalensi kekurangan gizi/prevalensi stunting lebih tinggi dibanding dengan angka Nasional;
- Angka kesembuhan penderita TB yang rendah (60% target 100%);
- Meningkatnya Penderita HIV AIDS di Sultra.
- Angka kesakitan DBD masih harus diwaspadai;
- Prevalensi penderita malaria di Sultra Tahun 2017 mencapai 0,21 per 1000 pddk;
- Prevalensi penderita penyakit jantung dan hipertensi semakin meningkat;

- Masih terdapat 11 kab/kota yang endemis Kasus Kusta;
- Masih terdapat 4 kab/kota yang endemis Kasus frambusia;
- Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat, Ormas dan swasta serta stakeholder lainnya dalam pembangunan kesehatan;
- Pandemi Covid-19 masih tetap menjadi perhatian di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Masih terdapat Kabupaten/ Kota belum memiliki kawasan bebas asap rokok;
- Presentase Desa yang melaksanakan STBM baru mencapai 49%;
- Cakupan pelaksanaan Kabupaten Kota Sehat baru mencapai 40%;
- Kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang belum optimal;
- Ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin masih rendah;
- Ketersediaan dan persebaran SDM Kesehatan yang belum sesuai dengan standar;
- Terbatasnya jenis dan jumlah, kualitas standar alat sarana dan prasarana;
- Kurangnya sarana dan prasarana serta alat penunjang pendidikan dan pelatihan di Balai Pelatihan Kesehatan Masyarakat;
- Belum semua penduduk Sultra memiliki Jaminan Kesehatan;
- Adanya Krisis dan Kedaruratan Bencana Alam.
- Belum optimalnya perilaku masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga lingkungan;
- Masih rendahnya faskes dasar yang terakreditasi;
- Belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber Daya Air:

- Masih terdapat kondisi rusak pada jaringan irigasi kewenangan provinsi;
- Masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku;
- Tingginya tingkat banjir yang dapat menurunkan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air;
- Masih adanya DAS kritis di WS Provinsi;
- Terjadinya pencemaran air di WS provinsi;
- Terjadinya degradasi lingkungan di WS provinsi;
- Pendayagunaan Air seperti PDAM, Irigasi dan air baku di WS Provinsi yang belum optimal;
- Masih terjadinya banjir di WS Provinsi;
- Terjadinya abrasi di WS Provinsi, pantai dan Pulau-pulau kecil
- Terjadinya pendangkalan di WS Provinsi dan Teluk Kendari;
- Masih banyaknya permukiman wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang belum terlindungi pengaman pantai;
- Belum tertibnya izin pemanfaatan/pengusahaan air permukaan dan air tanah;
- TKPSDA dan Dewan SDA Provinsi belum aktif sebagaimana mestinya;
- Komisi irigasi belum terbentuk.

Jalan dan Jembatan:

- Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan provinsi belum memenuhi standar dan dalam kondisi baik;
- Belum meratanya kondisi jaringan jalan kewenangan provinsi di kabupaten/kota;
- Kurangnya anggaran pemeliharaan jalan.

Air Minum:

- Belum optimalnya akses pelayanan air bersih; Kewenangan SPAM Regional masih di tahap FS, untuk ke tahap berikutnya terkendala di SPAM Kab/Kota, khususnya di Konsel dibutuhkan audit berkelanjutan sehingga hal ini yang menjadi kendala;
- Belum optimalnya pemanfaatan SDA yang tersedia untuk kebutuhan air minum;
- Belum optimalnya pengelolaan manajemen SPAM di Kabupaten/Kota;
- Belum semua Kabupaten/Kota memperbaharui dokumen Jakstrada nya;

- Masih ada beberapa SPAM di Kabupaten/Kota dalam kondisi rusak atau tidak berfungsi dengan baik;
- Akses air minum layak Prov. Sultra tahun 2021 masih sebesar 91,94% sedangkan target RPJMD Tahun 2022 sebesar 97%;
- Presentase rumah tangga Prov. Sultra terhadap akses air minum perpipaan Tahun 2021 masih 10,83% sementara target RPJMN 2020-2024 sebesar 30% ;
- Masih banyak masyarakat yang belum terakses terhadap air minum aman;
- Belum optimalnya pembinaan masyarakat terhadap akses air minum aman.

Sanitasi:

- *Belum optimalnya pelayanan sanitasi yang dapat dilihat dari data rumah tangga terhadap akses fasilitas buang air besar pada tahun 2020 yaitu masih ada 10,26% rumah tangga dengan sanitasi yang tidak layak, sedangkan 89,74% rumah tangga dikategorikan memiliki akses terhadap sanitasi layak.*
 - *81,93% rumah tangga sudah memiliki fasilitas buang air besar*
 - *7,81% rumah tangga masih menggunakan fasilitas bersama*
 - *8,69% rumah tangga yang tidak memiliki/ada tapi tidak menggunakan fasilitas buang air besar*
 - *1,57% rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar umum*
- Masih tingginya rumah tangga yang tidak menggunakan tangki septik sebagai tempat penampungan akhir tinja yaitu 10,10%.
 - *89,90% RT menggunakan tangki septik*
 - *4,86% RT menggunakan selain tangki septik (kolam/sawah/ sungai/danau/laut)*
 - *4,79% lubang tanah*
 - *0,46% pantai/tanah lapang/kebun/lainnya*
- Belum tersedianya infrastruktur pengolahan air limbah regional
- Belum adanya TPA regional.

Penataan Ruang:

- Belum optimalnya hasil perencanaan tata ruang wilayah sehingga belum dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang;
- Seluruh kabupaten/kota belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang dan masih banyaknya RTRW kabupaten/kota yang belum direvisi;
- Persentase RTH perkotaan yang masih rendah;
- Belum optimalnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang;
- Masih adanya pelanggaran terhadap tata ruang;
- Masih adanya beberapa kawasan strategis Provinsi yang belum dikelola;
- Masih terjadinya alih fungsi lahan secara illegal;
- Belum optimalnya perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan berbasis spasial;
- Baru 5 Kabupaten/Kota yang memiliki Forum Penataan Ruang (FPR);
- Baru 4 Kabupaten/Kota yang memiliki Rencana Detail tata Ruang (RDTR);
- Data penerapan rtrw dalam satu periode khususnya bidang infrastruktur.

Jasa Konstruksi

- Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi;
- Belum optimalnya pembina jasa konstruksi;
- Belum optimalnya sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI);
- Belum terlaksananya tertib badan usaha.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Belum tersedianya data perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi antar hirarki pemerintahan yang mencakup data numerik dan spasial sebagai dasar penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan program yang terintegrasi;

- Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang belum optimal, sehingga peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh menjadi lambat;
- Masih tingginya Rumah tidak layak Huni sebesar 72.184 Unit tahun 2021;
- Masih tingginya angka kawasan kumuh di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Masih tingginya backlog sebesar 16.124 kk tahun 2021;
- Pembangunan rumah tidak layak huni (mencakup 3 isu: kemiskinan, stunting dan penanganan kawasan kumuh);
- Masih ada 10 Kabupaten/Kota yang belum mereviu SK Kepala Daerah terkait Kawasan Kumuh sesuai dengan petunjuk teknis;
- Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen Perumahan seperti RP3KP Belum di reviu. Baru 3 Kabupaten 2021 (Kolaka Utara, Buton Utara dan Kolaka) yang mengajukan. 2 kabupaten di 2022 (Muna Barat dan Konawe Utara);
- Masih terbatasnya kemampuan penyediaan perumahan baik oleh masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Bencana:

- Minimnya mitigasi bencana: terdiri dari Kajian-kajian kebencanaan di kabupaten/kota yang masih kurang, Masih kurangnya peralatan penanggulangan bencana yang ada di kabupaten/kota, dan banyak peralatan dalam kondisi rusak, Masih kurangnya gudang logistik yang memenuhi standar;
- Belum optimalnya pelaksanaan penanggulangan bencana;
- Masih tingginya Indeks Resiko Bencana dan masih rendahnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Sultra karena disebabkan Minimnya anggaran yang tersedia untuk alokasi program kebencanaan dimasing-masing kabupaten/ kota. sehingga hal inilah yang menjadi salah satu alasan tidak terpenuhinya target dari 71 indikator IKD sesuai dengan karakteristik bencana masing-masing kabupaten/kota;
- Masih ada beberapa kabupaten kota yang belum menyusun rencana penanggulangan bencana maupun kajian risiko bencana;
- Belum optimalnya mitigasi bencana dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan melalui informasi dan sosialisasi edukasi dan komunikasi serta penyediaan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) utamanya di daerah 2 yg rawan bencana;
- Belum maksimalnya pentiapan SOP dengan Tusi penanggulangan bencana di daerah;
- Pelaksanaan Tanggap Darurat masih terkendala dengan pendanaan;
- Belum optimalnya sinregitas antar unsur pentahelix yaitu pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media dalam penyelenggaraan penanggulaangan bencana;
- Penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi masih menjadi nomenklatur sub kegiatan.

Trantibum dan Linmas

- Belum optimalnya penegakkan peraturan daerah;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan.

Kesbangpol

- Jumlah wajib pilih yg belum terdaftar/wajib pilih ganda
- Kurangnya SDM yang menangani konflik sosial
- Ormas yang memiliki Legalitas (SKT) tetapi belum melaporkan keberadaannya di Kesbangpol Prov. Sultra, Ormas yang belum memiliki legalitas (SKT), Ormas yang belum memiliki legalitas (SKT), Ormas yang masa berlaku SKT nya telah habis, Ormas yang tidak jelas keberadaannya.

6) Sosial

- Belum optimalnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik terkait penanganan kemiskinan dan pencapaian SPM;
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum dilakukan pemutakhiran secara berkala sehingga berpotensi salah sasaran;
- Pelaksanaan SPM belum optimal karena dari 4 panti yang menjadi target SPM, Dinas Sosial hanya memiliki 1 UPTD;
- Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial baik anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, gepeng dan korban bencana alam relatif besar.

4.1.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

- Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja yang rendah;
- Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;
- Belum optimalnya fungsi kelembagaan tripartit dan bipartit di kabupaten/kota;
- Daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia menjadi relatif rendah salah satu penyebab utama adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah;
- Tenaga kerja Indonesia masih berpenghasilan rendah dan tak mampu bersaing dengan tenaga kerja asing;
- Pemerintah harus berusaha memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) agar bisa bersaing dari negara berpenghasilan menengah (middle income countries) menjadi negara berpenghasilan tinggi;
- Kurangnya SDM dari sisi ketenagakerjaan dilakukan secara bertahap melalui program pendidikan, pelatihan dan fokus.
- Pemagangan dengan sasaran para pencari kerja yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Pelatihan peningkatan produktivitas bagi karyawan perusahaan;
- Rendahnya kegiatan bimbingan konsultasi yang ditujukan bagi perusahaan;
- Kurangnya kegiatan penganugerahan “sidha karya” bagi perusahaan;
- Kurangnya kegiatan pelatihan dengan sumber pendanaan dari APBD.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- Masih terjadi kesenjangan gender, terlihat dari disparitas capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) antar wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terlihat dari melambatnya capaian pendapatan dan partisipasi perempuan di legislatif;
- Belum optimalnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang responsif gender di daerah;
- Rendahnya capaian Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik;
- Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, seksual, maupun psikis, pada ranah privat maupun ranah publik.

3) Pangan

- Belum optimalnya jaminan keamanan pangan segar di Sulawesi Tenggara;
- Belum optimalnya ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah;
- Konsumsi pangan yang belum beragam bergizi seimbang dan aman.

4) Pertanahan

- Belum optimalnya pengendalian untuk mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- Belum optimalnya dukungan penetapan lokasi untuk pembangunan kepentingan umum;
- Penyediaan lahan untuk kepentingan umum masih banyak mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya;
- Meningkatnya Kebutuhan Lahan untuk pembangunan infrastruktur kepentingan umum;
- Belum optimalisasi Kualitas SDM bid. Pertanahan tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum;
- Masih banyak layanan izin penetapan lokasi yang belum sesuai standar pelayanan;
- Proses tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum masih lambat;
- Masih banyaknya terjadi sengketa dan konflik pertanahan;
- penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan Pemerintah Daerah belum optimal;
- Masih banyak tanah Pemda yang belum memiliki hak penguasaan atas tanah (sertifikat);
- Belum optimalnya penyediaan data base Pertanahan Pemerintah Daerah.

5) Lingkungan Hidup

- Rendahnya kapasitas daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH);
- Tingginya pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum tersedianya jaringan komunikasi data (Jarkomdat) untuk keperluan Akses Data Kependudukan untuk keperluan pelayanan publik (Kesehatan, Pendidikan, Penerimaan TNI/Polri dan Bantuan Sosial);
- Belum maksimalnya tenaga SDM Pengelola Sistem Administrasi Kependudukan berbasis digital ID;
- Masih kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan administrasi kependudukan (peralatan M2M jaringan komunikasi data).

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum optimalnya pengembangan kawasan perdesaan;
- Rendahnya Pengetahuan dan Keterampilan (Knowledge dan skill) Kades tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Sering terjadinya pergantian aparatur Desa (Sekdes, Kaur, Kasi, Kadus);
- Sarana dan Prasarana belum memadai untuk melaksanakan pelayanan publik secara optimal;
- Akses transportasi, komunikasi dan akses untuk mendukung pertumbuhan ekonomi/perekonomian desa sangat terbatas/kurang;
- Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa (Bumdes dan Bumdesma);
- Belum optimalnya jejaring pengembangan kawasan perdesaan;
- Fasilitas untuk melaksanakan Pengawasan dan BinteK bagi Aparatur Desa masih sangat terbatas baik oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi maupun Dinas Kabupaten;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana kelembagaan masyarakat desa;
- Terbatasnya indikator untuk menganalisis kinerja pemerintahan desa pada Indeks Desa Membangun.

- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Masih tingginya angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*);
 - Tingginya Peserta KB yang putus pakai (*Drop Out*) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria;
 - Masih tingginya prevalensi stunting.
- 9) Perhubungan
- Minimnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang berupa pemasangan rambu-rambu, dari ruas jalan provinsi;
 - Belum optimalnya pelayanan terminal tipe B (kewenangan pemerintah provinsi) dalam hal mendukung konektivitas antar moda transportasi;
 - Pada layanan transportasi laut, belum diserahkannya kewenangan pengelolaan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi terkait pelayanan angkutan laut regional guna mendukung aksesibilitas masyarakat wilayah kepulauan. Komunikasi dan Informatika;
 - Belum optimalnya pelayanan pelabuhan penyeberangan;
 - Masih banyak sarana prasarana perhubungan dalam kondisi kurang baik atau rusak;
 - Forum Lalu lintas sebagai wadah koordinasi bidang lalu lintas jalan raya antara kewenangan, antara sector dan antara actor belum berfungsi sebagaimana mestinya;
 - Masih maraknya terminal liar antara Kabupaten/Kota;
 - Parkiran kendaraan di kawasan kewenangan Provinsi yang belum terkelola dengan baik.
- 10) Komunikasi dan Informatika
- Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses komunikasi dan internet;
 - Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informatika dan website dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah. (Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum dilaksanakan secara optimal, terintegrasi dan berkelanjutan);
 - Masih terbatasnya upaya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan khususnya melalui media massa lokal maupun jaringan nasional;
 - Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi;
 - Data center sudah tersedia tapi belum berfungsi;
 - Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang belum optimal;
 - Belum maksimalnya sosialisasi penyelenggaraan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara sehingga masih terdapat daerah yang belum membentuk KIM;
 - Masih belum tersedianya regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan di bidang komunikasi dan informatika.
- 11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- Belum optimalnya manajemen Koperasi & UMKM;
 - Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi & UMKM;
 - Terbatasnya akses Permodalan Koperasi & UMKM;
 - Terbatasnya akses kemitraan dan jaringan usaha Koperasi & UMKM;
 - Rendahnya pengetahuan teknologi dan informasi bagi Koperasi & UMKM.
- 12) Penanaman Modal
- Belum ada Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2021, sehingga masyarakat yang akan mengurus izin terkait kewenangan yang diatur dalam

Perpres tersebut, harus menunggu, karena bukan kewenangan pusat, namun daerah belum ada legalitas operasional kewenangan;

- Belum optimalnya kualitas infrastruktur aplikasi OSS (online single submission);
- Sebagian perizinan belum sesuai dengan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

13) Kepemudaan dan Olahraga

- Masih banyaknya pemuda menganggur;
- Belum optimalnya prestasi atlet diberbagai cabang olahraga unggulan di tingkat nasional dan internasional;
- Kurangnya sarana dan prasarana olahraga sesuai standar;
- Kurangnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta kemitraan dengan stakeholder;
- Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta nilai-nilai budaya lokal.

14) Statistik

- Belum optimalnya pengelolaan satu data provinsi; termasuk Masih rendahnya komitmen stakeholder dalam mendukung satu data, belum memadainya sarana dan prasarana pendukung satu data, serta Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola data.

15) Persandian

- Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dengan baik karena masih belum terpenuhinya alokasi anggaran yang dibutuhkan dan infrastruktur pendukung yang belum memadai;
- Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan;
- Jaringan komunikasi sandi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota belum berjalan dengan baik;
- Masih rendahnya dukungan dan tingkat kesadaran akan pentingnya pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

16) Kebudayaan

- Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta nilai-nilai budaya lokal;
- Masih rendahnya pelestarian budaya dan nilai budaya.

17) Perpustakaan

- Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pustakawan;
- Masih banyaknya OPD yang belum memiliki Tenaga Perpustakaan (Pustakawan dan Tenaga Teknis);
- Rendahnya rasio ketersediaan koleksi perpustakaan dibanding jumlah penduduk;
- Masih rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) oleh pengelola Pemustaka;
- Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan;
- Masih rendahnya jumlah pemustaka yang terdaftar.

18) Kearsipan

- Penyelamatan, pemanfaatan dan pelayanan arsip, penyelamatan dan perlindungan arsip statis sebagai memori kolektif yang menggambarkan Mosaic sejarah Daerah yang lengkap belum terlaksana secara maksimal, masih tercecer di berbagai tempat bahkan rusak akibat bencana;
- Masih banyak OPD belum memiliki Arsiparis.

4.1.2.3. Urusan Pilihan Pemerintahan

1) Kelautan dan Perikanan

- Belum optimalnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya;
- Belum optimalnya penerapan mutu dan daya saing produk hasil perikanan;
- Belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kawasan konservasi perairan daerah;
- Belum optimalnya peranan masyarakat pesisir dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Masih tingginya ilegal, unreported and unregulated fishing.

2) Pariwisata

- Belum optimalnya pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- Pemasaran pariwisata yang belum efektif dan efisien;
- Belum optimalnya pengembangan SDM, regulasi dan kelembagaan kepariwisataan;
- Arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan;
- Belum optimalnya langkah yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi kreatif sebagai penunjang pariwisata daerah.

3) Pertanian

- Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan pertanian organik;
- Belum optimalnya nilai tambah hasil produksi;
- Masih rendahnya penguatan kelembagaan kelompok petani;
- Dampak perubahan iklim;
- Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani;
- Penyebaran penyakit menular pada hewan ternak.

4) Kehutanan

- Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta DAS;
- Pelaksanaan perhutanan sosial belum efektif dan efisien;
- Belum optimalnya penanganan kerusakan hutan.

5) Energi dan Sumber Daya Mineral

- Masih maraknya penambangan tanpa ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman penambangan yang benar;
- Belum optimalnya penambangan yang ramah lingkungan;
- Masih terdapat rumah tangga yang kurang mampu yang belum mendapatkan akses listrik secara layak;
- Pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pengembangan dan pemanfaatan EBT;
- Infrastruktur pendukung pengembangan EBT di daerah yang kurang;
- Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah;
- Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah.

6) Perdagangan

- Masih terbatasnya jenis, jumlah komoditi serta negara tujuan ekspor daerah;
- Belum tertibnya perdagangan antar pulau, daerah, keluar dan masuk;
- Masih sering terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat akibat pasokan distribusi yang memicu inflasi;
- Masih rendahnya pengujian dan sertifikasi mutu barang serta kalibrasi.

7) Perindustrian

- Belum optimalnya peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah melalui pengolahan dan hilirisasi industri;
- Kualitas, kuantitas, kontinuitas sebagian besar produk industri daerah belum mampu bersaing di pasar nasional maupun ekspor;
- Komitmen pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pengembangan industri melalui penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RPIK belum sepenuhnya dilaksanakan.

8) Transmigrasi

- Terbatasnya kuota dan lokasi penempatan transmigrasi dibanding dengan animo calon transmigran;
- Pertanahan (baseland) di wilayah LP LU I maupun LU II masih ada bersinggungan dengan kawasan hutan maupun kepentingan lain;
- Adanya beberapa lokasi transmigrasi di provinsi sulawesi tenggara yang masih bermasalah sehingga perlu klarifikasi dengan BPKH dan diupayakan penyelesaiannya;
- Terjadinya beberapa tempat izin usaha baik perkebunan maupun pertambangan yang masuk dalam kawasan transmigrasi.
- Beberapa lokasi transmigrasi terdapat akuvusi dari masyarakat setempat;
- Masih terdapat lokasi dan ekslokasi transmigrasi yang belum terbit SK HPL nya;
- Terbatasnya infrastruktur baik sarana maupun prasarana;
- Sulitnya akses ke beberapa lokasi transmigrasi.

4.1.2.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

- Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Belum optimalnya proses evaluasi perencanaan pembangunan dalam menilai kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah.

2) Keuangan

- Rendahnya Pendapatan Asli Daerah;
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- Rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah dibandingkan potensinya;
- Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
- Kualitas SDM aparat pengelola pajak masih rendah;
- Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;
- Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam peningkatan pendapatan daerah;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sektor Pelayanan Publik belum optimal;
- Belum adanya regulasi terbaru terkait pajak alat berat dan retribusi;
- Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

3) Kepegawaian

- Kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan belum optimal;
- Tingginya angka pelanggaran disiplin oleh aparatur;
- Belum optimalnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparatur;
- Sistem penilaian kinerja ASN belum akurat.

- 4) Pendidikan dan Pelatihan
 - Rendahnya kompetensi manajerial SDM aparatur;
 - Rendahnya kompetensi teknis dan fungsional SDM aparatur;
 - Belum terpenuhinya kapasitas penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
- 5) Penelitian dan Pengembangan
 - Masih rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan;
 - Minimnya Kebijakan Inovasi yang diterapkan daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
 - Minimnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang Riset / Kelitbangan;
 - Alokasi Anggaran Riset dan Inovasi yang masih minim, sehingga kurang berkontribusi pada Peningkatan Daya Saing Daerah.
- 6) Pengawasan
 - Belum optimalnya kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah);
 - Belum optimalnya peningkatan level maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di OPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Belum optimalnya pengelolaan manajemen risiko di lingkup OPD Provinsi;
 - Belum optimalnya manajemen pengawasan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- 7) Fungsi lainnya

Sekretariat Daerah

- Rendahnya OPD dalam menyimpan/mengarsipkan bukti dan administrasi sengketa Hukum;
- Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan, khususnya masyarakat miskin;
- Sinkronisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Kabupaten/Kota dengan Provinsi.
- Pengukuran Budaya Kerja ASN belum dilakukan secara berkala;
- Pembentukan Lembaga PD belum Efektif (Belum tepat Ukuran dan Tepat Fungsi);
- Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota terhadap Implementasi Reformasi Birokrasi dan Standar Pelayanan Publik masih rendah;
- Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD Provinsi belum Sinergi dengan Dokumen Perencanaan.
- Kurangnya penyediaan data perekonomian (Harga, Kebutuhan, Ketersediaan Bahan Pokok, Distribusi Barang/Jasa, Faktor-Faktor Produksi, Potensi Sumber Daya Alam) yang dapat dipertanggung jawabkan dan bersifat simultan;
- Belum optimalnya fungsi koordinasi dan monitoring antara Biro Perekonomian Setda Prov Sultra ataupun Bagian Perekonomian Kab/Kota dengan dinas teknis yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan Perekonomian Daerah;
- Belum optimalnya fungsi BUMD dalam memanfaatkan ataupun menunjang segala potensi Sumber Daya Alam maupun potensi industrial di daerah;
- Belum optimalnya fungsi BLUD dalam menunjang pelayanan umum daerah;
- Kurang maksimalnya koordinasi para Bupati/Walikota se-Sultra atas kebijakan tentang penanganan inflasi di daerah.
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi administrasi pelaksanaan pembangunan daerah belum optima;
- Belum tersedianya pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.

Sekretariat DPRD

- Belum adanya produk hukum DPRD hak prakarsa DPRD yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;
- Belum terlaksananya akuntabilitas dan transparansi mengawal produk tentang hak-hak prakarsa DPRD;
- Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4.2. Isu Strategis

4.2.1. Isu Strategis Global

4.2.1.1. Konflik Internasional Antara Negara Rusia dan Negara Ukraina

Terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina cukup mengguncang dunia terutama dalam bidang politik global dan pasar internasional sehingga mengancam terjadi krisis global, hal ini membawa tantangan baru ke dalam hubungan internasional. Kejadian ini tentu sangat berdampak jangka panjang terhadap ekonomi di seluruh dunia. Invasi Rusia terhadap Ukraina menjadi peristiwa global terkini yang sangat mempengaruhi seluruh negara di dunia. Invasi terhadap Ukraina oleh Rusia secara resmi dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022, yang kemudian hal ini menandai kembali terjadinya perang yang terakhir kali terjadi di Eropa sejak tahun 1945 sehingga perang antara Rusia dan Ukraina ini memiliki implikasi yang sangat besar bagi pasar global yang memiliki potensi menghasilkan dampak yang berjenjang pada ekonomi di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan Rusia dan Ukraina memiliki peranan yang sangat besar pada pasar minyak, gas, gandum, energi, makanan, dan pupuk global.

Menurut Bakrie (2022) dalam jurnal Hakim dan Sayidi (2022) Rusia merupakan produsen dan pengeksportir minyak terbesar ketiga di dunia, selain itu pengeksportir gas bumi terbesar kedua, serta pengeksportir batubara terbesar ketiga di dunia. Rusia juga memiliki peran yang besar dalam ekspor gandum karena merupakan pengeksportir terbesar di dunia dan pengeksportir minyak bunga matahari terbesar kedua. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, Rusia juga mendominasi perdagangan pupuk global dan menjadi pengeksportir pupuk terbesar. Ukraina juga memiliki peranan yang sama pentingnya dalam pemenuhan pasar global seperti pengeksportir minyak bunga matahari terbesar, pengeksportir jagung terbesar keempat dan pengeksportir gandum terbesar kelima. Dano (2022) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa menurut International Monetary Fund (IMF), Rusia tercatat menyumbang PDB global sebesar 1,6 persen pada tahun 2022, sedangkan output ekonomi Ukraina diperkirakan hanya sebesar 0,2 persen dari produksi dunia. Rusia dan Ukraina secara signifikan memegang peranan penting pada sektor energi dan makanan (Mbah & Wasum, 2022). Menurut catatan Departemen Pertanian AS, ekspor gandum Rusia dan Ukraina mencapai seperempat dari total ekspor global (USDA, 2022). Untuk ekspor jagung dan biji-bijian lainnya, Rusia dan Ukraina menyumbang hampir seperlima dari total ekspor global.

Dampak dari pandemi Covid-19 terasa makin panjang akibat invasi Rusia ke Ukraina yang sangat mengganggu ekonomi global. Beberapa negara ekonominya telah bangkit kembali dengan cepat setelah COVID-19, tetapi akibat yang ditimbulkan dalam perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan tekanan inflasi dan gangguan rantai pasokan yang besar. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina menyebabkan “*short effect*” karena kedua negara ini memiliki peranan yang cukup besar dalam perekonomian global atau biasa disebut sebagai “pemain besar” dalam ekonomi global. Hal ini tentunya berkaitan dengan kontribusi kenaikan harga energi dan pangan yang dapat berakibat terjadinya krisis karena pemerintah dari berbagai negara melakukan pengurangan dukungan atau ikut campur dalam perang Rusia dan Ukraina. Dano (2022) menjelaskan bahwa posisi Rusia sebagai salah satu negara produsen dan eksportir minyak dan energi terbesar dunia, jika konflik militer menyebabkan Rusia dijatuhi sanksi internasional berupa pembatasan kemampuan ekspor minyak dan gas, maka dapat dipastikan eskalasi berikutnya adalah kenaikan harga energi dunia. Kenaikan

harga energi hanya akan mendorong inflasi. Sehingga akibat banyak negara-negara yang berperan sebagai mesin penggerak ekonomi dunia, seperti Cina, Jepang, dan Eropa yang merupakan *net importir energy*, dengan kenaikan harga minyak akan membatasi pertumbuhan global. Kecuali di negara AS yang swasembada energi, tetapi harga minyak yang tinggi akan menyebabkan pengalihan sebagian pendapatan dari konsumen ke produsen, yang pada akhirnya akan menimbulkan potensi buruk pada sisi permintaan. Hakim dan Sayidin (2022) berpendapat bahwa krisis yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tentu berimbas kepada bidang ekonomi dan tentu konflik tersebut menimbulkan restrukturisasi perdagangan internasional. Meskipun tidak diketahui kapan restrukturisasi terjadi. Akan tetapi, tentu negara yang memiliki hubungan dengan Rusia atau Ukraina akan memiliki pengaruh besar terhadap kepentingan nasional.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina memiliki pengaruh dalam perekonomian antara negara di seluruh dunia dan salah satunya yang berpengaruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perang yang terjadi mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia hal ini yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia. Diketahui bahwa terdapat beberapa kenaikan harga komoditas seperti minyak bumi, gas bumi dan hasil pertambangan yang dikenakan kepada seluruh dunia. Negara-negara di Asia Tenggara menjadi negara yang cukup bergantung pada Rusia dalam hal komoditas minyak bumi karena letak geografis yang tidak terlalu jauh jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Rusia menjadi salah satu yang memiliki peran sangat besar di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Rusia memiliki keterikatan dengan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Indonesia dan Thailand dalam hal hubungan perekonomian dan militer. Berdasarkan hubungan ekonomi yang terjalin antara Vietnam dan Rusia mendapatkan total perekonomian lebih dari 2% PDB. Selain itu, Indonesia dan Thailand memiliki total perdagangan sekitar 1% PDB. Meskipun, perekonomian seluruh dunia berdampak atas perang yang terjadi dimana mendapatkan kurang dari 1% PDB, tetapi ketiga Negara ini memiliki hubungan ekonomi yang cukup erat. Selain itu, Vietnam, Indonesia dan Thailand juga menjadi negara yang memiliki hubungan militer yang cukup dekat seperti pembelian alutsista dan lain sebagainya.

4.2.1.2. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN *Economic Community* (AEC), Indonesia dan sembilan anggota ASEAN lainnya memasuki persaingan yang sangat ketat di bidang ekonomi. Pada dasarnya, MEA merupakan wadah yang sangat penting bagi kemajuan negara-negara ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga keberadaannya harus disikapi dengan positif. Dan diharapkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bisa berkompetisi dan bisa menempatkan ASEAN masuk ke dalam pasar terbesar di dunia.

Diharapkan terbentuknya pasar tunggal tersebut mendorong negara-negara di ASEAN untuk mencapai stabilitas dan kemajuan ekonomi yang kuat dalam menghadapi arus persaingan secara global. Meskipun adanya MEA sampai sekarang masih menjadi pro dan kontra, perdebatan tersebut cenderung mempertanyakan kesiapan negara-negara anggota dalam menghadapi iklim ekonomi baru di wilayah Asia Tenggara. Dalam menunjang tujuan MEA tersebut, setidaknya ada empat fokus utama yang dijalankan pada era pasar bebas ini sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

Sebagai masyarakat yang dinamis, sudah selayaknya kita harus bisa melihat lebih banyak dampak positif dari adanya pasar bebas Asia Tenggara atau MEA. ASEAN *Economic Community* atau MEA secara garis besar terfokus dalam empat hal, yaitu:

1. MEA sebagai pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang difungsikan sebagai sebuah kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. Terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi tersebut akan menghilangkan batasan terhadap arus barang, investasi, modal, jasa, dan tenaga profesional antarnegara di Asia Tenggara.

2. MEA berorientasi untuk membentuk kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan, perlindungan konsumen, dan berbagai macam perjanjian untuk saling menciptakan kondisi ekonomi yang adil.
3. Menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki daya saing tinggi serta ditunjang dengan kemudahan dalam mendapatkan modal.
4. MEA terintegrasi dengan perekonomian global sehingga jangkauan pasar yang diraih negara-negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal.

Dengan demikian, negara peserta ditantang untuk bersaing secara ketat satu sama lain. Pasar bebas harus disadari betul kondisinya agar terus bisa mengembangkan kemampuan dalam mengikuti persaingan di bidang apa pun. Banyak peluang yang bisa diambil dari MEA seperti yang dijabarkan berikut ini.

Beberapa Sektor yang menjadi Peluang bagi Indonesia dalam MEA

Sebenarnya adanya MEA memberi peluang bagi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN jika didukung dengan produktivitas yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang potensial.

Tentu saja hal tersebut sejalan dengan *ASEAN Economic Community Blueprint* yang intinya adalah MEA sangat diperlukan dalam mengurangi kesenjangan antarnegara ASEAN. MEA juga dapat digunakan sebagai jembatan dalam membangun rantai suplai makanan dan bisa menjadi perantara untuk melakukan kegiatan ekspor-impor dengan negara-negara non-ASEAN. Kesempatan baik tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengurangi hambatan perdagangan. Dengan tidak adanya hambatan di bidang perdagangan, Indonesia mampu meningkatkan kegiatan ekspor-impor sehingga bisa meningkatkan *gross domestic product* (GDP) atau produk domestik bruto (PDB). Karena itu, Indonesia sanggup berkompetisi dengan produk-produk unggulannya di perikanan, pertanian, dan perkebunan.

Pengembangan Sektor Investasi dan SDM Perlu Menjadi Prioritas

Selain sektor jasa dan sumber daya alam, Pemerintah juga fokus dalam mengembangkan sektor investasi dan SDM. Di sektor investasi, mengingat potensi yang dimiliki Indonesia cukup besar maka diprediksi akan sangat mudah untuk meningkatkan masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI). Masuknya FDI ini bakal mampu memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan SDM.

Indonesia sangat mungkin memposisikan diri sebagai negara tujuan investor karena tingkat kebutuhan akan barang dan jasa yang tinggi serta jumlah populasinya yang tinggi juga. Di bidang ini banyak sekali para pengusaha yang melirik investasi, termasuk properti. Sebagai lahan investasi yang sangat potensial, masyarakat Indonesia bisa mengambil kesempatan emas tersebut untuk memanfaatkan aliran modal asing. Dilihat dari aspek ketenagakerjaan Indonesia juga memiliki kesempatan yang sangat besar karena dengan jumlah populasi yang dimiliki akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja apalagi jika mereka sudah memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Dengan begitu, tenaga kerja Indonesia bisa mengisi kekosongan-kekosongan posisi yang ada di luar negeri. Ini juga menjadi kabar baik bagi para wirausaha karena mereka akan lebih mudah dalam mencari tenaga kerja yang lebih berkompeten dari berbagai negara di wilayah Asia Tenggara.

Tantangan yang Dihadapi Indonesia

Seiring dengan terciptanya peluang-peluang bisnis yang telah disebutkan di atas, ternyata setiap peluang tersebut juga memiliki risikonya masing-masing. Risiko tersebut bukan menjadi titik akhir yang tidak bisa diatasi. Akan tetapi, lebih menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meminimalkan berbagai kemungkinan yang terjadi setiap adanya peluang bisnis tersebut. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang harus dihadapi dengan adanya peluang-peluang yang telah disebutkan di atas.

Tantangan di Bidang Perdagangan Barang dan Jasa

Arus perdagangan bebas entah itu barang maupun jasa akan memunculkan *competition risk*. Artinya, selain menjadi negara pengekspor, Indonesia juga menjadi sasaran empuk eksportir dari negara lain. Hal ini mengakibatkan munculnya produk-produk luar yang beragam dalam jumlah banyak ke Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai jika produk-produk yang datang dari luar negeri memiliki kualitas yang lebih bagus. Industri lokal pun akan terancam akibat hal tersebut. Efek besar yang ditimbulkan adalah adanya defisit neraca perdagangan. Oleh karena itu, para pelaku usaha khususnya para produsen menciptakan produk yang memiliki standar terbaik sehingga produk lokal tetap memiliki kualitas. Pada sektor ini, yang memiliki peluang besar adalah para pelaku UMKM. Mulai dari diberlakukannya MEA sejak awal Januari 2016, Pemerintah telah bekerja keras melalui Balai Riset dan Standarisasi Industri (Baristand) di bawah komando Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam melakukan sosialisasi dan melakukan peningkatan kualitas SDM.

Tantangan di Bidang Investasi

Pada sektor ini, Indonesia terbilang memiliki risiko yang sangat tinggi karena adanya *exploitation risk*. Sebabnya, Indonesia kurang memiliki aturan dan regulasi yang ketat sehingga sektor-sektor riil semisal pertambangan mudah saja dikelola negara asing. Untuk yang satu ini, tentunya tidak banyak yang bisa diperbuat masyarakat. Padahal, Pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk mencegah adanya eksploitasi alam yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing.

Tantangan di Bidang Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan Indonesia memiliki tantangan yang luar biasa. Kalau dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Mengingat standar upah yang berlaku di Indonesia masih tergolong kecil sehingga tenaga kerja asing masih enggan untuk bekerja di sini. Malah sebaliknya, tenaga kerja Indonesia lebih memiliki peluang untuk bekerja di luar negeri untuk mendapatkan gaji yang lebih layak.

Tantangan di Bidang UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sasaran dan fokus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah regional ASEAN. UMKM Indonesia memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama tentang kualitas barang yang dihasilkan. Kebanyakan kualitas produk UKM Indonesia belum memenuhi standar. Hal itu disebabkan beberapa faktor. Pertama, biaya produksi dalam negeri yang sangat mahal sehingga tidak mampu menciptakan efisiensi produksi. Kedua, kurangnya pengetahuan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dan perlu sesegera mungkin diupayakan solusinya, baik oleh Pemerintah maupun pelaku usaha sendiri.

4.2.1.3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim diduga kuat terjadi akibat terjadinya pemanasan global. Perubahan iklim merupakan berubahnya kondisi temperatur atau suhu dan pola cuaca dengan jangka waktu yang panjang. Diperkirakan terjadinya peningkatan suhu global sebagai akumulasi dari meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai sumber emisi, khususnya dari pemanfaatan energi fosil untuk pelaksanaan aktivitas manusia. Sejak revolusi industri, emisi GRK mengalami peningkatan yang sangat cepat, khususnya gas karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrous oksida (N₂O). Gas-gas ini memiliki sifat seperti kaca sehingga adanya gas ini di atmosfer akan menimbulkan efek rumah kaca. Radiasi panas bumi yang lepas ke udara ditahan oleh GRK, sehingga suhu bumi semakin panas.

Dalam buku Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan *Nationally Determined Contribution* Kemen KLHK, disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Kajian Ke-5 (Assessment Reports 5

atau AR5) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), suhu bumi telah meningkat sekitar 0,8°C selama abad terakhir. Pada akhir tahun 2100, suhu global diperkirakan akan lebih tinggi 1.8-4°C dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999. Jika dibandingkan periode pra-industri (1750), kenaikan suhu global ini setara dengan 2.5-4.7°C. Proses pemanasan global terutama disebabkan oleh masuknya energi panas ke lautan (kurang lebih 90% dari total pemanasan), dan terdapat bukti bahwa laut terus menghangat selama periode ini.

Lebih lanjut dalam buku tersebut, disebutkan laporan IPCC menegaskan bahwa aktivitas manusia merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim, terutama dalam 50 tahun terakhir. Pengaruh manusia (antropogenic caused) tampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (karbon dioksida, metana, nitrogen oksida dan sejumlah gas industri) dari aktivitas manusia, yang tertinggi dalam sejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya sejak 800.000 tahun yang lalu. Konsentrasi gas CO₂ sekarang lebih tinggi 40% jika dibandingkan pada era pra-industri. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan. Bukti lebih lanjut tentang pengaruh aktivitas manusia juga dideteksi dari terjadinya pemanasan samudera, perubahan curah hujan, pencairan gletser dan tutupan es di kutub utara, serta terjadinya sejumlah iklim ekstrem di bumi.

Di Indonesia, cuaca ekstrim lebih banyak terjadi yang mengganggu kegiatan ekonomi. Para petani dan nelayan tidak dapat lagi menentukan masa tanam, masa panen dan masa melaut yang dapat menghasilkan tangkapan optimal. Banjir dan kekeringan sudah terjadi dimana-mana serta kejadian banjir rob juga telah lebih sering dialami masyarakat kota yang berlokasi di pinggir laut. Gelombang panas (El Nino) yang menyebabkan kebakaran gambut dan gelombang basah (La Nina) yang menyebabkan banjir sudah mengalami perubahan masa terjadinya.

4.2.1.4. *Sustainable Development Goals (SDGS)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalimat kuncinya adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).

Untuk menjamin implementasi TPB/SDGs berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip yang telah disepakati juga diadopsi oleh Indonesia. Prinsip pertama adalah *universality*. Prinsip ini mendorong penerapan TPB/SDGs di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam konteks nasional, implementasi TPB/SDGs akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah *integration*. Prinsip ini mengandung makna bahwa TPB/SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Prinsip kedua ini telah dipegang teguh dalam penyusunan rencana aksi khususnya terkait dengan penyusunan program dan kegiatan serta penganggarannya. Prinsip terakhir adalah "*No One Left Behind*" yang menjamin bahwa pelaksanaan TPB/SDGs harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Prinsip ini juga telah diterapkan dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Beberapa aspek penting terkait dengan pengarusutamaan TPB/SDGs di Sulawesi Tenggara antara lain pemetaan kesesuaian antara TPB/SDGs dengan prioritas pembangunan daerah dan pemetaan ketersediaan indikator TPB/SDGs di provinsi dan kabupaten/kota.

Kesesuaian antara TPB/SDGs dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Pencapaian target TPB/SDGs bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun wajib pula diikuti oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Agar TPB/SDGs dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, maka sangat perlu mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mewajibkan pengintegrasian TPB/SDGs dalam dokumen perencanaan, meliputi perencanaan jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), dan jangka pendek atau perencanaan tahunan (RKPD dan Renja PD).

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs sebagai berikut :

- Tujuan 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan
- Tujuan 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
- Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk disegala usia
- Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
- Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- Tujuan 6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
- Tujuan 7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
- Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- Tujuan 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
- Tujuan 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
- Tujuan 11. Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
- Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- Tujuan 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- Tujuan 14. Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
- Tujuan 15. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati
- Tujuan 16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif

Tujuan 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Perkembangan pencapaian TPB/SDGs jika dikaitkan dengan kondisi saat ini dengan adanya Pandemi Covid-19 sangat berdampak negatif, karena Pandemi Covid-19 bukan hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga memiliki dampak terhadap pencapaian TPB/SDGs dari masing-masing tujuan. Dampak dari terjadinya Pandemi Covid-19 ini menyebabkan penyesuaian strategi dan upaya mencapai target TPB/SDGs, seperti:

- Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan karena pandemi ini menurunkan pendapatan kelompok rentan dan miskin
- Tujuan 2: Tanpa Kelaparan juga terdampak karena logistik pangan terganggu akibat PSBB serta akses terhadap pangan menurun akibat PHK
- Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera yang menyangkut sektor kesehatan juga perlu pembenahan baik dari segi akses, pelayanan, dan alat kesehatan. Untuk kedepannya harus dipersiapkan reformasi kesehatan nasional sebagai upaya mengatasi pandemi.
- Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas terutama terkait kesiapan guru mengajar secara daring, infrastruktur TIK yang perlu dioptimalkan, dan perluasan teknologi internet bagi keluarga miskin dan rentan.
- Tujuan 5: Kesetaraan Gender pun mengalami perubahan. Layanan kesehatan produksi terganggu dan beban kerja perempuan di rumah tangga menjadi meningkat.
- Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau menghadapi tantangan akibat penurunan harga komoditas energi fosil.
- Tujuan 8 dan 9, laju pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan turun akibat turunnya pertumbuhan sektor industri. Dibandingkan tahun lalu, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan turun menjadi 2,3 persen.
- Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan. "Jika kita tidak intervensi, tingkat kemiskinan pada 2020 bisa mencapai 10,54 persen. Namun jika kita intervensi, kemiskinan dapat ditekan menjadi 9,24 persen, Penurunan pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak pada ketenagakerjaan.

Demikian pula dengan tujuan lainnya hingga tujuan 17 memiliki dampak yang cukup besar sehingga untuk mengembalikan seperti kondisi saat sebelum pandemi terjadi akan terasa sangat berat. Namun di sisi lain, pasca terjadinya Covid-19 memudahkan kita untuk mencapai beberapa target TPB/SDGs, khususnya yang berhubungan dengan lingkungan, seperti: Kualitas udara dan air terlihat membaik, emisi karbon berkurang, potensi meningkatnya keanekaragaman hayati, perdagangan satwa liar semakin berkurang. Akan tetapi, pengolahan sampah perlu diperhatikan, terlebih sampah medis yang menyumbang banyaknya sampah plastik akibat tingginya sampah medis yang dihasilkan saat terjadi Pandemi Covid-19.

Menghadapi perubahan ini, kita harapkan komitmen pencapaian target indikator TPB/SDGs dapat menjadi solusi bersama, untuk itu perlu untuk memasukkan indikator TPB/SDGs kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

4.2.2.1. Lingkungan Hidup

Gambaran lingkungan Indonesia berdasarkan Buku Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020 berdasarkan 3 (tiga) matra utama, yakni lahan, air dan udara, adalah sebagai berikut:

1) Lahan

a) *Tata Guna Lahan/Luas Tutupan Lahan*

Luas seluruh daratan Indonesia pada tahun 2019 adalah 187,8 juta Ha yang tersebar 6 (enam) kelompok pulau/ kepulauan besar (ekoregion) atau 34 provinsi. Daratan Indonesia ini terbagi atas lahan berhutan seluas 94,1 juta Ha atau 50,0% dari luas total daratan; dan lahan tidak berhutan dengan luas 93,6 juta Ha. Selama lima tahun terakhir (periode tahun 2014 – 2019), luas lahan berhutan Indonesia mengalami penurunan dari 95,7 Ha pada tahun 2014 menjadi 94,1 Ha pada tahun 2019. Kerusakan hutan akibat dari perubahan fungsi maupun peruntukan hutan merupakan salah satu faktor utama terjadinya penurunan luas lahan berhutan pada periode waktu tersebut.

b) *Deforestasi*

Deforestasi di Indonesia selama periode tahun 2014 – 2019 memperlihatkan tren penurunan, dari 1,09 juta Ha pada tahun 2014 menjadi 0,46 juta Ha pada tahun 2019. Untuk periode tahun yang sama, deforestasi lahan terbesar terjadi pada ekoregion Kalimantan (0,1491 juta Ha), diikuti Sumatera (0,0897 juta Ha), Papua (0,0774 Ha), dan Sulawesi – Maluku (0,0764 juta Ha). Sedangkan luas deforestasi lahan hutan di ekoregion Bali – Nusa dan Jawa masing-masing sebesar 0,0282 juta Ha dan 0,0186 juta Ha. Faktor utama penyebab terjadinya deforestasi lahan hutan khususnya di ekoregion Kalimantan dan Sumatera adalah kebakaran hutan yang merupakan salah satu kejadian luar biasa pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan fungsi penutupan lahan, kawasan hutan mengalami deforestasi yang paling besar terutama pada lahan hutan produksi tetap, sedangkan sisanya terdapat di Area Penggunaan Lain (APL).

c) *Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)*

Indeks Kualitas Tutupan Lahan atau IKTL merupakan indeks yang menggambarkan kinerja pengelolaan tutupan lahan termasuk di dalamnya aspek konservasi, rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial yang disajikan secara sederhana sehingga mudah dipahami. IKTL nasional yang dicapai pada tahun 2015 adalah 58,30, menurun menjadi 56,88 pada tahun 2017. Angka IKTL kemudian memperlihatkan tren peningkatan menjadi 61,03 pada tahun 2018 dan 62,0 pada tahun 2019.

2) Air

a) *Kuantitas Air*

Sumber daya air yang tersedia di wilayah Indonesia mencapai 3,9 triliun m³/tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara kaya air. Akan tetapi yang dapat dimanfaatkan sebesar 17,69% dari total sumber daya air yang tersedia atau 691,3 juta m³/tahun. Sekitar 25,30% dari 691,3 juta m³/tahun air, sebagian besar dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi, sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri, serta sebagai sumber energi terbarukan dari sumber daya air, yang meliputi: Pembangkit Listrik Tenaga Air/ PLTA (5.059 MW), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/ PLTM (140 MW), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (30 MW).

b) *Kualitas Air*

Secara umum, indeks kualitas air Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan secara nasional kualitas air sungai prioritas berada dalam kualitas cukup baik dengan angka IKA sebesar 65,86, yang kemudian turun menjadi 58,68 pada tahun 2017. Kualitas air sungai pada tahun 2018 meningkat dan berada pada kategori baik dengan IKA rata-rata sebesar 72,77, tetapi turun menjadi kategori kurang baik pada tahun 2019. Pada tahun 2015 – 2017, sebanyak 58,82% – 44,12% sungai berstatus kualitas cukup baik. Pada tahun 2018, sebagian besar (70,1%) sungai Indonesia memiliki

kualitas baik dan cukup baik (IKA > 70). Akan tetapi, pada 2019 kualitas sungai prioritas Indonesia mulai menurun, dimana mayoritas (76,5%) sungai memiliki kualitas kurang dan cukup baik (IKA: 50 – 70).

3) Udara

Pencemaran udara di wilayah perkotaan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Kebutuhan akan transportasi dan energi yang semakin meningkat, sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk memberikan konsekuensi meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi memberikan dampak pada kesehatan manusia dan lingkungan.

4.2.2.2. Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan II tahun 2020. Triwulan I tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 5,07. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana Covid-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina. Pada triwulan II, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi (pertumbuhan ekonomi negatif) sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru di mulai pada pertengahan Maret. Social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Keadaan ekonomi Indonesia tersebut masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan Indonesia 0,3%, merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya positif.

Para pengamat ekonomi dan Lembaga Internasional (IMF, Bank Dunia, OECD) memprediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Resesi tersebut akan dialami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi namun resesi ringan (mild recession) karena kontraksi ekonomi diperkirakan “hanya” sekitar -3%-0% dan tidak akan berlangsung lama, sekitar 2 triwulan. Prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah.

Pemda mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Di samping itu, Pemerintah juga mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun. Pemulihan ekonomi nasional diharapkan mulai terasa pada triwulan III. Meskipun tidak bertumbuh positif, diharapkan ekonomi nasional tidak berkontraksi sebesar triwulan II. Selanjutnya triwulan IV, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara itu, pada tahun 2021, diharapkan ekonomi nasional akan mengalami recovery secara signifikan. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 3 (tiga) kebijakan yang dilakukan yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara

bersamaan dengan sinergy antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait.

Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier effects yang signifikan.

Pemerintah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi. Untuk UMKM, pemerintah antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21) Ditanggung Pemerintah. Untuk korporasi, Pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh Pasal 22 impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN; menempatkan dana Pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Pemerintah juga memberikan penjaminan modal kerja untuk korporasi yang strategis, prioritas atau padat karya. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitasi nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

4.2.2.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut jenis SPM yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, terdiri atas:

- 1) Pendidikan
 - a. Pendidikan menengah
 - b. Pendidikan khusus
- 2) Kesehatan
 - a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
 - b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi
- 5) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi
- 6) Sosial
 - a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

Setiap Standar Pelayanan Minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan:

1. Pengumpulan data
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Laporan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

4.2.2.4. Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara Serentak pada Tahun 2024

Suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggungjawab dari penyelenggara pemilu saja, dalam hal ini Komisi Pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peran serta Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menyukseskan proses penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting. Hal ini mutlak bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemilu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sebagai upaya mencapai pemilu yang demokratis. Bentuk bantuan dan fasilitas tersebut antara lain berupa penugasan personil pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan,

dan PPS, bantuan kendaraan operasional, kelancaran distribusi logistik, penanganan ketentraman dan ketertiban umum dan penugasan personil linmas, serta menjamin netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) dan penyelenggara negara. Selain itu, Pemerintah Pusat dan daerah juga mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi, literasi, edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan pemilu, dan melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, agar masyarakat bisa memilih dengan cerdas dan calon-calon yang dipilih merupakan calon pemimpin yang berkualitas dan amanah, sehingga bisa memberikan dampak yang positif pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.2.3. Isu Strategis Sulawesi Tenggara

Bagian ini menjelaskan isu-isu strategis berdasarkan penelaahan dari gambaran kondisi daerah, isu global, dan nasional, maka diidentifikasi isu strategis pembangunan Sulawesi Tenggara kedepan, sebagai berikut :

4.2.3.1. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya merupakan isu daerah atau nasional, bahkan merupakan isu global yang menjadi kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2015. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* (SDGs)) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

TPB/SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip universalitas, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorangpun yang terlewatkan atau “*No one is Left Behind.*” Salah satu yang menjadi tujuan utama *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah kemiskinan, berdasarkan komitmen global bahwa kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*).

Kondisi penduduk miskin di Sulawesi Tenggara secara faktual masih mengalami keterbatasan akses pelayanan dasar meliputi akses pendidikan, kesehatan, air bersih, rumah yang layak, dan pangan. Selain itu, pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan dirasakan masih sangat rendah, dibuktikan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja karena tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Keterbatasan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil ditambah dengan akses pemasaran masih dirasakan pada kalangan masyarakat miskin hasil produksi belum layak untuk dipasarkan, sehingga akibatnya rumah tangga miskin tidak mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dampak Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 dirasakan sangat berpengaruh pada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami kenaikan yaitu dari 3,19 persen pada Agustus 2018 menjadi 3,52 persen pada Agustus 2019 dan di tahun 2020 menjadi 4,58 persen. Kenaikan TPT pada tahun 2020 ini menjadi bukti nyata dampak COVID-19 pada keadaan ketenagakerjaan. Faktor lain ketidakberdayaan masyarakat miskin disebabkan karena kondisi jasmani, psikologi, lingkungan yang terisolasi, kultur yang wajib diikuti sebagai suatu komunitas tertentu, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran atau bahkan untuk kepentingan tertentu dengan memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat miskin.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada Maret 2020 naik 1,85 ribu orang, walaupun secara persentase menurun dibandingkan periode sebelumnya. Rilis BPS menyebut bahwa Sultra adalah 1 dari sedikit provinsi di Indonesia yang persentase penduduk miskinnya turun. Bertolak belakang dengan kondisi secara nasional. Sebagian besar provinsi lainnya langsung merespon pandemi ini dengan kenaikan persentase penduduk miskin. Kemiskinan Sulawesi Tenggara turun menjadi 11 persen pada periode Maret 2020.

Bertambahnya penduduk miskin di Sultra hanya terjadi di perkotaan. Sebanyak 4,35 ribu penduduk di perkotaan berubah status dari sebelumnya tidak miskin menjadi miskin. Sementara itu, penduduk miskin di perdesaan berkurang, baik secara jumlah maupun persentase. Kenaikan cepat angka kemiskinan di perkotaan tentu di luar perkiraan. Survei Susenas sebagai dasar penghitungan angka kemiskinan dilaksanakan pada Bulan Maret. Sementara kasus Covid-19 pertama kali di Sulawesi Tenggara juga baru ditemukan pada Maret 2020. Saat itu, jumlah kasus covid-19 masih diangka 2 digit. Namun angka kemiskinan sudah melonjak tajam. Bisa dibayangkan kondisi kemiskinan perkotaan saat ini, setelah penemuan kasus covid sudah merata di hampir semua kab kota di Sultra.

Penduduk perkotaan ternyata lebih rentan dalam merespon perubahan cepat kondisi ekonomi dan sosial, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk perkotaan tergantung pada upah harian. Kebijakan Pemerintah yang menerapkan aturan *Work From Home (WFH)* dan penutupan Sekolah maupun kampus dengan menerapkan pengajaran secara *Virtual*, tanpa disadari sangat berdampak pada penghasilan masyarakat di perkotaan yang kesehariannya bekerja sebagai tukang ojek, sopir angkot maupun pedagang-pedagang makanan. Selain itu adanya kebijakan pengurangan jam operasional bagi pedagang, juga berdampak pada kurangnya penghasilan atau omset pedagang, yang berpengaruh pada melambatnya perputaran uang di Sulawesi Tenggara. Adanya kebijakan pembatasan transportasi dan aturan ketat di bidang transportasi berdampak ada wilayah yang mengalami kekurangan stok bahan pangan dan kenaikan harga barang karena kurangnya stok barang yang beredar.

4.2.3.2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia di Sulawesi Tenggara terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tenggara walaupun ditengah pandemi Covid-19. IPM Sultra meningkat dari 67,07 pada 2012 menjadi 71,45 pada 2020. Selama periode 2012 hingga 2017 pembangunan manusia di Sultra berstatus sedang, pada 2018-2022 pembangunan manusia Sultra bersatus tinggi. Khusus 2020, capaian IPM sebesar 71,45 atau tumbuh 0,25 poin dibanding 2019 yang tercatat sebesar 71,20. Berdasarkan dimensinya yang terdiri dari dimensi pengetahuan/pendidikan, dengan komponen rata-rata lama sekolah (RLS) selama 9,04 tahun dan harapan lama sekolah (HLS) 13,65 tahun. Meningkatnya angka RLS dan HLS ini tentunya seiring dengan memadainya fasilitas pendidikan. Kedepan, fasilitas pendidikan harus semakin baik karena dilembaga itulah akan melahirkan manusia yang menjadi masa depan bangsa.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan. Pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan kompetensi individu. Kompetensi dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong peningkatan pendapatan, sehingga tidak akan ada lagi masyarakat Sultra yang tidak mempunyai kesempatan berusaha dan bekerja hanya karena tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pembangunan manusia di bidang pendidikan harus mengedepankan pada akses dan mutu pendidikan untuk semua yaitu setiap penduduk usia sekolah memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi gender dan sosial ekonomi serta mendapatkan pendidikan budaya dan karakter dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Tidak hanya itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang di sertai dengan perubahan proses berbagai aspek kehidupan sosial menuntut terciptanya masyarakat yang gemar membaca. Perpustakaan sebagai organisasi publik memiliki peranan strategis untuk turut mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa. Maju mundurnya perpustakaan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat, bahkan minat baca dijadikan salah satu indikator yang dapat menunjukkan maju tidaknya suatu bangsa. Peran penting perpustakaan dalam membina dan meningkatkan minat baca masyarakat, karena dengan membaca diharapkan seseorang akan memperoleh informasi dari bahan pustaka yang dibaca dan memperoleh pengertian mendalam tentang suatu peristiwa atau gejala. Dengan adanya minat baca akan diperoleh hasil yang maksimal, baik itu informasi,

pengertian, pengetahuan, keterampilan, motivasi atau fakta seperti yang disajikan oleh bahan bacaan. Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai dengan jumlah koleksi bahan pustaka yang lengkap menjadi hal penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Ditengah Pandemi Covid-19, dimana proses pembelajaran dilakukan secara *virtual* dengan keterbatasan waktu dan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, Perpustakaan dapat menjadi alternatif solusi bagi para siswa untuk menambah pengetahuan dan informasi terkait pelajaran mereka, sehingga tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai ditengah pandemi Covid-19 ini.

Di bidang kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan ditujukan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan dan mendorong masyarakat untuk mengutamakan fasilitas kesehatan modern sebagai pilihan pengobatan. Layanan kesehatan di Sulawesi Tenggara ditopang oleh 31 rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, 279 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), serta fasilitas kesehatan lainnya. Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Di Sulawesi Tenggara, Kasus Ibu Hamil Kekurangan asupan Gizi untuk bayi yang dikandungnya masih tergolong tinggi. Kasus tersebut menyebabkan anak yang dilahirkan mengalami stantig (postur badan anak lebih pendek dari anak seusianya). Data Dinas Kesehatan Prov.Sultra pada tahun 2019, menunjukkan angka stanting anak balita 0-59 bulan menembus angka 2.920. Prov.Sultra merupakan salah satu daerah Lokus stunting. Stunting sangat berdampak pada tumbuh kembang anak, bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik tapi juga berdampak pada perkembangan otak anak. Dimana gangguan perkembangan otak akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan seseorang bahkan yang terburuk akan berdampak pada kematian. Indikator kesehatan lainnya ialah banyaknya balita yang terimunisasi campak menurun dari tahun 2016 (74,56 persen) menjadi 71,87 persen pada tahun 2017. Imunisasi ini untuk kekebalan tubuh balita saat ini agar tumbuh sehat hingga dewasa. Adapun penduduk yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di tahun 2017 ialah 24,10 persen, menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat saat lahir.

AHH merupakan ukuran yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam pembangunan manusia. Dengan AHH Sulawesi Tenggara 70,47 tahun pada tahun 2017, dapat diartikan bahwa bayi yang baru lahir diharapkan hidup sampai mencapai umur 70 tahun. Semakin meningkatnya AHH mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat juga semakin membaik. Meskipun AHH semakin meningkat namun angka kesakitan dan kematian masih cukup tinggi, sehingga perlu tetap fokus pada penanganan kesehatan masyarakat. Pada sisi lain, setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal karena Penyakit Tidak Menular (PTM) (63 persen dari seluruh kematian). Lebih dari 9 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular terjadi sebelum usia 60 tahun, dan 90 persen dari kematian “dini” tersebut terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Secara global PTM penyebab kematian nomor satu setiap tahunnya adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, seperti : Penyakit Jantung Koroner, Penyakit Gagal jantung atau Payah Jantung, Hipertensi dan Stroke. Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan, prevalensi tertinggi untuk penyakit Kardiovaskuler di Indonesia adalah PJK, yakni sebesar 1,5 persen atau 2.650.340 orang. Dari prevalensi tersebut, angka tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (4,4 persen atau 137.130 orang) dan terendah di Provinsi Riau (0,3 persen atau 12.321 orang), untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 1,7 persen atau 26.170 orang. Sementara total wilayah timur Indonesia 2,2 persen atau 635.754 orang. angka tersebut mencapai 23,98 persen dari total seluruh Indonesia sebesar 2.650.340 orang. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah timur Indonesia berpotensi besar penyumbang penderita penyakit jantung di Indonesia. Sementara belum ada Rumah Sakit Khusus yang menangani jantung bertempat di wilayah timur Indonesia. Dari alasan yang dikemukakan tersebut, maka salah satu isu strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kesehatan yaitu penyediaan Rumah Sakit Khusus Jantung di Sulawesi

Tenggara yang dapat menjadi Rumah Sakit rujukan pasien penderita jantung untuk kawasan timur Indonesia.

Paradigma pembangunan kesehatan selama ini yang mengarah pada tindakan kuratif, yang kedepan seharusnya mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif. Hal tersebut tetap harus didukung dengan upaya penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan, yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh kabupaten/kota.

4.2.3.3. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pertumbuhan ekonomi Sultra pada triwulan IV-2020 dibanding triwulan IV-2019 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar minus 2,15 persen, hal ini disebabkan dampak dari pandemi Covid-19, namun dibandingkan triwulan III-2020 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,11 persen, karena telah diberlakukannya kebijakan New Normal, kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor produksi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,14 persen. Sementara dari segi pengeluaran, kontraksi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 2,87 persen, pemicu pertumbuhan ekonomi Sultra triwulan IV-2020 sebesar 2,11 persen (q-to-q) dari sisi produksi, yakni pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas 13,41 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa 48,53 persen.

Kondisi ekonomi Sultra jika dicermati selama 2020 mengalami kontraksi 0,65 persen dibanding capaian 2019 tumbuh sebesar 6,50 persen (c-to-c). Secara keseluruhan sepanjang 2020 pemicu kontraksi pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi, yaitu terdapat terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan 5,25 persen dan dari sisi pengeluaran terdapat terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 3,59 persen. Triwulan IV 2020, BPS Sultra mencatat produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku tercatat mencapai nilai Rp 33,97 triliun atau Rp 24,24 triliun atas dasar harga konstan. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) triwulan III-2020 yang tercatat Rp 33,19 triliun atas dasar harga berlaku sebesar Rp23,74 atas dasar harga konstan,

Meskipun pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara sudah mulai membaik, namun kondisi ekonomi global dan regional yang tidak dapat diprediksi tepat, harus diantisipasi karena akan memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Sulawesi Tenggara kedepan. Beberapa kondisi yang akan dihadapi dalam beberapa tahun-tahun kedepan sebagai berikut:

1) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Dalam struktur PDRB Sulawesi Tenggara, pertanian menyumbang sekitar 24,08 persen terhadap total nilai PDRB atau menjadi yang paling dominan. Dari sisi ketenagakerjaan, 37,07 persen dari total penduduk yang bekerja berada di sektor pertanian. Hal inilah yang menjadikan pertanian memegang peranan utama dalam perekonomian Sulawesi Tenggara, meski angka ini sudah mulai menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, persoalan lain adalah makin kurangnya minat angkatan kerja yang menekuni sektor pertanian, dan memilih untuk bekerja di sektor industri serta perdagangan. Hal tersebut didukung dengan semakin terbatasnya lahan pertanian karena meningkatnya permintaan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan industri. Persoalan sektor pertanian sudah seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan Sulawesi Tenggara kedepan. Hal tersebut dikarenakan pertama, sebagian besar masyarakat Sulawesi Tenggara bekerja di sektor pertanian, meskipun kecenderungannya semakin menurun dan yang tersisa adalah petani usia tua. Kedua, dinamika sektor pertanian masih terbatas karena penggunaan teknologi yang belum begitu maju. Ketiga, sebagian besar penduduk yang dikategorikan hidup dalam garis kemiskinan adalah masyarakat petani. Keempat, infrastruktur yang mendukung proses produksi dan pemasaran, seperti irigasi serta transportasi dan komunikasi belum memadai. Kelima, terbatasnya akses pada informasi pasar. Sebagian besar petani belum memiliki atau menggunakan teknologi untuk pertukaran informasi tentang

kebutuhan dan harga-harga komoditas di pasar. Kondisi tersebut kemudian pada akhirnya menyebabkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan rendah.

Perikanan pada wilayah Sulawesi Tenggara terfokus pada pengembangan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada tahun 2017 subsektor perikanan budidaya menyumbang produksi yang cukup besar mencapai 1.016.380 ribu ton meningkat drastis dari tahun sebelumnya sebanyak 912.720 ton (Tahun 2016). Hal ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan usaha pembudidayaan ikan. Sedangkan pada sub sektor perikanan tangkap Sulawesi Tenggara yang berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 713 dan 714 (WPP-RI 713 dan 714) memiliki potensi lestari yang cukup besar sekitar 1.520.340 ton namun saat ini baru dimanfaatkan sebesar 203.872 ton atau 15% dari total potensi lestari tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Sulawesi Tenggara masih sangat rendah. Selain itu, salah satu upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan di Sulawesi Tenggara adalah melalui pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pendekatan yang inovatif yaitu mengubah pendekatan pemanfaatan sumberdaya laut dan perikanan dari akses terbuka (*open access*) menjadi akses yang terkendali (*managed-access*) atau dikenal dengan Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP). Masyarakat pesisir dan pulau-pulau-kecil memiliki potensi untuk memberikan kontribusi meningkatkan produksi perikanan guna mencukupi kebutuhan pangan dan bahan baku industri serta penciptaan lapangan kerja di sektor perikanan. Pengelolaan PAAP akan mendorong upaya pengelolaan perikanan skala kecil dengan fokus kepada pemberian akses pengelolaan dan pemanfaatan kawasan laut kepada kelompok nelayan dan aturan pengelolaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil akan berdaya secara ekonomi, sosial dan manajerial. Untuk komoditas perkebunan, terdapat lima komoditas yang dominan dihasilkan, yaitu kakao, kelapa, jambu mete, dan cengkeh, serta nilam. Produksi kakao tergolong besar, mencapai 125,05 ribu ton di tahun 2017. Angka ini tercatat menurun dari produksi tahun sebelumnya. Penurunan produksi kakao bisa disebabkan karena produktivitas pohon kakao petani yang terus menurun karena usia tanaman sudah uzur sehingga perlu peremajaan kebun kakao atau replanting. Untuk komoditi cengkeh masih relatif lebih rendah dibanding komoditas lain, meski mengalami peningkatan signifikan sebesar 53,22 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor cuaca yang lebih mendukung pada tahun 2017. Umumnya tanaman cengkeh dipengaruhi oleh curah hujan.

Subsektor peternakan penyumbang produksi paling besar adalah komoditas ayam kampung, sapi, dan ayam ras. Pada tahun 2017, produksi ayam kampung 9,66 ribu ton, angka ini tercatat relatif meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula pada produksi peternakan ayam ras yang juga cenderung meningkat. Beberapa faktor pendukung misalnya, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, mendapat bantuan hibah populasi ternak ayam lokal petelur dari Sembawa, Sumatera sebanyak 10 ribu ekor yang dialokasikan di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) di 2017. Program pemerintah yang mendukung peningkatan produksi ternak juga terdapat di beberapa kabupaten lain. Peningkatan produksi juga terjadi pada peternakan sapi, itik, dan kambing. Untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di pedesaan, dengan menggunakan ukuran Indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Terlihat nilai NTP sepanjang tahun 2017 berada di bawah angka 100 (angka patokan "*break event point*"). Angka NTP dibawah 100 menunjukkan daya beli petani yang rendah akibat kenaikan biaya produksi melebihi hasil yang diterima dari produk pertanian.

2) Sektor Pertambangan dan Penggalan

Peran lapangan usaha pertambangan dan penggalan dalam perekonomian Sulawesi Tenggara cukup besar, urutan kedua setelah sektor pertanian. Komoditas pertambangan yang utama di Sulawesi Tenggara adalah bijih logam yang dihasilkan dari nikel. Selain itu, dihasilkan juga aspal alam serta bahan tambang dan galian lainnya. Dari Nilai Tambah Bruto (NTB) lapangan usaha pertambangan dan penggalan tercatat ada fluktuasi pada NTB pertambangan bijih logam, dari 7,99 triliun rupiah di tahun 2015 menjadi 7,48 triliun rupiah di tahun 2016. Setelah itu kembali meningkat menjadi 9,31 triliun rupiah di tahun 2017.

Sedangkan untuk NTB pertambangan dan penggalian lainnya tercatat terus meningkat sehingga ikut mendorong kenaikan NTB lapangan usaha pertambangan dan penggalian selama periode 2015-2017. Namun peningkatan yang cukup drastis dari pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian pada tahun 2017 justru didorong oleh tingginya pertumbuhan subkategori pertambangan bijih logam (24,45 persen) karena pada bulan Februari 2017, pemerintah telah membuka peluang ekspor bijih nikel kadar dibawah 1,7 persen (kadar rendah). Sehingga kontribusi pertambangan dan penggalian sebesar 19,85 persen di tahun 2016 naik menjadi 21,01 persen di tahun 2017.

Disisi lain persentase tenaga kerja pertambangan dan penggalian malah menurun. Hal ini kemungkinan terjadi karena banyaknya tenaga kerja asing yang masuk. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan data bahwa jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di daerah selama 2017 sebanyak 1.032 orang. Hal ini tentu menggeser peluang untuk tenaga kerja lokal.

3) Sektor Industri Pengolahan

Selama periode 2017, berdasarkan data Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah perusahaan industri besar/ sedang terbanyak berupa industri hasil pertanian dan kehutanan sebanyak 6.579 perusahaan, disusul industri kimia (1.557 usaha), dan industri logam dan mesin (1.335 usaha). Perusahaan industri hasil pertaniandan kehutanan juga menyerap tenaga kerja terbanyak sebesar 30.966 orang. Meskipun industri logam dan mesin memiliki jumlah perusahaan paling sedikit dan jumlah tenaga kerja yang tidak terlalu banyak dibandingkan industri hasil pertanian dan kehutanan, namun nilai produksi yang dihasilkan tercatat paling besar, yakni Rp 2.680,61 miliar. Hal ini tercermin dari produktivitas industri logam dan mesin. Produktivitas industri besar/ sedang diukur berdasarkan rasio nilai produksi terhadap jumlah pekerja. Pada tahun 2017, industri logam dan mesin memiliki produktivitas terbesar, yakni Rp 278,53 juta/pekerja. Hal ini bisa terjadi karena nilai jual dari industri tersebut yang lebih tinggi dibandingkan industri lainnya. Pada tahun 2017 lapangan usaha industri pengolahan memberikan kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara sebesar 6,13 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,11 persen. Hal ini karena adanya kontribusi yang besar dari sub kategori industri makanan dan minuman di Sulawesi Tenggara.

4) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran pada triwulan II 2018 tercatat mengalami perlambatan sehingga menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Lapangan usaha tersebut tumbuh sebesar 6,6 persen (yoy) dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 8,4 persen (yoy). Perlambatan tersebut didorong oleh penurunan yang terjadi pada perdagangan luar negeri. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada penjualan luar negeri. Penurunan tersebut disebabkan oleh telah berlangsungnya ekspor bijih nikel kadar rendah pada triwulan II 2017 sehingga pertumbuhan ekspor tidak terjadi secara signifikan.

5) Investasi

Proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang disetujui pemerintah Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 tercatat meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, PMA sebesar 693 juta US dollar, naik 84,26 persen, sementara PMDN sebesar 3,148 triliun rupiah, naik 75,49 persen dari tahun 2016. Peningkatan ini menunjukkan banyaknya investor asing maupun domestik yang menanamkan investasinya di Sulawesi Tenggara, seperti sektor pertambangan. Meskipun demikian, optimalisasi kecepatan pelayanan perijinan perlu ditingkatkan, promosi investasi, jaminan keamanan dan kenyamanan investasi, informasi peluang investasi perlu ditingkatkan, didukung dengan pelayanan birokrasi yang efisien dan penggunaan teknologi berbasis *Online Sytem Submission* (OSS). Selain itu, perlunya pemerataan pertumbuhan dan persebaran investasi di Sulawesi Tenggara khususnya di wilayah perbatasan barat dan timur, serta wilayah selatan.

6) Sektor Konstruksi

Pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana sangat penting bagi Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan fisik yang meliputi gedung kantor, tempat tinggal, jalan, jembatan, dan lain-lain dapat dilihat dan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Dari hasil *Updating* Direktori Perusahaan Konstruksi, jumlah perusahaan konstruksi di Sulawesi Tenggara tahun 2016 tercatat sebanyak 3.480 perusahaan. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2015 yang berjumlah 2.678 perusahaan. Nilai pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak kontraktor terus meningkat sepanjang tahun 2014-2016. Pada tahun 2014, nilai konstruksi mencapai 3,4 triliun rupiah. Tahun 2015, nilai konstruksi yang telah diselesaikan mencapai 3,7 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2016, nilai konstruksi yang telah diselesaikan mencapai 3,9 triliun rupiah yang terdiri dari konstruksi bangunan gedung, bangunan sipil, dan konstruksi khusus. Share sektor konstruksi terhadap PDRB Sulawesi Tenggara juga tercatat berfluktuasi sepanjang tahun 2015-2017. Share sektor ini sebesar 13,33 persen pada tahun 2015 yang meningkat menjadi 14,02 persen pada tahun 2016, lalu menurun menjadi 13,35 persen pada tahun 2017.

Penurunan share sektor konstruksi ini sejalan dengan penurunan serapan tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini. Penduduk yang bekerja pada sektor konstruksi tahun 2015 sebesar 6,74 persen, turun menjadi 6,65 persen pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 menurun lagi menjadi 6,48 persen.

7) Sektor Pariwisata

Dalam menilai kesiapan pariwisata suatu daerah, salah satu cara paling mudah untuk menilainya adalah melalui 3A, yaitu Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi. Aksesibilitas dinilai dari kemudahan bagi para wisatawan untuk mencapai destinasi tujuan wisata (DTW) di suatu daerah. Selain itu, amenities sebagai penunjang kegiatan pariwisata seperti hotel, restoran dan hiburan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kesiapan amenities yang baik akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para wisatawan saat berkunjung ke suatu destinasi wisata. Terakhir yang tidak kalah penting adalah Atraksi. Atraksi biasanya selalu menjadi poin pertama yang mampu menarik minat wisatawan, terutama untuk DTW yang mengedepankan pesona alamnya.

Terdapat sekitar 666 tempat wisata di Sulawesi Tenggara. Besarnya potensi pariwisata Sulawesi Tenggara menjadikan sektor ini mampu mendukung perekonomian Sulawesi Tenggara. Potensi pariwisata ini mencakup potensi wisata usaha, wisata alam (pantai, air terjun), wisata budaya, serta potensi wisata sejarah (benteng, keraton, museum). Perkembangan pariwisata terbukti mampu mendorong peningkatan usaha jasa akomodasi, restoran, serta usaha terkait lainnya. Umumnya, obyek wisata di Sulawesi Tenggara belum memenuhi 3A, akibatnya banyak potensi wisata yang indah namun belum menjadi perhatian wisatawan. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan industri pariwisata di Sulawesi Tenggara. Salah satu contoh destinasi wisata yang menjadi andalan Sulawesi Tenggara adalah Pulau Wakatobi. Atraksi sebagai poin utama pendorong pariwisata terjadi di Wakatobi. Berada dalam segitiga terumbu karang dunia, keindahan bawah laut Wakatobi tidak perlu lagi diragukan. Beragam jenis terumbu karang dan biota laut dapat ditemukan dengan mudah saat melakukan beragam aktivitas seperti snorkeling dan diving. Menyadari bahwa memiliki potensi yang mendukung untuk pengembangan pariwisata, pemerintah pun tidak melepaskan kesempatan itu. Promosi secara gencar dilakukan untuk “menjual” di seluruh dunia. Namun promosi dilakukan tidak hanya untuk keindahan bawah laut Wakatobi. Berbagai destinasi wisata lainnya dan beragam budaya yang dimiliki turut dipromosikan sebagai alternatif kegiatan bagi para wisatawan untuk menghindari terjadinya kejenuhan.

Terbatasnya akses menuju Wakatobi memberikan gambaran bahwa aksesibilitas ke Wakatobi masih perlu dikembangkan sehingga memudahkan para wisatawan untuk menikmati keindahan di Wakatobi. Selain itu, amenities di Wakatobi juga masih perlu untuk dikembangkan. Jumlah penginapan di Wakatobi terbilang masih cukup terbatas dengan hanya tersedia 40 hotel dan 313 *homestay*. Jumlah restoran pun masih terbatas dengan hanya sejumlah 22 restoran. Selain itu, angkutan darat untuk mencapai destinasi wisata juga

masih sangat terbatas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi para wisatawan untuk menjelajahi Wakatobi.

Bertolak dari isu di atas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengembangkan kawasan wisata baru Toronipa Kabupaten Konawe. Untuk mengembangkan kawasan wisata Toronipa sebagai kawasan wisata unggulan yang berlokasi dekat dari perkotaan, maka ada tiga kriteria yang harus dipenuhi, yaitu Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi.

4.2.3.4. Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pembangunan berkelanjutan merupakan isu krusial yang harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam RPJMD. Isu pembangunan berkelanjutan merupakan isu TPB/SDGs yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. Terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Sulawesi Tenggara, disebabkan oleh pengelolaan air yang belum optimal, terganggunya kawasan tangkapan air/*catchment area*, eksploitasi air tanah oleh industri dan pemanfaatan kawasan pesisir/mangrove untuk tambak. Kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daerah pesisir yang menjadi konsentrasi hunian para nelayan kecil sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Abrasi, badai, pemutihan karang, dan gejala lainnya membutuhkan peningkatan kapasitas adaptif masyarakat pesisir yang berbasis pada kesehatan ekosistem laut dan perubahan perilaku memanfaatkan dan mengelola sumberdaya laut masyarakat pesisir. Peningkatan kapasitas ini akan memperkuat daya lenting sosial (*social resilience*) yang menjadi landasan dalam menghadapi guncangan eksternal (*external shock*) akibat bencana terkait iklim (*climate-related disaster*).

Dalam pengelolaan hutan, berbagai permasalahan masih terjadi seperti tekanan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian dan kebakaran hutan, kurang terpenuhinya kebutuhan hasil hutan berasal dari pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pengelolaan hutan negara belum mampu memenuhi standar pengelolaan hutan lestari. Masih maraknya kegiatan pertambangan tanpa ijin yang berpotensi merusak lahan didorong meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur, disisi lain perijinan belum banyak dipahami oleh masyarakat karena berpindahnya kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Sehingga perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin yang melibatkan penegak hukum. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi menunjukkan bahwa pemanfaatan energi fosil masih tinggi, menjadi pendorong tingginya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Pengembangan pemanfaatan EBT masih banyak mengalami kendala-kendala tentang karena teknologi yang mahal sehingga belum menarik bagi investor. Sedangkan dari sisi kesadaran buang masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup antara lain kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengolahan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air serta budaya hemat energi dan air sehingga masih terdapat penggunaan energi yang tidak efisien.

Meningkatnya kejadian bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan kekeringan disebabkan perubahan iklim global, rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber air, kurangnya SDM dan sarpras dalam penanganan bencana, dan perilaku masyarakat (buang sampah sembarangan,

penggundulan hutan). Masih kurangnya pengetahuan mitigasi/deteksi dini bencana oleh masyarakat dan tanggap bencana masyarakat untuk mengantisipasi bencana tsunami, banjir, kekeringan, longsor yang belum optimal, hal ini disebabkan koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/lintas bidang dan lintas wilayah, serta kurangnya dukungan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan kurangnya keterlibatan masyarakat, selain itu masih perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, memperkuat peringatan dini bencana, memperkuat manajemen kedaruratan dan melakukan percepatan pemulihan pasca bencana.

4.2.3.5. Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Titik krusial dalam tata kelola pemerintahan adalah keterbukaan informasi dan transparansi publik, akuntabilitas kinerja pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kebijakan, dan adanya koordinasi antara pemangku kebijakan dalam mencapai tujuan dalam mewujudkan visi. Kondisi tersebut harus didukung dengan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Penyediaan ruang informasi dan pengaduan masyarakat harus semakin transparan dan mudah diakses. Pelayanan publik secara langsung melalui perijinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kemudahan berusaha serta hak-hak sipil lainnya semakin ditingkatkan tanpa mengabaikan regulasi yang ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan tersebut.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat mengimplementasikannya pada semua struktur pemerintahan, meliputi : akuntabilitas kinerja pembangunan dibangun dimulai dari proses perencanaan partisipatif dan terukur, penganggaran, implementasi, evaluasi hingga pelaporan kinerja. Beberapa indikator atau parameter pengukuran akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin meningkat hingga target yang ingin dicapai bernilai A. Target tersebut dapat tercapai jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara konsisten terhadap siklus manajemen tersebut. Penilaian hasil pengelolaan keuangan negara berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia harus dipertahankan pada penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mendapatkan opini WTP tersebut wajib memenuhi beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja tersebut tentunya harus didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang semakin pesat agar memudahkan proses kerja untuk memperoleh capaian kinerja yang optimal dan mendukung *e-government*.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas, mampu menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang berkembang pesat dalam menunjang kinerja individu dan lembaganya, disamping kelembagaan yang tertata dengan baik. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai dengan penempatan ASN pada posisi yang tepat dan mampu produktif dan berkinerja baik pada instansi kerjanya. Penataan kelembagaan yang baik akan mampu bekerja secara efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan penguatan kelembagaan mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan untuk memiliki kesamaan pandangan dan kepentingan bersama dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu. Koordinasi yang dilakukan meliputi : upaya menjaga keamanan wilayah tetap kondusif dalam kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan tetap menjaga norma-norma dalam masyarakat serta

norma hukum yang berlaku. Upaya lain yang harus dilakukan yaitu menekan kriminalitas dan aksi-aksi lain yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga dengan situasi yang kondusif dapat menciptakan iklim yang sejuk, rasa aman, kehidupan masyarakat yang harmonis, perlindungan terhadap hak-hak sipil terjaga dan program-program pembangunan di Sulawesi Tenggara dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target.

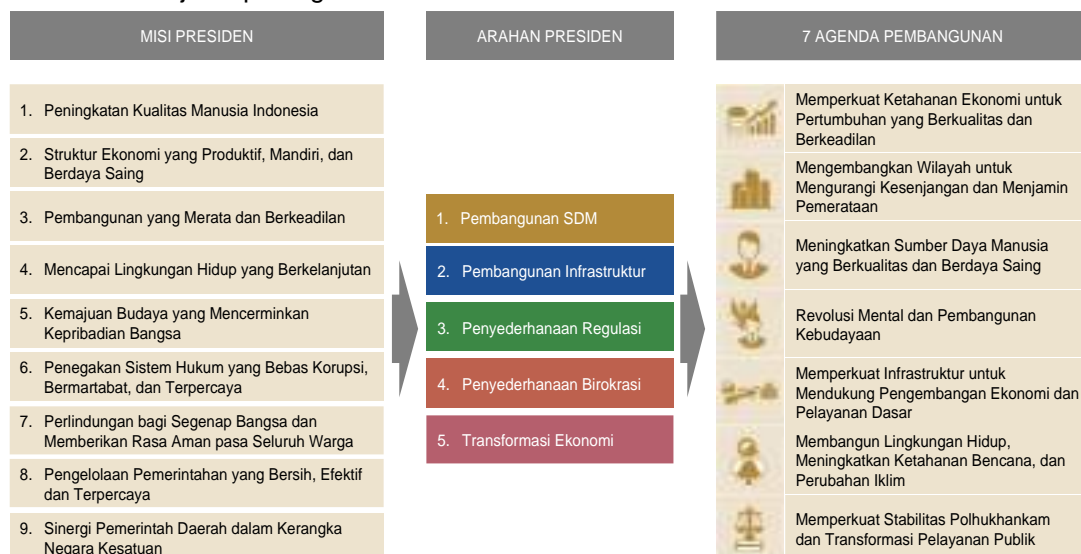
BAB V

TUJUAN & SASARAN

5.1. Penelaahan Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020 – 2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN 2005 – 2025, yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMN menjadi pedoman tidak hanya bagi perencanaan pembangunan pusat namun menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, karena perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk itu, dokumen RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 diharapkan selaras dengan dokumen RPJMN Tahun 2020 – 2024, yakni keselarasan dalam upaya pencapaian target-target indikator makro atau sasaran pembangunan nasional, antara lain: pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka sebagai sasaran pembangunan nasional. Selain itu dalam upaya mencapai sasaran pembangunan nasional, maka diperlukan pula keselarasan prioritas pembangunan antara pusat dan daerah khususnya target-target sasaran pada tahun 2024. RPJMN Tahun 2020 – 2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawa Cita Kedua. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 9 (sembilan) misi dan 7 (tujuh) agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar di bawah. Agenda pembangunan ini sekaligus menjadi Prioritas Nasional (PN) bagi pembangunan tahunan nasional.

Keterkaitan misi, arahan Presiden dan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional Tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.1
Misi dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Dalam lima tahun periode RPJMN (2020-2024), pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan tujuh (7) agenda pembangunan dengan target sebagai berikut.

Tabel 5.1
Target Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024

Indikator Pembangunan	Target Pembangunan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,40	6,80	7,10	8,60	8,90
Tingkat Kemiskinan (%)	10,76	10,36	9,35	8,15	7,25
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,30	3,20	3,10	2,80	2,40

Sumber: RPJMN Tahun 2020 – 2024

Bahwa target pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 tersebut di atas merupakan target yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024, target tersebut ditetapkan sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk di Indonesia. Tidak ada perubahan target indikator pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024. Penyesuaian target dilakukan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhatikan target-target yang direncanakan masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Dampak pandemi Covid-19 dirasakan tidak hanya pada aspek kesehatan saja, namun berdampak pula pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat serta perekonomian daerah.

Selain itu, dalam melaksanakan agenda pembangunan, Pemerintah telah menetapkan sejumlah proyek prioritas strategis (*major project*). Adapun *major project* yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai berikut:

Tabel 5.2
Daftar Proyek Prioritas Strategis (Major Project) di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam RPJMN Tahun 2020-2024

No.	Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Target	Highlight Proyek
1.	10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDB menjadi 5,5% (2024) - Meningkatnya devisa dari sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) - Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan (2024) dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024) 	<ul style="list-style-type: none"> - Percepatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan investasi di BTS dan Wakatobi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perintisan Destinasi Pariwisata; 2. Penanganan Jalan Mendukung 10 DPP; 3. Pembangunan Pelabuhan dan Bandara; 4. Pembangunan Desa Wisata dan Fasilitas BUMDes; 5. Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata; 6. Pembangunan dalam Wilayah dan Kawasan.
2.	9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong hilirisasi industri berbasis SDA agro dan mineral untuk penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi di luar Pulau Jawa. 	<ul style="list-style-type: none"> - KI beroperasi : 9 KI - Smelter beroperasi : 31 smelter (kumulatif) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi regulasi, tata ruang, perizinan, dan fasilitasi investasi; 2. Pembangunan kawasan industri dan smelter; 3. Pengembangan infrastruktur pendukung; 4. Peningkatan investasi, pemasaran dan kerjasama internasional; 5. Fasilitasi kemitraan usaha dan penyediaan SDM.
3.	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan status kesehatan masyarakat yang ditandai dengan: - Menurunnya angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup - Menurunnya prevalensi stunting pada balita hingga 14 persen 	<ul style="list-style-type: none"> - AKI 183/100.000 KH - Prevalensi stunting balita turun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian makanan tambahan (PMT), suplementasi gizi mikro, serta STBM, pelayanan KB berkualitas di fasilitas kesehatan; 2. PAUD Holistik-Integratif & kelas pengasuhan; 3. Penyediaan akses air minum & penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) layak; 4. Bantuan operasional kesehatan (DAK Kesehatan).

No.	Proyek Prioritas Strategis	Manfaat	Target	Highlight Proyek
	Jalan Trans Pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas - Meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah - Mendukung percepatan pembangunan di daerah 	- Pulau Muna dan Pulau Buton	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan proyek dan lahan 2. Rekonstruksi Jalan dan Jembatan 3. Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pembangunan akses air minum perpipaan untuk 10 juta rumah tangga. - Meningkatkan akses air minum layak nasional menjadi 100% yang terdiri dari akses air minum jaringan perpipaan 30,45% dan bukan jaringan perpipaan 69,55% - Menjamin ketersediaan air baku untuk air minum (50 m3/detik) - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan akses air minum layak dan aman yang dapat diakses pada saat dibutuhkan dan memenuhi standar kesehatan - Meningkatkan tingkat kesehatan, penyediaan akses air minum layak dan aman memiliki kontribusi sebesar 70% dalam penanganan <i>stunting</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan air baku: 50 m3/detik - Pembangunan SPAM: 10.000.000 Sambungan Rumah di 34 Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan air baku di kawasan prioritas pulau kecil terluar sebanyak 0,96 m³/s; 2. Menyediakan air baku di kawasan prioritas daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) sebanyak 17,62 m³/s; 3. Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan perkotaan sebanyak 9,8 m³/s; 4. Menyediakan air baku untuk mendukung kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) sebanyak 2,64 m³/s; 5. Menyediakan air baku di Kawasan pantai utara Jawa sebesar 2,45 m³/s; 6. Penyediaan air baku di kawasan rawan air sebanyak 16,54 m³/s; 7. Penurunan tingkat kebocoran hingga 25%; 8. Perluasan jaringan dan pemanfaatan kapasitas terpasang 2,89 juta SR; 9. Peningkatan/pembangunan SPAM baru 40.400 L/dtk; 10. Pembangunan SPAM regional 10.150 L/dtk; 11. Peningkatan kinerja operator air minum, 100% sehat.

Sumber: RPJMN Tahun 2020 – 2024

Dalam rangka mencapai target tersebut dan sebagai pelaksanaan arah kebijakan dan pembangunan wilayah, maka ditetapkan lokasi prioritas pembangunan berdasar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Adapun prioritas pembangunan wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara terletak pada lokasi sebagai berikut:

Tabel 5.3
Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2020 – 2024

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
Koridor Pertumbuhan		Koridor Pemerataan	
1.	Kab. Kolaka Utara	1.	Kab. Konawe Selatan
2.	Kab. Kolaka	2.	Kab. Muna
3.	Kab. Kolaka Timur	3.	Kab. Wakatobi
4.	Kota Kendari		
5.	Kab. Konawe		

Sumber: RPJMN Tahun 2020 – 2024

Prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dijabarkan ke dalam RKP sebagai perencanaan tahunan yang disinkronisasikan dengan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Sinergi antara pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap prioritas nasional. Hal ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Disamping itu, penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah. Mempedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

5.2. Penelaahan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025

Pelaksanaan pembangunan daerah sejatinya untuk mengubah kondisi masyarakat pada saat ini menuju kondisi yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan dengan tujuan untuk mengubah kondisi masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus, namun dilaksanakan secara terencana dan bertahap sehingga pemanfaatan sumber daya dalam merealisasikan perencanaan harus dilaksanakan secara baik agar dapat mencapai tujuan yang akan dicapai. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025, disebutkan bahwa periode pelaksanaan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 merupakan bagian tahap keempat (2020 – 2025) RPJPD.

Dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025 termuat pedoman pembangunan jangka panjang daerah yang berisi sasaran pokok dan arah kebijakan dalam jangka waktu 20 (Dua puluh) tahun guna mewujudkan Sulawesi Tenggara yang sejahtera, sesuai dengan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu: **“Sulawesi Tenggara yang Maju dan Sejahtera Tahun 2025”**. Rumusan visi tersebut bermakna bahwa keberhasilan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara, dua puluh tahun ke depan ditandai dengan kondisi Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang maju dengan penduduk yang sejahtera.

Dalam menjaga pencapaian visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005 – 2025 agar sesuai dengan yang dicita-citakan, disusun misi yang menjadi langkah-langkah dalam mencapai visi yang telah ditentukan. Perumusan misi RPJPD 2005 – 2025 dengan memperhatikan permasalahan, tantangan yang dihadapi Sulawesi Tenggara dan isu yang berkembang selama ini baik sebagai isu lokal, nasional dan bahkan sebagai isu global yang dinamis, maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang maju, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Sehubungan dengan hal tersebut maka misi pembangunan Sulawesi Tenggara untuk mencapai visi dari RPJPD 2005-2025, yaitu:

1. **Mewujudkan manusia Sulawesi Tenggara yang religius dan tangguh.**
Tujuan dari perwujudan manusia Sulawesi Tenggara yang religius dan tangguh adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia Sulawesi Tenggara
2. **Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis pada potensi daerah.**
Tujuan dari perwujudan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah adalah meningkatnya kekuatan ekonomi Sulawesi Tenggara yang mengandalkan segala keunggulan daerah yang bisa dimanfaatkan.
3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**
Tujuan dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik adalah meningkatnya kompetensi profesionalisme dan kualitas sistem pelayanan aparatur pemerintahan terhadap masyarakat Sulawesi Tenggara.
4. **Mewujudkan Pengelolaan lingkungan hidup.**
Tujuan dari perwujudan pengelolaan lingkungan hidup adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang dapat memelihara keberlangsungan ekosistem yang harmoni di bumi Sulawesi Tenggara.
5. **Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif.**
Tujuan dari perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang efektif adalah meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan RPJPD Tahap ke IV (2020 – 2025)

Tahap ke IV (2020 – 2025) merupakan tahapan penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera tahun 2025 karena merupakan tahapan terakhir dari RPJPD Provinsi

Sulawesi Tenggara. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap demi tahap pelaksanaan RPJPD, Tahap ke IV ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang Maju dan Sejahtera. Hal ini menjadi tujuan akhir perencanaan jangka panjang daerah yang disusun untuk periode dua puluh tahunan.

Sulawesi Tenggara pada akhir periode RPJPD yaitu tahun 2025 diharapkan menjadi daerah yang maju berdiri di depan turut menyumbangkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kesejahteraan daerah dan kemajuan daerah Sulawesi Tenggara diharapkan sudah dapat disetarakan dengan daerah maju di Indonesia. Kesejahteraan itu menuju pemerataan pendapatan yang tinggi yang didorong oleh tingginya pertumbuhan ekonomi yang disertai terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas tinggi pula, dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi dan akuntabel. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi ditandai oleh sistem pendidikan yang dapat bersaing dengan pendidikan di manca negara dengan keunggulan yang berbasis nilai-nilai agama dan budaya. Pada tingkat ini tercapainya angka rata-rata lama sekolah 12 Tahun; tercapainya angka persentasi tamat sekolah sebesar 90% untuk semua jenjang pendidikan. Kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sulawesi Tenggara juga tercermin dari tercapainya angka PDRB per kapita yang setingkat dengan angka PDRB rata-rata nasional; tercapainya angka kasus kriminalitas menurun hingga di bawah 5 kasus pertahun; serta terjaganya kerukunan masyarakat yang hidup berdampingan di atas perbedaan suku dan agama di Sulawesi Tenggara.

Prioritas pembangunan Tahap ke IV RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025 di atas, menjadi acuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 sebagai kelanjutan dari RPJMD Tahun 2018 – 2023 agar visi pembangunan jangka panjang tersebut dapat terwujud.

5.3. Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026

Berdasarkan hasil penelaahan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan visi dan misi serta arah kebijakan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025 serta isu strategis yang berkembang hingga saat ini dan akan berpengaruh hingga periode RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 ini berakhir, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026.

Tujuan RPD dirumuskan dengan mengacu pada misi RPJD karena daerah tidak memiliki kepada daerah terpilih sehingga harus mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang daerah, dan melihat kesesuaian dengan program yang dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan yang disusun berdasarkan gambaran umum wilayah, permasalahan pembangunan yang sedang terjadi, serta isu-isu strategis yang sedang berlangsung baik itu isu global, isu nasional maupun isu daerah, sekurang-kurangnya juga memuat tujuan dan sasaran RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap, serta mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan. Sasaran RPD 2024-2026 juga diterjemahkan kedalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD.

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2026 dikelompokkan sebagai berikut:

- Tujuan 1 Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul & Kompetitif.**
 - Sasaran 1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
 - Sasaran 1.2. Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan
- Tujuan 2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik**
 - Sasaran 2.1. Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat
 - Sasaran 2.2. Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat
 - Sasaran 2.3. Meningkatnya Ketersediaan, Akses, & Kualitas Konsumsi Pangan

Tujuan 3 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan

- Sasaran 3.1. Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Sektor Unggulan
 Sasaran 3.2. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja & Akses Terhadap Lap. Kerja
 Sasaran 3.3. Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi
 Sasaran 3.4. Meningkatnya konektivitas antarwilayah
 Sasaran 3.5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 Sasaran 3.6. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana

Tujuan 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

- Sasaran 4.1. Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah
 Sasaran 4.2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Setiap tujuan dan sasaran pembangunan diukur dengan indikator kinerja dan target kinerja per tahun hingga akhir periode. Perumusan indikator kinerja tujuan dan sasaran beserta target kinerja per tahun dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 disusun berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan dukungan Pemerintah Pusat melalui program prioritas yang mendukung capaian indikator dalam RPD.

Tujuan dan sasaran beserta indikator dan target kinerja tahunan disajikan pada tabel berikut:

*Tabel 5.4
 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja RPD Tahun 2024 – 2026*

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Tujuan 1 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL & KOMPETITIF	IPM	Nilai	72,23 (2022)	72,64	73,04	73,45	73,45
Sasaran 1.1. Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,13 (2021)	10,63	12,01	13,39	13,39
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,68 (2021)	14,87	16,06	17,24	17,24
Sasaran 1.2. Meningkatnya Jangkauan Pelayanan & Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat lahir	Tahun	71,72 (2021)	72,02	72,27	72,42	72,42
Tujuan 2 MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,27 (2022)	11,00	10,5	9,5	9,5
Sasaran 2.1. Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	Juta Rupiah	9.381 (2021)	10.046	10.777	11.148	11.148
Sasaran 2.2. Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Gini Ratio	Ratio	0,390 (2022)	0,385	0,375	0,350	0,350
Sasaran 2.3. Meningkatnya Ketersediaan, Akses, & Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	80,2 (2021)	86,1	87,5	89,0	89,0
	Prevalensi <i>Stunting</i>	Persen	17,05	16,79	15	14	14
Tujuan 3 MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS & PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,10 (2021)	6,0	6,5	7,0	7,0

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Sasaran 3.1. Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	Persen	2,55 (2021)	2,75	2,89	2,97	2,97
	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertambangan dan Penggalian	Persen	0,34 (2021)	1,53	1,62	1,69	1,69
	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Industri Pengolahan	Persen	5,58 (2021)	5,72	5,94	6,08	6,08
Sasaran 3.2. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja & Akses Terhadap Lap. Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,36 (2022)	3,00	2,75	2,25	2,25
Sasaran 3.3. Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	Pertumbuhan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	11,63	12,6	13,02	13,29	13,29
Sasaran 3.4. Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Indeks Infrastruktur	Nilai	n/a	90,15	91	92,55	92,55
Sasaran 3.5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	76,88	77,00	77,15	77,25	77,25
Sasaran 3.6. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	Skor	157.90	157,02	157,01	157	157
Tujuan 4 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,14 (B) (2019)	64,14	66,21	67,65	67,65
Sasaran 4.1. Meningkatnya akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	62,18 (B) (2019)	62,20 (B)	62,25 (B)	62,30 (B)	62,30 (B)
	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran 4.2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Nilai dan Kategori	2,71 Baik (B) (2020)	3,25 Baik (B)	3,27 Sangat Baik (A)	3,30 Sangat Baik (A)	3,30 Sangat Baik (A)

Sebagai tindaklanjut pencapaian target tujuan dan sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang akan diimplementasikan setiap tahun melalui Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah diharapkan dapat bersinergi dengan semua pihak atau pemangku kepentingan yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 - 2026, dirumuskan strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan program pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tiga tahun kedepan. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut:

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026

Hasil rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target kinerja pembangunan merupakan dasar dalam menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan merupakan langkah berisikan indikasi program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran RPD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu, perumusan strategi pembangunan juga memperhatikan masalah dan isu strategis yang telah dirumuskan agar rumusan arah kebijakan pembangunan dapat lebih terarah dalam pencapaian sasaran.

Arah kebijakan pembangunan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan program pembangunan yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan arah kebijakan mengoperasionalisasi strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 - 2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mewujudkan Tujuan 1 RPD Tahun 2024 – 2026

Tujuan 1 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL DAN KOMPETITIF
Sasaran 1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
Strategi: Menyelenggarakan pendidikan yang merata dan berkualitas
Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat.- Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan kesejahteraan.- Pengembangan SMK yang relevan dengan dunia kerja.- Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfaatan perpustakaan dan pemanfaatan teknologi informasi.- Mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya.- Meningkatkan kualitas hasil belajar dan pendidikan karakter peserta didik.

Sasaran 1.2. Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan
Strategi: Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan
Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. – Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar – Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan **Tujuan 1 Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif** dengan indikator: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dijabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu: *Sasaran 1.1. Meningkatkan Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*, dengan indikator: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berupaya menyelenggarakan pendidikan yang merata dan berkualitas, baik yang menjadi kewenangannya yaitu pada level pendidikan menengah dan khusus, maupun menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yaitu pada level pendidikan dasar dengan cara melaksanakan koordinasi kepada pemerintah kabupaten/kota melalui sinergi program sesuai dengan kewenangan masing-masing. Intervensi pemerintah provinsi terhadap kewenangan pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan melalui pemberian hibah atau melalui pendekatan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Adapun kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut melalui kebijakan: a) Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat; b) Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan kesejahteraan; c) Pengembangan SMK yang relevan dengan dunia kerja; d) Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfaatan perpustakaan dan pemanfaatan teknologi informasi; e) Mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya; dan f) Meningkatkan kualitas hasil belajar dan pendidikan karakter peserta didik. Kebijakan pembangunan tersebut diharapkan dapat bersinergi dengan pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan manusia yang unggul dan kompetitif di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada *Sasaran 1.2. Meningkatkan Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan*, dengan indikator: Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui beberapa OPD terkait, antara lain: Dinas Kesehatan dan didukung oleh Rumah Sakit Umum Bahteramas, Rumah Sakit Jiwa Provinsi, dan Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yii Koo akan meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan yang menjangkau semua lapisan masyarakat melalui kebijakan: a) Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; b) Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar; dan c) Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan. Diharapkan kontribusi semua pihak dalam pembangunan kesehatan yang lebih baik karena intervensi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi cukup terbatas mengingat kemampuan fiskal daerah.

Tabel 6.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mewujudkan Tujuan 2 RPD tahun 2024 – 2026

Tujuan 2 MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK	
Sasaran 2.1. Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	
Sasaran 2.2. Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	
Strategi: a) Mengurangi beban pengeluaran dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan; b) Menciptakan iklim usaha yang kondusif.	
Arah Kebijakan: – Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; – Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin; – Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin.	
Sasaran 2.3. Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	
Strategi: Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat.	
Arah Kebijakan: – Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat serta memperbaiki sistem informasi pangan; – Revitalisasi Lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.	

Upaya untuk mewujudkan **Tujuan 2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik** dengan indikator: Persentase Penduduk Miskin, dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, yaitu: *Sasaran 2.1. Meningkatkan Kemampuan Daya Beli Masyarakat*, dengan indikator: Pengeluaran Perkapita Disesuaikan dan *Sasaran 2.2. Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat*, dengan indikator: Gini Ratio, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui beberapa OPD terkait, antara lain: Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam mengurangi beban pengeluaran dan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan serta menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan meningkatkan perlindungan sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin melalui pemberdayaan kelompok-kelompok binaan dan memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin yang dapat meringankan beban bagi masyarakat miskin.

Pada *Sasaran 2.3. Meningkatkan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan*, dengan indikator: Skor Pola Pangan Harapan dan Prevalensi *Stunting*, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui beberapa OPD terkait, antara lain: Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, dan Dinas Perkebunan dan Hortikultura berperan dalam meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan bagi masyarakat melalui kebijakan meningkatkan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat serta memperbaiki sistem informasi pangan dan revitalisasi Lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Tabel 6.3.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mewujudkan Tujuan 3 RPD tahun 2024 – 2026

Tujuan 3 MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
Sasaran 3.1. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan
Strategi: Penerapan teknologi tepat guna dan hilirisasi potensi unggulan berbasis sumber daya alam.
Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> – Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan. – Peningkatan nilai tambah komoditi melalui hilirisasi
Sasaran 3.2. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses Terhadap Lapangan Kerja
Strategi: Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha
Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan kapasitas dan memenuhi keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk kebutuhan pasar
Sasaran 3.3. Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi
Strategi: Optimalisasi pengelolaan potensi investasi
Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi
Sasaran 3.4. Meningkatnya konektivitas antarwilayah
Strategi: Peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan kapasitas jalur darat dan laut antarwilayah, kawasan strategis dan simpul-simpul transportasi untuk menunjang ekonomi masyarakat.
Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> – Peningkatan jalan dan jembatan menuju/dalam kawasan strategis dan antar kabupaten/kota. – Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi melalui pengembangan fasilitas angkutan Jalan dan Pelabuhan Pengumpan Regional
Sasaran 3.5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Strategi: Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> – Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, darat, laut dan udara melalui peningkatan kapasitas daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sasaran 3.6. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana
Strategi: Mengurangi risiko bencana.
Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> – Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana.

Upaya untuk mewujudkan **Tujuan 3 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan**, dengan indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi, dijabarkan ke dalam 6 (enam) sasaran pembangunan, yaitu: **Sasaran 3.1. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan**, dengan indikator: Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan, dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui beberapa OPD terkait, antara lain: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas ESDM, Dinas Sumber

Daya Air dan Bina Marga, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, berperan dalam menjalankan strategi Penerapan teknologi tepat guna dan hilirisasi potensi unggulan berbasis sumber daya alam. Strategi tersebut dilakukan agar potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan perekonomian daerah. Potensi sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura, perikanan dan kehutanan) memiliki andil terbesar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara, selain itu sektor pertambangan dalam RPJMN 2020 – 2024 menjadi prioritas nasional di samping sektor pariwisata dengan keberadaan Pulau Wakatobi sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas. Nikel dan Aspal Buton merupakan komoditi unggulan pada sektor pertambangan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah. Diharapkan hilirisasi industri pertambangan dapat berkembang di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ditetapkannya beberapa proyek strategis nasional dapat mampu menyerap tenaga kerja lokal. Pada periode RPD ini, strategi pembangunan dalam mencapai sasaran tersebut dijabarkan ke dalam kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan dan peningkatan nilai tambah komoditi melalui hilirisasi.

Pada *Sasaran 3.2. Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses Terhadap Lap. Kerja*, dengan indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui beberapa OPD terkait, antara lain: Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dalam mencapai sasaran tersebut dilakukan dengan cara memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha melalui kebijakan meningkatkan kapasitas dan memenuhi keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk kebutuhan pasar. Hal ini perlu dilakukan mengingat upaya hilirisasi industri memerlukan jumlah tenaga kerja yang cukup besar dan mempunyai kapasitas mumpuni. Kesiapan tenaga kerja lokal dalam hal peningkatan keterampilan dan keahlian sesuai kebutuhan pasar industri perlu dipersiapkan dengan baik mengingat persaingan dengan tenaga kerja lain semakin tinggi.

Pada *Sasaran 3.3. Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi*, dengan indikator: Pertumbuhan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencapai sasaran tersebut menggunakan strategi optimalisasi pengelolaan potensi investasi. Hal ini dilakukan mengingat wilayah Sulawesi Tenggara memiliki potensi Sumber Daya Alam yang berlimpah, antara lain: sektor pertanian, sektor pertambangan (nikel dan aspal), dan sektor pariwisata, memerlukan investasi yang besar agar berdampak pada peningkatan perekonomian daerah. Untuk itu, kebijakan dalam menerapkan strategi tersebut melalui peningkatan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi untuk mendorong investasi dengan beberapa alternatif pilihan dari jenis investasi yang tersedia.

Pada *Sasaran 3.4. Meningkatnya konektivitas antarwilayah*, dengan indikator: Indeks Infrastruktur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dan Dinas Perhubungan menerapkan strategi peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan kapasitas jalur darat dan laut antarwilayah, kawasan strategis dan simpul-simpul transportasi untuk menunjang ekonomi masyarakat. Hal ini dilakukan mengingat wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang bercirikan kepulauan, sehingga pembangunan infrastruktur wilayah tidak hanya dilakukan di darat, namun sangat perlu mengkoneksikan antar pulau besar dan pulau kecil serta pada kawasan strategis melalui transportasi laut dan udara agar distribusi orang dan barang berjalan dengan baik dan lancar sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan perekonomian daerah. Untuk itu kebijakan yang diperlukan adalah peningkatan jalan dan jembatan menuju/dalam kawasan strategis dan antar kabupaten/kota, serta peningkatan sarana prasarana transportasi melalui pengembangan fasilitas angkutan jalan dan pelabuhan pengumpan regional.

Pada *Sasaran 3.5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*, dengan indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang, dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mencapai sasaran tersebut mengedepankan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan mengingat pembangunan baik yang dilaksanakan dalam bentuk fisik atau infrastruktur maupun non fisik akan berdampak pada lingkungan hidup. Untuk itu konsep pembangunan berkelanjutan menjadi penting untuk dilaksanakan karena pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan. Untuk itu arah kebijakan dalam menerapkan strategi tersebut yaitu pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, darat, laut dan udara melalui peningkatan kapasitas daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada *Sasaran 3.6. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana*, dengan indikator: Indeks Resiko Bencana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Satuan Polisi Pamong Praja mendorong upaya meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana. Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah yang berisiko terjadinya bencana, antara lain: bencana banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, dan likuefaksi. Dengan berbagai resiko tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi dengan cara mengurangi risiko bencana untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Untuk itu arah kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana. Kebijakan tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk melakukan pembinaan kepada masyarakat pada daerah rawan bencana agar mampu berperan dalam melakukan mitigasi bencana, melakukan evakuasi mandiri, dan berpartisipasi dalam respon tanggap darurat.

Tabel 6.4.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam Mewujudkan Tujuan 4 RPD tahun 2024 – 2026

Tujuan 4 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Sasaran 4.1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sasaran 4.2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
Strategi: Optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
Arah Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> – Melakukan penataan dan penguatan organisasi yang efektif dan efisien. – Meningkatkan profesionalisme aparatur. – Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi. – Meningkatkan pengawasan dan budaya kerja yang bersih dan bebas KKN.

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi sebagai dasar penyusunan atau pengambilan kebijakan pemerintah daerah

Upaya untuk mewujudkan **Tujuan 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi, dijabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran pembangunan, yaitu: *Sasaran 4.1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, dengan indikator: Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Opini Laporan Keuangan, dan *Sasaran 4.2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik*, dengan indikator: Indeks Kepuasan Pelayanan Publik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Kepegiaian Daerah, dan beberapa OPD terkait mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan cara melakukan optimalisasi penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berupaya melakukan Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, meliputi: 1) Manajemen Perubahan; 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3) Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tata Laksana; 5) Penataan Sumber Daya Manusia; 6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 7) Penguatan Pengawasan; dan 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut, yaitu: melakukan penataan dan penguatan organisasi yang efektif dan efisien, meningkatkan profesionalisme aparatur, meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi, meningkatkan pengawasan dan budaya kerja yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi sebagai dasar penyusunan atau pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan tahunan pembangunan untuk periode tahun 2024 – 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Tabel 6.5.
Arah Kebijakan Tahunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026

Tujuan RPD	Arah Kebijakan Tahunan		
	2024	2025	2026
1. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat. - Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan kesejahteraan. - Pengembangan SMK yang relevan dengan dunia kerja. - Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfaatan perpustakaan dan pemanfaatan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat. - Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan kesejahteraan. - Pengembangan SMK yang relevan dengan dunia kerja. - Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfaatan perpustakaan dan pemanfaatan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat. - Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi kompetensi dan peningkatan kesejahteraan. - Pengembangan SMK yang relevan dengan dunia kerja. - Meningkatkan literasi masyarakat melalui pemanfaatan perpustakaan dan pemanfaatan teknologi

Tujuan RPD	Arah Kebijakan Tahunan		
	2024	2025	2026
	informasi. - Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. - Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar - Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan.	informasi. - Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. - Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar - Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan.	informasi. - Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. - Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar - Meningkatkan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	- Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. - Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin. - Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin. - Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat serta memperbaiki sistem informasi pangan. - Revitalisasi Lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.	- Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. - Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin. - Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin. - Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat serta memperbaiki sistem informasi pangan. - Revitalisasi Lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.	- Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. - Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin. - Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin. - Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat serta memperbaiki sistem informasi pangan. - Revitalisasi Lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	- Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan. - Peningkatan nilai tambah komoditi melalui hilirisasi. - Meningkatkan kapasitas dan memenuhi keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk kebutuhan pasar. - Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi. - Peningkatan jalan dan jembatan menuju/dalam kawasan strategis dan antar kabupaten/kota. - Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi melalui pengembangan fasilitas angkutan Jalan dan Pelabuhan Pengumpan Regional. - Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, darat, laut dan udara melalui peningkatan kapasitas daerah dalam	- Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan. - Peningkatan nilai tambah komoditi melalui hilirisasi. - Meningkatkan kapasitas dan memenuhi keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk kebutuhan pasar. - Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi. - Peningkatan jalan dan jembatan menuju/dalam kawasan strategis dan antar kabupaten/kota. - Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi melalui pengembangan fasilitas angkutan Jalan dan Pelabuhan Pengumpan Regional. - Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, darat, laut dan udara melalui peningkatan kapasitas daerah dalam	- Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan. - Peningkatan nilai tambah komoditi melalui hilirisasi. - Meningkatkan kapasitas dan memenuhi keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk kebutuhan pasar. - Meningkatkan promosi investasi dan memperbanyak sumber dan jenis investasi. - Peningkatan jalan dan jembatan menuju/dalam kawasan strategis dan antar kabupaten/kota. - Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi melalui pengembangan fasilitas angkutan Jalan dan Pelabuhan Pengumpan Regional. - Pengurangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, darat, laut dan udara melalui peningkatan kapasitas daerah dalam

Tujuan RPD	Arah Kebijakan Tahunan		
	2024	2025	2026
	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. - Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana.	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. - Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana.	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. - Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	- Melakukan penataan dan penguatan organisasi yang efektif dan efisien. - Meningkatkan profesionalisme aparatur. - Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi. - Meningkatkan pengawasan dan budaya kerja yang bersih dan bebas KKN. - Meningkatkan kualitas pelayanan publik. - Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi sebagai dasar penyusunan atau pengambilan kebijakan pemerintah daerah.	- Melakukan penataan dan penguatan organisasi yang efektif dan efisien. - Meningkatkan profesionalisme aparatur. - Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi. - Meningkatkan pengawasan dan budaya kerja yang bersih dan bebas KKN. - Meningkatkan kualitas pelayanan publik. - Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi sebagai dasar penyusunan atau pengambilan kebijakan pemerintah daerah.	- Melakukan penataan dan penguatan organisasi yang efektif dan efisien. - Meningkatkan profesionalisme aparatur. - Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi. - Meningkatkan pengawasan dan budaya kerja yang bersih dan bebas KKN. - Meningkatkan kualitas pelayanan publik. - Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dan inovasi sebagai dasar penyusunan atau pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Arah kebijakan tahunan disusun sebagai acuan dalam menyusun rangkaian prioritas dalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Arah kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan atau kondisi daerah berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah dan prioritas nasional. Arah kebijakan menjadi gambaran program pembangunan yang bersifat indikatif dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024 – 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 – 2026. Program tersebut dibagi berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan beserta OPD penanggungjawab disertai dengan indikator kinerja outcome yang akan dicapai pada akhir periode. Capaian kinerja *outcome* program dimaksud memiliki korelasi terhadap pencapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024 - 2026.

Program prioritas pembangunan daerah akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan program perangkat daerah. Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan yang akan datang merupakan bagian dari proses pembangunan yang sudah berlangsung sejak masa pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pada periode sebelumnya disimpulkan bahwa terdapat sasaran pembangunan yang telah mencapai target, namun terdapat pula sasaran pembangunan yang belum mencapai target sehingga perlu ditindaklanjuti pada periode pemerintahan berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2018 – 2023, terdapat beberapa program yang perlu dilanjutkan karena kewajiban untuk melaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perlu dilanjutkan dengan alasan untuk kepentingan umum.

Beberapa prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada periode RPD Tahun 2024 – 2026, antara lain:

1. Pelaksanaan program yang bersifat mandatori (*Mandatory spending*) yaitu Bidang Pendidikan minimal 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Selain itu, dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tetap fokus pada upaya pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan meliputi: Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Murni, Tingkat Penyelesaian Sekolah, Persentase Guru Layak, Rasio Kelas Layak; dan Peta Mutu Pendidikan.

Demikian pula Program Bidang Kesehatan dengan *mandatory spending* minimal 10% dari APBD di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) dengan fokus pada upaya pencapaian indikator: Usia Harapan Hidup, Persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, Persentase Bayi dan Balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap, dan balita dengan gizi normal.

2. Penggunaan Dana Transfer Umum (DTU), yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) diarahkan paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan.
3. Penyelenggara pemerintahan daerah yang diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan, kesehatan, PUPR, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman tramtibumlinmas, dan sosial, sebagian substansinya ditetapkan sebagai SPM.
4. Mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pilpres dan Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024 dengan pengalokasian APBD untuk kegiatan tersebut.
5. Program lanjutan yang telah dirintis pada masa pemerintahan Kepala Daerah sebelumnya, antara lain: Pembangunan Jalan Pariwisata Kendari – Toronipa, Pembangunan patung Oputa Yii Koo di Kota Baubau, Pembangunan dan pengoperasian Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yii Koo, dan Pembangunan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.

Beberapa prioritas pembangunan daerah di atas dan prioritas pembangunan lainnya diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.6.
Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		OPD Penanggung-jawab
				Target	Rp (Juta)	
Tujuan 1: Mewujudkan Pembangunan Manusia Yang Unggul dan Kompetitif	IPM	Nilai	72,23	73,00 – 73,40		
Sasaran 1.1: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Persen	9,25	13,39		
	Harapan Lama Sekolah	Persen	13,63	17,24		

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		OPD Penanggung-jawab
				Target	Rp (Juta)	
1. Program Pengelolaan Pendidikan	a) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16-18 Tahun	Persen	85,64	100	2.379.811	Dinas Dikbud
	b) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 4-18 Tahun Pendidikan Khusus	Persen	79,29	100		Dinas Dikbud
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	c) Persentase Guru sertifikasi SMA/SMK/SLB	Persen	41,56	46,06	1.830.602	Dinas Dikbud
	d) Persentase Guru Penggerak SMA/SMK/SLB	Persen	0,51	0,78		Dinas Dikbud
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Persen	36	62	111	Dinas Dikbud
4. Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Menengah Dan Khusus Yang Menerapkan IKM Menggunakan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	17,82	27	3.604	Dinas Dikbud
5. Program Pengembangan Kebudayaan	Terlestarinya Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persen	13	19,21	31.864	Dinas Dikbud
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Terlestarinya Kesenian Tradisional	Persen	6	12	2.907	Dinas Dikbud
7. Program Pembinaan Sejarah	Terlestarinya Sejarah Sulawesi Tenggara	Persen	100	100	16.632	Dinas Dikbud
8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarinya Cagar Budaya	Persen	25	31	1.278	Dinas Dikbud
9. Program Pengelolaan Permuseuman	Terlestarinya Muesum	Persen	100	100	3.207	Dinas Dikbud
10. Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Pembinaan Perpustakaan	Persen	44,78	38,81	2.515	Dinas Perpustakaan & Arsip
11. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Cakupan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persen	5,55	40,11	700	Dinas Perpustakaan & Arsip
12. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing SDM Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas daya saing SDM Kepemudaan	Persen	100	100	12.615	Dikmudora
13. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Peningkatan dan Pengembangan daya saing SDM Keolahragaan	Persen	100	100	67.353	Dikmudora
14. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persen	58	100	2,337	Dikmudora
15. Program Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pembinaan Mental spiritual dan Pengembangan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	1.437.929	Biro Kesra Setda
16. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan PPRG	Persen	-	42	2.281	Dinas P3APPKB
17. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kab/Kota yang membentuk minimal 2 Forum Anak Tingkat Kecamatan dan 2 Forum Anak Desa/Kelurahan	Persen	29	65	1.257	Dinas P3APPKB
18. Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi	Persen	100	100	2.376	Dinas P3APPKB

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		OPD Penanggung-jawab
				Target	Rp (Juta)	
19. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase perangkat daerah yang mengelola data terpilah gender dan anak	Persen	21	52	727	Dinas P3APPKB
20. Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi	Persen	100	100	1.675	Dinas P3APPKB
21. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga (PUSPAGA) yang terbentuk	Persen	17	50	1.370	Dinas P3APPKB
Sasaran 1.2: Meningkatnya Jangkauan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	71,72	72,42		
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	a) Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lengkap	Persen	65	85	58.159	Dinkes
	b) Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Persen	14,8	8		
	c) Prevalensi Balita Under Weight (Berat Badan Kurang Menurut Umur)	Persen	7,8	4		
	d) Persentase Orang dengan HIV AIDS yang Menjalani Terapi ARV (ODHA On ART)	Persen	60	80		
	e) Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persen	48	90		
	f) Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 Bulan	Persen	84	93		
	g) Persentase Kab/Kota yang Merespon Peringatan Dini KLB (Alert System) Minimal 80%	Persen	100	100		
	h) Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia > 18 Tahun	Persen	23,82	20		
	i) Persentase Kab/kota yang Dibina dan Dipersiapkan Akreditasinya	Persen	100	100		
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas Dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	25	40	5.580	Dinkes
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persen	80	100	146	Dinkes
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS	Persen	82,4	95	1.781	Dinkes
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persen	1	100	281.645	RSUP Bahteramas
6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persen	100	100	75.800	R S J
7. Program Peningkatan Kapasitas	Persentase Peningkatan	Persen	100	100	3.000	R S J

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		OPD Penanggungjawab
				Target	Rp (Juta)	
Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					
8. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Persen	100	100	915	R S J
9. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persen	71,37	95	402.077	RSJPDO Oputa Yii Koo
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Persen	-	100	1.650	RSJPDO Oputa Yii Koo
11. Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	Persen	50 (Capaian 2022, sebagai baseline)	67	1.482	Dinas P3APPKB
12. Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	persen	30,2 (Capaian 2021, sebagai baseline)	49,52	1.544	Dinas P3APPKB Dinas P3APPKB
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	50 (Capaian 2022, sebagai baseline)	28,2		
13. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBanga)	Nilai	52,36 (Capaian 2021, sebagai baseline)	58,36	2.097	Dinas P3APPKB
TUJUAN 2: MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,27	10,0 – 9,5		
Sasaran 2.1: Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Juta Rupiah	9.381	11.148		
	Nilai Tukar Petani	Nilai	101,08	>100		
1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan pinjam	Unit KSP dan USP	888	939	600	Dinkop UMKM
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan	Unit Koperasi	2.976	3.129	900	Dinkop UMKM
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi Sehat	Unit KSP dan USP	414	516	650	Dinkop UMKM
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Anggota Koperasi dan UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Unit KUMKM	2.213	4.913	7.500	Dinkop UMKM
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	Persen	68	75	900	Dinkop UMKM
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM yang tumbuh dan berkembang untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri	Unit	249.398	253.898	1.500	Dinkop UMKM
7. Program Pengembangan UMKM	Jumlah Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Unit	48.928	50.428	900	Dinkop UMKM
8. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Usulan Produk Ekraf yang difasilitasi / mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Usulan	1	3	5.346	Dispar

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		OPD Penanggungjawab
				Target	Rp (Juta)	
9. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan Ekraf yang dibina	Orang	100	600	2.151	Dispar
10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Nilai Perdagangan Antar Pulau	Milyar	2,516	5	3.000	Disperindag
Sasaran 2.2: Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Gini Ratio	Ratio	0,390	0,375 – 0,350		
1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasa	Jumlah Fasilitas Warga Negara Pekerja Migran Korban tindak Kekerasan yang dilaksanakan	Kegiatan	-	3	433	Dinsos
2. Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan	Kegiatan	2	15	3.560	Dinsos
3. Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlantar dalam Panti yang memperoleh layanan dan Rehabilitasi.	Jiwa	5864	11518	2.619	Dinsos
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang mendapat perlindungan dan bantuan Sosial	KK	70537	5000	3.332	Dinsos
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman makam Pahlawan Nasional yang dikelola dan memperoleh Pemeliharaan	Unit	1	6	1.640	Dinsos
6. Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Jumlah Kerja Sama Desa	Dokumen	15	59	674	Dinas PMD
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Pembinaan, Penataan dan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Lembaga Ekonomi Desa, Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	Persen	85	100	7.670	Dinas PMD
Sasaran 2.3: Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Skor	80,2	89		
	Prevalensi Stunting	Persen	17,05	14		
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	a) Ketersediaan pangan utama (beras) b) Ketersediaan Energi c) Ketersediaan Protein	ton (Kkl/Kap/hari) (Gr/kap/hari)	309.429 3.523 79,02	326.076 3.300 66	1.274	Dinas Ketapang
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	a) Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabe merah, bawang merah, kedelai)	CV Beras	1,10	CV beras ≤ 5%	5.740	Dinas Ketapang
		CV Cabe Merah	14,15	CV cabai merah ≤ 25%		
		CV Bawang Merah	5,87	CV kedelai ≤ 5%		
		CV Kedelai	1,38	CV bawang merah ≤ 25%		
	b) Konsumsi Energi c) Konsumsi Protein	(Kkl/Kap/hari) (Gr/kap/hari)	20,28 61,3	2100 64		
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	Persen	16,66	13,51	1.250	Dinas Ketapang
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Yang memenuhi	Persen	77	85,2	3.170	Dinas Ketapang

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		OPD Penanggung-jawab
				Target	Rp (Juta)	
	Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan					
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,57	7,0 – 7,5		
Sasaran 3.1: Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.	Persen	2,55	2,97		
	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertambangan dan Penggalian	persen	1,34	1,69		
	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Industri Pengolahan	Persen	5,58	6,08		
1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang Tersedia dan Dikembangkan	Laporan	6	6	27.848	Distanak
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Tersedia dan Dikembangkan	Laporan	1	1	32.328	Distanak
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dikendalikan	Laporan	5	5	5.760	Distanak
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Kasus Bencana Pertanian yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	Laporan	1	3	6.816	Distanak
5. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani	Persen	5	5	5.820	Distanak
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan (Kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) dan Hortikultura (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk)	Ton	Perkebunan: 212.714 Ton Hortikultura: 38.630 Ton	Perkebunan: 214.763 Ton Hortikultura: 39.330 Ton	42	Disbunhorti
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan Produktif Komoditi Unggulan Perkebunan (Kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) dan Hortikultura (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk)	Ha	Perkebunan: 348.946 Hortikultura: 3.600	Perkebunan: 349.046 Hortikultura: 3.650	20	Disbunhorti
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian OPT Perkebunan dan Hortikultura	Persen	Perkebunan: 11,73 Hortikultura: 13,71	Perkebunan: 46,19 Hortikultura: 65,36	1	Disbunhorti
9. Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha Perkebunan dan Hortikultura yang terbit	IUP	0	4	0,75	Disbunhorti
10. Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelembagaan petani yang aktif	Persen	60	80	37	Disbunhorti
11. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luas Kawasan Perairan Laut Yang Memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Hektar	49.433	456.891	3.200	D K P
12. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	a) Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	259	270	42.000	D K P
	b) Nilai Tukar Nelayan	NTN	104	110	12.000	D K P
	c) Jumlah Sarana	Unit	210	220	280	D K P

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		OPD Penanggungjawab
				Target	Rp (Juta)	
	Perikanan Tangkap Yang Meningkatkan Kapasitasnya					
13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	a) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	406.324	420.000	8.200	D K P
	b) Jumlah Produksi benur/udang dan benih ikan	Juta Ekor	37	38	1.200	D K P
14. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	Kelompok	153	160	4.200	D K P
15. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	a) Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kap/ Tahun	71	72	1.400	D K P
	b) Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Unit	1.636	1.670	500	D K P
16. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	a) Meningkatnya kontribusi penerimaan daerah bidang ESDM	Rp (Juta)	259.307	14.234	900	Dinas ESDM
	b) Reklamasi lahan pasca tambang,	Ha	111	794,98	2.868	Dinas ESDM
	c) Meningkatnya kepatuhan pemegang IUP dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan	Ton	112.489,88	80.008.066	1.328	Dinas ESDM
17. Program Pengelolaan Aspek Gegeologian	Meningkatnya Jumlah data dan informasi kegeologian yang disebar-luaskan	Dokumen dan Laporan	2	21	2.295	Dinas ESDM
18. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Bauran Energi Baru Terbarukan Terhadap Ketenagalistrikan	Persen	0	96	28.654	Dinas ESDM
19. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	Persen	0	100	3.427	Dinas ESDM
	Rasio Desa Berlistrik	Persen	0	100	1.000	Dinas ESDM
20. Program Pengelolaan Hutan	a) Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	56.000	120.000	8.283	Dishut
	b) Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	365	1.500		
21. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Tersedianya infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dalam Kondisi Baik	Persen	78,51	84	600.000	Dinas SDA & BM
22. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	a) Persentase Jumlah Industri yang mengolah sumber daya daerah	Persen	10,28	13,0	13.000	Disperindag
	b) Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri yang mengolah sumber daya daerah	Persen	29,02	32,00	3.000	Disperindag
23. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	0	100	2.526	Disperindag
24. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya dan pengurusan legal aspek pertanahannya	Kawasan	1 Kawasan	11 SP	870	Distransnaker
25. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah KK transmigran yang ditempatkan	KK	500 KK	600 KK	210	Distransnaker
26. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Indeks perkembangan kawasan transmigrasi	Indeks	11 Kimtrans	11 Kimtrans	1.950	Distransnaker
Sasaran 3.2: Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja dan Akses Terhadap Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen	Persen	3,36	2,25		
1. Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan norma ketenagakerjaan.	Persen	65	80	2.550	Distransnaker
2. Program Pelatihan Kerja dan	Persentase tenaga kerja	Persen	75	90	2.925	Distransnaker

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		OPD Penanggungjawab
				Target	Rp (Juta)	
Produktivitas Tenaga Kerja	yang difasilitasi untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitasnya					
3. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan, difasilitasi akses kesempatan kerja dan usaha mandiri	Persen	90	100	3.700	Distransaker
4. Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	75	90	2.750	Distransaker
5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Ahli Konstruksi	Kelas	-	6	1.500	Dinas SDA & BM
Sasaran 3.3: Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi	Pertumbuhan Investasi / Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	11,63	13,29		
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang dibuat/dievaluasi	Dokumen	1	10	2.200	DPM & PTSP
2. Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah media yang digunakan dalam Penyelenggaraan Promosi penanaman modal	Media	5	20	6.000	DPM & PTSP
3. Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan	Poin	84,32	87	4.500	DPM & PTSP
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	Persentase Pemanfaatan sistem informasi perizinan dan penanaman modal	Persen	100	100	450	DPM & PTSP
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi PMDN/PMA	Triliun Rupiah	21,73	25	7.500	DPM & PTSP
6. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Jumlah Izin dan Pendaftaran Perusahaan	Persen	-	80	1.867	Disperindag
7. Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor	US\$	5,36 Milyar	7 Milyar	650	Disperindag
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah Koordinasi dengan instansi terkait penerbit izin usaha industri	kali	8	12	250	Disperindag
9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri	Kali	3	5	600	Disperindag
10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1	3	15.000	Disperindag
11. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Komoditi	Kali	6	36	600	Disperindag
	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Komoditi	Kali	17	30		
12. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata - Rata Lama Bepergian Wisatawan	Hari	7,55	7,7	47.496	Dispar
13. Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	4.832.290	20.198.647	12.884	Dispar
14. Program Penataan Bangunan Gedung	Cakupan Penataan Bangunan Gedung	Unit	31 Unit	75 Unit	12.900	Dinas CKBK & TR
15. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan Pengembangan Jasa Konstruksi	Dokumen	10	26	7.300	Dinas CKBK & TR
16. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	6 Dokumen	10 Dokumen	1.400	Dinas CKBK & TR
Sasaran 3.4: Meningkatnya konektivitas antarwilayah	Indeks Infrastruktur	Nilai	87,83	92,55		

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		OPD Penanggungjawab
				Target	Rp (Juta)	
1. Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	84,11	90	2.400.000	Dinas SDA & BM
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Terminal Tipe B	Persen	17,65	65	39.401	Dishub
	Persentase Perlengkapan Jalan Provinsi Yang Terpasang	Persen	19,12	50	10.000	Dishub
3. Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Izin Pelayaran Diterbitkan	Persen	100	100	1.860	Dishub
	Persentase Meningkatnya Pelabuhan Regional Operasional dalam kondisi layak	Persen	4,76	85,71	226.286	Dishub
Sasaran 3.5: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72,03	74,68		
1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan keterpenuhan kajian dampak dan perizinan lingkungan hidup	Persen	100	100	1.520	D L H
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persen	90	100	4.427	D L H
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Cakupan keterpenuhan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi	Persen	20	100	950	D L H
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan keterpenuhan pengelolaan limbah B3	Persen	100	100	694	D L H
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan keterpenuhan penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup	Persen	100	100	2.096	D L H
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha yang Terkait dengan PPLH	Cakupan keterpenuhan pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Persen	0	100	206	D L H
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan keterpenuhan pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Persen	0	100	522	D L H
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan keterpenuhan pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Persen	100	100	868	D L H
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan keterpenuhan penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup	Persen	100	100	520	D L H
10. Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan keterpenuhan penanganan sampah yang menjadi kewenangan provinsi	Persen	30	100	6.180	D L H
11. Program Pengelolaan Hutan	Dokumen RPHJP	Dokumen	0	15	114.417	Dishut
	Luas Rehabilitasi Lahan kritis dan kawasan hutan	Ha	980	3.645		
	Persentase Penurunan luas kerusakan kawasan hutan	persen	1	3		
12. Program Konservasi Sumber	Pengembangan	Ha	225	300	5.675	Dishut

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		OPD Penanggungjawab
				Target	Rp (Juta)	
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pengelolaan Kawasan Konservasi					
13. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Evaluasi Pengelolaan DAS	Unit	4	9	3.903	Dishut
14. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Kehutanan	a) Luas Fasilitas Izin Perhutanan Sosial	Ha	10.055	9.000	18.391	Dishut
	b) Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	Unit	4	30		
	c) Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Pendamping Kehutanan	Orang	53	165		
15. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - SPM	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - SPM	Dokumen	-	3 Dokumen	1.450	Dinas CKBK & TR
16. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dokumen	-	4 Dokumen	1.500	Dinas CKBK & TR
17. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - SPM	Cakupan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah - SPM	Dokumen	-	1 Dokumen	500	Dinas CKBK & TR
18. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dokumen	-	50 Dokumen	13.000	Dinas CKBK & TR
19. Program Pengembangan Permukiman	Cakupan Pengembangan Permukiman	Sistem Jaringan	15	50	15.000	Dinas CKBK & TR
20. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Cakupan Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Kawasan	55 Kawasan	183 Kawasan	27.250	Dinas CKBK & TR
21. Program Kawasan Permukiman	Tertatanya Kawasan Kumuh kewenangan provinsi dengan luas 10 - 15 Ha	Ha	85.31 Ha Kegiatan PSU Kawasan Kumuh dan 192 Ha Perencanaan Kawasan Kumuh	30 Ha	30.000	Dinas PRKPP
22. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Kawasan Permukiman yang terfasilitasi PSU	Kawasan	83 Kawasan	158	37.500	Dinas PRKPP
23. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Tanah untuk Pengembangan bagi Kepentingan Umum	Ha	5000 Ha	15.000 Ha	2.3000	Dinas PRKPP
24. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terselesaikannya Pemberian santunan tanah pembangunan	org/bdg	80 org/bdg	100 org/bdg	24.800	Dinas PRKPP
25. Program Penatagunaan Tanah	Terlaksananya Penatagunaan Tanah	Persen	85	98	600	Dinas PRKPP
Sasaran 3.6: Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Resiko Bencana	Skor	157,9	145		
1. Program Penanganan Bencana	Persentase Korban bencana yang memperoleh Penanganan	Persen	100	100	2.270	Dinsos
2. Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Unit	145 Unit Rumah bagi Korban Bencana, 65 Unit rumah bagi korban relokasi	150	9.750	Dinas PRKPP
3. Program Penanggulangan Bencana	Menurunya indeks Risiko Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Prov.Sultra	Indeks	155,79	140,79	16.800	BPBD
4. Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Kabupaten/Kota Yang telah membentuk satgas Linmas	Kab/Kota	0	9	562	Satpol PP

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		OPD Penanggungjawab
				Target	Rp (Juta)	
5. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanggulangan kebakaran dan Non Kebakaran berdasarkan respon time (15 menit)	Persen	100	100	625	Satpol PP
TUJUAN 4: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,14	67,65		
Sasaran 4.1: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	62,18 (B)	62,30 (B)		
	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	6.768.622	Semua OPD
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, serta Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	98	98	22.469	Inspektorat Daerah
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Kualitas APIP dalam Rangka Profesionalisme Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Persen	92	97	4.838	Inspektorat Daerah
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	2.466.233	BPKAD
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	0,75	100	16.779	BPKAD
6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	persen	100%	1	10.914	BAPPEDA
7. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100%	1	23.029	BAPPEDA
8. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas & Fungsi DPRD	Persentase peningkatan Dukungan pelaksanaan Tugas & Fungsi DPRD DPRD	Persen	100	100	60.692	Sekretariat DPRD
9. Program Penataan Organisasi	Cakupan Penataan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	100	7.775	Biro Organisasi Setda
10. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah yang baik	Persen	100	100	18.386	Biro Pemerintahan Setda
11. Program Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pembinaan Mental spiritual dan Pengembangan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	1.437.929	Biro Adm. Kesra Setda
12. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan Penyusunan Perundang-undangan dan bantuan hukum yang difasilitasi	Persen	100	100	6.740	Biro Hukum Setda
13. Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Pengelolaan Kebijakan Administrasi Perekonomian	Persen	100	100	8.901	Biro Perekonomian Setda
14. Program Kebijakan dan	Cakupan Pelaksanaan	Persen	100	100	9.302	Biro PBJ Setda

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		OPD Penanggung-jawab
				Target	Rp (Juta)	
Pelayanan Pengadaan Barang & Jasa	Pengadaan Barang dan jasa yang lebih terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien					
15. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan Administrasi Pembangunan Daerah	Persen	100	100	5.729	Biro Adm. Pembangunan Setda
16. Program Administrasi Umum	Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100	266.365	Biro Umum Setda
17. Program Pelayanan Penghubung	Persentase Terpenuhinya Operasional Penunjang yang bersifat Rutin Urusan Pemerintahan Daerah Prov. Sultra	Persen	60	100	950	Badan Penghubung
18. Program Penataan Desa	Persentase Penatausahaan Pemerintahan Desa	Persen	0	18	850	Dinas PMD
19. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	50	85	1.370	Dinas PMD
20. Program Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik	Laporan	1	1	7.412	Dinas Kominfo
21. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Aplikasi Informatika yang Dikelola dan Terhubung Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Unit	-	5	3.715	Dinas Kominfo
22. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dokumen	1	1	790	Dinas Kominfo
23. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	20	50	773	Dinas Kominfo
24. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	a) Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan	Persen	-	100	16.550	BRIDA
	b) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi Daerah	Persen	-	100	10.095	BRIDA
25. Program Pengelolaan Arsip	Cakupan Pengelolaan Arsip	Persen	13,53	39,97	1.080	Dinas Perpustakaan & Arsip
26. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	18,8	40,54	525	Dinas Perpustakaan & Arsip
27. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan Pelaksanaan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Kebangsaan Kepada Instansi/Lembaga/Organisasi dan Masyarakat	Orang	100	600	6.610	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
28. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan Pemilu	Persen	88,29	95	2.594	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
29. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Jumlah Ormas yang terdaftar dalam setiap tahunnya	Persen	80	95	684	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RPD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		OPD Penanggungjawab
				Target	Rp (Juta)	
30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pelaksanaan evaluasi nilai-nilai budaya di Sulawesi Tenggara Tenggara setiap tahunnya	Kegiatan	100	300	2.200	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
31. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik di daerah setiap tahunnya	Persen	70	80	367	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sasaran 4.2: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Nilai	2,71 Baik (B)	3,30 Sangat Baik (A)		
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	72,23	100	5.180	RSJPDO Opata Yii Koo
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur (Melalui Sertifikasi/Uji Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi)	Orang	649	1150 Orang	12.816	BPSPDM
3. Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelayanan Urusan Kepegawaian	Persen	100%	100%	17.874	B K D
4. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	6.718	Satpol PP
5. Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tingkat Kab/Kota se Sultra	Persen	87	95	781	Dinas Dukcapil
6. Program Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil bagi Aparatur Disdukcapil	Persen	70	100	882	Dinas Dukcapil
7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dengan baik	Persen	70	85	450	Dinas Dukcapil
8. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	80	95	80	Dinas Dukcapil
9. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	Persen	5	5	5.590	BAPENDA

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta Indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kondisi Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1.
Kondisi Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 – 2023

Kode	Kapasitas Riil Belanja	Kondisi Pendanaan	
		Tahun 2022	Tahun 2023
A.	BELANJA	5.337.034.706.360	4.912.167.261.707
1.	Belanja Operasional	2.881.673.052.573	2.827.157.725.878
	Belanja Pegawai	1.635.277.347.138	1.628.831.274.282
	Belanja Barang dan Jasa	997.160.884.524	1.042.042.508.305
	Belanja Bunga	80.000.000.000	60.000.000.000
	Belanja Hibah	154.829.570.911	90.135.943.291
	Belanja Bantuan Sosial	14.405.250.000	6.148.000.000
2.	Belanja Modal	1.815.379.730.808	1.309.429.678.987
	Belanja Modal Tanah	34.104.590.215	2.780.409.119
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	318.838.258.343	212.642.963.375
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	670.340.232.835	678.978.438.076
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	753.984.700.415	393.451.405.417
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	38.111.949.000	21.576.463.000
3.	Belanja Tidak Terduga	13.472.970.637	23.856.826.000
	Belanja Tidak Terduga	13.472.970.637	23.856.826.000
4.	Belanja Tranfer	626.508.952.342	751.723.030.842
	Belanja Bagi Hasil	578.900.702.342	677.723.030.842
	Belanja Bantuan Keuangan	47.608.250.000	74.000.000.000
	Jumlah Belanja	5.337.034.706.360	4.912.167.261.707
	Total Surplus/(Defisit)	(1.313.318.273.383)	(355.028.427.609)
B.	PEMBIAYAAN		
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.389.318.273.383	275.000.000.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	824.604.048.457	533.817.790.526
	Penerimaan Pinjaman Daerah	564.714.224.926	96.210.637.083
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.389.318.273.383	275.000.000.000
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	76.000.000.000	275.000.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	20.000.000.000
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	56.000.000.000	255.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	76.000.000.000	275.000.000.000

Kode	Kapasitas Riil Belanja	Kondisi Pendanaan	
		Tahun 2022	Tahun 2023
	Pembiayaan Netto	1.313.318.273.383	355.028.427.609
3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0

Sumber: BPKAD, 2023

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimuthakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur pada Program maupun kerangka Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah tiga tahun kedepan (2024 – 2026) Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7.2.

Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026

NO	Uraian	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
2	BELANJA	6.409.164.727.565,60	7.050.081.200.322,16	7.755.089.320.354,38
1	BELANJA OPERASI	3.454.449.891.088,02	3.799.894.880.196,82	4.179.884.368.216,50
1.1	Belanja Pegawai	1.977.416.960.067,78	2.175.158.656.074,56	2.392.674.521.682,01
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.199.767.071.179,93	1.319.743.778.297,92	1.451.718.156.127,72
1.3	Belanja Bunga	96.800.000.000,00	106.480.000.000,00	117.128.000.000,00
1.4	Belanja Hibah	177.361.302.340,31	195.097.432.574,34	214.607.175.831,78
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.104.557.500,00	3.415.013.250,00	3.756.514.575,00
2	BELANJA MODAL	2.171.308.770.897,53	2.388.439.647.987,28	2.627.283.612.786,01
2.1	Belanja Modal Tanah	41.266.554.160,15	45.393.209.576,17	49.932.530.533,78
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	376.680.258.333,83	414.348.284.167,21	455.783.112.583,93
2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	812.090.072.244,77	893.299.079.469,25	982.628.987.416,17
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	895.156.427.868,78	984.672.070.655,66	1.083.139.277.721,22
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	46.115.458.290,00	50.727.004.119,00	55.799.704.530,90
2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.330.233.246,23	27.863.256.570,85	30.649.582.227,94
3.1	Belanja Tidak Terduga	25.330.233.246,23	27.863.256.570,85	30.649.582.227,94
4	BELANJA TRANSFER	758.075.832.333,82	833.883.415.567,20	917.271.757.123,92
4.1	Belanja Bagi Hasil	700.469.849.833,82	770.516.834.817,20	847.568.518.298,92
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	57.605.982.500,00	63.366.580.750,00	69.703.238.825,00
	Jumlah Belanja	6.409.164.727.565,60	7.050.081.200.322,16	7.755.089.320.354,38

Sumber: BPKAD 2022 (diolah)

7.2. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan keseluruhan program yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pilihan serta unsur penunjang pemerintahan.

Program Perangkat daerah meliputi program Organisasi Perangkat Daerah beserta indikator program, target tahunan dan inidkasi pendanaan yang akan dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 tahun 2021, maka Program Organisasi Perangkat Daerah tahun 2024-2026 Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana pada tabel berikut ini :



Tabel 7.3
Rencana Program Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026

RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024 - 2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1			URUSAN PEMERINTAHAN												
1			URUSAN WAJIB												
1	1		PENDIDIKAN												
1	1		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				1.665.695.948.918		2.498.543.923.376		3.747.815.885.064		7.912.055.757.358		
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	778.510.710.666	100	1.167.766.065.999	100	1.751.649.098.999	100	3.697.925.875.664	Dinas Dikbud
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 16-18 Tahun	Persen	85,64	100%	501.012.857.048	100%	751.519.285.571	100%	1.127.278.928.357	100%	2.379.811.070.976	Dinas Dikbud
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Usia 4-18 Tahun Pendidikan Khusus	Persen	79,29	100%		100%		100%				
1	1	3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru sertifikasi SMA/SMK/SLB	Persen	41,56%	43,06%	385.389.955.913	44,56%	578.084.933.869	46,06%	867.127.400.803	46,06%	1.830.602.290.584	Dinas Dikbud
				Persentase Guru Penggerak SMA/SMK/SLB	Persen	0,51%	0,59%		0,67%		0,78%				
1	1	4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Persen	36%	45%	23.502.338	53%	35.253.506	62%	52.880.259	62%	111.636.103	Dinas Dikbud
1	1	5	PROGRAM	Persentase	Persen	17,82%	20,49%	758.922.954.00	24%	1.138.384.431	27%	1.707.576.647	27%	3.604.884.032	Dinas

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			PENGEMBANGAN KURIKULUM	Satuan Pendidikan Menengah Dan Khusus Yang Menerapkan IKM Menggunakan Kurkum Muatan Lokal											Dikbud
1	2		KESEHATAN												
1	2		DINAS KESEHATAN				144.576.786.674		159.034.465.341		174.937.911.875		174.937.911.875		
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	89.304.891.500	100	98.235.380.650	100	108.058.918.715	100	108.058.918.715	Dinkes
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a) Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lengkap	Persen	65	80	48.065.950.174	82	52.872.545.191	85	58.159.799.710	85	58.159.799.710	Dinkes
				b) Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	Persen	14,8	10		9		8		8		
				c) Prevalensi Balita Under Weight (Berat Badan Kurang Menurut Umur)	Persen	7,8	6		5		4		4		
				d) Persentase Orang	Persen	60	64		70		80		80		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab					
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD							
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
				dengan HIV AIDS yang Menjalani Terapi ARV (ODHA On ART)																
				e) Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)											Persen	48	70	80	90	90
				f) Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 Bulan											Persen	84	92	92,5	93	93
				g) Persentase Kab/Kota yang Merespon Peringatan Dini KLB (Alert System) Minimal 80%											Persen	100	100	100	100	100
				h) Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia > 18 Tahun											Persen	23,82	30	25	20	20
				i) Persentase Kab/kota											Persen	100	100	100	100	100

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				yang Dibina dan Dipersiapk an Akreditasin ya											
1	2	3	PROGRAMPENINGKATANK APASITASSUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas Dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	25	35	4.612.375.000	36	5.073.612.500	40	5.580.973.750	40	5.580.973.750	Dinkes
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI,ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Usaha Kecil Obat Tradisional(UKO T) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persen	80	90	121.000.000	95	133.100.000	100	146.410.000	100	146.410.000	Dinkes
1	2	5	PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan GERMAS	Persen	82,4	85	1.472.570.000	90	1.619.827.000	95	1.781.809.700	95	1.781.809.700	Dinkes
1	3		RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI					316.631.420.000		351.405.062.000		390.122.643.200		390.122.643.200	
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	89.631.420.000	100	98.605.062.000	100	108.477.643.200	100	108.477.643.200	R S U P
1	3	2	PROGRAM PEMENUHANA UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian pemuenuhan upaya kesehatan	Persen	100	100	227.000.000.000	100	252.800.000.000	100	281.645.000.000	100	281.645.000.000	R S U P

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcame)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				perorangan dan upaya kesehatan masyarakat											
1	4		RUMAH SAKIT JIWA				61.597.920.000		59.912.000.000		65.160.000.000		186.669.920.000		
1	4	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	41.172.000.000	100	34.112.000.000	100	31.670.000.000	100	106.954.000.000	R S J
1	4	2	PROGRAM PEMENUHANA UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persen	100	100	18.950.920.000	100	24.600.000.000	100	32.250.000.000	100	75.800.920.000	R S J
1	4	3	PROGRAMPENINGKATANK APASITASSUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	100	100	1.200.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	3.000.000.000	R S J
1	4	4	PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Persen	100	100	275.000.000	100	300.000.000	100	340.000.000	100	915.000.000	R S J
1	5		RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH OPUTA YI KOO				210.358.016.901		226.930.545.501		232.469.552.760		669.758.115.162		
1	5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	79.998.856.901	100	88.511.385.501	100	92.340.392.760	100	260.850.635.162	RSJPDO Oputa Yii Koo
1	5	2	PROGRAM PEMENUHANA UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Cakupan Pemenuhan Upaya	Persen	90	91	128.259.160.000	92	136.109.160.000	93	137.709.160.000	95	402.077.480.000	RSJPDO Oputa Yii Koo

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
1	5	3	PROGRAMPENINGKATANK APASITASSUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	100	100	1.600.000.000	100	1.760.000.000	100	1.820.000.000	100	5.180.000.000	RSJPDO Oputa Yii Koo
1	5	4	PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Persen	100	100	500.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	1.650.000.000	RSJPDO Oputa Yii Koo
1	6		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	6		DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA				900.450.000.000		1.060.500.000.000		1.220.550.000.000		3.181.500.000.000		
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	50.000.000.000	100	60.000.000.000	100	70.000.000.000	100	180.000.000.000	Dinas SDA & BM
1	6	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tersedianya infrastrukturSumb er Daya Air (SDA) dalam Kondisi Baik	Persen	65,02	81,50	150.000.000.000	82,50	200.000.000.000	84,00	250.000.000.000	84,00	600.000.000.000	Dinas SDA & BM
1	6	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	81,50	87,00	700.000.000.000	88,00	800.000.000.000	90,00	900.000.000.000	90,00	2.400.000.000.000	Dinas SDA & BM
1	6	4	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Ahli Konstruksi	Kelas	2	2	450.000.000	2	500.000.000	2	550.000.000	6	1.500.000.000	Dinas SDA & BM
1	6		DINAS CIPTA KARYA, BINA				79.950.000.000		89.000.000.000		92.300.000.000		94.300.000.000		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	Target (6)	Rp. (7)	Target (8)	Rp. (9)	Target (10)	Rp. (11)	Target (12)	Rp. (13)	(14)
			KONTRUKSI DAN TATA RUANG												
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	13.000.000.000	100	13.500.000.000	100	14.000.000.000	100	14.000.000.000	Dinas CKBK & TR
1	6	2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - SPM	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum	Dokumen	-	2	1.000.000.000	3	1.950.000.000	3	1.450.000.000	3	1.450.000.000	Dinas CKBK & TR
1	6	3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dokumen	-	4	1.500.000.000	-	-	-	-	4	1.500.000.000	Dinas CKBK & TR
1	6	4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - SPM	Cakupan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Spm	Dokumen	-	1	500.000.000	-	-	-	-	1	500.000.000	Dinas CKBK & TR
1	6	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dokumen	-	31	7.800.000.000	44	11.200.000.000	50	13.000.000.000	50	13.000.000.000	Dinas CKBK & TR
1	6	6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Cakupan Pengembangan Permukiman	Sistem Jaringan	15	40	12.000.000.000	46	13.800.000.000	50	15.000.000.000	50	15.000.000.000	Dinas CKBK & TR
1	6	7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Penataan Bangunan Gedung	Unit	31	21	11.300.000.000	71	12.100.000.000	75	12.900.000.000	75	12.900.000.000	Dinas CKBK & TR
1	6	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Cakupan Penataan Bangunan Dan Lingkungan	Kawasan	55	176	23.350.000.000	183	27.250.000.000	183	27.250.000.000	183	27.250.000.000	Dinas CKBK & TR
1	6	9	PROGRAM	Cakupan	Dokumen	10	26	7.300.000.000	26	7.300.000.000	26	7.300.000.000	26	7.300.000.000	Dinas

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Pengembangan Jasa Konstruksi											CKBK & TR
1	6	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	6	10	2.200.000.000	10	1.900.000.000	9	1.400.000.000	9	1.400.000.000	Dinas CKBK & TR
1	7		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	7		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					35.750.000.000		37.750.000.000		37.750.000.000		89.250.000.000	
1	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	10.000.000.000	100	12.000.000.000	100	12.000.000.000	100	12.000.000.000	Dinas PRKP & Pertanahan
1	7	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Unit	145/65	50	3.250.000.000	50	3.250.000.000	50	3.250.000.000	150	9.750.000.000	Dinas PRKP & Pertanahan
1	7	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tertatanya Kawasan Kumuh kewenangan provinsi dengan luas 10 - 15 Ha	Ha	85.31/192	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	10	10.000.000.000	30	30.000.000.000	Dinas PRKP & Pertanahan
1	7	4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Kawasan Permukiman yang terfasilitasi PSU	Kawasan	83	25	12.500.000.000	25	12.500.000.000	25	12.500.000.000	158	37.500.000.000	Dinas PRKP & Pertanahan
1	8		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
1	8		SATPOL PP					15.230.000.000		16.495.000.000		18.076.250.000		18.076.250.000	
1	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pelayanan	Persen	100	100	10.170.000.000	100	10.170.000.000	100	10.170.000.000	100	10.170.000.000	Satpol PP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			DAERAH PROVINSI	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi											
1	8	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	4.300.000.000	100	5.375.000.000	100	6.718.750.000	100	6.718.750.000	Satpol PP
1	8	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Tanggap Bencana	Kab/Kota	0	3	360.000.000	3	450.000.000	3	562.500.000	3	562.500.000	Satpol PP
1	8	4	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan NonKebakaran	Persen	100	100	400.000.000	100	500.000.000	100	625.000.000	100	625.000.000	Satpol PP
1	9		B P B D					15.770.000.000		15.770.000.000		15.770.000.000		47.310.000.000	
1	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	10.170.000.000	100	10.170.000.000	100	10.170.000.000	100	30.510.000.000	B P B D
1	9	2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Menurunnya indeks Risiko Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Prov.Sultra	Indeks	155,79	150,79	5.600.000.000	145,79	5.600.000.000	140,79	5.600.000.000	140,79	16.800.000.000	B P B D
1	10		SOSIAL												
1	10		DINAS SOSIAL					21.387.266.000		26.229.675.000		30.270.794.000		77.887.735.000	
1	10	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	100	15.929.466.000	100	18.820.835.000	100	20.814.419.000	100	55.564.720.000	Dinsos



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Daerah Provinsi											
1	10	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dilaksanakan	Kegiatan	9	2	936.000.000	2	1.170.000.000	2	1.454.000.000	6	3.560.000.000	Dinsos
1	10	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Fasilitasi Warga Negara Pekerja Migran Korban tindak Kekerasan yang dilaksanakan	Kegiatan	0	1	115.000.000	1	143.750.000	1	175.000.000	3	433.750.000	Dinsos
1	10	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar dalam Panti yang memperoleh layanan dan Rehabilitasi.	Jiwa	5864	3500	2.796.800.000	3518	3.690.090.000	4500	4.600.375.000	11518	11.087.265.000	Dinsos
1	10	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah PPKS yang mendapat perlindungan dan bantuan Sosial	KK	70537	1500	642.000.000	1500	1.165.000.000	2000	1.525.000.000	5000	3.332.000.000	Dinsos
1	10	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase Korban bencana yang memperoleh Penanganan	Persen	100	100	588.000.000	100	765.000.000	100	917.000.000	300	2.270.000.000	Dinsos
1	10	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman makam Pahlawan Nasional yang dikelola dan	Unit	1	2	380.000.000	2	475.000.000	2	785.000.000	6	1.640.000.000	Dinsos

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				memperoleh Pemeliharaan											
2			NON PELAYANAN DASAR												
2	7		TENAGA KERJA												
2	7		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				6.380.000.000		6.925.000.000		7.460.000.000		20.765.000.000		
2	7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	2.930.000.000	100	2.950.000.000	100	2.960.000.000	100	8.840.000.000	Distransnaker
2	7	2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang difasilitasi untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitasnya	Persen	65,00	70,00	700.000.000	75,00	850.000.000	80,00	1.000.000.000	80,00	2.550.000.000	Distransnaker
2	7	3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan,difasilitasi akses kesempatan kerja dan usaha mandiri	Persen	75,00	80,00	850.000.000	85,00	975.000.000	90,00	1.100.000.000	90,00	2.925.000.000	Distransnaker
2	7	4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	90,00	90,00	1.100.000.000	95,00	1.250.000.000	100,00	1.350.000.000	100,00	3.700.000.000	Distransnaker
2	7	5	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturannorma	Persen	75,00	80,00	800.000.000	85,00	900.000.000	90,00	1.050.000.000	90,00	2.750.000.000	Distransnaker

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				ketenagakerjaan.											
			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
2	8		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB				11.671.655.500		12.895.672.300		12.672.303.600		37.239.631.400		
2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	8.651.632.200	100	9.666.296.300	100	9.232.984.200	100	27.550.912.700	Dinas P3APPKB
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementa sikan PPRG	Persen	-	21	698.608.000	31	761.535.000	42	821.583.400	42	2.281.726.400	Dinas P3APPKB
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi	Persen	100	100	759.306.000	100	792.230.500	100	824.609.200	100	2.376.145.700	Dinas P3APPKB
2	8	4	PROGRAMPENINGKATANK UALITAS KELUARGA	Persentase lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga (PUSPAGA) yang terbentuk	Persen	17	28	421.063.600	39	456.669.900	50	492.836.800	50	1.370.570.300	Dinas P3APPKB
2	8	5	PROGRAMPENGELOLAANSI STEMDATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang mengelola data terpilah gender dan anak	Persen	21	31	230.750.000	42	242.287.500	52	254.401.800	52	727.439.300	Dinas P3APPKB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kab/Kota yang membentuk minimal 2 Forum Anak Tingkat Kecamatan dan 2 Forum Anak Desa/Kelurahan	Persen	29	41	391.795.700	53	418.303.100	65	447.203.200	65	1.257.302.000	Dinas P3APPKB
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di provinsi	Persen	100	100	518.500.000	100	558.350.000	100	598.685.000	100	1.675.535.000	Dinas P3APPKB
2	9		PANGAN												
2	9		DINAS KETAHANAN PANGAN					13.320.960.367		15.270.270.367		15.539.110.149		44.130.340.883	
2	9	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	9.835.982.467	100	10.231.292.467	100	10.454.307.439	100	30.521.582.373	Dinas Ketapang
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1. Ketersediaan pangan utama (beras)	ton	309.429	303.562	294.000.000	311.175	490.000.000	326.076	490.000.000	326.076	1.274.000.000	Dinas Ketapang
				2. Ketersediaan Energi	(Kkl/Kap/hari)	3.523	3.200		3.250		3.300		3.300		
				3. Ketersediaan Protein	(Gr/kap/hari)	79,02	64		65		66		66		
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.Koefisien variasi pangan strategis (beras, cabe merah,bawang merah, kedelai)	CVBeras	1,10	≤ 5%	2.120.977.900	≤ 5%	2.868.977.900	≤ 5%	2.894.802.710	≤ 5%	7.884.758.510	Dinas Ketapang
					CV Cabe Merah	14,15	≤ 25%		≤ 25%		≤ 25%				
					CVBawang Merah	5,87	≤ 25%		≤ 25%		≤ 25%				
					CV Kedelai	1,38	≤ 5%		≤ 5%		≤ 5%				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				2. Konsumsi Energi	(Kkl/Kap/hari)	20,28	2.075,9		2.087,9		2100		2100		
				3.Konsumsi Protein	(Gr/kap/hari)	61,3	62,0		63		64		64		
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan	Persen	16,66	15,76	250.000.000	14,41	500.000.000	13,51	500.000.000	13,51	1.250.000.000	Dinas Ketapang
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Persen	77	82,35	820.000.000	83,8	1.180.000.000	85,2	1.200.000.000	85,2	3.200.000.000	Dinas Ketapang
2	10		PERTANAHAN												
2	10		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					39.300.000.000		43.750.000.000		48.400.000.000		48.400.000.000	
2	10	1	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Tersedianya Tanah untuk Pengembangan bagi Kepentingan Umum	Ha	0	500	19.000.000.000	1000	21.000.000.000	1500	23.000.000.000	15000 Ha	23.000.000.000	Dinas PRKP & Pertanahan
2	10	2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Terselesaikannya Pemberian santunan tanah pembangunan	org/bdg	0	80 org/bdg	19.900.000.000	90 org/bdg	22.150.000.000	100 org/bdg	24.800.000.000	100 org/bdg	24.800.000.000	Dinas PRKP & Pertanahan
2	10	3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terlaksananya Penatagunaan Tanah	Persen	0	85	400.000.000	95	600.000.000	98	600.000.000	98%	600.000.000	Dinas PRKP & Pertanahan
2	11		LINGKUNGAN HIDUP												
2	11		DINAS LINGKUNGAN HIDUP					12.945.284.600		16.512.077.290		19.681.138.884		49.138.500.774	
2	11	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	100	8.970.284.600	100	10.315.827.290	100	11.863.201.384	100	31.149.313.274	D L H

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Daerah Provinsi											
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan keterpenuhan dokumen perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup (%)	Persen	100	100	550.000.000	100	172.500.000	100	798.375.000	100	1.520.875.000	D L H
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (%)	Persen	90	90	1.275.000.000	100	1.466.250.000	100	1.686.187.500	100	4.427.437.500	D L H
2	11	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Pengelolaan Taman Keanekaragam Hayati dan Ruang Terbuka Hijau (%)	Persen	20	20	150.000.000	50	372.500.000	100	428.375.000	100	950.875.000	D L H
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun(%)	Persen	100	100	200.000.000	100	230.000.000	100	264.500.000	100	694.500.000	D L H
2	11	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupanpembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)(%)	Persen	100	100	550.000.000	100	687.500.000	100	859.375.000	100	2.096.875.000	D L H
2	11	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUMADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG	Cakupan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat	Persen	-	20	50.000.000	50	62.500.000	100	93.750.000	100	206.250.000	D L H

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			TERKAIT DENGAN PPLH	(MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH (%)											
2	11	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DANPENYULUHANLINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan kapasitas lingkungan hidup bagi masyarakat(%)	Persen	-	20	150.000.000	50	172.500.000	100	200.000.000	100	522.500.000	D L H
2	11	9	PROGRAMPENGHARGAANLINGKUNGANHIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peningkatan persentase jumlah penghargaan lingkungan hidup (%)	Persen	100	100	250.000.000	100	287.500.000	100	330.625.000	100	868.125.000	D L H
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penyelesaian sengketa lingkungan hidup (%)	Persen	100	100	150.000.000	100	172.500.000	100	198.375.000	100	520.875.000	D L H
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pengelolaanpers ampahan regional (%)	Persen	30	43	650.000.000	57	2.572.500.000	71	2.958.375.000	100	6.180.875.000	D L H
2	12		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
2	12		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATAN SIPIL				9.663.218.577		12.096.523.221		15.151.404.026		15.151.404.026		
2	12	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	8.293.218.577	100	10.366.523.221	100	12.958.154.026	100	12.958.154.026	Dinas Dukcapil
2	12	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran	Persen	87	85	500.000.000	90	625.000.000	95	781.250.000	95	781.250.000	Dinas Dukcapil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Penduduk Tingkat Kab/Kota se Sultra											
2	12	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil bagi Aparatur Disdukcapil	Persen	70	85	450.000.000	90	630.000.000	95	882.000.000	100	882.000.000	Dinas Dukcapil
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dengan baik	Persen	70	72	350.000.000	75	400.000.000	80	450.000.000	85	450.000.000	Dinas Dukcapil
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	80	85	70.000.000	87	75.000.000	90	80.000.000	95	80.000.000	Dinas Dukcapil
2	13		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
2	13		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					17.072.414.365		18.813.425.092		22.295.446.545		58.181.286.002	
2	13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	13.692.587.565	100	15.061.846.322	100	17.800.363.835	100	46.554.797.722	D P M D
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penatausahaan Pemerintahan Desa	Persen	0	3	250.000.000	6	275.000.000	9	325.000.000	18	850.000.000	D P M D
2	13	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerja Sama Desa	Dokumen	15	17	198.444.400	20	218.288.840	22	257.977.720	59	674.710.960	D P M D
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persen	80	85	675.385.800	90	776.693.670	95	979.309.410	95	2.431.388.880	D P M D

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pembinaan, Penataan dan Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, Lembaga Ekonomi Desa, Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	Persen	85	90	2.255.996.600	95	2.481.596.260	100	2.932.795.580	100	7.670.388.440	D P M D
2	14		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
2	14		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB				1.590.768.500		1.701.032.700		1.832.775.600		5.124.576.800		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	persen	50	56	460.824.000	61	491.860.100	67	529.329.000	67	1.482.013.100	Dinas P3APPKB
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	persen	48,00	48,76	476.538.000	49	513.941.800	49,52	554.335.900	49,52	1.544.815.700	Dinas P3APPKB
				Angka kelahiran	Kelahiran	30,20	29,2		29		28,20		28,20		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	per 1000 WUS 15-19 tahun										
2	14	04	PROGRAMPEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	52,36	54,36	653.406.500	56,36	695.230.800	58,36	749.110.700	58,36	2.097.748.000	Dinas P3APPKB
2	15		PERHUBUNGAN												
2	15		DINAS PERHUBUNGAN				45.832.969.000		49.659.517.450		53.743.650.823		53.743.650.823		
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	28.479.969.000	100	29.903.967.450	100	31.399.165.823	100	31.399.165.823	Dishub
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Terminal Tipe B	Persen	35,29	47,06	4.008.000.000	58,82	4.408.800.000	64,71	5.290.560.000	64,71	5.290.560.000	Dishub
				Persentase Perlengkapan Jalan Provinsi Yang Terpasang		28,12	38,23	1.500.000.000	49,55	1.725.000.000	65,13	2.070.000.000	65,13	2.070.000.000	
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Meningkatnya Pelabuhan Regional Operasional dalam kondisi layak	Persen	65,38	73,08	11.845.000.000	80,77	13.621.750.000	88,46	14.983.925.000	88,46	14.983.925.000	Dishub
2	16		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
2	16		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				20.024.000.000		21.025.200.000		22.076.460.000		63.125.660.000		
2	16	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	100	9.931.000.000	100	10.427.550.000	100	10.948.927.500	100	31.307.477.500	Diskominfo

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Daerah Provinsi											
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik	Laporan	1	1	6.723.350.000	1	7.059.517.500	1	7.412.493.375	1	21.195.360.875	Diskominfo
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Aplikasi Informatika yang Dikelola dan Terhubung Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Unit	0	3	3.369.650.000	4	3.538.132.500	5	3.715.039.125	5	10.622.821.625	Diskominfo
2	17		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												
2	17		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH					13.181.000.000		14.282.550.000		14.706.427.500		42.169.977.500	
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	9.031.000.000	100	9.982.550.000	100	10.206.427.500	100	29.219.977.500	Dinkop & UMKM
2	17	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan pinjam	Unit KSP dan USP	888	17	200.000.000	17	200.000.000	17	200.000.000	939	600.000.000	Dinkop & UMKM
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pengawasan dan Pemeriksaan	Unit Koperasi	2.976	51	300.000.000	51	300.000.000	51	300.000.000	3.129	900.000.000	Dinkop & UMKM
2	17	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	Unit KSP dan USP	414	34	250.000.000	34	200.000.000	34	200.000.000	516	650.000.000	Dinkop & UMKM
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Anggota Koperasi dan UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Unit KUMKM	2.213	800	2.300.000.000	900	2.500.000.000	1.000	2.700.000.000	4.913	7.500.000.000	Dinkop & UMKM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	17	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Jumlah Koperasi Aktif	Persen	68	69	300.000.000	72	300.000.000	75	300.000.000	75	900.000.000	Dinkop & UMKM
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang tumbuh dan berkembang untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri	Unit	249.398	1.000	500.000.000	1.500	500.000.000	2.000	500.000.000	253.898	1.500.000.000	Dinkop & UMKM
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Unit	48.928	300	300.000.000	500	300.000.000	700	300.000.000	50.428	900.000.000	Dinkop & UMKM
2	18		PENANAMAN MODAL												
2	18		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP				13.200.000.000		15.850.000.000		18.600.000.000		47.650.000.000		
2	18	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	Kategori/ Poin	A (-)	A (-)	8.000.000.000	A	9.000.000.000	A	10.000.000.000	A	27.000.000.000	Dinas PM & PTSP
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang dibuat/dievaluasi	Dokumen	1	2	600.000.000	2	700.000.000	3	900.000.000	10	2.200.000.000	Dinas PM & PTSP
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah media yang digunakan dalam Penyelenggaraan Promosi penanaman modal	Media	5	5	1.500.000.000	5	2.000.000.000	5	2.500.000.000	20	6.000.000.000	Dinas PM & PTSP
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas	Poin	84,32	85	1.000.000.000	86	1.500.000.000	87	2.000.000.000	87	4.500.000.000	Dinas PM & PTSP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				penyelenggaraan perizinan dan non perizinan											
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi PMDN/PMA	Triliun Rupiah	21,73	22	2.000.000.000	23	2.500.000.000	25	3.000.000.000	25	7.500.000.000	Dinas PM & PTSP
2	18	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Persentasi Pemanfaatan sistem informasi perizinan dan penanaman modal	Persen	100	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	450.000.000	Dinas PM & PTSP
2	19		KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA												
2	19		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					33.991.232.188		39.089.917.016		44.953.404.569		118.034.553.773	
2	19	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	10.288.680.042	100	11.831.982.048	100	13.606.779.356	100	35.727.441.446	Diskemudora
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya saing SDM Kepemudaan	Persen	3.159.127.750	100	3.632.996.912	100	4.177.946.449	100	4.804.638.416	100	12.615.581.777	Diskemudora
2	19	3	PROGRAMPENGEMBANGANDAYASAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan dan Pengembangan daya saing SDM Keolahragaan	Persen	16.866.365.160	100	19.396.319.934	100	22.305.767.924	100	25.651.633.113	100	67.353.720.971	Diskemudora
2	19	4	PROGRAMPENGEMBANGANKAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persen	585.422.000	100	673.235.300	100	774.220.595	100	890.353.684	100	2.337.809.579	Diskemudora

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2	20		STATISTIK												
2	20		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					716.700.000		752.535.000		790.161.750		2.259.396.750	
2	20	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggraan Statistik Sektoral	Dokumen	1	1	716.700.000	1	752.535.000	1	790.161.750	3	2.259.396.750	Diskominfo
2	21		PERSANDIAN												
2	21		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					701.600.000		73.6680.000		572.859.000		2.211.794.000	
2	21	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	20	30	701.600.000	40	73.6680.000	50	572.859.000	50	2.211.794.000	Diskominfo
2	22		KEBUDAYAAN												
2	22		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					11.766.449.514		17.649.674.271		26.474.511.407		55.890.635.192	
2	22	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlestarinya Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persen	13%	14,71%	6.708.368.006	16,21%	10.062.552.008	17,71%	15.093.828.012	19,21%	31.864.748.026	Dinas Dikbud
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Terlestarinya Kesenian Tradisional	Persen	6%	7%	612.033.093	9%	918.049.640	10%	1.377.074.459	12%	2.907.157.192	Dinas Dikbud
2	22	3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Terlestarinya Sejara Sulawesi Tenggara	Persen	100	100	3.501.669.381	100	5.252.504.072	100	7.878.756.107	100	16.632.929.560	Dinas Dikbud
2	22	4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarinya Cagar Budaya	Persen	25%	27%	269.220.750	28%	403.831.125	30%	605.746.688	31%	1.278.798.563	Dinas Dikbud
2	22	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Terlestarinya Muesum	Persen	100	100	675.158.285	100	1.012.737.427	100	1.519.106.140	100	3.207.001.851	Dinas Dikbud
2	23		PERPUSTAKAAN												
2	23		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					40.035.000.000		43.331.000.000		46.165.000.000		46.165.000.000	
2	23	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan	Persen	100	100	37.705.000.000	100	40.651.000.000	100	42.950.000.000	100	42.950.000.000	Dinas Perpus & Arsip

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pemerintahan Daerah Provinsi											
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Pembinaan Perpustakaan	Persen	44,78	28,24	1.830.000.000	32,95	2.135.000.000	38,81	2.515.000.000	38,81	2.515.000.000	Dinas Perpus & Arsip
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Cakupan Pelestarian Koleksi Nasional dan Maskah Kuno	Persen	5,55	28,65	500.000.000	31,23	545.000.000	40,11	700.000.000	40,11	700.000.000	Dinas Perpus & Arsip
2	24		KEARSIPAN												
2	24		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					1.102.000.000		1.290.000.000		1.605.000.000		1.605.000.000	
2	24	1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan Pengelolaan Arsip	Persen	13,53	27,83	752.000.000	32,20	870.000.000	39,97	1.080.000.000	39,97	1.080.000.000	Dinas Perpus & Arsip
2	24	2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	18,8	27,03	350.000.000	32,43	420.000.000	40,54	525.000.000	40,54	525.000.000	Dinas Perpus & Arsip
3			URUSAN PILIHAN												
3	25		KELAUTAN DAN PERIKANAN												
3	25		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					89.100.000.000		91.550.000.000		93.980.000.000		93.980.000.000	
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	21.000.000.000	100	21.000.000.000	100	21.000.000.000	100	21.000.000.000	D K P
3	25	2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN,PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Perairan Laut Yang Memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	Hektar	49.433	302.954	3.000.000.000	427.302	3.100.000.000	456.891	3.200.000.000	456.891	3.200.000.000	D K P
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	259	260	40.000.000.000	265	41.000.000.000	270	42.000.000.000	270	42.000.000.000	D K P

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggung Jawab		
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir RPD	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Tangkap											
				Nilai Tukar Nelayan	NTN	104	105	10.000.000.000	108	11.000.000.000	110	12.000.000.000	110	12.000.000.000	
				Jumlah Sarana Perikanan Tangkap Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Unit	210	215	200.000.000	220	250.000.000	220	280.000.000	220	280.000.000	
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	406.324	410.000	8.000.000.000	415.000	8.100.000.000	420.000	8.200.000.000	420.000	8.200.000.000	D K P
				Jumlah Produksi benur/udang dan benih ikan	Juta Ekor	37,00	37,20	1.000.000.000	37,30	1.100.000.000	37,50	1.200.000.000	37,50	1.200.000.000	
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	Kelompok	153	155	4.000.000.000	158	4.100.000.000	160	4.200.000.000	160	4.200.000.000	
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kap/ Tahun	71	71	1.400.000.000	72	1.400.000.000	72	1.400.000.000	72	1.400.000.000	D K P
				Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Unit	1.636	1.650	500.000.000	1.650	500.000.000	1.670	500.000.000	1.670	500.000.000	
3	26		PARIWISATA												
3	26		DINAS PARIWISATA					26.576.681.650		27.905.515.733		29.300.791.519		83.782.988.902	
3	26	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	5.044.728.150	100	5.296.964.558	100	5.561.812.785	100	15.903.505.493	Dispar
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rata - rata Lama Bepergian Wisatawan	Hari	7,55	7,63	15.066.402.800	7,70	15.819.722.940	7,78	16.610.709.087	7,70	47.496.834.827	Dispar
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	4.832.290	6.666.000	4.087.090.700	6.732.660	4.291.445.235	6.799.987	4.506.017.497	20.198.647	12.884.553.432	Dispar
3	26	4	PROGRAM	Jumlah Usulan	Usulan	1	1	1.695.960.000	1	1.780.758.000	1	1.869.795.900	3	5.346.513.900	Dispar

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Produk Ekraf yang difasilitasi / mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual											
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM pariwisata dan Ekraf yang dibina	Orang	100	200	682.500.000	200	716.625.000	200	752.456.250	600	2.151.581.250	Dispar
3	27		PERTANIAN												
3	27		DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN				125.526.664.000		114.466.120.000		130.615.004.000		130.615.004.000		
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	46.953.700.000	100	49.133.400.000	100	52.042.040.000	100	52.042.040.000	Distanak
3	27	2	PROGRAMPENYEDIAANDA NPENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Sarana Pertanian yang Tersedia dan Dikembangkan	Laporan	3	6 Laporan	27.848.580.000	6 Laporan	23.367.400.000	6 Laporan	27.848.580.000	6 Laporan	27.848.580.000	Distanak
3	27	3	PROGRAMPENYEDIAANDA NPENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Prasarana Pertanian yang Tersedia dan Dikembangkan	Laporan	1	1 Laporan	32.328.384.000	1 Laporan	25.260.320.000	1 Laporan	32.328.384.000	1 Laporan	32.328.384.000	Distanak
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Kasus Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dikendalikan	Laporan	3	5	5.760.000.000	5	4.800.000.000	5	5.760.000.000	15	5.760.000.000	Distanak
3	27	5	PROGRAMPENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Kasus Bencana Pertanian yang Dikendalikan dan Ditanggulangi	Laporan	1	1	6.816.000.000	1	7.530.000.000	1	6.816.000.000	3	6.816.000.000	Distanak
3	27	6	PROGRAM PENYULUHAN	Persentase	Persen	5	5	5.820.000.000	5	4.375.000.000	5	5.820.000.000	5	5.820.000.000	Distanak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			PERTANIAN	Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani											
3	27		DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA				50.399.522.000		67.724.839.000		78.195.918.000		196.320.279.000		
3	27	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	28.729.038.000	100	30.941.942.000	100	34.042.986.000	100	93.713.966.000	Disbunhorti
3	27	2	PROGRAMPENYEDIAANDANPENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Komoditi Unggulan Perkebunan (Kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) dan Hortikultura (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk)	Ton	1. Bun : 212.714 Ton 2. Horti: 38.630 Ton	1. Bun : 212.714 Ton 2. Horti: 38.630 Ton	11.174.850.000	1. Bun: 213.738 Ton 2. Horti: 38.980 Ton	13.812.115.000	1. Bun: 214.763 Ton 2. Horti: 39.330 Ton	17.217.871.000	1. Bun: 214.763 Ton 2. Horti: 39.330 Ton	42.204.836.000	Disbunhorti
3	27	3	PROGRAMPENYEDIAANDANPENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Luas Lahan Produktif Komoditi Unggulan Perkebunan (Kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) dan Hortikultura (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk)	Ha	1. Bun : 348.946 Ha 2. Horti: 3.600 Ha	1. Bun : 348.946 Ha 2. Horti: 3.600 Ha	300.000.000	1. Bun: 348.996 Ha 2. Horti: 3.625 Ha	9.750.000.000	1. Bun: 349.046 Ha 2. Horti: 3.650 Ha	10.725.000.000	1. Bun: 349.046 Ha 2. Horti: 3.650 Ha	20.775.000.000	Disbunhorti
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	Presentase luas areal	Persen	1. Bun : 11,73%	1. Bun : 11,73%	250.000.000	1. Bun: 35,19%	485.000.000	1. Bun: 46,19%	541.000.000	1. Bun: 46,19%	1.276.000.000	Disbunhorti

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			BENCANA PERTANIAN	pengendalianOP T Perkebunan dan Hortikultura		2. Horti: 13,71%	2. Horti: 13,71%		2. Horti: 55,36 %		2. Horti: 65,36 %		2. Horti: 65,36 %		
3	27	5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah izin usaha Perkebunan dan Hortikultura yang terbit	IUP	0	0	-	2	250.000.000	4	500.000.000	4	750.000.000	Disbunhorti
3	27	6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani yang aktif	Persen	60	60	9.945.634.000	75	12.485.782.000	80	15.169.061.000	80%	37.600.477.000	Disbunhorti
3	28		KEHUTANAN												
3	28		DINAS KEHUTANAN					126.055.412.000		164.956.604.000		137.778.615.200		428.790.631.200	
3	28	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	77.696.250.000	100	115.315.992.000	100	85.106.662.700	100	278.118.904.700	Dishut
3	28	2	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dokumen RPHJP	Dokumen	0	5	39.742.162.000	5	40.319.862.000	5	42.639.127.500	15	122.701.151.500	Dishut
				Luas Rehabilitasi Lahan kritis dan kawasan hutan	Ha	980	1215		1215		1215		3.750		
				Produksi Hasil Hutan Kayu	M3	56.000	40.000		40.000		40.000		120.000		
				Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	365	500		500		500		1.500		
				Persentase Penurunan luas kerusakan kawasan hutan	persen	1	1		1		1		3		
3	28	3	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Ha	225	100	1.685.000.000	100	1.952.500.000	100	2.037.750.000	300	5.675.250.000	Dishut
3	28	4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Evaluasi Pengelolaan DAS	Unit	4	3	1.257.000.000	3	1.312.750.000	3	1.334.025.000	9	3.903.775.000	Dishut
3	28	5	PROGRAM PENDIDIKAN	Luas Fasilitasizin	Ha/Tahu	10.000		5.675.000.000		6.055.500.000		6.661.050.000		18.391.550.000	Dishut

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKT DIBIDANG KEHUTANAN	Perhutanan Sosial	n		4	10						30	
				Jumlah KTH yang meningkat klasifikasinya	Unit				10		10				
				Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Pendamping Kehutanan	Orang	53			55		55		55		
3	29		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL												
3	29		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				30.426.355.818		53.895.978.041		24.875.178.253		113.362.892.254		
3	29	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	20.686.043.053	100	43.331.298.041	100	13.649.021.204	100	77.314.432.872	Dinas ESDM
3	29	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Meningkatnya Jumlah data dan informasi kegeologian yang disebar-luaskan	Dokumen dan Laporan	2	3	1.075.000.000	3	1.133.800.000	4	1.161.157.049	21	2.295.162.049	Dinas ESDM
3	29	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Meningkatnya kontribusi penerimaan daerah bidang ESDM	Rp	259.307.258.742	206.073.451.898	280.000.000	219.643.874.507	296.800.000	235.018.937.944	305.000.000	14.234.519.821	900.970.000	Dinas ESDM
				Reklamasi lahan pasca tambang,	Ha	111	135,564	633.000.000	142,34	749.080.000	146,46	790.000.000	794,98	2.868.534.808	
				Meningkatnya kepatuhan pemegang IUP dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan	Ton	112.489,88	13.856.832	275.000.000	14.965.379	305.000.000	16.012.955	345.000.000	80.008.066	1.328.960.000	
3	29	4	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Bauran Energi Baru Terbarukan	Persen		4'82	7.477.312.765	5,5	8.080.000.000	7,21	8.625.000.000	96	28.654.832.525	Dinas ESDM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Terhadap Ketenagalistrikan											
3	29	5	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi	Persen		99,50		99,90		100		100		Dinas ESDM
				Rasio Desa Berlistrik	Persen		99,90	-	100	-	100	-	100	-	
3	30		PERDAGANGAN												
3	30		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				18.895.811.807		29.550.000.000		36.900.000.000		36.900.000.000		
3	30	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	12.695.811.807	100	15.000.000.000	100	20.000.000.000	100	20.000.000.000	Disperindag
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Jumlah Izin dan Pendaftaran Perusahaan	Persen	-	50	850.000.000	60	1.105.000.000	80	1.436.500.000	80	1.867.450.000	Disperindag
3	30	3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai Perdagangan Antar Pulau	Milyar	1762	3500	350.000.000	4000	450.000.000	4500	500.000.000	4500	500.000.000	Disperindag
3	30	4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1	1	5.000.000.000	2	13.000.000.000	3	15.000.000.000	3	15.000.000.000	Disperindag
3	30	5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaksanaan promosi penggunaan porduk dalam negeri	Kali	1	1	100.000.000	2	200.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	Disperindag
3	30	6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	US\$	1,002 Milyar	2,2 Milyar	300.000.000	2,5 Milyar	400.000.000	3,00 Milyar	500.000.000	3,00 Milyar	500.000.000	Disperindag
3	30	7	PROGRAMSTANDARDISASI DANPERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Komoditi	Kali	6	16	450.000.000	25	500.000.000	36	600.000.000	36	600.000.000	Disperindag
				Jumlah Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Kali	17	17		25		30		30		
3	31		PERINDUSTRIAN												

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3	31		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					7.230.000.000		7.695.000.000		8.743.500.000		9.326.550.000	
3	31	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Jumlah Industri yang mengolah sumber daya daerah	Persen	1,73%	2,2%	5.950.000.000	2,5%	6.000.000.000	3,0%	6.500.000.000	3,0%	6.500.000.000	Disperindag
				Persentase Peningkatan Nilai Produksi Industri yang mengolah sumber daya daerah	Persen	1,14%	17,82%		23,17%		30,12%		30,12%		
3	31	2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Koordinasi dengan instansi terkait penerbit izin usaha industry	kali	0	18	130.000.000	18	200.000.000	18	300.000.000	18	300.000.000	Disperindag
3	31	3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	0	80	1.150.000.000	90	1.495.000.000	100	1.943.500.000	100	2.526.550.000	Disperindag
3	32		TRANSMIGRASI												
3	32		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					940.000.000		1.010.000.000		1.080.000.000		3.030.000.000	
3	32	1	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya dan pengurusan legal aspek pertanahannya	Kawasan (SP)	1	4	280.000.000	4	290.000.000	3	300.000.000	11	870.000.000	Distransnaker
3	32	2	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah KK transmigran yang ditempatkan	KK	500	200	60.000.000	200	70.000.000	200	80.000.000	600	210.000.000	Distransnaker
3	32	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Indeks perkembangan kawasan transmigrasi	Kimtrans	11	4	600.000.000	4	650.000.000	3	700.000.000	11	1.950.000.000	Distransnaker
4	01		UNSUR PENUNJANG												

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcame)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			URUSAN													
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					693.510.575.401		777.024.761.651		871.254.250.865		1.961.659.259.521		
4	01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	186.345.455.096	100	193.784.873.300	100	200.528.379.262	100	200.528.379.262	Setda	
4	01	2	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	100	76.707.091.361	100	88.213.155.065	100	101.445.128.325	100	266.365.374.751	Setda	
4	01	3	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Cakupan Penataan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100	100	2.239.052.400	100	2.574.910.260	100	2.961.146.799	100	7.775.109.459	Setda	
4	01	4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Cakupan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah yang baik	Persen	100	100	5.294.898.400	100	6.089.133.160	100	7.002.503.134	100	18.386.534.694	Setda	
4	01	5	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pembinaan Mental spiritual dan Pengembangan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	414.090.504.480	100	476.204.080.152	100	547.634.692.175	100	1.437.929.276.807	Setda	
4	01	6	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Cakupan Penyusunan Perundang- undangan dan bantuan hukum yang difasilitasi	Persen	100	100	1.941.232.000	100	2.232.416.800	100	2.567.279.320	100	6.740.928.120	Setda	
4	01	7	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Pengelolaan Kebijakan Administrasi	Persen	100	100	2.563.362.464	100	2.947.866.834	100	3.390.046.859	100	8.901.276.156	Setda	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Perekonomian											
4	01	8	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG & JASA	Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa yang lebih terintegrasi, terpadu, efektif dan efisien	Persen	100	100	2.678.967.200	100	3.080.812.280	100	3.542.934.122	100	9.302.713.602	Setda
4	01	9	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Cakupan Pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan AdministrasiPembangunan Daerah	Persen	100	100	1.650.012.000	100	1.897.513.800	100	2.182.140.870	100	5.729.666.670	Setda
4	02		SEKRETARIAT DPRD				111.845.771.217		123.030.348.339		135.333.383.173		135.333.383.173		
4	02	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	61.686.730.054	100	67.855.403.059	100	74.640.943.365	100	74.640.943.365	Set. DPRD
4	02	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD	Persentase peningkatan Dukungan pelaksanaan tugas & Fungsi DPRD DPRD	Persen	100	100	50.159.041.163	100	55.174.945.279	100	60.692.439.807	100	60.692.439.807	Set. DPRD
5	01		PERENCANAAN												
5	01		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				29.370.606.606		32.307.667.267		35.538.433.994		97.216.707.865		
5	01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	19.115.554.227	100	21.027.109.650	100	23.129.820.615	100	63.272.484.491	Bappeda
5	01	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	Persentase Terlaksananya	persen	100	100	3.297.552.500	100	3.627.307.750	100	3.990.038.525	100	10.914.898.775	Bappeda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan, Pengerndalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah											
5	01	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	persen	100	100	6.957.499.879	100	7.653.249.867	100	8.418.574.854	100	23029324599	Bappeda
5	02		KEUANGAN												
5	02		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				1.056.730.401.221		1.109.566.921.282		1.165.045.267.346		3.331.342.589.848		
5	02	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	164.766.017.477	100	173.004.318.350	100	181.654.534.267,90	100	519.424.870.094,82	B P K A D
5	02	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OpiniLaporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	886.149.584.786	WTP	930.457.064.025	WTP	976.979.917.226,01	WTP	2.793.586.566.036,29	B P K A D
5	02	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Peresentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	0,75	WTP	5.814.798.959	WTP	6.105.538.906	WTP	6.410.815.851,75	WTP	18.331.153.716,67	B P K A D
5	02		BADAN PENDAPATAN DAERAH				101.500.300.000		111.524.545.000		122.551.214.500		122.551.214.500		
5	02	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	96.880.300.000	100	106.442.545.000	100	116.961.014.500	100	116.961.014.500	Bapenda
5	02	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentasi Peningkatan Pendapatan	Persen	5	5	4.620.000.000	5	5.082.000.000	5	5.590.200.000	5	5.590.200.000	Bapenda

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcame)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Daerah											
5	03		KEPEGAWAIAN												
5	03		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				27.400.000.000		30.140.000.000		33.154.000.000		90.694.000.000		
5	03	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	22.000.000.000	100	24.200.000.000	100	26.620.000.000	100	72.820.000.000	B K D
5	03	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan urusan Kepegawaian	Persen	100	100%	5.400.000.000	100%	5.940.000.000	100%	6.534.000.000	100%	17.874.000.000	B K D
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
5	04		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				35.051.320.065		40.309.018.074		46.355.370.784		53.308.676.402		
5	04	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	26.624.082.575	100	30.617.694.961	100	35.210.349.205	100	40.491.901.586	B P S D M
5	04	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur (Melalui Sertifikasi/Uji Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi)	Orang	649	750 Orang	8.427.237.490	800 Orang	9.691.323.113	1000 Orang	11.145.021.579	1150 Orang	12.816.774.816	B P S D M
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
5	05		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				15.899.600.000		16.542.150.000		17.655.600.000		50.097.350.000		
5	05	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan	Persen	100	100	7.849.600.000	100	7.687.150.000	100	7.915.100.000	100	23.451.850.000	B R I D A

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Pemerintahan Daerah Provinsi											
5	05	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan	Persen	40	40	5.000.000.000	60	5.500.000.000	80	6.050.000.000	100	16.550.000.000	B R I D A
				Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi Daerah	Persen	40	40	3.050.000.000	60	3.355.000.000	80	3.690.500.000	100	10.095.500.000	B R I D A
5	07		BADAN PENGHUBUNG PROV. SULTRA				17.328.114.750		18.150.828.268		19.634.894.529		52.563.837.547		
5	07	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	16.578.114.750	100	17.300.828.268	100	18.684.894.529	100	52.563.837.547	Badan Penghubung
5	07	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Terpenuhinya Operasional Penunjang yang bersifat Rutin Urusan Pemerintahan Daerah Prov. Sultra	Persen	60	100	750.000.000	100	850.000.000	100	950.000.000	100	2.550.000.000	Badan Penghubung
6	01		PENGAWASAN												
6	01		INSPEKTORAT DAERAH				28.895.100.000		30.050.904.000		31.270.300.160		90.216.304.160		
6	01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	20.147.100.000	100	20.952.984.000	100	21.808.463.360	100	62.908.547.360	Inspektorat Daerah
6	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah, serta	Persen	98	98	7.198.000.000	98	7.485.920.000	98	7.785.356.800	98	22.469.276.800	Inspektorat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
6	01	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Kualitas APIP dalam Rangka Profesionalisme Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Persen	92	93	1.550.000.000	94	1.612.000.000	95	1.676.480.000	97	4.838.480.000	Inspektorat Daerah
8			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
8	01		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				17.728.679.064		9.287.167.110		10.597.167.110		37.483.312.116		
8	01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100	100	7.242.167.110	100	8.342.167.110	100	9.442.167.110	100	25.026.501.331	Badan Kesbangpol
8	01	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Peningkatan Pelaksanaan Ideologi Pancasila,Wawasan Kebangsaan,Bela Negara dan Karakter Kebangsaan Kepada Instansi/Lembaga /Organisasi dan Masyarakat	Orang	100	100	6.347.983.077	200	105.000.000	300	157.500.000	600 ORANG	6.610.483.077	Badan Kesbangpol
8	01	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK	Persentase Tingkat	Persen	88,29	90	1.673.724.537	95	525.000.000	95	525.000.000	95	2.594.023.369	Badan Kesbangpol

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan Pemilukada											
8	01	4	PROGRAM PEMBERDAYAANDAN PENGAWASANORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Jumlah Ormas yang terdaftar dalam setiap tahunnya	Persen	80	80	421.660.227	85	105.000.000	95	157.500.000	95	684.160.227	Badan Kesbangpol
8	01	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Pelaksanaan evaluasi nilai-nilai budaya di Sulawesi Tenggara Tenggara setiap tahunnya	Kegiatan	100	100	1.937.831.034	100	105.000.000	100	157.500.000	300	2.200.331.034	Badan Kesbangpol
8	01	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah konflik di daerah setiap tahunnya	Persen	70	70	105.313.077	75	105.000.000	80	157.500.000	80	367.813.077	Badan Kesbangpol

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah serta indikator kinerja penyelenggara pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Baubau tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Tahun		
				2024	2025	2026
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,57	6,0-6,5	6,5-7,0	7,0-7,5
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,36	2,75-3,0	2,50-2,75	2,25-2,50
3.	Gini Ratio	Nilai	0,390	0,380-0,385	0,375-0,380	0,350-0,375
4.	Tingkat Kemiskinan	persen	11,27	10,5-11,0	10,0-10,5	9,5-10,0
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	72,23	72,50-72,65	72,65-73,00	73,00-73,40

8.2. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator kinerja Utama (IKU) daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 pada tabel berikut ini:

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun		
			2024	2025	2026
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Persen	10,63	12,01	13,39
2.	Harapan Lama Sekolah	Persen	14,87	16,06	17,24
3.	Angka Harapan Hidup saat lahir	Tahun	72,02	72,27	72,42
4.	Pengeluaran Perkapita disesuaikan	Juta Rupiah	10.046	10.777	11.148
5.	Gini Ratio	Nilai	0,336	0,333	0,330

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun		
			2024	2025	2026
6.	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	86,1	87,5	89,0
7.	Prevalensi Stunting	Persen	16,79	15	14
8.	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, & Perikanan.	Persen	2,75	2,89	2,97
9.	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertambangan dan Penggalian	Persen	1,53	1,62	1,69
10.	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Industri Pengolahan	Persen	5,72	5,94	6,08
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,12	2,85	2,56
12.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen	1,24	1,66	1,93
13.	Indeks Infrastruktur	Persen	90,15	91	92,55
14.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	77,00	77,15	77,25
15.	Indeks Resiko Bencana	Nilai	157,02	157,01	157
16.	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	BB	BB	BB
17.	Opini Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP
18.	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Kategori	B	B	B

Catatan : Indikator Kinerja Utama diambil dari Indikator Sasaran RPD

8.3. Indikator Kinerja Kunci

Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8.3.
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Tahunan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
Aspek Pelayanan Umum							
A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib							
Pelayanan Dasar							
1.	Pendidikan						
1.1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	85,64	100	100	100	100
1.2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Persen	79,29	100	100	100	100
2.	Kesehatan						
2.1.	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Nilai	1,4	1,49	1,62	1,75	1,75
2.2.	Persentase SPM RS yang terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100
2.3.	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Persen	100	100	100	100	100
2.4.	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100	100	100	100	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	65,02	68	70	72	72
3.2.	Rasio kemantapan jalan	Persen	84.11	87	88	89	89

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Tahunan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
3.3.	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.	Orang	60	60	60	60	60
3.4	Cakupan perpipaan jaringan air minum	Dokumen	-	2	3	3	3
3.5	Cakupan penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	Sistem jaringan	15	40	46	50	50
3.6	Cakupan Bangunan Gedung dan fasilitas umum pemda sesuai standard an kriteria	Unit	86	197	254	258	258
3.7	Tersedianya RTR Kab/kota yang mendapat rekom dan dokumen RTR Provinsi yang tersusun	Dokumen	6	10	10	10	10
4. Perumahan Rakyat							
4.1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100	100	100	100
4.2.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	100	100	100	100
4.3.	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 ha yang ditangani	Persen	0,1	0,25	0,50	1	1
4.4.	Persentase Satuan Perumahan yang dilengkapi PSU	Persen	4,82	6,5	10	15	15
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
5.1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	80	85	90	95	95
6. Sosial							
6.1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	17	25	25	50	50
6.2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	75	80	80	80	80
6.3.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	16	50	50	50	50
6.4.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persen	100	100	100	100	100
Pelayanan Non Dasar							
1. Tenaga Kerja							
1.1.	Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100
1.2.	Persentase peningkatan tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	15,49	17,50	20	25	25
1.3.	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	60	65	70	75	75
1.4.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	1.93	2,2	2,3	2,5	2,5
1.5.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	23,62	25	27,25	30	30

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Tahunan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
1.6.	Persentase perusahaan yang menerapkan norma hukum ketenagakerjaan	Persen	1,71	2	2,25	2,50	2,50
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	-	10	12,5	15	15
2.2.	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Nilai	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6
2.3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Nilai	15,71	15,51	15,31	15,11	15,11
3.	Pangan						
3.1.	Persentase cadangan pangan	Persen	33	33	33	34,0	100
4.	Pertanahan						
4.1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	98	98	98	98	98
4.2.	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persen	93	95	95	97	98
4.3.	Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota	Persen	85	90	95	95	95
5.	Lingkungan Hidup						
5.1.	Tingkat Keterpenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100
5.2.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Perizinan Lingkungan Hidup	Persen	70	80	85	90	90
5.3.	Indeks Kualitas Air	Poin	56,21	56,32	56,45	56,52	56,52
5.4.	Indeks Kualitas Air Laut	Poin	85,70	85,84	85,97	86,12	86,12
5.5.	Indeks Kualitas udara	Poin	92,05	92,12	92,28	92,39	92,39
5.6.	Indeks Kualitas tutupan lahan	Poin	74,33	74,64	74,78	74,92	74,92
5.7.	Tingkat Partisipasi Masyarakat/ lembaga Masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ Filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	20	23	50	75	75
5.8.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kategori	B	B	B	A	A
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
6.1.	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Persen	90	95	96	98	99
6.2.	Pemanfaatan data kependudukan	Persen	31	42	52	63	73
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7.1.	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,62	0,62	0,62	0,625	0,635
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8.1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Nilai	2,59	2,51	2,48	2,46	2,46
8.2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	Nilai	48	48,76	49,14	49,52	49,52
8.3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Nilai	24	23,54	23,34	22,94	22,94
9.	Perhubungan						
9.1.	Rasio konektivitas Provinsi	Persen	35,29	47,06	58,82	64,71	64,71
9.2.	V/C Ratio Jalan Provinsi	Persen	28,12	38,23	49,55	65,13	65,13
10.	Komunikasi dan Informatika						
10.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	6,25	10	30	50	10
10.2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	60	70	80	90	90
11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Tahunan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
11.1.	Persentase koperasi yang Berkualitas	Persen	49,57	69,87	70,65	70,98	70,98
12.	Penanaman Modal						
12.1.	persentase peningkatan investasi di provinsi	Persen	-22,20	1,24	4,55	8,70	15,05
13.	Kepemudaan dan Olahraga						
13.1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	50	53	57	60	65
13.2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	60	63	70	75	80
13.3	Peningkatan prestasi olahraga	Orang	56	60	65	70	75
14.	Statistik						
14.1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	37,5	50	60	70	70
15.	Persandian						
15.1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	-	20	40	60	60
16.	Kebudayaan						
16.1	Terlestarikannya Cagar Budaya (jumlah Cagar Budaya yang terlindungi)	Persen	23,91	24,00	24,25	24,50	24,50
16.2.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Hasil Kesepakatan Rakortek)	Nilai	48,62	50,66	52,70	54,74	54,74
17.	Perpustakaan						
17.1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	69,93	77,50	79,00	82,00	82,00
17.2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	75,00	72,0	75,00	80,00	80,00
18.	Kearsipan						
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara baku	Persen	2,90%	10%	15%	20%	20%
18.2.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Persen	50%	55%	60%	75%	75%
B. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan							
1.	Kelautan Perikanan						
1.1.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ribu Ton	670	670	680	690	690
1.2.	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persen	78,57	93	90	95	95
2.	Pariwisata						
2.1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,90	1,99	2,09	2,19	2,19
3.	Pertanian						
3.1	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB	Persen	2,63	2,63	2,70	2,78	2,78
3.2	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	Persen	256,00	256,00	2,56	2,56	2,56
3.3	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan	Nilai	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20
3.4	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Peternakan	Nilai	96,70	96,70	96,80	96,90	96,90
3.5	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ku/ha	108,00	108,00	109,00	109,00	109,00
	Padi	Ku/ha	41,38	41,38	41,58	41,99	41,99
	Jagung	Ku/ha	38,64	38,64	38,83	39,21	39,21
	Kedelai	Ku/ha	17,18	17,18	17,26	17,43	17,43
	Kacang Tanah	Ku/ha	8,72	8,72	8,76	8,85	8,85
	Kacang Hijau	Ku/ha	12,76	12,76	12,83	12,95	12,95
	Ubi Kayu	Ku/ha	266,67	267,67	267,98	270,60	270,60

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Tahunan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
	Ubi Jalar	Ku/ha	132,57	133,57	133,22	134,53	134,53
3.6	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular :						
	Ai (Unggas)	Persen	2	2	2	2	2
	Brucellosis dan Helminthiasis (Ternak Potong)	Persen	2	2	2	2	2
	Rabies (Hewan Peliharaan /anjing)	Persen	5	5	5	5	5
4.	Kehutanan						
4.1.	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	10.055	3000	3000	3000	9000
4.2.	Persentase kerusakan hutan per tahun (deforestasi)	Persen	0,36	1	1	1	3
4.3.	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	1205	1250	1250	1250	3750
5.	Energi Sumber Daya Mineral						
5.1.	Persentase desa yang teraliri listrik	Persen	100	100	100	100	100
6.	Perdagangan						
6.1.	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Persen	45	50	55	60	60
6.2.	Tertib usaha	Persen	80	80	85	90	90
6.3.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga- harga barang kebutuhan pokok	Persen	2,5	3	3,5	4	4
7.	Perindustrian						
7.1.	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (kesepakatan hasil rakortek)	Persen	7,7	8	8,5	9	9
7.2.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB (kesepakatan hasil rakortek)	Persen	8,3	8,6	8,9	9,3	9,3
C. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan							
1.	Urusan Pemerintahan						
1.1	Sekretariat Daerah						
	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kategori	B	B	B	B	B
1.2	Sekretariat DPRD						
	Persentase Dukungan Layanan dan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yakni Fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Perda yang di tetapkan	Perda	7	8	9	10	10
2	Urusan Perencanaan dan Keuangan						
2.1	Bappeda						
	Persentase kesesuaian antara RPD dengan RKPD	Persen	60	65	75	80	80
	Persentase kesesuaian antara RPD dengan Renstra PD	Persen	60	65	75	80	80
	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja PD	Persen	60	65	75	80	80
	Implementasi e-planning terintegrasi e-budgeting	Persen	60	70	90	100	100
3.	Bapenda						
3.1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persen	5	5	5	5	5
3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak	Predikat (Nilai)	A-	A-	A-	A-	A-
4.	Pengadaan						

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Tahunan			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	
4.1.	Persentase jumlah proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0
4.2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	8,16	10,16	10,50	11,16	11,16
4.3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	63,69	65,69	67,77	68,33	68,33
5.	Manajemen Keuangan						
5.1.	<i>Revenue Mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	104,24	100	100	100	95,96
6.	Kepegawaian						
6.1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	452,91	453,92	454,93	455,94	455,94
6.2.	Rasio Pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	6,24	7,25	8,26	9,27	9,27
6.3.	Rasio Jabatan Fungsional Berkompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100	100	100	100	100
7.	Transparansi dan Partisipasi Publik						
7.1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>information on resources available to frontline service delivery units</i>)	Persen	50	50	50	50	50
7.2.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public Access to Fiscal Information</i>)	Persen	50	50	50	50	50
8.	Pengawasan						
	Inspektorat						
8.1.	Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah	Persen	100	150	150	150	50
8.2.	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3
8.3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3,07	3,10	3,15	3,15

BAB IX

P E N U T U P

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai panduan bagi Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih pasca Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024. RPD Tahun 2024 – 2026 sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Selanjutnya dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran yang dimulai dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sampai dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 dan hasil rumusan permasalahan dan isu strategis yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang. Penyusunan RPD ini melalui proses atau tahapan penyusunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan pemangku kepentingan. Untuk, itu diperlukan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat agar pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara dapat berjalan sesuai rencana dan dapat memberikan *outcome* dan *impact* bagi kesejahteraan masyarakat, perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing daerah.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan kekuatan-Nya agar Provinsi Sulawesi Tenggara semakin maju dan sejahtera.

Gubernur Sulawesi Tenggara,



H. ALI MAZI, SH